JamSyar

BERTAHAN DI TENGAH *Perubahan*

2021

Laporan Tahunan | *Annual Report*

jamkrindosyariah.co.id

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN TAHUNAN
INFORMATION PRESENTED IN THE ANNUAL REPORT

Referensi dan standar yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tahunan PT Jamkrindo Syariah menggunakan parameter dan kriteria standar yang berlaku di Indonesia, tempat di mana Perusahaan melaksanakan kegiatan usahanya. laporan tahunan ini menggunakan standar yang tercantum dalam SEOJK nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan kriteria Annual Report Award (ARA) yang dikembangkan oleh 7 (tujuh) prinsipal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Komite Nasional Kebijakan Governance.

PT Jamkrindo Syariah juga menyampaikan beberapa aspek yang merupakan bagian dari pengembangan dan interpretasi atas isi Laporan Tahunan. Dengan demikian, PT Jamkrindo Syariah mengharapkan Laporan Tahunan ini dapat mendorong peningkatan keterbukaan informasi yang wajar seiring dengan terpenuhinya aspek komposisi dan aspek substansi.

The Annual Report of PT Jamkrindo Syariah is prepared in accordance with applicable standards and regulations in Indonesia, where the Company operates. Specifically, it adheres to the guidelines set forth in SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of Annual Reports for Issuers or Public Companies, as well as the Annual Report Award (ARA) criteria established by seven key stakeholders: the Financial Services Authority (OJK), Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs), Ministry of Finance, Bank Indonesia, Indonesia Stock Exchange (IDX), Indonesian Accountants Association, and the National Committee for Governance Policy (KNKG).

Additionally, PT Jamkrindo Syariah incorporates selected aspects that reflect the evolving interpretation and development of annual report content. The Company aims for this report to enhance transparency through comprehensive information disclosure while ensuring adherence to both structural and substantive requirements.

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB
DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perseroan yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis dimana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan Tahunan ini memuat kata "Perseroan", "Jamsyar", atau "Perusahaan" yang didefinisikan sebagai PT Jamkrindo Syariah yang menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang usaha penyedia jasa penjaminan syariah. Adakalanya kata "kami" digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Jamkrindo Syariah secara umum.

This Annual Report contains statements regarding the Company's financial condition, operating results, policies, projections, plans, strategies, and objectives that constitute forward-looking statements under applicable laws and regulations, except for matters of a historical nature. These statements involve inherent risks and uncertainties that may cause actual developments or results to differ materially from those described.

This Annual Report contains statements regarding the Company's financial condition, operating results, policies, projections, plans, strategies, and objectives that constitute forward-looking statements under applicable laws and regulations, except for matters of a historical nature. These statements involve inherent risks and uncertainties that may cause actual developments or results to differ materially from those described.

This Annual Report uses the terms "Company," "Jamsyar," or "Company" to refer to PT Jamkrindo Syariah, which conducts its main business activities in the field of sharia guarantee services. For convenience, the term "we" is occasionally used to refer to PT Jamkrindo Syariah in general.

TEMA
THEME

Desain dengan tema "Bertahan di Tengah Perubahan" ini mencerminkan komitmen JamSyar sebagai perusahaan dalam menghadapi dinamika industri dan perubahan lingkungan bisnis yang terus berkembang. Ilustrasi sosok yang melangkah naik di atas balok-balok menggambarkan upaya JamSyar untuk tumbuh secara bertahap, adaptif, dan berkelanjutan di tengah tantangan zaman. Elemen tangan yang menyusun balok melambangkan faktor eksternal seperti regulasi, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan ekonomi yang membentuk arah perusahaan. Dominasi warna biru dan hijau merepresentasikan stabilitas, kepercayaan, dan pertumbuhan, sejalan dengan nilai JamSyar dalam menjaga ketahanan bisnis sekaligus terus berinovasi agar tetap relevan dan memberikan manfaat di tengah perubahan.

The design with the theme "Surviving Amid Change" reflects **JamSyar's** commitment as a company to face the dynamics of the industry and an ever-evolving business environment. The illustration of a figure stepping upward on stacked blocks represents JamSyar's efforts to grow gradually, adaptively, and sustainably amid ongoing challenges. The hand arranging the blocks symbolizes external factors such as regulations, community needs, and economic developments that shape the company's direction. The dominant blue and green tones convey stability, trust, and growth, aligning with JamSyar's values in maintaining business resilience while continuously innovating to remain relevant and deliver value in the midst of change.

KEUNGGULAN PERUSAHAAN
COMPANY EXCELLENCE

Perusahaan Penjaminan Syariah TERDEPAN dan PROFESIONAL

A LEADING AND PROFESSIONAL Sharia Guarantee

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENS

Tentang Laporan Tahunan
About the Annual Report 2

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
Disclaimer and Limitation of Liability 2

Kesinambungan Tema Laporan Tahunan
Continuity of the Annual Report Theme 3

Pencapaian Signifikan Perusahaan
Significant Achievements of The Company 3

Daftar Isi
Table of Contents 4

IKHTISAR KINERJA
PERFORMANCE HIGHLIGHTS 7

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Summary of Important Financial Data 8

Informasi Saham
Stock Information 13

Ikhtisar Efek Lainnya
Summary of Other Securities 13

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications 14

Peristiwa Penting 2021
Significant Events 2021 17

LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT 19

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report 20

Laporan Direksi
Board of Directors Report 26

PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE 33

Identitas Perseroan
Company Identity 34

Riwayat Singkat
Company in Brief 35

Jejak Langkah
Milestone 36

Visi, Misi dan Budaya Perseroan
Vision, mission, and Corporate Values 37

Kegiatan Usaha
Organizational Structure 39

Struktur Organisasi
Board of Commissioners Profile 44

Profil Dewan Komisaris
Profile of the Board of Commissioners 49

Profil Direksi
Profile of the Board of Directors 45

Informasi Pemegang Saham
Information of Shareholders 66

Informasi Entitas Anak
Information on Subsidiaries 68

Struktur Grup
Group Structure 68

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 79

Tinjauan Ekonomi dan Industri
Economic and Industry Overview 81

Tinjauan Per Segmen Usaha
Business Segment Review 82

Kemampuan Membayar Utang
Debt Servicing Capability 98

Tingkat Kolektibilitas Piutang
Accounts Receivable Collectability 99

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
Capital Structure and Management Policy 99

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal
Material Commitments for Capital Expenditure 100

Investasi Barang Modal yang Direalisasikan Pada Tahun Buku Terakhir
Capital Expenditure Realized in the Last Fiscal Year 100

Informasi Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Facts Occurring After the Auditor's Report Date 101

Perbandingan Antara Target dan Realisasi di Tahun Buku 2022
Comparison between Target and Realization in Fiscal Year 2022 100

Aspek Pemasaran
Marketing Aspect 101

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan
Changes in Laws and Regulations with Significant Impact on the Company 103

Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policies 103

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE 105

Struktur dan Organ Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Structure and Governance Bodies 109

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders 122

Dewan Komsiaris
Board of Commissioners 130

Direksi
Board of Directors 131

Komite Audit
Audit Committee 135

Fungsi Nominasi dan Remunerasi Sekretaris Perusahaan
Nomination and Remuneration Function 138

Unit Audit Internal
Internal Audit Unit 140

Auditor Eksternal
External Auditor 144

Manajemen Risiko
Risk Management 145

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System 152

Perkara Penting Perusahaan
Material Legal Cases 154

Sanksi Administratif
Administrative Sanctions 155

Kode Etik
Code of Ethics 155

Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System 158

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Corporate Social Responsibility 161

LAPORAN KEUANGAN
Financial Report 167

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
This page is intentionally left blank

Syariah
Jamkrindo

01

Ikhtisar Kinerja
Performance Highlight

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
OVERVIEW OF KEY FINANCIAL DATA

POSISI KEUANGAN
FINANCIAL POSITION

Uraian / Description	2021	2020	2019	2018	2017
Aset Lancar Current Assets	**2,334,270**	**1.498.613**	**1.166.437**	**789.529**	**465.595**
Kas dan Setara Kas Current Assets	685,349	443.899	502.748	372.009	271.588
Surat Berharga Securities	262,270	171.320	163.652	87.022	67.565
Piutang Co Guarantee Co-Guarantee Receivables	48,161	36.684	41.329	16.934	12.480
Piutang Lain-lain Other Receivables	112,451	41.151	7.130	4.906	2.968
Biaya Dibayar Dimuka Prepaid Expenses	515,906	386.126	307.646	215.420	71.993
Aset Lain-lain Other Assets	710,133	419.433	143.932	93.239	39.000
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	**111,312**	**75.266**	**18.207**	**15.102**	**3.737**
Aset Tetap Fixed Assets	68,443	59.552	3.020	2.617	2.424
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	42,233	15.499	15.041	12.347	1.146
Aset Tak Berwujud Intangible Assets	636	215	146	137	168
Jumlah Aset Intangible Assets	**2,445,582.00**	**1.573.879**	**1.184.644**	**804.631**	**469.332**
Liabilitas Lancar Current Liabilities	**1,160,777**	**765.135**	**516.149**	**394.589**	**192.026**
Utang Klaim Claim Payables	22,611	962	1.328	1.060	182
Utang Pajak Tax Payables	62,273	9.529	3.277	2.931	290
Utang Re Guarantee Re-Guarantee Payables	55,555	41.531	32.711	12.639	7.737
Pendapatan Ditangguhkan Deferred Income	946,439	668.668	448.755	323.374	175.734
Utang Lain-lain Other Payables	73,899	44.445	30.078	54.585	8.082
Liablitas Tidak Lancar Non-Current Liabilities	**307,758**	**155.551**	**140.762**	**80.246**	**3.447**
Cadangan Klaim Claims Reserve	303,763	151.957	138.777	79.001	3.282
Imbalan Pasca Kerja Post-Employment Benefits	3,995	3.594	1.985	1.245	165
Jumlah Liablitas Total Liabilities	**1,468,535**	**920.686**	**656.911**	**474.835**	**195.473**
Modal Saham Share Capital	705,620	550.000	475.000	300.000	250.000
Ditentukan Penggunaanya Appropriated	96,843	51.706	34.502	11.959	11.092
Belum Ditentukan Penggunaanya*) Unappropriated*)	168,157	45.137	17.204	22.543	11.186
(Rugi) Laba yang belum direalisasikan atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual setelah pajak*) (Loss) Unrealized gain on marketable securities after tax*)	6,427	6.350	1.027	-4.706	1.581

Uraian / Description	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah Ekuitas Total Equity	977,047	653.193	527.733	329.796	273.859
Jumlah Liabiltas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	2,445,582	1.573.879	1.184.644	804.631	469.332

*) Dinyatakan Kembali / *) Restated

LAPORAN LABA RUGI
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS

Uraian / Description	2021	2020	2019	2018	2017
Pendapatan Kafalah Kafalah Income	489.416	187.355	123.203	90.607	41.187
Imbal Jasa Kafalah Kafalah Fee	959.276	500.292	331.501	160.862	73.909
Beban Penjaminan/ Premi Penjaminan Ulang Bruto Expenses/Gross Re-Guarantee Premiums	469.860	312.937	208.298	70.255	32.721
Beban Kafalah Kafalah Expenses	**261.054**	**154.336**	**116.615**	**90.847**	**9.842**
Beban Klaim Claim Expenses	127.756	125.407	85.942	67.420	11.551
Beban Ujrah Ujrah Expenses	14.209	14.289	11.300	15.125	317
Beban Kafalah Lain Other Kafalah Expenses	1.355	1.727	2.162	-	-
Kenaikan Estimasi Klaim Increase in Estimated Claims	117.734	12.913	17.211	8.301	- 2.027
Penjaminan Bersih Re-Guarantee - Net	**228.362**	**33.019**	**6.588**	**-240**	**31.345**
Pendapatan Investasi Investment Income	56.865	56.451	44.872	24.582	22.668
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Other Income (Expenses)	29.315	31.405	17.654	45.884	2.809
Beban Usaha Operating Expenses	101.345	70.497	55.433	45.338	40.919
Zakat Zakat	6.458	914	564	0	-
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	206.739	49.464	13.117	24.887	15.903
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	38.582	4.327	-4.087	2.344	4.714
Beban Pajak Mini Current Income Tax	65.338	6.286	518	4.630	4.282
(Beban) Manfaat Pajak Tangguhan Deferred Tax Benefit (Expenses)	-26.756	-1.959	4.605	-2.287	431
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	168.157	45.137	17.204	22.543	11.189
Penghasilan Komprehensif Lainnya Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi Income Items that will not be reclassified to profit or loss			331.501	160.862	73.909
- Pengukuran Kembali Imbalan kerja Remeasurement of employee benefits	1.326	-384	47	41	3.378
- Efek Pajak terkait Related tax effect	-292	85	- 12	- 10	- 212
Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi Items that will be reclassified to profit or loss					
- Keuntungan yang belum di realisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar Unrealized gains on marketable securities measured at fair value	-1.227	7.208	7.597	- 7.077	- 4

Uraian / Description	2021	2020	2019	2018	2017
- Efek pajak terkait Related tax effect	270	-1.586	-1.899	1.137	1
Jumlah pendapatan komprehensif lainnya Total other comprehensive income	77	5.323	5.733	-5.909	3.163
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	168.234	50.460	22.937	16.634	14.352

LAPORAN ARUS KAS
CASH FLOW STATEMENT

Uraian / Description	2021	2020	2019	2018	2017	YoY 2020-2021 (%)	CAGR 2017-2021 (%)
Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi Net Cash Flow Used in Operating Activities	482.767	200.059	78.932	108.275	56.213	141,31%	71,19%
Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi Net Cash Flow Used in Investing Activities	-102.865	(54.269)	(72.500)	(57.855)	(35.376)	89,55%	30,58%
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Net Cash Flow Used in Financing Activities	152.248	70.862	175.000	50.000	(1.362)	114,85%	-20,16%
Kenaikan Kas Dan Setara Kas Increase in Cash and Cash Equivalents	532.150	216.652	181.432	100.421	19.475	145,62%	128,63%
Kas Dan Setara Kas Awal Periode Cash and Cash Equivalents at the Beginning of Year	863.332	646.680	465.248	271.588	252.113	33,50%	36,03%
Kas Dan Setara Kas Akhir Periode Cash and Cash Equivalents at the Beginning of Year	1.395.482	863.332	646.680	372.009	271.588	61,64%	50,56%

RASIO-RASIO KEUANGAN
FINANCIAL RATIO

Uraian / Description	2021	2020	2019	2018	2017
Gearing Ratio Produktif Productive Gearing Ratio	14	15,46	11,38	17,52	12,59
Gearing Ratio Total Total Gearing Ratio	27,43	29,8	21,46	31,93	24,4
Rasio Klaim (%) Claims Ratio (%)	18,55%	43,16%	40,28%	44,39%	16,80%
Default Rate (%) Default Rate (%)	0,23%	0,39%	0,30%	0,32%	0,09%
Likuiditas (%) Liquidity (%)	185,31%	199,38%	414,96%	122,45%	181,56%
Solvabilitas (%) Solvency (%)	166,53%	170,95%	180,34%	169,46%	240,10%
Return on Assets (ROA) (%)	10,80%	4,34%	2,16%	3,91%	3,86%
Return on Equity (ROE) (%)	20,63%	7,64%	4,01%	7,47%	5,95%
Debt to Equity Ratio (DER) (%)	150,30%	140,95%	124,48%	143,98%	71,38%
Debt to Assets Ratio (DAR) (%)	60,05%	58,50%	55,45%	59,01%	41,65%

GRAFIK IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
OVERVIEW OF KEY FINANCIAL DATA

ASET LANCAR
CURRENT ASSETS

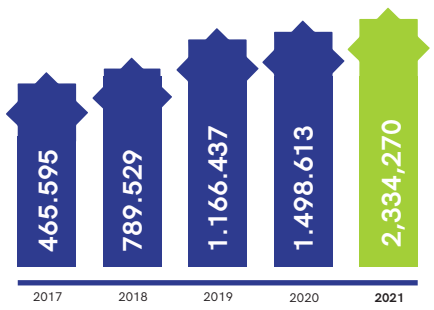

ASET TIDAKLANCAR
NON-CURRENT ASSETS

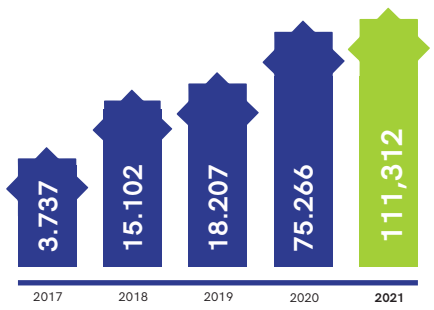

BEBAN PENJAMINAN
GUARANTEE EXPENSES

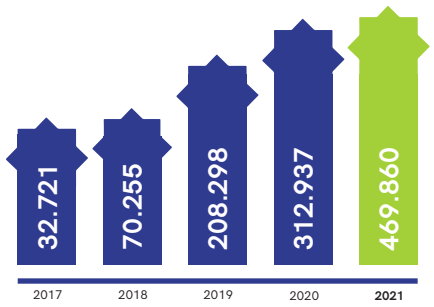

LIABILITAS TIDAK LANCAR
NON-CURRENT LIABILITIES

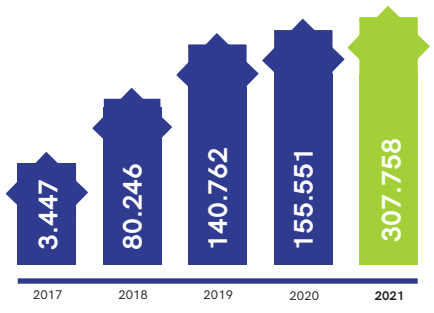

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

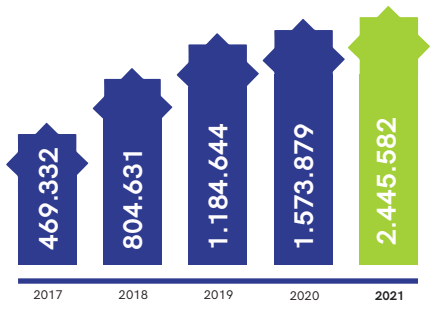

BEBAN KLAIM
CLAIM EXPENSES

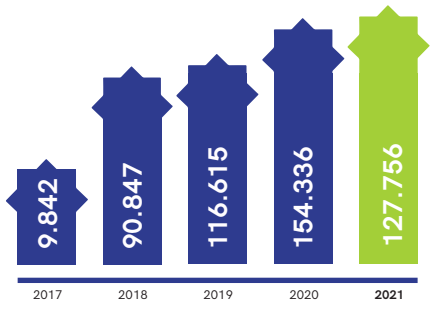

LIABILITAS LANCAR
CURRENT LIABILITIES

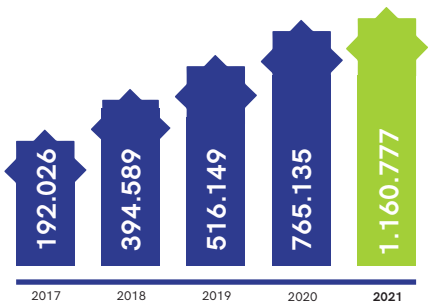

PENDAPATAN PENJAMINAN
GUARANTEE INCOME

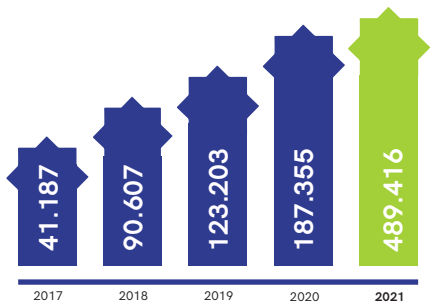

PENJAMINAN BERSIH
REGUARANTEE - NET

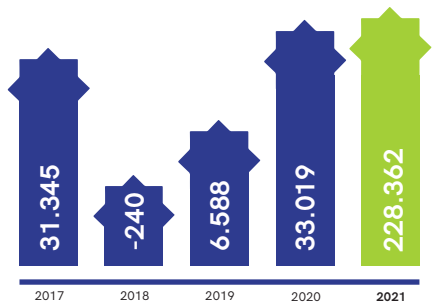

BEBAN USAHA
OPERATING EXPENSES

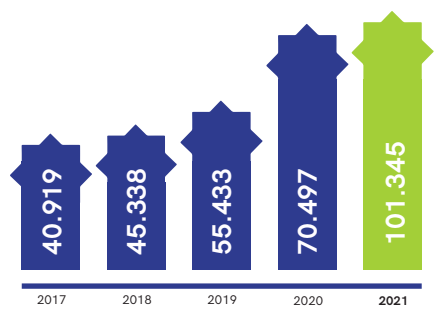

LABA SEBELUM PAJAK
PROFIT BEFORE TAX

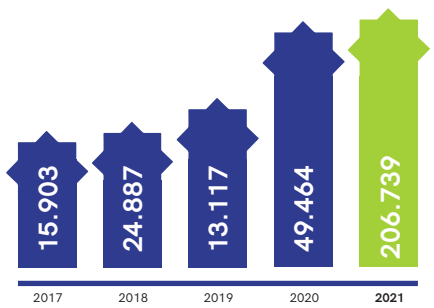

BEBAN PAJAK PENGHASILAN
INCOME TAX EXPENSES

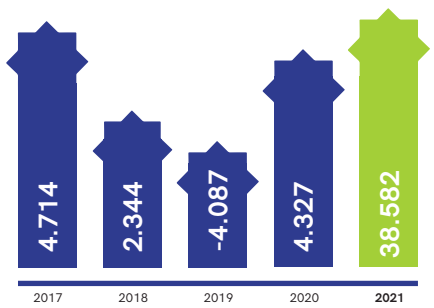

LABA TAHUN BERJALAN
PROFIT FOR THE YEAR

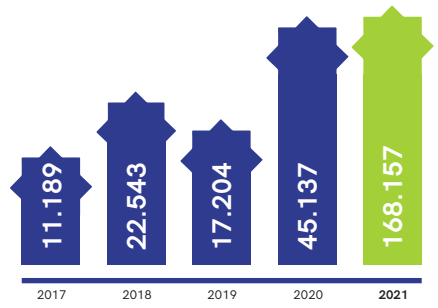

LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

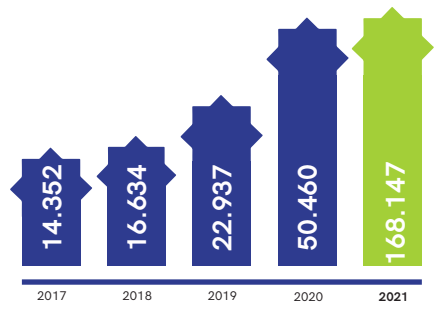

LABA (RUGI) PER SAHAM
EARNINGS (LOSS) PER SHARE

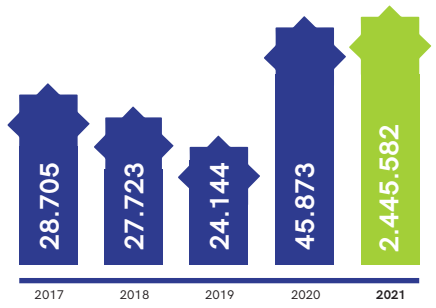

IKHTISAR SAHAM
SHARE OVERVIEW

JUMLAH SAHAM
NUMBER OF SHARES

Hingga akhir tahun 2021, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tidak memperdagangkan sahamnya ke publik oleh karena itu, Perusahaan tidak dapat memberikan informasi tentang harga saham yang diperdagangkan di pasar modal.

As of the end of 2021, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah had not traded its shares to the public; therefore, the Company cannot provide information on share prices traded in the capital market.

INFORMASI TENTANG PERDAGANGAN SAHAM DAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PUBLIK
INFORMATION ON SHARE TRADING AND PUBLIC SHARE OWNERSHIP

Hingga 31 Desember 2021, PT Jamkrindo Syariah belum melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) sehingga tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik di bursa efek baik di dalam maupun luar nageri. Dengan demikian, laporan terkait:

1. Jumlah saham yang beredar
2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat:
   - Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan
   - Harga saham tertinggi, terendah dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan
   - Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan
3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang:
   - Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan
   - Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan
   - Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Belum tersaji di dalam laporan tahunan ini.

As of December 31, 2021, PT Jamkrindo Syariah had not conducted an Initial Public Offering (IPO) and therefore did not trade its shares to the public on any stock exchange, whether domestic or international. Consequently, the following reports are not presented in this Annual Report:

1. Number of shares outstanding
2. Information in tabular form containing:
   - Market capitalization based on the price on the Stock Exchange where the shares are listed
   - Highest, lowest and closing share price based on the price on the Stock Exchange where the shares are listed
   - Share trading volume on the Stock Exchange where the shares are listed.
3. Information in graphical form containing at least:
   - Closing price based on the price on the Stock Exchange where the shares are listed
   - Share trading volume on the Stock Exchange where the shares are listed
   - Quarterly share-trading volume on the Stock Exchange where the shares are listed for the last two (2) years.

Not yet presented in this annual report.

INFORMASI TENTANG PENERBITAN OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI
ISSUANCE OF BONDS, SUKUK OR CONVERTIBLE BONDS

Hingga akhir tahun 2021, PT Jamkrindo Syariah tidak menerbitkan obligasi, sukuk, obligasi konversi, maupun efek lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding), tingkat bunga/ imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk.

As of the end of 2021, PT Jamkrindo Syariah had not issued bonds, sukuk, convertible bonds, or any other securities. Accordingly, no information is available regarding the number of bonds/sukuk/convertible bonds outstanding, interest or reward rates, maturity dates, or bond and sukuk ratings.

AKSI KORPORASI SAHAM
STOCK CORPORATE ACTION

Sebagai perusahaan tertutup, Perseroan tidak melakukan aksi korporasi saham berupa pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), saham bonus, dan lainnya. Sehingga, Perseroan tidak mengungkapkan hal-hal tersebut di dalam Laporan Tahunan 2021.

As a privately held company, the Company does not conduct stock corporate actions such as stock splits, reverse stock combinations, bonus shares, or other similar actions. Therefore, these matters are not disclosed in the Annual Report.

PENGHARGAAN 2021
AWARDS IN 2021

Tanggal : 05 Februari 2021 / February

Indonesia Good Corporate Governance Award 2021 – Economic Review: 1st The Best Indonesia GCG Award-VI-2021 (Category: Multifinance – Asset Rp 1 T – Rp 5 T) (Score: 81.00) | Indonesia Good Corporate Governance Award 2021 – Economic Review: 1st The Best Indonesia GCG Award VI 2021 (Category: Multifinance – Asset Rp1 T–Rp5 T), with a score of 81.00.

Tanggal : 26 Februari 2021 / February

Certificate Of Achievement – ISAA (Indonesia Star Award Association) : BEST OF INDONESIA AWARDS 2021 to PT. PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH – GATOT SUPRABOWO (Direktur Utama) – category: Best of Business & Company AWARDS 2021 | Certificate of Achievement – ISAA (Indonesia Star Award Association): BEST OF INDONESIA AWARDS 2021 awarded to PT Penjaminan Jamkrindo Syariah – Gatot Suprabowo (President Director), category Best of Business & Company Awards 2021.

Tanggal : 31 Maret 2021 / March

DIGITECH AWARD 2021, DIGITAL TECHNOLOGY & INNOVATION AWARD 2021 – itech (Digital Innovation & ICT For Excellence): Category "THE BEST ICT BUSINESS STRATEGY IN INSURANCE/ GUARANTEE INDUSTRIES 2021" | DIGITECH Award 2021 – Digital Technology & Innovation Award 2021 by iTech (Digital Innovation & ICT for Excellence), category The Best ICT Business Strategy in Insurance/Guarantee Industries 2021.

Tanggal : 19 Maret 2021 / March

Certificate of Achievement – INDONESIA Award MAGAZINE: INSPIRING PROFESSIONAL & LEADERSHIP AWARD 2020 – 2021 to ARI PERDANA GANDHI (KEPALA DIVISI BISNIS PT JAMKRINDO SYARIAH) | Certificate of Achievement – Indonesia Award Magazine: Inspiring Professional & Leadership Award 2020–2021 awarded to Ari Perdana Gandhi (Head of Business Division of PT Jamkrindo Syariah).

Tanggal : 09 April 2021 / April

ECONOMIC REVIEW – 2nd The Best Indonesia Enterprise Risk Management Award-IV-2021, Category: Multifinance Company – State Owned Enterprise's & Subsidiaries Asset < Rp. 10T | Economic Review – 2nd The Best Indonesia Enterprise Risk Management Award IV 2021, category Multifinance Company – State-Owned Enterprises and Subsidiaries with assets < Rp10 T.

Tanggal : 06 Mei 2021 / May

INFOBANK - The Best Collaborator Sharia Based Company in SMEs Financing | Infobank – The Best Collaborator Sharia-Based Company in SMEs Financing.

Tanggal : 24 Juni 2021 / June

ECONOMIC REVIEW - 1st THE BEST Informative Website, category: Shariah Multifinance Company - BUMN & Subsidiary - Asset < Rp 10 T | Economic Review – 1st The Best Informative Website, category Sharia Multifinance Company – SOE and Subsidiary with assets < Rp10 T.

Tanggal : 07 Juli 2021 / July

HUMAN CAPITAL 2021 On Resilence Excellence Award - The Best in HR Crisis Management 2021 dan The Best Recruitment 2021 | HUMAN Human Capital Award 2021 on Resilience Excellence: The Best in HR Crisis Management 2021 and The Best Recruitment 2021.

Tanggal : 05 Agustus 2021 / August

BUSINESS NEWS - GRC 2021 & PERFORMANCE EXCELLENCE AWARD - GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE. THE BEST GRC FOR CORPORATE RISK MANAGEMENT 2021 (FINANCIAL SERVICES) | BUSINESS Business News – GRC & Performance Excellence Award 2021: The Best GRC for Corporate Risk Management 2021 (Financial Services).

Tanggal : 05 Agustus 2021 / August

BUSINESS NEWS - GRC 2021 & PERFORMANCE EXCELLENCE AWARD - GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE. ENDANG SRI WINARNI THE BEST CHIEF FINANCIAL & RISK MANAGEMENT OFFICER 2021 (FINANCIAL SERVICES) | Business News – GRC & Performance Excellence Award 2021: Endang Sri Winarni as The Best Chief Financial & Risk Management Officer 2021 (Financial Services).

Tanggal : 27 Agustus 2021 / August

ECONOMIC REVIEW - Indonesia CSR Award 2021. 2nd The Best CSR Of The Year 2021 Category: Subsidiary of State Owned Enterprises Company | Economic Review – Indonesia CSR Award 2021: 2nd The Best CSR of the Year 2021, category Subsidiary of State-Owned Enterprises Company.

Tanggal : 27 Agustus 2021 / August

ECONOMIC REVIEW - Indonesia CSR Award 2021. The Best Indonesia Director for CSR of The Year 2021. Category: Subsidiary of State Owned Enterprises Company | Economic Review – Indonesia CSR Award 2021: The Best Indonesia Director for CSR of the Year 2021, category Subsidiary of State-Owned Enterprises Company.

Tanggal : 17 September 2021 / September

ECONOMIC REVIEW -

1. 2nd The Best of Indonesia Human Capital Award (IHCA) of The Year 2021 untuk PT Jamkrindo Syariah
2. The Best Indonesia HR Director 2021 untuk Ibu Endang Sri Winarni selaku Direktur Keuangan, SDM dan Umum

ECONOMIC REVIEW -
2nd The Best of Indonesia Human Capital Award (IHCA) 2021 for PT Jamkrindo Syariah and The Best Indonesia HR Director 2021 awarded to Endang Sri Winarni as Director of Finance, Human Capital, and General Affairs.

Tanggal : 30 September 2021 / September

INFOBANK 10TH SHARIA AWARD 2021 - Sharia Institution with predicate EXCELLENT for Financial performance 2020 | Infobank 10th Sharia Award 2021 – Sharia Institution with Excellent predicate for Financial Performance 2020.

Tanggal : 30 Oktober 2021 / November

INDONESIA SHARIA ECONOMIC FESTIVAL 2021 - Nominal Penjaminan Terbesar Indonesia Sharia Economic Festival 2021 – Award for the Largest Guarantee Nominal Value.

Tanggal : 10 November 2021 / November

DIGITAL CULTURE EXCELLENCE AWARD 2021 -
a. The Best Growing Corporate
b. The Best CEO for Changing Maker to Digital Culture

Tanggal : 19 November 2021 / November

INDONESIA FINANCE AWARD IV 2021 - ECONOMIC FREVIEW - JamSyar meraih Penghargaan dalam kategori "SOE Subsidiary Company – Sharia Financial Services Industry" dengan Score A-Platinum Award (Very Excellent) | Indonesia Finance Award IV 2021 – Economic Review: JamSyar received the award in the SOE Subsidiary Company – Sharia Financial Services Industry category with an A-Platinum Award (Very Excellent).

Tanggal : 15 Desember 2021 / December

BUMN BRANDING & MARKETING AWARD 2021 - BUMN TRACK - JamSyar meraih Penghargaan Silver Winner pada kategori Branding "Brand Communication and Activation" | BUMN Branding & Marketing Award 2021 – BUMN Track: JamSyar received Silver Winner in the Brand Communication and Activation category.

Tanggal : 22 Desember 2021 / December

HUMAN CAPITAL & PERFORMANCE AWARD 2021 - BUSINESS NEWS - JamSyar meraih Penghargaan "The Best Reward and Recognition Strategy 2021" dan "Employee Engagement Strategy 2021" | Human Capital & Performance Award 2021 – Business News: JamSyar received The Best Reward and Recognition Strategy 2021 and Employee Engagement Strategy 2021 awards.

PERISTIWA PENTING
KEY EVENTS IN 2021

Tanggal : 17 Maret / March

031/PKS/JAMSYAR/III/2021, PT Bank Syariah Indonesia, Pembiayaan Kepemilikan Emas Cooperation Agreement No. 031/PKS/JAMSYAR/III/2021 with PT Bank Syariah Indonesia on Gold Ownership Financing.

Tanggal : 30 Juli / July

Bantuan Ekonomi UMKM Terdampak COVID-19 Economic Assistance Program for MSMEs Affected by COVID-19.

Tanggal : 19 September / September

Milad Ke-7 Jamkrindo Syariah 7amsyar: Secure, Survive, & Sustain / The 7th Anniversary of Jamkrindo Syariah "7amSyar": Secure, Survive, and Sustain.

Tanggal : 20 Juli / July

Penyerahan Hewan Qurban Idul Adha 1442 H Distribution of Qurban Livestock in Commemoration of Eid al-Adha 1442 H.

Tanggal : 10 Agustus / August

Pembukaan Kantor Cabang Utama (Jakarta). Nomor: KEP-81/NB.213/2021
Opening of the Jakarta Main Branch Office based on Decree No. KEP-81/NB.213/2021.

Tanggal : 22 Juli / July

Memperoleh Opini Wajar Tanpa Modifikasian/ Wajar Tanpa Pengecualian dari KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, firma anggota jaringan global Price Water House Coopers (PwC) atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2020. Receipt of an Unmodified Opinion (Unqualified Opinion) from Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Public Accounting Firm (a member of the PwC global network) on the 2020 Financial Statements.

Tanggal : 11 Oktober / October

Penambahan Modal
Penambahan Modal sebesar Rp155.620.692.192
Capital Increase amounting to Rp155,620,692,192.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
This page is intentionally left blank

Syariah
Jamkrindo

02

Laporan Manajemen
Management Report

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT OF COMMISSIONERS

ARIBOWO

KOMISARIS UTAMA
PRESIDENT COMMISIONER

Pencapaian finansial dan operasional Perseroan menunjukkan bahwa Perseroan berada di jalur yang tepat, dengan tidak lagi menujukan pandangan ke belakang, namun dengan fokus menatap ke depan seiring upaya menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, PT Jamkrindo Syariah dapat melewati tahun ini dengan berbagai pencapaian yang membanggakan. Izinkan kami segenap Dewan Komisaris, mengucapkan salam dan terimakasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perjalanan Perseroan di sepanjang tahun 2021. Terlebih, kami sangat menghargai peran penting dan kerja sama yang solid dari setiap Insan Perseroan sehingga Perseroan mampu memperkuat eksistensinya dalam industri, di tengah kondisi yang cukup menantang di tahun 2021.

Dengan semangat yang tinggi, kami berkomitmen untuk memelihara komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan dengan seluruhvpemangku kepentingan. Selain itu, kami akan terus berkomitmen serta untuk terus melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai pengawas dengan penuh dedikasi. Selaras dengan hal tersebut, Dewan Komisaris berharap bahwa Laporan Tahunan ini dapat menjadi acuan yang komprehensif bagi para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan Perseroan di tahun 2021 yang penuh dengan tantangan.

Dear Shareholders and Esteemed Stakeholders,

We express our gratitude to Almighty God, by whose grace and blessings PT Jamkrindo Syariah was able to navigate the year with various commendable achievements. On behalf of the Board of Commissioners, we extend our greetings and appreciation to all stakeholders who contributed to the Company's journey throughout 2021. We especially value the important role and strong collaboration of all Company personnel, which enabled the Company to strengthen its presence within the industry amid the challenging conditions of 2021.

With strong commitment, we will continue to maintain open and sustainable communication with all stakeholders. The Board of Commissioners remains dedicated to consistently carrying out its supervisory roles and responsibilities. In line with this commitment, we expect this Annual Report to serve as a comprehensive reference for shareholders and stakeholders in understanding the Company's performance and progress throughout the challenging year of 2021.

SITUASI PEREKONOMIAN 2021
ECONOMIC CONDITIONS IN 2021

Tahun 2021 menjadi fase penting dalam proses pemulihan ekonomi nasional setelah tekanan signifikan akibat pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7,07% YoY pada kuartal II 2021, yang sempat memberikan sinyal positif pemulihan. Namun, momentum ini tidak berlangsung lama karena munculnya varian Delta yang memicu lonjakan kasus dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara ketat, sehingga menekan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

The year 2021 was an important phase in the national economic recovery process after significant pressure due to the COVID-19 pandemic throughout 2020. The Central Statistics Agency (BPS) recorded Indonesia's economic growth at 7.07% YoY in the second quarter of 2021, which gave a positive signal of recovery. However, this momentum did not last long due to the emergence of the Delta variant, which triggered a spike in cases and the implementation of strict restrictions on community activities (PPKM), thereby suppressing economic activity in various sectors.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

DIRECTORS' PERFORMANCE AND ASSESSMENT BASIS

Dewan Komisaris, dengan komitmen penuh atas tanggung jawab yang dimiliki, senantiasa mengawasi kinerja dan strategi yang diimplementasikan oleh Direksi demi tercapainya tujuan Perseroan. Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2021, Direksi telah menunjukkan etos kerja yang baik dengan menampilkan dedikasi dan kerja kerasnya. Secara umum, penilaian yang diberikan terhadap Direksi dilakukan berdasarkan pencapaian Perseroan baik dari segi keuangan maupun operasional.

With full commitment to its responsibilities, the Board of Commissioners continuously supervised the performance and strategies implemented by the Board of Directors to achieve the Company's objectives. Throughout 2021, the Board of Commissioners assessed that the Board of Directors demonstrated strong work ethics, reflected in its dedication and efforts. Overall, the evaluation of the Board of Directors was based on the Company's financial and operational achievements.

Dilihat dari sudut pandang keuangan, Dewan Komisaris berpendapat bahwa kinerja yang ditunjukkan oleh Direksi sudah cukup optimal dan masih dapat ditingkatkan. Sepanjang tahun 2021, upaya Perseroan dalam mencapai target laba bruto RKAP mengalami banyak tantangan yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti. Kemudian dari sisi operasional, Perseroan juga mendapat banyak tantangan yang menyebabkan terhambatnya Pendapatan Usaha. Berbagai faktor yang. Dewan Komisaris menilai, bahwa merupakan salah satu upaya yang baik dalam merespon tantangan-tantangan tersebut.

From a financial perspective, the Board of Commissioners considers that the performance of the Board of Directors was relatively optimal, with further potential for improvement. During 2021, the Company's efforts to achieve its gross profit target under the RKAP faced various challenges driven by several factors, such as. Operationally, the Company also encountered obstacles that affected operating revenue due to factors including. The Board of Commissioners views as a positive measure in responding to these challenges.

Melalui penilaian ini, Dewan Komisaris dapat memberikan umpan balik konstruktif kepada Direksi untuk meningkatkan kinerja Perseroan secara keseluruhan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan suatu kerangka kerja yang transparan dan akuntabel dalam menjalankan fungsi korporasi serta memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para Direksi yang memiliki loyalitas tinggi terhadap Perseroan di tengah kondisi yang kurang kondusif di tahun 2021, dengan tetap berdedikasi untuk perkembangan Perseroan. Kami berharap, dengan komposisi Direksi sekarang, mampu membawa Perseroan kepada pencapaian yang lebih baik untuk tumbuh berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Through this evaluation, the Board of Commissioners provides constructive feedback to the Board of Directors to enhance the Company's overall performance. This process is expected to establish a transparent and accountable framework in carrying out corporate functions while ensuring long-term business sustainability. The Board of Commissioners also extends its appreciation to the Board of Directors for their high level of loyalty and dedication amid the challenging conditions of 2021. With the current composition of the Board of Directors, we are confident that the Company will achieve improved performance and sustainable growth while upholding the principles of Good Corporate Governance (GCG).

Tahun 2021, Perseroan membukukan perolehan pendapatan sebesar Rp892,39 miliar, naik 136% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp378,13 miliar. Apabila dibandingkan dengan target RKAP 2021, realisasi pendapatan telah memenuhi 100% dari target yang ditetapkan.
Peningkatan tersebut mendorong peningkatan laba bersih Perseroan yang mencapai Rp99,36 miliar atau naik 125,49% dibandingkan dengan tahun 2020, dan telah memenuhi 100% dari target yang telah ditetapkan.
Hal ini merupakan indikasi lebih lanjut dari keberhasilan Direksi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis Perseroan. Berbagai inisiatif yang diterapkan di tahun 2021 merupakan langkah dalam mempertahankan profitabilitas Perseroan yang berkelanjutan.

In 2021, the Company posted revenue of IDR 892.39 billion, up 136% compared to 2020's IDR 378.13 billion. When compared to the 2021 RKAP target, the realized revenue has met 100% of the set target.
This increase drove the Company's net profit to IDR 99.36 billion, up 125.49% compared to 2020, and has met 100% of the target set.
This is a further indication of the Board of Directors' success in implementing the Company's various strategic policies. The various initiatives implemented in 2021 are steps to maintain the Company's sustainable profitability.

PERAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI YANG DITERAPKAN DIREKSI DAN FREKUENSI PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

SUPERVISORY ROLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ON STRATEGY IMPLEMENTATION AND ADVISORY FREQUENCY

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris sepanjang tahun 2021 didukung oleh keberadaan Committees, yang melakukan monitoring terhadap perumusan strategi hingga implementasinya oleh Direksi beserta jajaran terkait. Direksi beserta seluruh Committees melakukan pengawasan kepada strategi-strategi jangka pendek maupun jangka panjang, yang tercantum di dalam RKAP dan RJPP Perseroan. Hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan oleh Direksi, yang pada tahun 2021 dilaksanakan secara efektif sesuai ketentuan yang berlaku.

The Board of Commissioners' supervisory activities throughout 2021 were supported by its Committees, which monitored the formulation and implementation of strategies by the Board of Directors and related management. This supervision covered both short-term and long-term strategies outlined in the Company's RKAP and RJPP, as part of an effective oversight function in accordance with applicable regulations.

Adapun dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian saran kepada Direksi, Dewan Komisaris berpedoman pada Board Manual dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Di mana fungsi pengawasan Dewan Komisaris dibagi dalam menjadi 2 (dua) tingkatan, sebagai berikut:

In carrying out its supervisory and advisory roles, the Board of Commissioners refers to the Board Manual and the Board of Commissioners' Charter, applying two levels of oversight:

1. Performance Level
   Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dengan memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta memberikan masukan kepada RUPS.
2. Conformance Level
   Dewan Komisaris melaksanakan kegiatan pengawasan pada tahap selanjutnya untuk memastikan nasihat telah dijalankan serta dipenuhinya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar yang berlaku.

1. Performance Level
   Providing direction, guidance, and input to the Board of Directors and the GMS..
2. Conformance Level
   Ensuring that recommendations are implemented and that compliance with prevailing laws and the Company's Articles of Association is maintained..

Di tahun 2021, pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap perumusan dan implementasi strategi Perseroan telah dijalankan melalui hubungan kerja dengan Direksi. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan rapat gabungan dan rapat Dewan Komisaris yang mengundang anggota Direksi. Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris menitikberatkan pengawasan pada beberapa aspek kinerja Perseroan, terutama pada aspek keuangan. Di mana Dewan Komisaris senantiasa mendukung upaya Perseroan untuk melakukan.

Throughout 2021, supervision was conducted through close working relationships with the Board of Directors, including joint meetings and Board of Commissioners' meetings attended by Directors. The oversight focused primarily on financial performance, while continuously supporting the Company's initiatives to .

Sebagai organ yang bertugas dalam melaksanakan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat terhadap pengelolaan Perseroan, Dewan Komisaris melaksanakan proses penelaahan dan pemberian persetujuan terhadap seluruh strategi dan kebijakan yang termuat dalam RKAP maupun RJPP. Dewan Komisaris menyampaikan hasil pengawasan secara berkala kepada RUPS, termasuk apabila terdapat penurunan kinerja Perseroan yang signifikan.

As a supervisory body, the Board of Commissioners reviewed and approved strategies and policies outlined in the RKAP and RJPP, and periodically reported the results of its oversight to the GMS, including in cases of significant performance decline.

Berdasarkan fungsi dan tugas yang dimiliki, Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan terhadap penyusunan strategi dan kebijakan strategis oleh Direksi yang termuat dalam RKAP maupun RJPP. Bersamaan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan terhadap implementasi strategi dan kebijakan strategis yang diterapkan sepanjang tahun 2021.

Based on the Commissioners' assessment, the Board of Directors successfully formulated and implemented strategies aligned with the conditions faced by the Company throughout 2021. These strategies were considered effective in optimizing available opportunities and were executed by taking into account the advice and recommendations provided through an effective working relationship between the Commissioners and the Board of Directors.

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi beserta seluruh jajaran terkait telah menyusun dan mengimplementasikan strategi dan kebijakan strategis yang sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh Perseroan sepanjang tahun. Terkait hal tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa susunan strategi dan kebijakan strategis yang diterapkan dapat mengoptimalkan setiap peluang-peluang yang ada. Dewan Komisaris menilai bahwa implementasi strategi dan kebijakan strategis telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan saran dan nasihat yang diberikan, berdasarkan pelaksanaan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Commissioners is of the view that the Board of Directors, together with the relevant management, has formulated and implemented strategies and strategic policies that are aligned with the conditions faced by the Company throughout the year. In this regard, the Commissioners considers that the strategies and policies adopted were able to optimize available opportunities. The Commissioners also notes that the implementation of such strategies and strategic policies was carried out by taking into account the recommendations and advice provided through an effective working relationship between the Commissioners and the Board of Directors.

MEKANISME DAN FREKUENSI PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI
MECHANISM AND FREQUENCY OF ADVISORY TO THE DIRECTORS

Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat atas pengelolaan Perseroan telah dilaksanakan Dewan Komisaris melalui hubungan kerja yang efektif bersama Direksi beserta jajaran terkait. Dewan Komisaris membangun hubungan kerja dengan Direksi melalui penyelenggaraan rapat gabungan secara rutin serta melalui komunikasi sehari-hari. Selain itu, Dewan Komisaris juga telah melaksanakan rapat yang mengundang anggota tertentu Direksi, untuk membahas persoalan khusus terkait pengelolaan Perseroan.

The supervisory and advisory functions over the management of the Company have been carried out by the Board of Commissioners through an effective working relationship with the Board of Directors and relevant management. This relationship was established through regular joint meetings as well as day-to-day communication. In addition, the Board of Commissioners also convened meetings involving specific members of the Board of Directors to discuss particular issues related to the Company's management.

Fungsi pemberian nasihat telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sepanjang tahun 2021 dengan berlandaskan pada hasil kerja pengawasan terhadap implementasi strategi, juga dinamika internal dan eksternal yang dihadapi Perseroan.

The advisory function was exercised by the Board of Commissioners throughout 2021 based on the results of its supervision over strategy implementation, as well as the internal and external dynamics faced by the Company.

Hingga 31 Desember 2021, Dewan Komisaris telah memastikan bahwa fungsi pemberian nasihat kepada Direksi sudah mencakup 2 (dua) tingkatan, yaitu pelaksanaan pemberian nasihat (Performance Level) serta monitoring terhadap tindak lanjut atas nasihat yang telah disampaikan (Conformance Level).

As of 31 December 2021, the Board of Commissioners ensured that the advisory function provided to the Board of Directors covered two levels, namely the provision of advice (Performance Level) and the monitoring of follow-up actions on the advice delivered (Conformance Level).

Dalam menyampaikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat gabungan bersama Direksi yang Dewan Komisaris dengan mengundang anggota Direksi yang direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris. Selain itu, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat kerja yang mengundang anggota Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali atau melebihi jumlah Rapat Internal Dewan Komisaris dengan mengundang anggota Direksi yang direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris.

In providing advice to the Board of Directors, the Board of Commissioners held a joint meeting with the Board of Directors by inviting members of the Board of Directors as planned in the Board of Commissioners' Work Plan and Budget (RKA). In addition, the Board of Commissioners has held working meetings inviting members of the Board of Directors 12 (twelve) times or more than the number of Internal Meetings of the Board of Commissioners by inviting members of the Board of Directors as planned in the Board of Commissioners' Work Plan and Budget (RKA).

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN OLEH DIREKSI
VIEW ON BUSINESS PROSPECTS PREPARED BY THE DIRECTORS

Dewan Komisaris memberikan penilaian positif terhadap pandangan Direksi atas strategi dalam memanfaatkan prospek usaha yang disusun oleh Direksi. Sebagai organ yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan memberi nasihat, Dewan Komisaris senantiasa menciptakan harmonisasi atas kepercayaan antara kedua pihak demi menjaga kunci kesuksesan jangka panjang. Pandangan yang diungkapkan oleh Direksi mencerminkan pemahaman mendalam akan dinamika pasar dan potensi pertumbuhan Perseroan.

The Board of Commissioners provides a positive assessment of the Board of Directors' views regarding strategies to capitalize on business prospects. As an organ responsible for supervision and advisory, the Board of Commissioners consistently fosters trust and alignment between both parties to safeguard long-term success. The views expressed by the Board of Directors reflect a strong understanding of market dynamics and the Company's growth potential.

Dewan Komisaris telah melakukan tinjauan atas prospek usaha yang disusun oleh Direksi. Berdasarkan hal tersebut, Dewan Komisaris melihat bahwa prospek yang disusun telah mempertimbangkan kondisi perkembangan ekonomi global maupun nasional, serta praduga atas dinamika industri yang dapat mempengaruhi performa Perseroan.

The Board of Commissioners has reviewed the business prospects prepared by the Board of Directors and considers that such prospects have taken into account global and national economic developments, as well as assumptions regarding industry dynamics that may affect the Company's performance.

Bersamaan dengan pemulihan ekonomi pasca Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah, Perseroan yakin bahwa di tahun 2022 dan tahun-tahun mendatang akan diisi oleh berbagai macam peluang. Berdasarkan optimisme tersebut, Dewan Komisaris yakin bahwa Perseroan memiliki prospek usaha yang menjanjikan di tahun 2022 sehingga dapat membangkitkan kinerjanya. Dewan Komisaris akan terus mengawasi kinerja Direksi khususnya dalam memastikan kesiapan sumber daya dan mempersiapkan kesiapan Perseroan untuk berkontribusi aktif dalam memajukan perekonomian nasional

In line with the post-COVID-19 economic recovery initiatives undertaken by the Government, the Company is confident that 2022 and subsequent years will present various opportunities. Based on this optimism, the Board of Commissioners believes that the Company has promising business prospects in 2022 and will continue to supervise the Board of Directors, particularly in ensuring resource readiness and the Company's preparedness to actively contribute to national economic growth.

Sehubungan dengan hal tersebut, penilaian yang diberikan oleh Dewan Komisaris mewakili kepentingan yang dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan. Dewan Komisaris juga menegaskan bahwa strategi yang disusun oleh Direksi telah dianalisis secara cermat dan sesuai dengan tujuan jangka panjang Perseroan. Sebagai upaya dalam menciptakan landasan yang kokoh untuk pengambilan keputusan, Direksi akan terus melakukan pengawasan secara ketat dan menyeluruh terhadap kinerja Direksi.

Accordingly, the assessment provided by the Board of Commissioners represents the interests of all stakeholders. The Board of Commissioners also emphasizes that the strategies formulated by the Board of Directors have been carefully analyzed and are aligned with the Company's long-term objectives. As part of strengthening the decision-making foundation, the Board of Commissioners will continue to exercise thorough and comprehensive oversight of the Board of Directors' performance.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
COMMISSIONERS' VIEW ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dewan Komisaris menyadari bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam mengevaluasi kinerja Perseroan, Dewan Komisaris senantiasa menakankan penerapan GCG kepada Direksi.

Commissioners recognizes that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) is a fundamental pillar for sustainability and long-term growth. In evaluating the Company's, the Commissioners consistently emphasizes the importance of GCG implementation to the Directors.

Berdasarkan penerapan GCG yang dilaksanakan sepanjang tahun, Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas komitmen Perseroan dalam menjalankan best practices. Hal tersebut tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap regulasi dan hukum yang berlaku, tetapi juga mencakup seluruh prinsip-prinsip GCG. Dewan Komisaris berpendapat bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG telah dilakukan secara efektif dan menyeluruh. Selain itu, penerapan GCG juga merupakan bukti kuat integritas dan transparansi operasional Perseroan. Dewan Komisaris juga menilai bahwa Perseroan telah berperan secara aktif dalam menerapkan GCG melalui pemanfaatan mekanisme Whistleblowing System yang sesuai dengan peraturan terkini.

Based on the implementation of GCG throughout the year, the Board of Commissioners appreciates the Company's commitment to best practices. This commitment encompasses not only compliance with applicable laws and regulations but also adherence to all GCG principles. The Board of Commissioners believes that GCG principles have been implemented effectively and comprehensively, reflecting the Company's integrity and operational transparency. The Board of Commissioners also notes the Company's active role in implementing GCG through the utilization of a Whistleblowing System in accordance with prevailing regulations.

Dengan kesungguhan pada penerapan GCG, Dewan Komisaris berharap bahwa Perseroan dapat menciptakan lingkungan yang lebih akuntabel, beretika, dan berdaya saing serta membangun kepercayaan masyarakat dan Stakeholder dalam pengelolaan perusahaan secara bertanggung jawab. Penilaian positif dari Dewan Komisaris tidak hanya menggambarkan kinerja yang baik dari Direksi dan jajaran terkait, tetapi juga mencerminkan integritas dan kepercayaan yang ditanamkan dalam budaya Perseroan. Hal ini memperkuat keyakinan pemangku kepentingan, meningkatkan reputasi Perseroan, serta menciptakan landasan yang kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang. Dengan demikian, timbal balik positif dari Dewan Komisaris terhadap penerapan *Good Corporate Governance* tidak hanya sebagai bentuk penghargaan, tetapi juga sebagai dorongan untuk terus meningkatkan standar dan praktik korporat yang lebih baik di masa mendatang.

With its commitment to implementing GCG, the Board of Commissioners hopes that the Company can create a more accountable, ethical, and competitive environment and build public and stakeholder trust in responsible corporate management. The positive assessment from the Board of Commissioners not only reflects the good performance of the Board of Directors and related parties, but also reflects the integrity and trust instilled in the Company's culture. This strengthens stakeholder confidence, enhances the Company's reputation, and creates a solid foundation for long-term growth. Thus, the positive feedback from the Board of Commissioners on the implementation of Good Corporate Governance is not only a form of appreciation, but also an encouragement to continue improving corporate standards and practices in the future.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
EVALUATION COMMITTEES UNDER THE COMMISSIONERS

Secara keseluruhan, komite-komite yang berada di bawah naungan Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik. Untuk itu, Dewan Komisaris memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh organ pendukung atas kontribusi yang telah diberikan. Melalui hasil positif tersebut, Dewan Komisaris akan terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerjanya sehingga dapat membantu Perseroan dalam mencapai tujuan.

Overall, the committees under the Board of Commissioners have carried out their duties and responsibilities effectively. Accordingly, the Board of Commissioners expresses its highest appreciation to all supporting organs for their contributions. Building on these positive results, the Board of Commissioners will continue to enhance its effectiveness and efficiency in supporting the achievement of the Company's objectives.

PERUBAHAN SUSUNAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS
CHANGES THE COMPOSITION OF THE COMMISSIONERS

Sampai dengan 31 Desember 2021, tidak terdapat perubahan pada komposisi Dewan Komisaris,

As of 31 December 2021, there were no changes in the composition of the Board of Commissioners.

APRESIASI
APPRECIATION

Segenap anggota Dewan Komisaris memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direksi atas kinerja yang dinamis sepanjang tahun 2021. Terlebih juga, Dewan Komisaris menyampaikan rasa terima kasih yang besar kepada seluruh insan Perseroan atas kerja keras dan dedikasi yang telah diberikan, sehingga Perseroan dapat melalui tahun ini dengan berbagai pencapaian yang membanggakan. Tidak lupa, Dewan Komisaris memberikan terima kasih kepada seluruh pemangku Kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan.

All members of the Board of Commissioners extend their highest appreciation to the Board of Directors for their dynamic performance throughout 2021. The Board of Commissioners also expresses sincere gratitude to all Company personnel for their hard work and dedication, enabling the Company to achieve commendable results during the year. Appreciation is also extended to all stakeholders for their continued trust and support.

Melalui laporan ini, izinkan kami menyampaikan hasil dari kerja keras dan dedikasi yang telah diberikan oleh seluruh insan Perseroan. Berkat dukungan dari seluruh pihak, Dewan Komisaris berharap bahwa Perseroan dapat meningkatkan pencapaian serta kinerja keuangan dan operasional di masa yang akan datang.

Through this report, we present the outcomes of the collective efforts and dedication of all Company personnel. With continued support from all parties, the Board of Commissioners is optimistic that the Company will further enhance its financial and operational performance in the future.

Jakarta, 28 Desember 2021
Jakarta, December 28, 2021

Aribowo
Komisaris Utama
President Commisioner

GATOT SUPRABOWO

DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR

Komitmen PT Jamkrindo Syariah untuk terus tumbuh sehat dan berkelanjutan tetap tinggi meski di tengah tantangan perekonomian yang silih berganti pasca pandemi COVID-19 di sepanjang tahun 2021. Upaya tersebut dilakukan melalui penajaman fokus pada pencapaian target usaha yang selaras dengan Visi dan Misi Perseroan, terutama dalam membangun keberlanjutan bisnis Perseroan.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga PT Jamkrindo Syariah ("Perseroan") dapat melalui tahun 2021 yang penuh tantangan dengan meraih kinerja yang baik. Perseroan juga masih dapat mempertahankan performa bisnisnya ditengah tantangan internal dan juga eksternal.

Direksi, beserta seluruh jajaran manajemen dan karyawan Perseroan serta dukungan Dewan Komisaris, telah melakukan upaya terbaik melalui program kerja dan penerapan strategi yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan pasar, agar dapat merealisasikan kinerja yang sesuai dengan harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Melalui Laporan Tahunan Tahun 2021 ini, perkenankan Kami menyampaikan laporan pengelolaan Perseroan di sepanjang tahun 2021, sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban Kami kepada Pemegang Saham beserta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Laporan tahunan ini juga menjadi implementasi transparansi Perusahaan yang senantiasa berupaya menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan secara konsisten dan berkesinambungan dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari.

Dear Shareholders and Esteemed Stakeholders,

We express our gratitude to Almighty God for His blessings and grace, which enabled PT Jamkrindo Syariah ("the Company") to navigate the challenging year of 2021 while achieving positive performance. The Company also managed to sustain its business performance amid various internal and external challenges..

The Board of Directors, supported by the Board of Commissioners, along with management and all employees of the Company, has made its best efforts through the implementation of work programs and strategies aligned with market conditions and demands, to deliver performance in line with the expectations of shareholders and stakeholders.

Through this 2021 Annual Report, we present the Company's management report for the year 2021 as a form of accountability to our Shareholders and all stakeholders. This annual report also reflects the Company's commitment to transparency and the consistent and sustainable implementation of Good Corporate Governance principles in conducting its business activities.

PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL TETAP SOLID DITENGAH KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI GLOBAL TAHUN 2021

NATIONAL ECONOMIC GROWTH REMAINS SOLID AMID GLOBAL ECONOMIC UNCERTAINTY IN 2021

Tahun 2021 ditetapkan sebagai fase penting dalam proses pemulihan ekonomi nasional setelah perekonomian mengalami tekanan signifikan akibat pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada kuartal II2021 ekonomi RI tumbuh sebesar 7,07% secara *year on year* (YoY). Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 3,31% dari kuartal sebelumnya. Sayangnya sinyal positif ini tak berlangsung lama, karena kemudian terjadi amukan varian Delta yang menyumbang angka kematian tertinggi selama pandemi. Industri penjaminan adalah salah satu ranah yang terdampak COVID-19.

The year 2021 was marked as a critical phase in the national economic recovery process following significant economic pressure caused by the COVID-19 pandemic throughout 2020. Statistics Indonesia (BPS) recorded that in the second quarter of 2021, Indonesia's economy grew by 7.07% year-on-year (YoY), representing an increase of 3.31% compared to the previous quarter. However, this positive momentum was short-lived due to the spread of the Delta variant, which led to a surge in cases and the highest mortality rate during the pandemic. The guarantee industry was among the sectors affected by the impact of the COVID-19 pandemic.

Meningkatnya angka beban klaim tidak hanya disebabkan oleh kondisi perekonomian, tapi juga banyaknya mitra usaha yang gagal bayar karena telah meninggal dunia. Pemerintah pun terpaksa menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara lebih ketat guna memperlambat penyebaran virus, dengan risiko tertekannya berbagai sektor perekonomian.

The increase in claim expenses was not only driven by economic conditions, but also by the rising number of business partners experiencing defaults, including cases caused by death. In response, the Government implemented stricter Community Activity Restrictions (PPKM) to curb the spread of the virus, which consequently placed additional pressure on various economic sectors.

Seluruh Industri terutama sektor keuangan dituntut untuk lebih jeli melihat peluang. Bagaimana tren permintaan di masyarakat dan bagaimana perubahan perilaku konsumen pada keadaan krisis. Di sisi lain, pemerintah kembali menyediakan sejumlah stimulus untuk menyelamatkan serta meningkatkan bisnis antara lain melalui kebijakan restrukturisasi pinjaman, tambahan bantuan modal, keringanan pembayaran tagihan listrik, dan dukungan pembiayaan lainnya, serta melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

All industries, particularly the financial sector, were required to be more vigilant in identifying opportunities, including observing demand trends and shifts in consumer behavior during the crisis. At the same time, the Government reintroduced various stimulus measures to sustain and enhance business activities, such as loan restructuring policies, additional capital assistance, electricity bill relief, and other financing support, including the continuation of the National Economic Recovery (PEN) Program.

Perseroan terus mendorong layanan penjaminan kredit dan bantuan konsultasi manajemen kepada para pelaku bisnis, serta bekerja sama dengan lembaga keuangan bank maupun non bank untuk mempermudah akses pinjaman modal kerja dan/atau investasi.

The Company continued to strengthen credit guarantee services and provide management consulting assistance to business players, while collaborating with banking and non-banking financial institutions to facilitate access to working capital and/or investment financing.

PERAN DIREKSI DALAM PROSES STRATEGI DAN RENCANA BISNIS SERTA PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASINYA

THE ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN STRATEGY AND BUSINESS PLANNING AND OVERSIGHT OF ITS IMPLEMENTATION

Direksi memegang peran kunci dalam proses perumusan strategi dan penentuan arah kebijakan strategis Perseroan, dimana hal ini merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara kolegial. Selama proses berlangsung, setiap anggota Direksi dan organ-organ pendukung di bawahnya berkontribusi menyumbangkan pemikiran dan pandangan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman profesional yang dimiliki, termasuk mengakomodir masukan dan arahan dari Dewan Komisaris.

The Board of Directors plays a key role in formulating the Company's strategy and determining its strategic policy direction, as part of the collective execution of the Board's duties and responsibilities. Throughout this process, each member of the Board of Directors, together with its supporting organs, contributes ideas and perspectives based on their respective competencies and professional experience, while also accommodating input and guidance from the Board of Commissioners.

Setelah melalui seluruh tahapan tersebut, kami memastikan strategi dan kebijakan strategis yang sudah ditetapkan untuk tahun 2021 telah selaras dengan visi dan misi Perseroan, serta sudah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Untuk memastikan eksekusi strategi telah dilakukan secara konsisten dan benar oleh masing-masing unit bisnis, Direksi mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan jajaran manajemen untuk meninjau progres dari penerapan strategi dan menganalisa hasil yang dicapai.

Upon completion of these stages, we ensure that the strategies and strategic policies established for 2021 are aligned with the Company's vision and mission and have obtained approval from the Board of Commissioners. To ensure consistent and effective execution across all business units, the Board of Directors conducts regular coordination meetings with management to review implementation progress and evaluate the results achieved.

Keterlibatan aktif Direksi pada seluruh tahapan mulai dari perancangan strategi, penetapan, hingga mengawal langsung pelaksanaannya, memungkinkan kami untuk dapat mengidentifikasi isu-isu atau kendala yang dihadapi di lapangan dengan lebih cepat sehingga langkah-langkah mitigasi risiko juga dapat diambil sedini mungkin. Apabila diperlukan, Direksi juga dapat melakukan penyesuaian terhadap strategi yang dijalankan selama tahun buku agar pertumbuhan bisnis Perseroan senantiasa berada di jalur yang diharapkan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

The active involvement of the Board of Directors at every stage—from strategy formulation and determination to direct oversight of implementation—enables the early identification of issues and operational challenges, allowing risk mitigation measures to be taken in a timely manner. Where necessary, the Board of Directors may also adjust the strategies implemented during the financial year to ensure that the Company's business growth remains in line with the expectations of shareholders and other stakeholders.

PRIORITAS STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PERSEROAN UNTUK MERAIH PERTUMBUHAN YANG LEBIH BAIK

STRATEGIC PRIORITIES AND POLICIES TO ACHIEVE SUSTAINABLE GROWTH

Sebagai upaya untuk menciptakan nilai positif bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan, pada tahun 2021, Perseroan berfokus pada implementasi strategi yang diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan melalui pengembangan usaha yang sudah dimiliki Perseroan dan melanjutkan pengembangan proyek-proyek baru lainnya. Sepanjang tahun buku 2021, Perseroan secara khusus telah menerapkan langkah-langkah strategis untuk mendorong pendapatan.

As part of its efforts to create positive value for shareholders and stakeholders, in 2021 the Company focused on implementing strategies aimed at accelerating growth through the development of its existing business lines while continuing the expansion of new projects. Throughout the 2021 financial year, the Company specifically implemented strategic initiatives designed to drive revenue growth.

Agar pertumbuhan pendapatan tetap tinggi, kami telah mengupayakan berbagai cara seperti melakukan , serta terus berusaha menggali ceruk bisnis lain dengan berpenetrasi ke pasar yang baru. Di sisi lain, Perseroan juga memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan pendapatan segmen lainnya melalui .

To maintain strong revenue growth, we have pursued various initiatives, including , , while continuously exploring other business niches by penetrating new markets. At the same time, the Company has also placed greater emphasis on enhancing revenue from other segments through .

Dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran manajemen dan segenap karyawan dalam menerapkan strategi yang telah disetujui, kami meyakini Perseroan akan terus tumbuh dan berkembang sebagai perusahaan penjaminan syariah yang terintegrasi dan mampu memberikan *good services*.

With the full commitment of management and all employees in implementing the approved strategies, we are confident that the Company will continue to grow and develop as an integrated Sharia guarantee company capable of delivering high-quality services.

ANALISIS KINERJA PERSEROAN
COMPANY PERFORMANCE ANALYSIS

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021
POSISI KEUANGAN

Langkah-langkah strategis yang telah dijalankan disepanjang tahun 2021 membuahkan hasil yang maksimal serta mampu mendorong pertumbuhan kinerja di beberapa lini bisnis yang pada akhirnya juga berhasil meningkatkan posisi top lines Perseroan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan pendapatan sebesar % dari tahun sebelumnya sehingga dibukukan menjadi Rp miliar (tercapai 100% dari target 2021). Secara umum, kenaikan pendapatan neto selama 2021 bersumber dari peningkatan .

The strategic initiatives implemented throughout 2021 delivered optimal results and successfully drove performance growth across several business lines, which ultimately strengthened the Company's top-line position. This was reflected in revenue growth of % compared to the previous year, reaching Rp billion (achieving 100% of the 2021 target). Overall, the increase in net revenue during 2021 was primarily driven by the growth of .

Di tahun 2021, Perseroan mengalami peningkatan pendapatan melalui segmen . Hal ini dikarenakan membaik sehingga Perseroan dapat mencapai target yang ditentukan. Dengan pencapaian kinerja operasional maupun bisnis yang beragam dari masing-masing Unit Usaha, realisasi laba tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan dari target sebesar 99.368.132.753 terealisasi Rp 105.844.061.395 ditahun ini. Namun secara keseluruhan profitabilitas Perseroan masih mengalami tekanan di 2021 atas non-operasional dan tidak mempengaruhi arus kas sebagaimana dapat dilihat dari posisi rugi bersih Perseroan yang mengalami peningkatan. Hal ini tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha maupun posisi kas Perseroan.

In 2021, the Company recorded higher revenue through the segment. This was attributable to improvements in , enabling the Company to achieve its predetermined targets. Supported by varied operational and business performance across each Business Unit, The Company's current year profit realised increased from the target of IDR 99,368,132,753 to 105,844,061,395 this year. However, overall profitability remained under pressure in 2021 due to non-operational factors that did not affect cash flows, as reflected in the increase in the Company's net loss. This condition did not have an impact on business performance or the Company's cash position.

Direksi memastikan seluruh kebijakan strategis yang telah disusun dan dijalankan secara konsisten sepanjang tahun ini berhasil mewujudkan pencapaian target kinerja positif dengan tetap memperhatikan isu kepatuhan dan keberlanjutan. Kendati semuanya berjalan baik, kami tetap menyadari bahwa ruang-ruang perbaikan tentu masih tetap ada dan kami berkomitmen untuk meningkatkannya agar Perseroan dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar di masa depan.

The Board of Directors ensured that all strategic policies formulated and consistently implemented throughout the year successfully delivered positive performance targets while maintaining due consideration for compliance and sustainability aspects. While the overall performance was encouraging, we remain aware that there is still room for improvement, and we are committed to continuously enhancing our performance to enable the Company to achieve greater success in the future.

PROSPEK USAHA
POSISI KEUANGAN

Perseroan sangat optimis serta memiliki keyakinan bahwa kinerja Perseroan juga akan mengalami peningkatan dari sisi finansial dan juga operasional. Direksi juga akan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelatihan yang berkesinambungan kepada karyawan. Sementara itu, untuk meningkatkan pendapatan Perseroan dalam jangka pendek, Direksi akan terus menyusun strategi dengan perencanaan yang matang dengan terus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam mengelola bisnis.

The Company remains highly optimistic and confident that its performance will continue to improve, both financially and operationally. The Board of Directors will also continue to enhance service quality through ongoing and sustainable employee training programs. Meanwhile, to increase the Company's short-term revenue, the Board of Directors will continue to formulate well-structured strategies supported by prudent planning, while consistently upholding the principle of prudence in managing the business.

Direksi juga memandang seluruh organ perusahaan telah bersinergi dalam membangun landasan tata kelola yang kokoh untuk membentuk organisasi yang lebih transparan dan akuntabel. Secara keseluruhan, Direksi memastikan bahwa pengelolaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan best practices yang berlaku secara umum, terutama dalam industri penjaminan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Board of Directors also believes that all corporate organs have worked in synergy to establish a strong governance foundation, fostering a more transparent and accountable organization. Overall, the Board of Directors ensures that the Company's management has been conducted in accordance with generally accepted best practices, particularly within the guarantee industry, as well as in compliance with applicable laws and regulations.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SEBAGAI LANDASAN DALAM MENGELOLA BISNIS

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE AS THE FOUNDATION FOR BUSINESS MANAGEMENT

Dalam menghadapi dinamika dan persaingan usaha yang semakin ketat, Perseroan menegaskan komitmen tingginya terhadap penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/"GCG") untuk mewujudkan pertumbuhan bisnis yang berkualitas dan berkelanjutan. Sebagai perusahaan terbuka, penerapan GCG di Perseroan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta juga berpedoman pada praktik terbaik yang berlaku di sektor keuangan.

In responding to increasingly dynamic conditions and intensifying business competition, the Company reaffirms its strong commitment to the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles to achieve high-quality and sustainable business growth. As a public company, the implementation of GCG within the Company refers to prevailing laws and regulations and is also guided by best practices applicable in the financial sector.

Melalui penerapan GCG yang konsisten pada setiap aspek operasional bisnis dan di semua tingkatan organisasi, Perseroan berhasil mempertahankan kredensial dan keberlangsungan usahanya sebagai perusahaan yang terintegrasi di Indonesia. Sejauh ini meski masih dihadapkan dengan berbagai tantangan di bisnis usaha yang sedang dalam pengembangan, Perseroan tetap mampu menjalankan seluruh kegiatan usahanya secara profesional dengan berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan kewajaran, serta didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing tinggi serta agile terhadap perubahan. Sejalan dengan komitmen Perseroan untuk menerapkan GCG secara konsisten dan berkesinambungan, Direksi memastikan implementasi GCG di Perseroan sudah berjalan efektif sepanjang tahun 2021, yang tercermin dari terjalinnya hubungan antar-organ yang terbangun secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, ketersediaan infrastruktur dan softstructure tata kelola yang memadai, serta berjalannya sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang robust baik pada aspek operasional maupun finansial sehingga Perseroan dapat memantau, menilai, mengendalikan, dan memitigasi setiap risiko yang berpotensi memengaruhi kelangsungan usaha baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Through the consistent application of GCG across all aspects of business operations and at every organizational level, the Company has been able to maintain its credentials and business continuity as an integrated company in Indonesia. Despite continuing challenges in developing business segments, the Company has consistently carried out its operations in a professional manner based on the principles of transparency, accountability, responsibility, and fairness, supported by the availability of highly competent, competitive, and agile human resources.

In line with the Company's commitment to the consistent and sustainable implementation of GCG, the Board of Directors ensured that GCG implementation throughout 2021 was carried out effectively. This was reflected in clear and accountable relationships among corporate organs, the availability of adequate governance infrastructure and soft structures, as well as the effective operation of robust internal control and risk management systems covering both operational and financial aspects. These measures enable the Company to monitor, assess, control, and mitigate potential risks that may affect business sustainability in both the short and long term.

Komitmen terhadap GCG diyakini akan memberikan perlindungan bagi para pemangku kepentingan dan meningkatkan kepercayaan investor sehingga pada akhirnya juga dapat membantu Perseroan untuk terus melangkah maju mewujudkan pertumbuhan usaha yang lebih besar di masa depan.

The Company believes that a strong commitment to GCG provides protection for stakeholders and enhances investor confidence, which in turn supports the Company's continued progress toward achieving greater and more sustainable business growth in the future.

PERUBAHAN KOMPOOSISI DIREKSI

CHANGES IN THE COMPOSITION DIRECTORS

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat perubahan dalam komposisi Direksi Perseroan. Kami berharap komposisi ini mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

Throughout 2021, there were no changes in the composition of the Company's Board of Directors. We expect that this composition will continue to perform its duties and responsibilities effectively and optimally.

APRESIASI
APPRECIATION

Sebagai penutup, Direksi mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi, arahan dan saran yang diberikan kepada Direksi selama tahun 2021. Penghargaan yang sama juga kami sampaikan kepada seluruh karyawan Perseroan yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi dan integritas dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Ucapan terima kasih juga kami berikan kepada para pelanggan, mitra bisnis, pemegang saham dan regulator, serta para pemangku kepentingan lainnya yang tidak mungkin dapat kami sebutkan satu persatu.

Semoga perjalanan tahun 2021 dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan momentum yang memotivasi kita semua untuk dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang tepat dalam mewujudkan pertumbuhan yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Selain terus berupaya meningkatkan performa keuangan, kami juga berharap semoga Perseroan dapat terus memberikan manfaat yang optimal bagi pemegang saham, karyawan, dan masyarakat luas.

In closing, the Board of Directors would like to express its deepest appreciation and sincere gratitude to the Board of Commissioners for the recommendations, guidance, and advice provided throughout 2021. We also extend our highest appreciation to all employees of the Company for their hard work, dedication, and integrity in facing the various challenges encountered during the year. Our gratitude is also conveyed to our customers, business partners, shareholders, regulators, and all other stakeholders whom we are unable to mention individually.

May the experiences of 2021 serve as valuable lessons and a motivating momentum for all of us to formulate the right strategic steps in achieving stronger growth in the years ahead. In addition to continuously striving to improve financial performance, we also hope that the Company will continue to deliver optimal benefits to shareholders, employees, and the wider community.

Jakarta, 28 Desember 2021
Jakarta, December 28, 2021

Gatot Suprabowo
Direktur Utama
President Director

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2024 PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH

STATEMENT OF RESPONSIBILITY FROM BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS ON ANNUAL REPORT AND SUSTAINABILITY REPORT YEAR 2024 PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information contained in PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah year 2024 Annual Report and Sustainability Report have been fully disclosed and being responsible upon accountability of this Annual Report's contents.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 30 Juni 2022| Jakarta, June 30, 2022

Atas Nama Dewan Komisaris
On be half of the Board of Commissioners

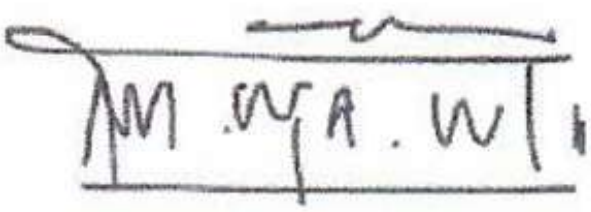

Muhammad Syakir Sula
Komisaris
Commissioner

Aribowo
Komisaris Utama
President Commissioner

Wildan
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Atas Nama Direksi
On be half of the Board of Directors

Achmad Sonhadji
Direktur Operasional
Director of Operations

Gatot Suprabowo
Direktur Utama
President Director

Endang Sri Winarni
Direktur Keuangan, SDM & Umum
Director of Finance, Human Resources & General Affairs

Syariah Jamkrindo

03

Profil Perusahaan

Company Profile

INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN
OVERVIEW AND COMPANY IDENTITY

NAMA PERUSAHAAN | COMPANY NAME

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH | PT JAMKRINDO SYARIAH

SEBUTAN | BRAND NAME

Jamsyar

TANGGAL PENDIRIAN | DATE OF ESTABLISHMENT

19 September 2014

PERIJINAN PERUSAHAAN | BUSINESS LICENSES

Didirikan dan beroperasi berdasarkan izin-izin, sebagai berikut:

- Persetujuan Definitif Kementerian BUMN Surat Nomor: S-536/MBU/2014 tanggal 16 September 2014 tentang Persetujuan Definitif Pendirian Anak Perusahaan PT Jamkrindo Syariah • Akta Notaris Nomor 68 oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. tanggal 19 September 2014;
- Secara resmi telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-26462.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tanggal 24 September 2014; • Izin operasional dari OJK melalui surat nomor: KEP-134/D.05/2014 tanggal 07 November 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Syariah kepada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah;
- Izin produk Suretyship dari OJK No.S- 489/2014 Tanggal 19 Desember 2014 dan pencatatan produk Surety Bond, Customs Bond, dan Kontra Bank Garansi melalui surat OJK No. S-34/2015 tanggal 15 Januari 2015.

STATUS PERUSAHAAN | COMPANY STATUS

Cucu Perusahaan Badan Usaha Milik Negara

BENTUK BADAN HUKUM | LEGAL ENTITY FORM

Perseroan Terbatas (PT)

DASAR HUKUM PENDIRIAN | FOUNDING LEGAL BASIS

Dasar Hukum Pendirian PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Akta Pendiran No 68 Thn 2014 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 26462.40.10.2014

ALAMAT KANTOR PUSAT | HEAD OFFICE ADDRESS

Gedung JamSyar Jl LetJend Suprapto No 20 Blok AII/4, RT.6/RW.5, Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10510

JUMLAH KARYAWAN | NUMBER OF EMPLOYEES

239 orang

JARINGAN KANTOR | OFFICE NETWORK

1 Kantor Pusat, 11 Kantor Cabang, dan 3 KUP

RUANG LINGKUP USAHA | BUSINESS SCOPE

Perusahaan bergerak dalam bidang usaha jasa penjaminan syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 02POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan:

- Kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar adalah Penjaminan berdasarkan prinsip syariah.
- Produk atau jasa yang dihasilkan mulai tahun 2019 adalah Kafalah Pembiayaan Umum, Kafalah Pembiayaan Multiguna, Kafalah Pembiayaan Mikro, Kafalah Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa, Kafalah Bank Garansi/Kontra Bank Garansi, Surety Bond, dan Customs Bond, Kafalah Pembiayaan KPR Sejahtera FLPP, Kafalah Penjaminan Distribusi Barang, KUR, dan Supply Chain Financing.

MODAL DASAR | AUTHORIZED CAPITAL

Rp1.000.000.000.000

MODAL DISETOR | AUTHORIZED CAPITAL

Rp705.620.500.000

MEDIA SOSIAL | SOCIAL MEDIA

Facebook : Jamkrindo Syariah
Instagram : @jamkrindos yariah
Twitter : @jam_syar

KONTAK PERUSAHAAN | COMPANY CONTACT

Sekretaris Perusahaan :
Telp. 021 - 6540386
Faks. 021- 6540389
Website: www.jamkrindosyariah.co.id
Email : info@jamkrindosyariah.co.id

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
BRIEF COMPANY HISTORY

Dengan adanya kerjasama penjaminan PT Jamkrindo dengan bank syariah pada 1997 melalui ditandatanganinya kerjasama penjaminan pembiayaan syariah dengan PT Bank Mu'amalat Indonesia menjadi titik awal berdirinya PT Jamkrindo Syariah. Lebih lanjut, tahun 2003, PT Jamkrindo Syariah bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri dan kemudian diikuti dengan beberapa mitra bank syariah maupun lembaga non-bank.

Seiring perkembangan bisnis syariah, utamanya Perbankan Syariah, maka dibentuk unit usaha Syariah PT Jamkrindo dalam bentuk Divisi Penjaminan Syariah, berdasarkan rekomendasi DSN Nomor U-217/ DSN-MUI/IX/2006 tanggal 15 September 2006. Divisi Penjaminan Syariah beroperasi sejak 13 Februari 2007, melayani Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah, baik Bank maupun Non Bank.

Untuk memurnikan kegiatan usahanya, maka PT Jamkrindo membentuk PT Penjaminan Jamkrindo Syariah yang resmi didirikan pada tanggal 19 September 2014 berdasarkan Akta Notaris Nomor 68 oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. tanggal 19 September 2014. Di tahun yang sama, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah secara resmi telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-26462.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Pada tanggal 7 November 2014, PT Penjaminan Jamkrindo memperoleh izin perusahaan penjaminan dari OJK melalui Surat Izin OJK No. Kep-134/D.05/2014. Untuk menjalankan bisnis penjaminan syariah, PT Jamkrindo Syariah mendapatkan izin produk Suretyship dari OJK No.S-489/2014 Tanggal 19 Desember 2014 dan pencatatan produk Surety Bond, Customs Bond, dan Kontra Bank Garansi melalui surat OJK No. S-34/2015 tanggal 15 Januari 2015.

Awal tahun 2015 juga menjadi momentum bagi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dalam memperluas jangkauan layanan penjaminan syariah. Melalui surat nomor S-27/ NBB.223/2015 tanggal 23 Januari 2015, PT Jamkrindo Syariah diberi izin membuka kantor cabang di Kota Medan, Bandung, dan Surabaya. Dalam menjalankan bisnis, PT Jamkrindo Syariah didukung oleh Kantor Unit Pelayanan. Pada awal tahun 2019, Perseroan memiliki 5 Kantor Cabang yang tersebar di Medan, Palembang, Surabaya, Bandung, dan Makassar dan 8 Kantor Unit Pelayanan yang tersebar di Aceh, Pekanbaru, Lampung, Semarang, Pontianak, Balikpapan, Mataram dan Banjarmasin. Seiring dengan kebutuhan penjaminan, pada posisi akhir tahun 2019 telah dilakukan pembukan 1 (satu) Kantor Unit Pelayanan di Wilayah Padang dan peningkatan status 3 KUP menjadi Cabang, yaitu Aceh, Semarang, dan Banjarmasin, sehingga pada posisi akhir tahun 2021 Perseroan tercatat telah memiliki 15 Kantor Cabang dan 5 Kantor Unit Pelayanan.

Perseroan juga senantiasa melakukan peningkatan kualitas layanan kepada mitra bisnis, terjamin serta stakeholder lainnya dan juga meningkatkan semangat dalam memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian Syariah khususnya dan perekonomian Indonesia pada umumnya. Hal ini terbukti dengan keberhasilan Perseroan meraih penghargaan "Nominal Penjaminan Terbesar" dalam Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) Award tahun 2021. Hal ini menunjukan eksistensi Perseroan sebagai perusahaan penjaminan Syariah terbesar di Indonesia dengan total asset pada posisi 30 September 2021 sebesar Rp 2,18 triliun dan ekuitas pada posisi yang sama sebesar Rp 892,97 miliar. Pada periode 1 Januari hingga 30 September 2021, Perseroan telah menjamin lebih dari seribu terjamin dengan nilai penjaminan sebesar Rp 33,78 triliun. Nilai penjaminan tersebut meningkat 38,75% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja yang sangat baik tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan untuk meraih kesuksesan di tahun mendatang.

The establishment of PT Jamkrindo Syariah began in 1997 through a guarantee cooperation between PT Jamkrindo and Islamic banking, marked by the signing of a Sharia financing guarantee agreement with PT Bank Muamalat Indonesia. In 2003, PT Jamkrindo Syariah further expanded its cooperation with Bank Syariah Mandiri, followed by partnerships with other Islamic banks and non-bank institutions.

In line with the growth of the Islamic finance industry, particularly Islamic banking, PT Jamkrindo established a Sharia Business Unit in the form of a Sharia Guarantee Division based on the DSN recommendation No. U-217/DSN-MUI/IX/2006 dated 15 September 2006. This division commenced operations on 13 February 2007, providing Sharia-based financing guarantees (kafalah) for both bank and non-bank Islamic financial institutions.

To strengthen its focus on Sharia guarantee activities, PT Jamkrindo officially established PT Penjaminan Jamkrindo Syariah on 19 September 2014 under Notarial Deed No. 68, drawn up by Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. In the same year, the Company obtained legal entity approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

On 7 November 2014, the Company obtained a guarantee business license from the Financial Services Authority (OJK). PT Jamkrindo Syariah subsequently received approval for Suretyship products and the registration of Surety Bond, Customs Bond, and Counter Bank Guarantee products.

In early 2015, the Company expanded its service network by opening branch offices in Medan, Bandung, and Surabaya. As of the end of 2021, the Company operated 15 Branch Offices and 5 Service Unit Offices across various regions in Indonesia. The Company continuously improves service quality for business partners, guaranteed parties, and stakeholders. This commitment was reflected in the achievement of the "Largest Guarantee Nominal" award at the Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) Award 2021, reaffirming the Company's position as the largest Sharia guarantee company in Indonesia.

The Company also continuously improves the quality of its services to business partners, guarantors, and other stakeholders, as well as increasing its enthusiasm in contributing to the growth of the Sharia economy in particular and the Indonesian economy in general. This is proven by the Company's success in winning the "Largest Guarantee Nominal" award at the 2021 Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) Awards. This demonstrates the Company's existence as the largest Sharia guarantee company in Indonesia with total assets as of September 30, 2021 amounting to IDR 2.18 trillion and equity at the same position amounting to IDR 892.97 billion. From January 1 to September 30, 2021, the Company has guaranteed more than a thousand guarantees with a guarantee value of IDR 33.78 trillion. This guarantee value increased by 38.75% compared to the same period last year. This excellent performance is expected to be a stepping stone to success in the coming year.

INFORMASI TENTANG PERUBAHAN NAMA DAN STATUS BADAN HUKUM
INFORMATION ON CHANGES IN COMPANY NAME AND LEGAL ENTITY STATUS

Hingga akhir 2021, Perseroan tercatat belum pernah mengalami perubahan nama serta perubahan status badan hukum.

Until the end of 2021, the Company has never undergone any changes in name or legal entity status.

JEJAK LANGKAH
MILESTONES

2006

Pada 15 September terbit rekomendasi DSN MUI melalui surat nomor U217/DSNMUI/IX/2006 untuk mulai menjalankan usaha penjaminan syariah.

On September 15, MUI DSN issued recommendation through letter number U217/DSNMUI/IX/2006 to start implementing sharia guarantee businesses.

2007

Launching Penjaminan Syariah
(Divisi Penjaminan Syariah)

Launch of Sharia Guarantee
(Sharia Guarantee Division).

2014

- PT Penjaminan Jamkrindo Syariah resmi berdiri pada 19 September 2014
- Penerbitan Sertifikat Kafalah (Penjaminan) Pertama pada 30 Desember 2014 untuk Produk Kontra Bank Garansi
- PT Penjaminan Jamkrindo Syariah was officially established on September 19, 2014
- The first Kafalah (Guarantee) Certificate was issued on December 30, 2014 for the Bank Guarantee Counter Product

2016

- PT Penjaminan Jamkrindo Syariah mendapatkan Izin Produk Surety Bond, Customs Bond, dan Kontra Bank Garansi
- PT Penjaminan Jamkrindo Syariah mendapatkan Izin membuka Kantor Cabang Medan, Surabaya, dan Bandung
- Penerbitan Sertifikat Kafalah (Penjaminan) Pertama untuk Produk Customs Bond
- Penerbitan Sertifikat Kafalah (Penjaminan) Pertama untuk Produk Surety Bond
- Penerbitan Sertifikat Kafalah (Penjaminan) Pertama untuk Produk Kafalah (Penjaminan) Pembiayaan Umum
- Penerbitan Sertifikat Kafalah (Penjaminan) Pertama untuk Produk Kafalah (Penjaminan) Pembiayaan Mikro dan Kafalah (Penjaminan) Pembiayaan Multiguna
- Penerbitan Sertifikat Kafalah (Penjaminan) Pertama untuk Produk Kafalah (Penjaminan) Produk Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang dan Jasa
- PT Penjaminan Jamkrindo Syariah obtained a license for Surety Bond, Customs Bond, and Bank Guarantee products.
- PT Penjaminan Jamkrindo Syariah obtained a license to open branch offices in Medan, Surabaya, and Bandung.
- Issuance of the First Kafalah (Guarantee) Certificate for Customs Bond Products
- Issuance of the First Kafalah (Guarantee) Certificate for Surety Bond Products
- Issuance of the First Kafalah (Guarantee) Certificate for General Financing Kafalah (Guarantee) Products
- Issuance of the First Kafalah (Guarantee) Certificate for Micro Financing Kafalah (Guarantee) and Multipurpose Financing Kafalah (Guarantee) Products
- Issuance of the First Kafalah (Guarantee) Certificate for Construction Financing and Goods and Services Procurement Kafalah (Guarantee) Products

2018

- Peningkatan Status Sharia Office Chanelling Palembang menjadi Kantor Cabang pada 22 Desember 2017
- Pembukaan Kantor Unit Pelayanan Pontianak pada tanggal (Tanya Renbang Kep-Dir Nya)
- Pembukaan Kantor Unit Pelayanan Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2017
- Pembukaan Kantor Unit Pelayanan Mataram pada tanggal 22 Desember 2017
- Pembukaan Kantor Unit Pelayanan Aceh pada tanggal 22 Desember 2017
- Upgrade of the Palembang Sharia Office Chanelling to Branch Office on December 22, 2017
- Opening of the Pontianak Service Unit Office on (Ask Renbang Kep-Dir Nya)
- Opening of the Banjarmasin Service Unit Office on December 22, 2017
- Opening of the Mataram Service Unit Office on December 22, 2017
- Opening of the Aceh Service Unit Office on December 22, 2017

2019

- Pembukaan Kantor Unit Pelayanan Padang
- Penambahan Modal sebesar Rp 175.000.000.000.000
- Opening of the Padang Service Unit Office
- Capital increase of
- Rp175,000,000,000,000

2020

- Penambahan Modal sebesar Rp. 75.000.000.000.000
- Capital increase
- Rp. 75.000.000.000.000

2021

- Pembukaan Kantor Cabang Utama (Jakarta).
- Memperoleh Opini Wajar Tanpa Modifikasian / Wajar Tanpa Pengecualian dari KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, firma anggota jaringan global Price Water House Coopers (PwC) atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2020.
- Penambahan Modal sebesar Rp. 150.620.692.192,00 dalam rangka Phase Out UUS Jamkrindo ke JamSyar.
- Peningkatan status KUP Pontianak, Padang dan Pekanbaru menjadi Kantor Cabang.
- Opening of Main Branch Office (Jakarta).
- Received an Unqualified Opinion from KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, a member firm of the global network Price Water House Coopers (PwC) on the 2020 Financial Statements.
- Capital increase of IDR 150,620,692,192.00 in the context of the Phase Out of UUS Jamkrindo to JamSyar.
- Upgrading of the status of KUP Pontianak, Padang, and Pekanbaru to Branch Offices.

VISI, MISI, DAN NILAI PERUSAHAAN
VISION, MISSION, COMPANY VALUES

Visi dan Misi Perusahaan telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah No. 18.Kep-Dir/VII/2015 tentang Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) tanggal 3 Agustus 2015. Adapun visi dan misi perusahaan adalah sebagai berikut :

The Company's Vision and Mission have been approved by the Board of Commissioners and Directors as stipulated in the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah No. 18.Kep-Dir/VII/2015 concerning the Board Manual dated August 3, 2015. The company's vision and mission are as follows:

VISI | VISION

"Menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah Terpercaya dan Terdepan dalam Pertumbuhan Bisnis di Indonesia

MISI | MISSION

- Amanah 1 Melakukan kegiatan penjaminan Syariah bagi pengembangan entitas bisnis di Indonesia
- Amanah 2 Memberikan layanan yang luas dan berkualitas Tinggi
- Amanah 3 Memberikan manfaat kepada stakeholder sesuai prinsip bisnis yang sehat dan berlandaskan syariah.

NILAI BUDAYA PERUSAHAAN
CORPORATE CULTURE VALUES

Budaya Perusahaan merupakan intangible asset yang sangat menentukan pencapaian Visi dan Misi Perusahaan. Terinspirasi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip bisnis syariah, PT Jamkrindo Syariah memformulasikan Budaya Perusahaan ke dalam sebuah akronim AKHLAK. Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia di Perusahaan. Akhlak terdiri dari :

Corporate culture is an intangible asset that greatly determines the achievement of the company's vision and mission. Inspired by the values contained in the principles of sharia business, PT Jamkrindo Syariah has formulated its corporate culture into an acronym, AKHLAK. Core Values of Human Resources in the Company. Akhlak consists of:

AKHLAK

Amanah
Definisi: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
Panduan perilaku:
- Memenuhi janji dan komitmen.
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan.

Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

Kompeten
Definisi: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
Panduan perilaku:
- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis
Definisi: Saling peduli dan menghargai perbedaan.
Panduan perilaku:
- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal
Definisi: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
Panduan perilaku:
- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, Perusahaan dan Negara.
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih benar.
- Patuh kepada pemimpin sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

Adaptif
Definisi: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubadan Panduan perilaku.
Panduan perilaku:
- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- Bertindak proaktif.

Kolaboratif
Definisi: Membangun kerja sama yang sinergis.
Panduan perilaku:
- Memberikan kesempatan kepada pihak untuk berkontrubusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Trustworthy
Definition: Upholding the trust that has been placed in you.
Behavioral guidelines:
- Fulfill promises and commitments.
- Take responsibility for your tasks, decisions, and actions.
- Adhere to moral and ethical values..

Competent
Definition: Continuously learn and develop capabilities.
Behavioral guidelines:
- Improve personal competence to respond to ever-changing challenges.
- Help others learn.
- Complete tasks with the highest quality.

Harmonious
Definition: Caring for and respecting differences.
Behavioral guidelines:
- Respect everyone regardless of their background.
- Be willing to help others.
- Build a conducive work environment.

Loyal
Definition: Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and State.
Behavior guidelines:
- Maintaining the good name of fellow employees, leaders, the Company, and the State.
- Willing to make sacrifices to achieve the greater good.
- Obeying leaders as long as it does not conflict with the law and ethics.

Adaptive
Definition: Continuously innovate and be enthusiastic in driving or facing change. Behavioral guidelines.
Behavioral guidelines:
- Quickly adapt to become better.
- Continuously make improvements in line with technological developments.
- Act proactively.

Collaborative
Definition: Building synergistic cooperation.
Behavioral guidelines:
- Provide opportunities for parties to contribute.
- Be open to cooperation to generate added value.
- Mobilize the use of various resources for common goals.

PENJELASAN LOGO PERUSAHAAN
CORPORATE LOGO EXPLANATION

Logo PT Jamkrindo Syariah menyerupai medali yang terdiri dari tiga lipatan pita berwarna hijau dan biru yang membentuk huruf "J" dengan bintang sisi delapan di bagian kanan bawah. Warna biru melambangkan identitas korporat perusahaan induk, yaitu PT Jamkrindo, sedangkan warna hijau melambangkan syariah yang menjadi prinsip operasional bisnis perusahaan. Logo Perusahaan telah didaftarkan di Ditjen HAKI No C00201403826 tanggal 7 Oktober 2014.

The PT Jamkrindo Syariah logo resembles a medal consisting of three folds of green and blue ribbon forming the letter 'J' with an eight-pointed star in the lower right corner. The blue colour symbolises the corporate identity of the parent company, PT Jamkrindo, while the green colour symbolises sharia, which is the principle of the company's business operations. The company logo has been registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights No. C00201403826 on 7 October 2014.

BIDANG USAHA
BUSINESS ACTIVITIES

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN PERUSAHAAN
BUSINESS ACTIVITIES BASED ON THE COMPANY BUDGET

Kegiatan usaha Perseroan menurut anggaran dasar terakhir bergerak di bidang usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan sebagaimana disebutkan pada Akta Pendirian Jamsyar No. 68 pasal 3 tanggal 19 September 2014 adalah sebagai berikut:

1. Penjaminan atas Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan dan di luar Lembaga Keuangan;
2. Penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial atau pembiayaan atau pinjaman berdasarkan Prinsip Syariah baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang disalurkan antara lain oleh Koperasi Simpan Pinjam, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, antara lain Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Koperasi Jasa Keuangan Syariah, koperasi lainnya yang menjalankan usaha dengan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung (channeling maupun executing);
3. Penjaminan atas Pembiayaan atau Pinjaman berdasarkan Prinsip Syariah program Kemitraan yang disalurkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka Program Kemitraan
4. Penjaminan atas Surat Utang;
5. Penjaminan Anjak Piutang/Factoring Syariah;
6. Penjaminan Transaksi Dagang;
7. Penjaminan Distribusi;
8. Penjaminan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Surety Bond);

The Company's business activities according to the latest articles of association are engaged in the field of Sharia-based Guarantee.

The business activities carried out by the Company as stated in the Jamsyar Deed of Establishment No. 68 article 3 dated September 19, 2014 are as follows:

1. Guarantees for financing based on Sharia principles distributed by financial institutions and outside financial institutions;
2. Guarantees for the fulfillment of financial obligations or financing or loans based on Sharia Principles, whether for individuals, business entities, limited liability companies, business units of foundations, cooperatives, and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) distributed by, among others, Savings and Loan Cooperatives, Sharia Micro Financial Institutions, including Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Sharia Financial Services Cooperatives, other cooperatives that operate based on Sharia Principles, either directly or indirectly (channeling or executing);
3. Guarantees for Financing or Loans based on Sharia Principles for partnership programs distributed by State-Owned Enterprises (BUMN) in the context of Partnership Programs
4. Guarantees for Debt Securities;
5. Guarantees for Sharia Factoring;
6. Guarantees for Trade Transactions;
7. Guarantees for Distribution;
8. Guarantees for the Procurement of Goods and/or Services (Surety Bonds);

9. Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi);
10. Penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
11. Penjaminan Letter of Credit (L/C);
12. Penjaminan Kepabeanan (Customs Bond);
13. Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan Syariah; dan
14. Penyediaan informasi/database Terjamin terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan.

Berikut adalah jasa yang dijalankan Perseroan

Hingga 31 Desember 2021, jasa yang telah dijalankan Perseroan dan telah disesuaikan segmentasinya pada pengungkapan laporan keuangan Perseroan meliputi:

9. Bank Guarantee (Counter Bank Guarantee);
10. Domestic Documentary Credit Guarantee (SKBDN);
11. Letter of Credit (L/C) Guarantee;
12. Customs Bond Guarantee;
13. Management consulting services related to Sharia Guarantee business activities; and
14. Provision of information/database related to Guarantee business activities.

The following are the services provided by the Company

As of December 31, 2021, the services provided by the Company and adjusted to the segmentation in the Company's financial statements include:

Produk / Product	**Uraian** / Description	**Turunan Produk** / Product Derivatives
Kafalah Pembiayaan Umum General Financing Guarantee	Penjaminan Pembiayaan yang diajukan untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha/ proyek atau kegiatan investasi yang dilakukan oleh perorangan, perusahaan atau koperasi dengan tujuan untuk mendapat hasil/return dari kegiatan tersebut. Financing guarantees are submitted to support the smooth running of business activities/projects or investment activities carried out by individuals, companies, or cooperatives with the aim of obtaining results/returns from these activities.	• Kafalah Pembiayaan Modal Kerja • Kafalah Pembiayaan Investasi • Working Capital Financing Guarantee • Investment Financing Guarantee
Kafalah Pembiayaan Multiguna Multipurpose Financing Guarantee	Kafalah Pembiayaan Multiguna adalah Penjaminan atas Pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) kepada Terjamin (Makfuul 'Anhu) dengan sumber pengembalian adalah penghasilan tetap/gaji dan pendapatan lain perbulan yang sah dari tempat Terjamin (Makfuul 'Anhu) bekerja. / Multipurpose Financing Guarantee is a guarantee for financing provided by the Guarantor (Makfuul Lahu) to the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) with the source of repayment being a fixed income/salary and other legitimate monthly income from the Guaranteed Party's (Makfuul 'Anhu) place of employment.	
Kafalah Pembiayaan Mikro Micro Financing Guarantee	Kafalah Pembiayaan Mikro adalah Penjaminan atas Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk keperluan modal kerja dan/atau investasi dengan Plafond maksimum sebesar Rp250.000.000,- atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) atau sesuai kesepakatan tertulis antara Jamsyar dan Penerima Jaminan (Makfuul Lahu). Microfinance Guarantee is a guarantee for financing provided to business actors for working capital and/or investment purposes with a maximum ceiling of IDR 250,000,000 or in accordance with the provisions applicable to each Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) or in accordance with a written agreement between Jamsyar and the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu).	
Kafalah Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa Construction and Goods/Services Procurement Financing Guarantee	Kafalah Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa adalah penjaminan atas Pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) kepada Terjamin (Makfuul 'Anhu) untuk keperluan tambahan Modal Kerja, usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan kontrak kerja antara Terjamin (Makfuul 'Anhu) dengan Bouwheer (pemilik proyek) Construction Financing and Goods/Services Procurement Guarantee is a guarantee for Financing provided by the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) to the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) for additional Working Capital, construction services and goods/services procurement in accordance with the work contract between the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) and the Bouwheer (project owner).	
Kafalah Kontra Bank Garansi Counter Bank Guarantee	Kafalah Kontra Bank Garansi (KBG) adalah Pemberian Jaminan sebagai kontra garansi atas fasilitas Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank kepada Terjamin (Makfuul 'Anhu)/ Bank Guarantee Counter Guarantee (KBG) is a guarantee provided as a counter guarantee for a Bank Guarantee facility issued by the Bank to the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu).	• Kafalah BG untuk Penawaran (Jaminan Tender • Kafalah BG Uang Muka (Jaminan Uang Muka) • Kafalah BG Pelaksanaan (Jaminan Pelaksanaan) • Kafalah BG Pemeliharaan (Jaminan Pemeliharaan) • Kafalah BG khusus atau BGSP2D • Kafalah Bank Guarantee for Bid Submission • Kafalah Bank Guarantee for Advance Payment • Kafalah Bank Guarantee for Performance • Kafalah Bank Guarantee for Maintenance • Special Kafalah Bank Guarantee or SP2D Bank Guarantee
Surety Bond Surety Bond	Surety Bond adalah pemberian jaminan kepada Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) atas risiko kegagalan/wanprestasi Principal (Makfuul 'Anhu) dalam melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan kepada Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) Surety Bond is a guarantee provided to the Obligee (Makfuul Lahu) against the risk of default or non-performance by the Principal (Makfuul 'Anhu) in carrying out a job in accordance with the agreed contract.	
Customs Bond Customs Bond	Customs Bond adalah perikatan penjaminan antara tiga pihak, Penjamin (Kafiil) terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari Principal/Terjamin (Makfuul 'Anhu) terhadap Pemilik Proyek (Obligee) dalam hal Principal/Terjamin (Makfuul 'Anhu) tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. / Customs Bond is a tripartite guarantee arrangement in which the Guarantor (Kafiil) is obligated to fulfill the obligations arising from the Principal/Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) to the Project Owner (Obligee) in the event that the Principal/Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) fails to perform its obligations.	

Jasa / Description	**Uraian** / Description	**Produk** / Description
Kafalah Pembiayaan KPR Sejahtera FLPP Kafalah for FLPP Sejahtera Mortgage Financing	Kafalah Pembiayaan KPR Sejahtera FLPP adalah adalah penjaminan pembiayaan dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diberikan kepada Terjamin (Makfuul 'Anhu) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera Tapak atau Susun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. / Kafalah FLPP Sejahtera Mortgage Financing is a financing guarantee supported by the Housing Financing Liquidity Facility (FLPP), provided to the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) from Low-Income Communities (MBR) for the ownership of landed or vertical Sejahtera housing, in accordance with the regulations of the Ministry of Public Works and Public Housing.	
Kafalah Distribusi Barang Goods Distribution Kafalah	Penjaminan dari Penjamin atas Distribusi Barang sesuai dengan dokumen perjanjian antara Penerima Jaminan dengan Terjamin the execution goods distribution in accordance with terms and conditions set forth in the agreement between the Obligee.	
Kafalah KUR-iB Kafalah	Pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada pihak Terjamin atau Nasabah KUR-iB. Mikro dan KUR-iB Ritel berdasarkan akad pembiayaan yang digunakan untuk modal kerja dan/atau investasi yang risiko atas pengembaliannya dijamin oleh Penjamin. Financing provided by the Obligee to the Guaranteed Party or KUR-iB Micro and KUR-iB Retail customers under a financing contract, utilized for working capital and/or investment purposes, with the repayment risk guaranteed by the Guarantor.	
Kafalah Pembiayaan Invoice Kafalah	Pembiayaan melalui pemberian dana talangan (qardh) untuk pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari TERJAMIN kepada PENERIMA JAMINAN yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang/Obligee sesuai dengan prinsip syariah. / Financing through the provision of bridge financing (qardh) for the transfer of short-term receivables or bills from the GUARANTEE HOLDER to the GUARANTEE RECIPIENT, who then collects the receivables from the debtor/Obligee in accordance with sharia principles.	

Dalam menjalankan aktivitas penjaminan, akad yang digunakan adalah Kafalah Bil Ujrah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI No.74/DSN-MUI/I/2009 tanggal 15 Januari 2009 tentang Penjaminan Syariah dan POJK Nomor 6/ POJK.05/2014. Adapun akad-akad Pembiayaan yang dapat dijamin adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Murabahah
   Pembiayaan dari Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) berupa jual beli barang antara Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dengan Terjamin (Makfuul 'Anhu) dengan harga asal (pokok pembiayaan) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
2. Pembiayaan Salam
   Pembiayaan dari Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) berupa jual beli barang antara Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dengan Terjamin (Makfuul 'Anhu) dimana barang yang dibeli Terjamin (Makfuul 'Anhu) akan diserahkan di kemudian hari sedangkan pembiayaan dilakukan di muka.
3. Pembiayaan Istishna'
   Pembiayaan dari Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) berupa jual beli barang antara Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dengan Terjamin (Makfuul 'Anhu) dimana jual beli tersebut berupa pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dan Terjamin (Makfuul 'Anhu), sedangkan Pembiayaan dapat dilakukan di muka, cicilan atau ditangguhkan pada masa yang akan datang.
4. Pembiayaan Mudharabah
   Pembiayaan berupa kerja sama usaha antara Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dengan Terjamin (Makfuul 'Anhu) dimana Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) menyediakan seluruh modal, sedangkan Terjamin (Makfuul 'Anhu) mengelola Usaha tersebut dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang timbul dari usaha tersebut akan dibagi kepada Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dan Terjamin (Makfuul 'Anhu) sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati.
5. Pembiayaan Musyarakah
   Pembiayaan berupa kerja sama usaha antara Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dan Terjamin (Makfuul 'Anhu) untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi kepada Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dan Terjamin (Makfuul 'Anhu) sesuai nishbah bagi hasil yang disepakati dan risiko ditanggung sesuai dengan kontribusi dana masing-masing.
6. Pembiayaan Ijarah
   Pembiayaan berupa Hak Guna (Manfaat) suatu barang atau jasa dari Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dalam waktu tertentu melalui Pembayaran Sewa dari Terjamin (Makfuul 'Anhu) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
7. Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamliik
   Pembiayaan berupa Hak Guna (Manfaat) suatu barang atau jasa dari Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dalam waktu tertentu melalui Pembayaran Sewa dari Terjamin (Makfuul 'Anhu), dengan disertai opsi untuk membeli/ tidak membeli barang pada akhir perjanjian Pembiayaan.

In conducting guarantee activities, the contract applied is Kafalah Bil Ujrah as stipulated in DSN MUI Fatwa No. 74/DSN-MUI/I/2009 dated 15 January 2009 on Sharia Guarantee and OJK Regulation No. 6/POJK.05/2014. The financing contracts eligible for guarantee include the following:

1. Murabahah Financing
   Financing from the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) takes the form of a sale and purchase of goods between the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) and the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) at the original price (principal financing) plus an agreed profit margin..
2. Salam Financing
   Financing from the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) in the form of a sale and purchase of goods between the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) and the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu), whereby the goods purchased by the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) will be delivered at a later date while financing is carried out in advance.
3. Istishna' Financing
   Financing from the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) takes the form of a sale and purchase of goods between the Guarantee Recipient and the Guaranteed Party, whereby the sale and purchase takes the form of an order for the manufacture of certain goods with specific criteria and requirements agreed between the Guarantee Recipient and the Guaranteed Party, while financing can be carried out in advance, in installments, or in the future..
4. Mudharabah Financing
   Financing in the form of a business partnership between the Guarantor (Makfuul Lahu) and the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) whereby the Guarantor (Makfuul Lahu) provides all the capital, while the Guarantee Recipient (Makfuul 'Anhu) manages the business with an agreement that the profits arising from the business will be shared between the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) and the Guarantee Recipient (Makfuul 'Anhu) in accordance with the agreed profit sharing ratio.
5. .Musyarakah Financing
   Financing in the form of a business partnership between the Guarantor (Makfuul Lahu) and the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) for a specific business, where each party contributes funds with an agreement that the profits will be shared between the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) and the Guarantee (Makfuul 'Anhu) in accordance with the agreed profit sharing ratio and the risks will be borne in accordance with their respective contributions.
6. Ijarah Financing
   Financing in the form of the right to use goods or services for a specified period through rental payments, without transferring ownership of the asset.
7. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Financing
   Financing in the form of the right to use goods or services through rental payments, accompanied by an option to acquire ownership or purchase the asset at the end of the financing period.

WILAYAH OPERASIONAL
OPERATIONAL AREA

KANTOR UNIT PELAYANAN PONTIANAK
Jl. Jenderal Ahmad Yani Komplek Town House, No. A7, Pontianak
Kode Pos: 78122
Telp. 0561-8179112
pontianak@jamsyar.id

Aceh
Jl. Tgk. Mr Mohd. Hasan No. 22 Botoh,
Leung Bata, Banda Aceh
Telp. 0651- 7316222
aceh@jamsyar.id

Medan
Jl. K.H. Wahid Hasyim No 32, Medan
Kode Pos: 20154
Telp. 061-88817121
medan@jamsyar.id

KANTOR UNIT PELAYANAN PEKANBARU
Komplek Perkantoran Mutiara Asri Garden Jalan Arifin Ahmad No. 6,
vKec. Marpoyan Damai, Kel. Sidomulyo Timur, Pekanbaru- Riau 28289
Telp. 0761- 6709906
pekanbaru@jamsyar.id
Telp. 0721-5609283

KANTOR UNIT PELAYANAN PADANG
Jalan Veteran No. 75, Kel. Purus, Kec. Padang Barat, Padang
Kode Pos: 40115
Telp. 0751-8959005
padang@jamsyar.id

Palembang
Jl. Residen A. Rozak No 27, Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni, Palembang
Kode Pos: 30114
Telp. 0711-813546
palembang@jamsyar.id

Lampung
Jl. Jend Sudirman No.75B Tanjung Raya, Kedamaian, Bandar Lampung
Kode Pos: 35128
Telp : 0721 5609283
lampung@jamsyar.id

Banjarmasin
Jl. A. Yani KM 7, 9 Ruko D Kel. Manarap, Kertak Hanyar Banjarmasin
Kode Pos: 70654
Telp. 0511-6782405
banjarmasin@jamsyar.id

Balikpapan
Jl. Marsma R. Iswahyudi No 124M RT 30 Kel.Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan
Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur
Telp. 0542-8528526
balikpapan@jamsyar.id

Makassar
Jalan Sungai Saddang Lama No. 23, Kota Makassar
Telp. 0411-894 4555
makassar@jamsyar.id

Mataram
Jl. Pejanggik No.49, Cakranegara Barat, Mataram
Kode Pos: 83239
Telp. 0370-7847691
mataram@jamsyar.id

Surabaya
Jl. Bogowonto No. 51, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya
Kode Pos: 60241
Telp. 031-5618799, 031-5683099
surabaya@jamsyar.id

Semarang
Jl. Dr. Wahidin No. 45 Kaliwiru, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50253
Telp. 024-76422421
semarang@jamsyar.id

STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

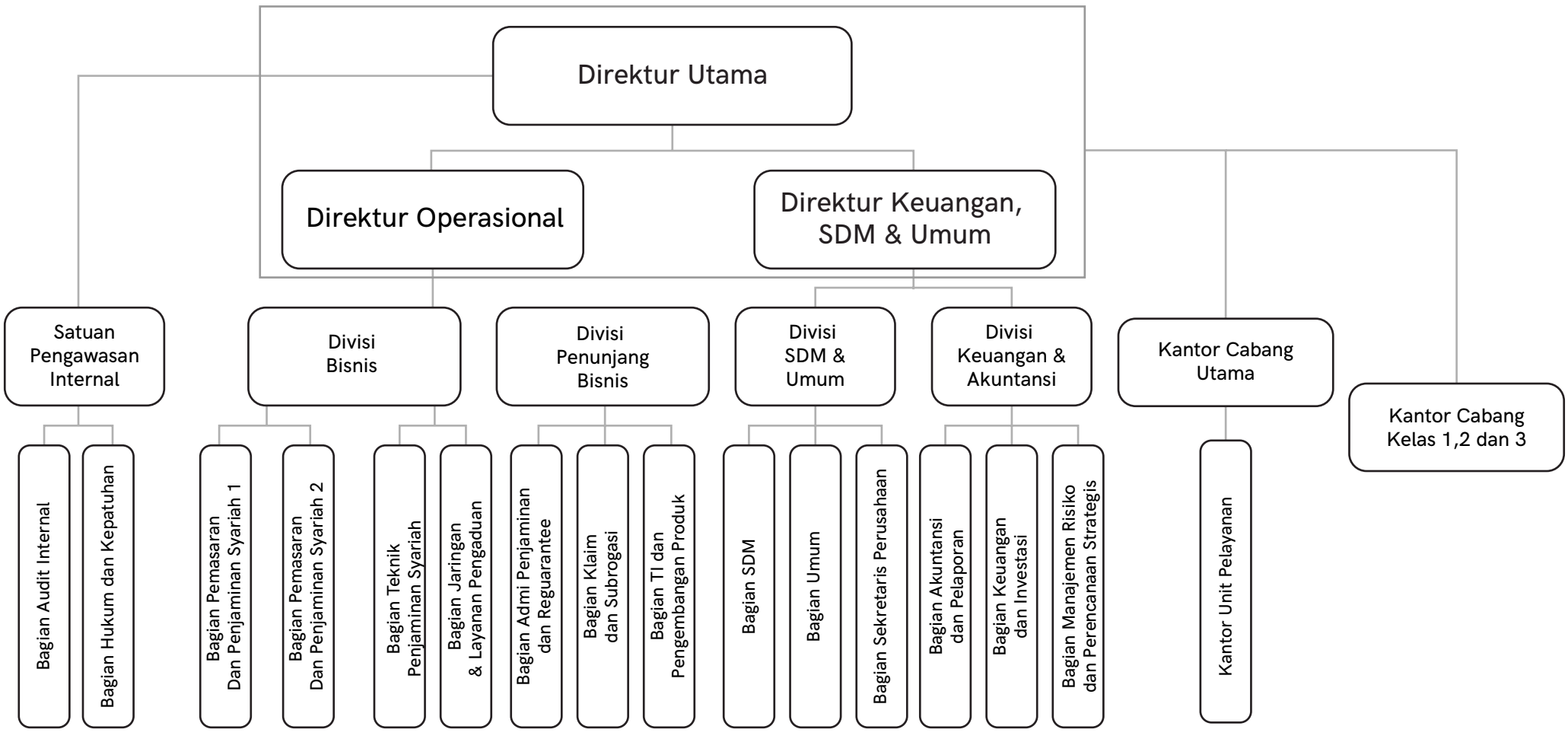

PROFIL DEWAN KOMISARIS
COMMISSIONERS' PROFILE

A DRS. ARIBOWO, AK, MM

Komisaris Utama | President Commissioner

Warga Negara | Nationality
Indonesia

Kelahiran | Place of Birth
Probolinggo, 6 Juni 1966

Usia | age
55 Tahun

Domisili | Domicile
DKI Jakarta

Periode Jabatan | Term of Office
2019 - Present

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	AKTA Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Penjaminan Jamkrindo Syariah nomor 19 tanggal 24 Oktober 2019 / Deed of Statement of Decision Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah number 19 dated October 24, 2019
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Akuntansi Universitas Airlangga (1990) • Magister Manajemen Universitas Andalas (2002) • Bachelor of Accounting, Airlangga University (1990) • Master of Management, Andalas University (2002)
Riwayat Karier Career History	• Komisaris Utama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2019 - sekarang) • Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT Jamkrindo (2016 - sekarang) • Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2017-2019) • Kepala Kantor Wilayah II Palembang PT Jamkrindo Syariah (2016) • Kepala Kantor Wilayah I Jakarta PT Jamkrindo Syariah (2015-2016) • Kepala Kantor Cabang Khusus Jakarta PT Jamkrindo Syariah (2014-2015) • Kepala Kantor Wilayah II Surabaya PT Jamkrindo Syariah (2014). • President Commissioner of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2019 - present) • Head of Finance and Investment Division of PT Jamkrindo (2016 - present) • Commissioner of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2017-2019) • Head of Regional Office II Palembang PT Jamkrindo Syariah (2016) • Head of Regional Office I Jakarta PT Jamkrindo Syariah (2015-2016) • Head of Special Branch Office Jakarta PT Jamkrindo Syariah (2014-2015) • Head of Regional Office II Surabaya PT Jamkrindo Syariah (2014).
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT Jamkrindo (2016 - sekarang) Head of Finance and Investment Division, PT Jamkrindo (2016 - present)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya, serta tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham utama/pengendali. / He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners or Directors, nor is he affiliated with any major/controlling shareholders.

DRS. WILDAN, AK

Komisaris Independen | Independent commissioner

Warga Negara | Nationality
Indonesia

Kelahiran | Place of Birth
Padang, 11 Maret 1962

Usia | age
59 Tahun

Domisili | Domicile
DKI Jakarta

Periode Jabatan | Term of Office
2019 – Present

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	AKTA Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Penjaminan Jamkrindo Syariah nomor 19 tanggal 24 Oktober 2019 / Deed of Statement of Decision Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah number 19 dated October 24, 2019
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Akuntansi Universitas Andalas (1987) Sarjana Akuntansi Universitas Andalas (1987)
Riwayat Karier Career History	• Operation Director Bank BRI Syariah (2015 – 2019) • Initial Public Offering PT. BRI Syariah (2018) • Compliance and Risk Management Director (2014 – 2015) • Financing Support Group Head Bank BRI Syariah (2012 – 2014) • Operation Director Bank BRI Syariah (2015 – 2019) • Initial Public Offering PT. BRI Syariah (2018) • Compliance and Risk Management Director (2014 – 2015) • Financing Support Group Head Bank BRI Syariah (2012 – 2014)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain Does not hold concurrent positions in other companies
Hubungan Afiliasi Affiliations	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya, serta tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham utama/pengendali. / He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners or Directors, nor is he affiliated with any major/controlling shareholders.

IR. H. M. SYAKIR SULA, AAIJ, FIIS, CRGP

Komisaris | commissioner

Warga Negara | Nationality
Indonesia

Kelahiran | Place of Birth
Poso, 12 Februari 1964

Usia | age
57 Tahun

Domisili | Domicile
DKI Jakarta

Periode Jabatan | Term of Office
2019 – Present

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	AKTA Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Penjaminan Jamkrindo Syariah nomor 19 tanggal 24 Oktober 2019 / Deed of Statement of Decision Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah number 19 dated October 24, 2019
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Pertanian Universitas Padjajaran Bachelor of Agriculture, Padjajaran University
Riwayat Karier Career History	• Komisaris Independen PT AIA Financial (2021 – Sekarang) • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Reasuransi Nasional Indonesia (2020 – Sekarang) • Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2019 – sekarang) • Komisaris Independen di PT Bank Nasional Indonesia (2015 - 2018) • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Panin Dai Ichi Life Syariah (2018 - 2021) • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Central Asia Raya (2018 – 2021) • Komisaris Independen PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014 – 2019) • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Tabungan Negara (2012 - 2015) • Independent Commissioner of PT AIA Financial (2021 – Present) • Chairperson of the Sharia Supervisory Board of PT Reasuransi Nasional Indonesia (2020 – Present) • Commissioner of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2019 – Present) • Independent Commissioner at PT Bank Nasional Indonesia (2015 - 2018) • Chair of the Sharia Supervisory Board at PT Panin Dai Ichi Life Syariah (2018 - 2021) • Chair of the Sharia Supervisory Board at PT Central Asia Raya (2018 – 2021) • Independent Commissioner of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014 – 2019) • Chair of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Tabungan Negara (2012 - 2015)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	• Komisaris Independen di PT AIA Financial (2021 - Sekarang) • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Reasuransi Nasional Indonesia (2020 – sekarang) • Komisaris Independen PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2019 - sekarang) • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Central Asia Raya (2018 – 2021) • Independent Commissioner of PT AIA Financial (2021 – Present) • Chairperson of the Sharia Supervisory Board of PT Reasuransi Nasional Indonesia (2020 – Present) • Commissioner of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2019 – Present) • Chair of the Sharia Supervisory Board at PT Central Asia Raya (2018 – 2021)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya, serta tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham utama/pengendali. / He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners or Directors, nor is he affiliated with any major/controlling shareholders.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS
CHANGE COMPOSITION OF COMMISSIONERS

Sampai dengan 31 Desember 2021, tidak terdapat perubahan pada komposisi Dewan Komisaris Perseroan.

As of December 31, 2021, there have been no changes to the composition of the Company's Board of Commissioners.

PROFIL DIREKSI
DIRECTORS' PROFILE

GATOT SUPRABOWO

Direktur Utama | President Director

Warga Negara | Nationality
Indonesia

Kelahiran | Place of Birth
Banyuwangi, 26 Oktober 1973

Usia | age
48 Tahun

Domisili | Domicile
DKI Jakarta

Periode Jabatan | Term of Office
2019 - Present

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	AKTA Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Penjaminan Jamkrindo Syariah nomor 19 tanggal 24 Oktober 2019 / Deed of Statement of Decision Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah number 19 dated October 24, 2019
Riwayat Pendidikan Educational Background	S1 Manajemen Universitas Jember (1995) / Bachelor of Management, University of Jember (1995)
Riwayat Karier Career History	• Direktur Bisnis merangkap Plt. Direktur Utama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2017-2019) • Direktur Bisnis PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014-2017) • Pejabat Pranata Utama Direktorat SDM dan Umum PT Jamkrindo (2014) • Kepala Kantor Wilayah III PT Jamkrindo (2014) • Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PT Jamkrindo (2013-2014) • Plt. Kepala Divisi Klaim dan Subrograsi PT Jamkrindo (2012-2013) • Business Director and Acting President Director of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2017-2019) • Business Director of PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014-2017) • Senior Official at the Directorate of Human Resources and General Affairs at PT Jamkrindo (2014) • Head of Regional Office III of PT Jamkrindo (2014) • Head of Planning and Development Division of PT Jamkrindo (2013-2014) • Acting Head of Claims and Subrogation Division of PT Jamkrindo (2012-2013)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain Does not hold concurrent positions in other companies
Hubungan Afiliasi Affiliations	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya, serta tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham utama/pengendali. / He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners or Directors, nor is he affiliated with any major/controlling shareholders.

ACHMAD SONHADJI

Direktur | Director

Warga Negara | Nationality
Indonesia

Kelahiran | Place of Birth
Surabaya, 19 April 1965

Usia | age
56 Tahun

Domisili | Domicile
Bekasi, Jawa Barat

Periode Jabatan | Term of Office
2019 – Sekarang/ Present

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	AKTA Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Penjaminan Jamkrindo Syariah nomor 19 tanggal 24 Oktober 2019 / Deed of Statement of Decision Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah number 19 dated October 24, 2019
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2 Manajemen Keuangan Sekolah Tinggi Manajemen Labora (1999) • S1 Akuntansi Universitas Brawijaya (1990) • Master's Degree in Financial Management, Labora College of Management (1999) • Bachelor's Degree in Accounting, Brawijaya University (1990)
Riwayat Karier Career History	• Direktur Operasional PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2017 – 2019) • Pejabat Pranata Utama Direktorat MSDM, Umum dan Kepatuhan (2017) • Kepala Satuan Pengawasan Internal PT Jamkrindo Syariah (2014-2016) • Pejabat Pranata Utama Direktorat SDM dan Umum (2014) • Kepala Divisi Pemasaran dan Penjaminan Syariah PT Jamkrindo Syariah (2014) • Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi PT Jamkrindo Syariah (2014) • Kepala Kantor Cabang Surabaya PT Jamkrindo Syariah (2013) • Kepala Divisi Keuangan PT Jamkrindo Syariah (2012) • Operations Director of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2017 – 2019) • Senior Executive Officer, Directorate of Human Resources, General Affairs and Compliance (2017) • Head of Internal Audit Unit, PT Jamkrindo Syariah (2014-2016) • Senior Executive Officer, Directorate of Human Resources and General Affairs (2014) • Head of the Marketing and Sharia Guarantee Division of PT Jamkrindo Syariah (2014) • Head of the Claims and Subrogation Division of PT Jamkrindo Syariah (2014) • Head of the Surabaya Branch Office of PT Jamkrindo Syariah (2013) • Head of the Finance Division of PT Jamkrindo Syariah (2012)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain Does not hold concurrent positions in other companies
Hubungan Afiliasi Affiliations	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya, serta tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham utama/pengendali. / He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners or Directors, nor is he affiliated with any major/controlling shareholders.

ENDANG SRI WINARNI

Direktur | Director

Warga Negara | Nationality
Indonesia

Kelahiran | Place of Birth
Boyolali, 12 Maret 1971

Usia | age
50 Tahun

Domisili | Domicile
DKI Jakarta

Periode Jabatan | Term of Office
2019 - Present

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	AKTA Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Penjaminan Jamkrindo Syariah nomor 19 tanggal 24 Oktober 2019 / Deed of Statement of Decision Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah number 19 dated October 24, 2019
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S1 Teknologi Industri Pertanian Universitas Gadjah Mada (1994) • S2 Manajemen Program Manajemen Risiko Universitas Indonesia (2003) • Bachelor of Science in Agricultural Engineering, Gadjah Mada University (1994) • Master of Science in Risk Management, University of Indonesia (2003)
Riwayat Karier Career History	• Direktur Keuangan, SDM & Umum PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014 - 2019) • Pejabat Pranata Utama Direktorat SDM dan Umum (2014) • Kepala Divisi Teknik Penjaminan Non-Bank PT Jamkrindo (2014 • Kepala Divisi Manajemen Risiko PT Jamkrindo Syariah (2012 - 2014) • Director of Finance, Human Resources & General Affairs, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014 - 2019) • Senior Administrator, Directorate of Human Resources and General Affairs (2014) • Head of Non-Bank Guarantee Engineering Division, PT Jamkrindo Syariah (2014) • Head of Risk Management Division, PT Jamkrindo Syariah (2012 - 2014)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain Does not hold concurrent positions in other companies
Hubungan Afiliasi Affiliations	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya, serta tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham utama/pengendali. / He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners or Directors, nor is he affiliated with any major/controlling shareholders.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI
COMPOSITION OF DIRECTORS

Per 31 Desember 2021, tidak terdapat perubahan pada komposisi Direksi Perseroan.

As of December 31, 2021, there were no changes in the composition of the Company's Board of Directors.

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH
SHARIA SUPERVISORY BOARD PROFILE

PROF.DR. HASANUDDIN AF, M.A

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of the Sharia Supervisory Board

Warga Negara / Nationality : Indonesia

Domisili / Domicile : Tangerang, Banten

Kelahiran / Place of birth : Majalengka, 18 Juli 1945

Usia / Age : 76 Tahun

Periode Jabatan / Term of Ofice : 2014 - Sekarang / Present

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	AKTA Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Penjaminan Jamkrindo Syariah nomor 19 tanggal 24 Oktober 2019 / Deed of Statement of Decision Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah number 19 dated October 24, 2019
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana IAIN Jakarta (1974) / Bachelor's degree from IAIN Jakarta (1974) • Magister IAIN (1989) / Master's degree from IAIN (1989) • Doktoral IAIN (1994) / Doktoral IAIN (1994)
Riwayat Karier Career History	• Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014 – 2019) • Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat (2010 – sekarang) • Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Victoria (2010 – sekarang) • Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrindo Syariah 9 (2006 – 2014) • Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014 – 2019) • Chairman of the Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council (MUI) (2010 – present) • Chairman of the Supervisory Board of Bank Victoria (2010 – present) • Member of the Supervisory Board of PT Jamkrindo Syariah 9 (2006 – 2014)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	• Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Victoria Syariah (2010 – sekarang) • Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat (2010 – sekarang) • Chairman of the Sharia Supervisory Board of Bank Victoria Syariah (2010 – present) • Chairman of the Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council (MUI) (2010 – present)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya, serta tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham utama/pengendali. / He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners or Directors, nor is he affiliated with any major/controlling shareholders.

ABDUL AZIEM SH, M.PD

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of the Sharia Supervisory Board

Warga Negara : Indonesia
Nationality

Domisili : DKI Jakarta
Domicile

Kelahiran : Jakarta, 31 Desember 1973
Place of Birth

Usia : 48 Tahun
Age

Periode Jabatan : 2014 - Sekarang / Present
Term of Ofice

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	AKTA Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Penjaminan Jamkrindo Syariah nomor 19 tanggal 24 Oktober 2019 / Deed of Statement of Decision Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah number 19 dated October 24, 2019
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S1 Hukum - Universitas Borobudur (1997) • S2, Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan - Universitas Negeri Jakarta (2005) • S3, Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir - Institut PTIQ Jakarta (2020)
Riwayat Karier Career History	• Kepala Bidang Pendidikan Perguruan Islam Miftahul Huda, Jakarta (2002 – sekarang) • Pembimbing Haji dan Umrah KBIH Maslakul Huda (2001 – Sekarang) • Head of Islamic Education at Miftahul Huda, Jakarta (2002 – present) • Hajj and Umrah Advisor at KBIH Maslakul Huda (2001 – present)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	• Kepala Bidang Pendidikan Perguruan Islam Miftahul Huda, Jakarta (2002 – sekarang) • Pembimbing Haji dan Umrah KBIH Maslakul Huda (2001 – Sekarang) • Head of Islamic Education at Miftahul Huda, Jakarta (2002 – present) • Hajj and Umrah Advisor at KBIH Maslakul Huda (2001 – present)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya, serta tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham utama/pengendali. / He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners or Directors, nor is he affiliated with any major/controlling shareholders.

KEPALA DIVISI
DIVISION HEADS

Nama / Name	**Jabatan** / Position	**Tanggal Pengangkatan** / Date of Appointment
Pada awal 2021, susunan Kepala Divisi adalah sebagai berikut: **At the beginning of 2021, the composition of the Division Heads was as follows:**		
Ibrahim Nur Setiawan	Plh Kepala Satuan Pengawas Internal Acting Head of Internal Audit Unit	Kep-Dir Nomor 028 tgl 16 September 2020 Directorate Circular No. 028 dated September 16, 2020
Ari Perdana Gandhi	Kepala Divisi Bisnis I Head of Business Division I	Kep-Dir Nomor 046 tgl 17 september 2021 Directorate Circular No. 046 dated September 17, 2021
Ichsan Mufti	Kepala Divisi Bisnis II Head of Business Division II	
Iwan Hermawan	Kepala Divisi Penunjang Bisnis Head of Business Support Division	Kep-Dir Nomor 055 tgl 31 Desember 2019 Directorate Circular No. 055 dated December 31, 2019
Arry Risaf Arisandi	Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi Head of Finance and Accounting Division	Kep-Dir Nomor 055 tgl 31 Desember 2019 Directorate Circular No. 055 dated December 31, 2019
Juli Sumartana	Kepala Divisi SDM & Umum Head of Human Resources & General Affairs Division	
Hingga akhir tahun 2021, tidak terdapat perubahan pejabat sehingga susunan Kepala Divisi adalah sebagai berikut: **Until the end of 2021, there have been no changes in personnel, so the composition of the Division Heads is as follows:**		
Juli Sumartana	Kepala Satuan Pengawas Internal Head of Internal Audit Unit	Kep-Dir Nomor 028 tgl 16 September 2020 Directorate Circular No. 028 dated September 16, 2020
Ari Perdana Gandhi	Kepala Divisi Bisnis I Head of Business Division I	Kep-Dir Nomor 046 tgl 17 september 2021 Directorate Circular No. 046 dated September 17, 2021
Ichsan Mufti	Kepala Divisi Bisnis II Head of Business Division II	Kep-Dir Nomor 046 tgl 17 september 2021 Directorate Circular No. 046 dated September 17, 2021
Iwan Hermawan	Kepala Divisi Penunjang Bisnis Head of Business Support Division	Kep-Dir Nomor 055 tgl 31 Desember 2019 Directorate Circular No. 055 dated December 31, 2019
Arry Risaf Arisandi	Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi Head of Finance and Accounting Division	Kep-Dir Nomor 055 tgl 31 Desember 2019 Directorate Circular No. 055 dated December 31, 2019
Maria Ulfah	Plt Kepala Divisi SDM dan Umum Acting Head of Human Resources and General Affairs Division	Kep-Dir Nomor 020 tgl 31 Maret 2021 Directorate General Letter No. 020 dated March 31, 2021

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH
CHANGE SHARIA SUPERVISORY BOARD COMPOTION

Sampai dengan 31 Desember 2021, tidak terdapat perubahan pada komposisi Dewan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

As of December 31, 2021, there have been no changes to the composition of the Company's Sharia Supervisory Board.

DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
EMPLOYEE DEMOGRAPHICS AND COMPETENCY DEVELOPMENT

Jumlah total karyawan tetap pada posisi 31 Desember 2021 adalah sebanyak 128 orang. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak 24 orang atau 23% dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 104 orang.

The total number of permanent employees as of December 31, 2021, was 128. This number increased by 24 people or 23% compared to 2020, which was 104 people.

Dengan jumlah tersebut, maka komposisi karyawan tetap perempuan adalah sebesar 39% dari total karyawan. Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenis kelamin 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

With this number, the composition of female permanent employees is 39% of the total number of employees. The composition of the Company's permanent employees based on gender for the last two (2) years is as follows:

Profil demografi karyawan Perseroan dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut ini:

The demographic profile of the Company's employees is presented in the following table and chart:

No	Jenis Kelamin / Gender	Komposisi Karyawan / Employee Composition				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Laki- laki / Male	39	49	49	68	78
2	Perempuan / Female	20	20	20	36	50
	Jumlah / Total	**59**	**69**	**69**	**104**	**128**

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN UNIT KERJA
EMPLOYEE COMPOSITION BY WORK UNIT

Di bawah ini disajikan demografi dan komposisi karyawan tetap berdasarkan unit kerja, tingkat pendidikan, status kepegawaian, kompetensi, serta jenis kelamin.

The following presents the demographics and composition of permanent employees based on work unit, education level, employment status, competency, and gender.

Unit Kerja / Work Unit	2021		2020	
	Jumlah / Total	Komposisi (%) / Composition (%)	Jumlah / Total	Komposisi (%) / Composition (%)
Kantor Pusat	54	42,19%	44	42,31%
KC Bandung	8	6,25%	7	6,73%
KC Surabaya	8	6,25%	8	7,69%
KC Medan	8	6,25%	7	6,73%
KC Palembang	6	4,69%	6	5,77%
KC Makassar	6	4,69%	5	4,81%
KC Semarang	6	4,69%	6	5,77%
KC Aceh	6	4,69%	5	4,81%

Unit Kerja / Work Unit	2021		2020	
	Jumlah / Total	Komposisi (%) / Composition (%)	Jumlah / Total	Komposisi (%) / Composition (%)
KC Mataram	5	3,91%	3	2,88%
KC Banjarmasin	4	3,13%	3	2,88%
KC Lampung	4	3,13%	3	2,88%
KC Balikpapan	4	3,13%	2	1,92%
KUP Pontianak	3	2,34%	2	1,92%
KUP Pekanbaru	3	2,34%	2	1,92%
KUP Padang	3	2,34%	1	0,96%
Jumlah/Total	**128**	**100,00%**	**104**	**100,00%**

Sebagian besar Karyawan Tetap ditempatkan di Unit Kantor Cabang, dengan komposisi sebesar 57,8% dari total karyawan tetap, yang mencerminkan fokus Perseroan pada penguatan layanan dan operasional di tingkat cabang.

The majority of Permanent Employees are assigned to Branch Office Units, accounting for 57.8% of the total permanent workforce, reflecting the Company's focus on strengthening service delivery and operational activities at the branch level. .

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
EMPLOYEE COMPOSITION BY EDUCATION LEVEL

Tingkat Pendidikan / Education Level	2021		2020	
	Jumlah / Total	Komposisi (%) / Composition (%)	Jumlah / Total	Komposisi (%) / Composition (%)
D3	8	6,25%	7	6,73%
S1/D4	110	85,94%	88	84,62%
S2	10	7,81%	9	8,65%
Jumlah/Total	**128**	**100,00%**	**104**	**100,00%**

Sebanyak 85,94% karyawan Perseroan di tahun 2020 memiliki latar belakang Strata-1 (S1)/diploma 4 (D4), tidak jauh berbeda dengan komposisi tahun 2020.

In 2021, 85.94% of the Company's employees held a Bachelor's degree (S1) or Diploma IV (D4), a proportion that is largely unchanged from 2020.

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN
EMPLOYEE COMPOSITION BY EMPLOYMENT STATUS

Status Kepegawaian / Gender	2021		2020	
	Jumlah / Total	Komposisi (%) / Gender	Jumlah / Gender	Komposisi (%) / Gender
Tetap	128	53,56%	104	60,82%
Tidak Tetap	111	46,44%	67	39,18%
Jumlah/Total	**239**	**100,00%**	**171**	**100,00%**

Berdasarkan status kepegawaian, komposisi karyawan Perseroan terdiri atas karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Karyawan tetap adalah karyawan yang bekerja secara tetap untuk jangka waktu tidak tertentu sedangkan karyawan tidak tetap merupakan karyawan yang bekerja untuk jangka waktu tertentu sesuai pada kebutuhan pada unit kerja/proyek terkait dimana para pihak menandatangani surat perjanjian kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja untuK Waktu Tertentu (PKWT). Di tahun 2021, jumlah karyawan tetap sebesar 53,56% dan karyawan tidak tetap sebesar 46,44%

Based on employment status, the Company's workforce consists of permanent and non-permanent employees. Permanent employees work on an ongoing basis for an indefinite period, while non-permanent employees are engaged for a fixed period according to the needs of the respective work unit or project, under a Fixed-Term Employment Agreement (PKWT). In 2021, permanent employees accounted for 53.56% of the workforce, while non-permanent employees comprised 46.44%.

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN JENJANG JABATAN

EMPLOYEE COMPOSITION BY POSITION

Jenjang Jabatan / Position	2021		2020	
	Jumlah / Total	Komposisi (%) Composition (%)	Jumlah / Total	Komposisi (%) Composition (%)
Kepala Divisi/SPI / SPI Head of Division/IAU	5	4,69%	6	42,31%
Kepala Cabang Kelas 1 Class 1 Branch Manager	5	3,91%	3	6,73%
Kepala Cabang Kelas 2 Class 2 Branch Manager	4	3,13%	2	7,69%
Kepala Cabang Kelas 3 Class 3 Branch Manager	6	4,69%	6	6,73%
Kepala KUP / Head of SO	0	0%	3	5,77%
Kepala Bagian / Section Head	25	19,53%	26	4,81%
Staff / Staff	76	59,38%	52	5,77%
Pelaksana / Executive	7	5,47%	6	4,81%
Jumlah / Total	**128**	**100,00%**	**104**	**4,81%**

Berdasarkan Jenjang Jabatan, komposisi karyawan Perseroan terdiri atas 4 (empat) jenjang jabatan. Jabatan yang paling mendominasi adalah staff dengan komposisi 59,38% dari total Karyawan

Based on position level, the Company categorizes employees into four levels. Staff positions represent the largest group, accounting for 59.38% of total employees.

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN KOMPETENSI

EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON GENDER/SEX

Kompetensi / Competency	2021		2020	
	Jumlah / Total	Komposisi (%) Composition (%)	Jumlah / Total	Komposisi (%) Composition (%)
Manajemen / Management	45	35,16%	46	44,23%
Non Manajemen / Non-Management	83	64,84%	58	55,77%
Jumlah / Total	**128**	**100%**	**104**	**100,00%**

Sebanyak 35,16% karyawan Perseroan di tahun 2021 merupakan karyawan manajemen, sedangkan 64,84% lainnya merupakan karyawan Non Manajemen yang bekerja pada berbagai fungsi pendukung dan/atau manajerial.

In 2021, 35.16% of the Company's employees were classified as management, while the remaining 64.84% were non-management employees working in various support and/or operational functions.

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN GENDER/JENIS KELAMIN
EMPLOYEE COMPOSITION BY GENDER

Jenis Kelamin Gender	2021		2020	
	Jumlah / Total	Persentase (%) Percentage (%)	Jumlah / Total	Persentase (%) Percentage (%)
1	78	60,94%	68	65,38%
2	50	39,06%	36	34,62%
1	128	100,00%	104	100,00%

Karyawan Perseroan didominasi oleh karyawan laki-laki dengan Komposisi sebesar 60,94% pada tahun 2020.

The Company's workforce in 2020 was predominantly male, with men representing 60.94% of total employees.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN
COMPETENCY DEVELOPMENT

Pendidikan dan pelatihan merupakan implementasi atas strategi dan kebijakan Perseroan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Melalui strategi ini, Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM secara efektif, efisien, dan memiliki dampak dan tujuan pembelajaran sesuai harapan yang ingin dicapai. Selain itu, Perseroan juga memiliki program pengembangan manajemen yang ditujukan bagi para calon pemimpin masa depan.

Education and training serve as long-term, sustainable implementations of the Company's strategies and policies. Through this approach, the Company remains committed to enhancing the competence and capability of its human resources effectively and efficiently, ensuring that training delivers meaningful impact and achieves the intended learning objectives. In addition, the Company provides a management development program designed to prepare future leaders.

Pelatihan dan pengembangan SDM Perseroan terdiri dari program soft-skill dan hard-skill. Dalam pelatihan soft- skill, Perseroan memberikan perhatian pemahaman dan pengertian core competencies masing-masing individu. Sementara, pelatihan hard-skill fokus pada kebutuhan dari masing-masing individu karyawan yang diselaraskan dari hasil penilaian kinerja dan kebutuhan departemen, organisasi, dan pengembangan individu.

The Company's HR training and development initiatives consist of both soft-skill and hard-skill programs. Soft-skill training emphasizes the understanding and strengthening of each individual's core competencies. Meanwhile, hard-skill training focuses on the specific needs of each employee, aligned with performance appraisal results as well as departmental, organizational, and individual development priorities.

Hingga akhir 2021, Perseroan telah berinvestasi sebesar Rp1.796.943.887 pada program pengembangan kompetensi karyawan. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp972.500.833. Pada tahun ini, Perseroan mencatatkan 214 hari pelatihan dengan 385 jam 24 menit jumlah jam pelatihan.

As of the end of 2021, the Company invested Rp1,796,943,887 in employee competency development programs, an increase from Rp972,500,833 in 2020. During the year, the Company recorded a total of 214 training days, equivalent to 385 hours and 24 minutes of training.

Secara rinci, program kompensi karyawan yang dilakukan Perseroan pada tahun 2021, antara lain sebagai berikut:

The detailed employee competency development programs implemented by the Company in 2021 are as follows:

Tanggal Date	Jenis Pelatihan Training Type	Tujuan Pelatihan Training Objective	Lokasi Location	Bentuk Pelatihan Training Form	Biaya Cost
03/03/2021	*14 th Annual Meeting & Awarding For Publict Relation Practitioners : Webminar PR is King Internal Communication is Princess (in Pandemic Multidimensuin Crisis)*	*Corporate Communication*	*Zoom Meet*	*Seminar*	
27/01/2021	3 Series Cross Director Of Business Talks Implementasi Core Values Adaptif dan Kolaboratif / 3 Series Cross Director of Business Talks Implementation of Core Values Adaptive and Collaborative	Lain-lain Other	*Zoom Meet*	Sosialisasi Familiarization	
02/02/2021	Aspek Administrasi dan Legal dalam Proses Kredit / Administrative and Legal Aspects of Credit Process	*Legal*	*Zoom Meet*	*Workshop*	1,500,000
23/01/2021	Dasar-dasar Reasuransi Reinsurance Fundamentals	Lain-lain Other	*Zoom Meet*	Pelatihan Training	485,123
04/02/2021	Eksekutif Strategi Memenangkan Perkara dalam Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Keadilan / Executive Strategy to Win Cases in Sharia Economic Disputes Based on Justice	*Legal*	*Zoom Meet*	*Seminar*	450,000

Tanggal Date	Jenis Pelatihan Training Type	Tujuan Pelatihan Training Objective	Lokasi Location	Bentuk Pelatihan Training Form	Biaya Cost
22/01/2021	Good Collector Good Deal: Strategi Penagihan Kredir yang tepat di Masa Pademi / Good Collector Good Deal: The Right Credit Collection Strategy during the Pandemic	Lain-lain Other	*Zoom Meet*	Pelatihan Training	1,000,000
08/03/2021	Kenaikan Gaji Berbasis Kinerja , Anggaran & Sundulan Performance-Based Salary Increase & Budget	HCM	*Zoom Meet*	Pelatihan Training	350,000
27/03/2021	Pembekalan Cakar Briefing	Keuangan	*Zoom Meet*	Pelatihan Training	-
10/04/2021	Menulis Opini Tanpa Pecah Ndase Training Opinion Writing Training	Corporate Communication	*Zoom Meet*	*Worskhop*	-
20/03/21-21/03/21	Pelatihan "For Human Resources Manager Training for Human Resource Managers	HCM	*Zoom Meet*	Pelatihan Training	999,000
27/01/2021	Peran Corporate Secretary Perusahaan Publik Roles of Corporate Secretary in Public Companies	Corporate Communication	*Zoom Meet*	Pelatihan Training	2,000,000
05/08/2021	Sharing sesion dalam rangka persiapan General Audit Laporang Keuangan tahun buku 2020 oleh KAP Sharing session in preparation for the General Audit of 2020 Financial Statements by PAF	Internal Audit	*Zoom Meet*	Sosialisasi Familiarization	-
08/02/2021- 12/02/2021	Sharing Session : Produk Penjaminan Syariah Sharing Session: Sharia Guarantee Products	Penjaminan	*Zoom Meet*	*Sharing Session*	-
08/03/2021	Skala Upah Wage Scale	HCM	*Zoom Meet*	Pelatihan Training	350,000
13/04/2021	Sosialialisasi POJK MRTI LJKNB Familiarization of POJK MRTI LJKNB	MR	*Zoom Meet*	Sosialisasi Familiarization	-
19/02/2021	Sosialisasi Peraturan KPK No.2 Tahun 2020 dan Pengisian e-LHKPN / Familiarization of KPK Regulation No.2 of 2020 and e-LHKPN Filling	Lain-lain	*Zoom Meet*	Sosialisasi Familiarization	-
26/02/2021	Strategi Pengelolaan Keuangan untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan / Financial Management Strategies to Improve Company Competitiveness	Tata Kelola	*Novotel*	Pelatihan Training	-
28/01/2021	*Virtual Seminar : Corporate Restructuring - Enhancing Economic & Social Value*	Lain-lain	*Zoom Meet*	Seminar	-
07/04/2021	Webminar "Financial Planner dan Sosialisasi Produk Bank Syariah Indonesia" / "Financial Planner and Familiarization of Bank Syariah Indonesia Products" Webinar	Lain-lain	*Zoom Meet*	Sosialisasi Familiarization	-
23/03/2021	*Webminar Figting With HC Emerging*	HCM	*Zoom Meet*	*Seminar*	-
20/04/2021	Webminar Mendorong Literasi dan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di Era Digital / Encouraging Consumer Literacy and Protection in the Financial Services Sector in the Digital Era Webinar	Lain-lain	*Zoom Meet*	*Seminar*	-
20/02/2021	Webminar Mens Rea dan Pertanggung Jawaban Pidana dalam Pengelolaan Korporasi / Mens Rea and Criminal Liability in Corporate Management Webinar	Tata Kelola	*Zoom Meet*	*Seminar*	-
08/04/2021	Webminar Webminar Awarenes SNI ISO 37001 dan Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada Sektor Jasa Keuangan / Familiarization of SNI ISO 37001 and Implementation of Anti-bribery Management System in the Financial Services Sector Webinar	Tata Kelola	*Zoom Meet*	*Seminar*	-
19/03/2021	*Workload Analysis*	HCM	*Zoom Meet*	Pelatihan Training	350,000
30/03/2021	Workshop Penggunaan Tool Sewa sesuai PSAK 73 Workshop on the Use of Lease Tool in accordance with SFAS 73	Keuangan	*Zoom Meet*	*Worskhop*	-
22/04/2021	Diskusi Publik Virtual terkait Draf Ekposur Standar Akuntansi Keuangan (Financial Accounting Standard) AAOIFI (FAS) "Financial Reporting for Zakah" / Virtual Public Discussion on the Exposure Draft of AAOIFI's Financial Accounting Standard (FAS) "Financial Reporting for Zakah"	Lain-lain	*Zoom Meet*	*Worskhop*	-

Tanggal Date	Jenis Pelatihan Training Type	Tujuan Pelatihan Training Objective	Lokasi Location	Bentuk Pelatihan Training Form	Biaya Cost
23/04/2021	Pembuatan Profil Resiko Perusahaan Asuransi yang baik dan benar / Preparing Insurance Company Risk Profile	MR	*Zoom Meet*	Seminar	300,000
27/04/2021	Webinar Persiapan Pelaksanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan Webinar on Preparation for the Implementation of the Job Loss Guarantee Program (JKP) of Employment Social Security	Lain-lain	*Zoom Meet*	Sosialisasi Familiarization	-
28/04/2021	Webminar Ekonomi Syariah "Penguatan Industri Ekonomi Syariah di Era Digitalisasi dan New Normal / Sharia Economics Webinar of "Strengthening the Sharia Economic Industry in the Era of Digitalization and New Normal	Lain-lain	*Zoom Meet*	Seminar	-
29/04/2021	TopiPeranan Penjaminan Syariah Dalam Kegiatan Ekspor Impor Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Syariah The Role of Sharia Guarantees in Import-Export Activities to Support Sharia Economic Recovery	Penjaminan	*Zoom Meet-Straming YC*	Seminar	-
29/04/2021	Unlocking The Power Of SMEs "Membangun Ekosistem dan Akses Keuangan Bagi UMKM / Unlocking the Power of SMEs "Building Ecosystems and Financial Access for SMEs"	Lain-lain	*Zoom Meet-Straming YC*	Seminar	-
06/05/2021	*Human Capital Investmen In Digital Era*	Lain-lain	*Zoom Meet-Straming YC*	Seminar	-
06/05/2021	Pemberitahuan Syarat dan Tata Cara Pelaporan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan yang mengalami PHK Notification of Terms and Procedures for Reporting Participation in the Health Insurance Program for Laid-Off Employees	Lain-lain	*Zoom Meet*	Sosialisasi Familiarization	-
08/05/21-09/05/21	Pemberitahuan Syarat dan Tata Cara Pelaporan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan yang mengalami PHK Notification of Terms and Procedures for Reporting Participation in the Health Insurance Program for Laid-Off Employees	Marketing	*Zoom Meet*	Training	2,450,000
20/05/2021	Pemberitahuan Syarat dan Tata Cara Pelaporan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan yang mengalami PHK Notification of Terms and Procedures for Reporting Participation in the Health Insurance Program for Laid-Off Employees	Lain-lain	*Zoom Meet*	Sosialisasi Familiarization	-
27/05/2021	Talent Management and Development BUMN SOE Talent Management and Development	Lain-lain	*Zoom Meet*	Webinar	-
02/06/2021	*Woman In Leadership*	Lain-lain	*Zoom Meet*	Webinar	-
11/06/2021	*Winning Stategies In Customer Experience*	Marketing	*Zoom Meet-Straming YC*	Webinar	-
16/06/2021	Sosialisasi Cetak Biru Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan 2021-2025 / Familiarization of Blueprint for Human Resource Development in the Financial Services Sector 2021-2025	HCM	*Zoom Meet*	Sosilialisasi	-
16/06/2021	Hidup Sehat dan Berpikir Positif di Masa Pademi Healthy Living and Positive Thinking in the Aging Period	Lain-lain	*Zoom Meet*	Webinar	-
16/06/2021	Indonesia Most Powerful Women & Indonesia Young Women Business Leaders 2021 Compassionate Leadership Di Era Pademi / Indonesia Most Powerful Women & Indonesia Young Women Business Leaders 2021 Compassionate Leadership during the Pandemic	Lain-lain	*Zoom Meet*	Webinar	-
24/06/2021	Zoominar & Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award-VI-2021	Corporate Communication	*Zoom Meet*	Webinar	-
24/06/2021	Zoominar & Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award-VI-2022	Corporate Communication	*Zoom Meet*	Webinar	-
26-27/06/2021	*Online Training Online Be Excellence With Excel*	Lain-lain	*Zoom Meet*	Webinar	1,125,000
30/06/2021	Webinar Transformasi Digital Bisnis Asuransi berbasis Governance Risk Managemen & Compliance / Webinar on Digital Transformation of Insurance Business based on Governance Risk Management & Compliance	MR	*Zoom Meet*	Webinar	400,000

Tanggal Date	Jenis Pelatihan Training Type	Tujuan Pelatihan Training Objective	Lokasi Location	Bentuk Pelatihan Training Form	Biaya Cost
26/06/21-22/08/21	Pelatihan PSAK For Profesional SFAS Training For Professionals	Keuangan	*Zoom Meet*	*Training*	4,950,000
01/07/2021	Online Roadshow Multifinance Syariah Batch #4 Raih Kemudahan Bermuamalah dengan multifianance syariah di era digital Online Roadshow of Multifinance Syariah Batch #4: Achieve Ease of Business with Multifinance Syariah in the Digital Era	Lain-lain	*Streaming YC*	*Webinar*	-
12/07/21-15/06/21	Sharing Session : Produk Penjaminan Syariah Sharing Session: Sharia Guarantee Products	Penjaminan	*Zoom Meet*	*Webinar*	-
14/07/21-16/07/21	Interpretasi KPKU BUMN Interpretation of SOE Performance Excellence Assessment Criteria	Lain-lain	*Zoom Meet*	*Webinar*	2,500,000
28/07/21 - 29/07/21	Critical Issue In Business Excellens 2013 - 2021	Lain-lain	*Zoom Meet*	*Webinar*	3,000,000
26/07/21 - 30/07/21	Pembekalan Calon Karyawan Juli 2021 New Employee Orientation July 2021	Tata Kelola	*Zoom Meet*	*Webinar*	-
30/07/2021	Aspek Syariah Sharia Aspects	Aspek Syariah	*Zoom Meet*	*Webinar*	-
31/07/2021	Pengenalan Perbankan Introduction to Banking	Lain-lain	*Zoom Meet*	*Webinar*	-
31/07/2021	Motivasi/Pengembangan Diri Motivation/Self-Development	Lain-lain	*Zoom Meet*	*Webinar*	33,000,000
05/08/2021	"Seminar Memahami Skema Sertfiakasi Bidang MSDM Berdasarkan SKKNI" Seminar on Understanding the HRM Certification Scheme Based on SKKNI	Lain-lain	*Zoom Meet*	*Webinar*	-
03/08/21 - 07/08/21	SUKSES Mulia Leadership Session Noble SUCCESS Leadership Session	Lain-lain	*Zoom Meet*	*Webinar*	
12/08/2021	Sistem Kearsipan Digital Digital Archiving System	Lain-lain	*Zoom Meet*	*Webinar*	1,500,000
12/08/21 - 13/08/21	*Workshop Form Home "Stategic Management For Growt"*	Lain-lain	*Zoom Meet*	*Webinar*	750,000
23/08/2021	program pemagangan GNIK GNIK Apprenticeship Program	Lain-lain	*Zoom Meet*	*Webinar*	-
30/08/21 - 11/09/21	QIA Tingkat Lanjutan Advanced QIA	Internal Audit	*Zoom Meet*	*Webinar*	15,000,000
30/08/21 - 11/09/21	QIA Tingkat Dasar Basic QIA	Internal Audit	*Zoom Meet*	*Webinar*	13,000,000
08/09/21 - 09/09/21	*Risk Based Auditing: The Approach For Aligning With Strategies*	Internal Audit	*Zoom Meet*	*Webinar*	2,500,000
20/09/2021 -21/09/2021	*Workshop Finance and Accounting for Non Finance and Accounting Internal Auditor (FANIA)*	Internal Audit	*Zoom Meet*	*Webinar*	2,000,000
16/09/2021	Optimalisasi Pemanfaatan Big Data pada Pengembangan Produk dan Jasa Keuangan Optimizing the Use of Big Data in the Development of Financial Products and Services	IT	*Zoom Meet*	*Webinar*	-
29/09/21-30/09/21	*Webminar Development Risk Intelligence*	Lain-lain	*Zoom Meet*	*Webinar*	2,082,500
29/09/2021	*Succes With Effective Comuniation*	Corporate Communication	*Zoom Meet*	*Webinar*	-
09/10/2021	Workshop Pra Ijtima Sanawi (Anual Meeting) DPS Tahun 2021 Bidang Pembiayaan, Penjaminan , Modal Ventura, Pegadaian dan Fintect Syariah Workshop on SSB Pre-Ijtima Sanawi (Annual Meeting) in 2021 in Financing, Guarantee, Venture Capital, Pawnshop and Sharia Fintech	Lain-lain	*Zoom Meet*	*Webinar*	500,000
21/10/21 - 22/10/24	Treasury Management: alternatif aktiva produktif dan optimalisasi pengelolaan likuiditas Treasury Management: Alternative Earning Assets and Optimizing Liquidity Management	Keuangan	*Zoom Meet*	*Webinar*	2,500,000
23/10/2021	*Insurance Customer Service, Comlaint Handling & Customer Protection*	Layanan	*Zoom Meet*	*Webinar*	400,000
30/10/21 & 01/11/21	*Refreshment CRGP*	MR	*Zoom Meet*	*Webinar*	-

Tanggal Date	Jenis Pelatihan Training Type	Tujuan Pelatihan Training Objective	Lokasi Location	Bentuk Pelatihan Training Form	Biaya Cost
30/10/21, 06/11/21 & 13/11/21	Training dan Sertifikasi CRGP CRGP Training and Certification	MR	*Zoom Meet*	*Webinar*	-
08/11/2021	Training CRMP CRMP Training	MR	*Zoom Meet*	*Webinar*	-
30/10/21, 06/11/21, 13/11/21 & 20/11/21	Training dan Sertifkasi CRMO CRMO Training and Certification	MR	*Zoom Meet*	*Webinar*	-
12/11/21 & 19/11/21	Pelatihan Cadangan Teknik Asuransi Insurance Engineering Reserve Training	MR	*Zoom Meet*	*Webinar*	-
24-25 Nov 2021	Treasury Managemnt: Alternatif Aktiva Produktif dan Optimalisasi Pengelolaan Likuiditas Treasury Management: Alternative Earning Assets and Optimizing Liquidity Management	Keuangan Finance	*Zoom Meet*	*Webinar*	2,500,000
24-25 Nov 2021	Penerapan Anti Money Laundry dalam mendukung GCG Implementation of Anti Money Laundry in Supporting GCG	Tata Kelola Governance	*Zoom Meet*	*Webinar*	2,500,000
19/11/2021	*Financial Resilience in Economic Turbulance Embracing Opportunities in Recovery Era*	MR	*Zoom Meet*	*Webinar*	-
29/11/2021	*9th BUMN Branding & Marketing Award 2021*	Penjaminan Guarantee	*Zoom Meet*	*Webinar*	-
02/12/2021	*Review Requirement of Actuarial Software*	Keuangan Finance	*Zoom Meet*	*Webinar*	-
03/12/2021	Human Capital & Performance Award 2021	HCM	*Zoom Meet*	*Webinar*	-
26-27 Nov 2021	Pelatihan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Services Procurement Construction Training	Lain-lain Others	*Zoom Meet*	*Webinar*	-
2-3 Des 2021	Webminar Ittima Sanawi (Annual Meeting) DPS Tahun 2021 Webinar on SSB Ittima Sanawi (Annual Meeting) in 2021	Lain-lain Others	*Zoom Meet*	*Webinar*	-
10/12/2021	Pelatiahan Penjaminan Customs Bond Customs Bond Guarantee Training	Penjaminan Guarantee	*Zoom Meet*	*Webinar*	-
15/12/2021	Pelatihan Dan Discusi Akuntansi Penjaminan Syariah Sharia Guarantee Accounting Training and Discussion	Keuangan Finance	*Zoom Meet*	*Webinar*	4,750,000
21-22 Desember 2021	*Project Management Fundamental - For Beginner and Intermediate Professionals (PMBOK v6 and IEEE Standards)*	Penjaminan Guarantee	*Zoom Meet*	*Webinar*	6,000,000
27-28 Desember 2021	*Fundamental IT Audit For Internal Auditor: Planning, Performing and Presenting*	IT	*Zoom Meet*	*Webinar*	5,000,000
26/12/2021	Sosial Media Analisis Social Media Analysis	Penjaminan Guarantee	*Zoom Meet*	*Webinar*	-
28/12/21-30/12/21	Advesity Quotient Building Karyawan Employee Adversity Quotient Building	HCM	*Zoom Meet*	*Pelatihan*	3,250,000

ROADMAP PENGEMBANGAN SDM
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT ROADMAP

Jenis Diklat Type of Training	BOD / BOC	DPS	Kepala Divisi / SPI / Kepala Cabang Date	Kepala KUP / Kabag Person in Charge	Staff / Pelaksana Additional Information	Total Additional Information
Aspek Managerial Managerial Aspect	-	-	18	17	1	36
Aspek Syariah Sharia Aspect	-	4	-	9	22	35
Corporate Communication	-	-	3	2	3	8
HCM	9	-	10	15	33	67
Internal Audit	-	-	1	1	2	4
Keuangan Finance	2	-	-	5	9	17
Lain-lain Others	-	-	2	2	11	15

Jenis Diklat Type of Training	BOD / BOC	DPS	Kepala Divisi / SPI / Kepala Cabang Date	Kepala KUP / Kabag Person in Charge	Staff / Pelaksana Additional Information	Total Additional Information
Layanan Service	-	-	-	-	1	1
Leadership	-	-	-	-	-	-
Legal	-	-	-	1	1	2
Marketing	1	-	-	-	1	2
MR	2	-	3	4	-	9
Penjaminan Guarantee	-	-	-	2	-	2
Tata Kelola Governance	1	-	1	2	1	5
IT	-	-	-	-	2	2
Jumlah Total	4	-	4	9	6	3

ROADMAP PENGEMBANGAN SDM
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT ROADMAP

No	Program/Proyek Pengembangan Development Program/Project	Tujuan/Output yang Diharapkan Expected Objectives/Outputs	Waktu Pelaksanaan Date	Penanggung Jawab Person in Charge	Keterangan Tambahan Additional Information
1	Mengelola Aspek Hukum Managing Legal Aspects	Meningkatkan kemampuan dalam memahami, menerapkan, dan mengawasi aspek hukum yang terkait operasional lembaga penjaminan sesuai regulasi yang berlaku. / Improve the ability to understand, implement, and monitor legal aspects related to the operations of guarantee institutions in accordance with applicable regulations.	Januari - Desember 2021 January - December 2021	Divisi SDM & Umum	-

No	Program/Proyek Pengembangan Development Program/Project	Tujuan/Output yang Diharapkan Expected Objectives/Outputs	Waktu Pelaksanaan Date	Penanggung Jawab Person in Charge	Keterangan Tambahan Additional Information
2	Mengelola Audit Internal Managing Internal Audit	Membekali peserta dengan keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi audit internal untuk memastikan kepatuhan, efektivitas, dan efisiensi proses bisnis. / Equip participants with the skills to plan, execute, and evaluate internal audits to ensure compliance, effectiveness, and efficiency of business processes.	Januari - Desember 2021 January - December 2021	Divisi SDM & Umum / General Affairs Division	-
3	Mengelola Investasi Managing Investments	Mengembangkan kompetensi dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi portofolio investasi untuk mencapai target imbal hasil dengan risiko terkendali. Develop competencies in planning, managing, and evaluating investment portfolios to achieve target returns with controlled risks.	Januari - Desember 2021 January - December 2021	Divisi SDM & Umum / General Affairs Division	-
4	Mengelola Klaim dan Subrogasi Penjaminan / Managing Underwriting Claims and Subrogation	Meningkatkan kemampuan dalam penanganan klaim dan subrogasi secara efektif, cepat, dan sesuai ketentuan hukum. / Improve the ability to handle claims and subrogation effectively, quickly, and in accordance with legal provisions.	Januari - Desember 2021 January - December 2021	Divisi SDM & Umum / General Affairs Division	-
5	Mengelola Likuiditas Managing Underwriting Claims and Subrogation	Membekali peserta dengan strategi dan teknik pengelolaan kas serta aset likuid untuk menjaga kemampuan memenuhi kewajiban keuangan perusahaan. / Equip participants with strategies and techniques for managing cash and liquid assets to maintain the ability to meet the company's financial obligations.	Januari - Desember 2021 January - December 2021	Divisi SDM & Umum / General Affairs Division	-
6	Mengelola Pemasaran Produk Penjaminan / Managing Guarantee Product Marketing	Mengembangkan keterampilan merancang dan menjalankan strategi pemasaran produk penjaminan yang efektif dan kompetitif. / Develop skills to design and execute effective and competitive underwriting product marketing strategies.	Januari - Desember 2021 January - December 2021	Divisi SDM & Umum / General Affairs Division	-
7	Mengelola Portofolio Penjaminan Managing Guarantee Portfolio	Meningkatkan kemampuan dalam mengelola komposisi portofolio penjaminan untuk mengoptimalkan kinerja dan meminimalkan risiko. / Improve the ability to manage the composition of the guarantee portfolio to optimize performance and minimize risk.	Januari - Desember 2021 January - December 2021	Divisi SDM & Umum / General Affairs Division	-
8	Mengelola Risiko Perusahaan Penjaminan / Managing Guarantee Company Risks	Membekali peserta dengan kemampuan mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang dihadapi perusahaan penjaminan. / Equip participants with the ability to identify, assess, and control the risks faced by guarantee companies.	Januari - Desember 2021 January - December 2021	Divisi SDM & Umum / General Affairs Division	-
9	Mengelola Sistem Informasi Managing Information Systems	Meningkatkan keterampilan dalam mengembangkan, mengelola, dan mengoptimalkan sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. / Improve skills in developing, managing, and optimizing information systems to support decision making.	Januari - Desember 2021 January - December 2021	Divisi SDM & Umum / General Affairs Division	-
10	Mengelola Sumber Daya Manusia di Lembaga Penjaminan Managing Human Resources in a Guarantee Institution	Mengembangkan kemampuan pengelolaan SDM untuk meningkatkan produktivitas, motivasi, dan retensi karyawan. / Develop HR management skills to improve employee productivity, motivation, and retention.	Januari - Desember 2021 January - December 2021	Divisi SDM & Umum / General Affairs Division	-
11	Mengelola Sumber Permodalan Managing Capital Sources	Membekali peserta dengan strategi memperoleh, mengelola, dan mengoptimalkan permodalan perusahaan penjaminan. / Equip participants with strategies to obtain, manage, and optimize the capital of guarantee companies.	Januari - Desember 2021 January - December 2021	Divisi SDM & Umum / General Affairs Division	-
12	Mengembangkan Produk Penjaminan / Developing Guarantee Products	Meningkatkan kemampuan inovasi dalam merancang dan meluncurkan produk penjaminan yang sesuai kebutuhan pasar. / Improve innovation capabilities in designing and launching guarantee products that meet market needs.	Januari - Desember 2021 January - December 2021	Divisi SDM & Umum / General Affairs Division	-
13	*Good Corporate Governance (GCG)*	Meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip GCG untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan perusahaan. / Improve the understanding and implementation of GCG principles to ensure transparency, accountability and sustainability of the Company.	Januari - Desember 2021 January - December 2021	Divisi SDM & Umum / General Affairs Division	-
14	Aspek Managerial / Managerial Aspect	Mengasah keterampilan manajerial dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya perusahaan. / Hone managerial skills in planning, organizing, directing, and controlling company resources.	Januari - Desember 2021 January - December 2021	Divisi SDM & Umum / General Affairs Division	-

No	Program/Proyek Pengembangan Development Program/Project	Tujuan/Output yang Diharapkan Expected Objectives/Outputs	Waktu Pelaksanaan Date	Penanggung Jawab Person in Charge	Keterangan Tambahan Additional Information
15	*Leadership*	Mengembangkan kemampuan kepemimpinan untuk memotivasi, mengarahkan, dan menginspirasi tim dalam mencapai tujuan perusahaan. / Develop leadership skills to motivate, direct, and inspire teams to achieve Company goals.	Januari - Desember 2021 January - December 2021	Divisi SDM & Umum / General Affairs Division	-
16	*Corporate Communication*	Meningkatkan keterampilan komunikasi korporat untuk membangun citra positif dan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. / Improve corporate communication skills to build a positive image and good relationships with stakeholders.	Januari - Desember 2021 January - December 2021	Divisi SDM & Umum / General Affairs Division	-
17	General Affair	Membekali peserta dengan keterampilan mengelola kegiatan umum, administrasi, dan layanan pendukung operasional perusahaan. / Equip participants with skills to manage general activities, administration, and operational support services of the Company.	Januari - Desember 2021 January - December 2021	Divisi SDM & Umum / General Affairs Division	-

ASPEK TATA KELOLA SDM
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

No	Aspek Tata Kelola SDM Human Resource Management Aspects	Deskripsi Pelaksanaan Tahun 2021 / Description of Implementation in 2021
1	Perencanaan SDM / Perencanaan SDM	
2	Rekrutmen Karyawan / Rekrutmen Karyawan	Seiring dengan beroperasi Perusahaan, Perusahaan telah menetapkan strategi untuk selalu menjaga kualitas sumber daya manusia dengan pengelolaan yang bertanggung jawab serta peningkatan kompetensi lewat pelatihan-pelatihan yang sesuai dan bermanfaat. Dalam upaya memastikan ketersediaan SDM yang kompeten, Perusahaan melakukan proses rekrutmen SDM. Dengan berpedoman pada Peraturan Direksi Nomor: 09/Per-Dir/IX/2014 tentang Pengadaan Karyawan PT Jamkrindo Syariah, berikut adalah beberapa kegiatan untuk rekrutmen SDM, antara lain: 1. Penentuan jumlah dan komposisi kebutuhan SDM sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta melakukan kerjasama dengan konsultan. 2. Melakukan kerjasama dengan konsultan yang profesional untuk pelaksanaan rekrutmen karyawan. 3. Pemberitahuan kepada pelamar, baik yang diterima maupun tidak diterima di perusahaan. 4. Perusahaan senantiasa berkomitmen untuk menunjang kesetaraan dalam menyeleksi SDM, dimana kesempatan yang sama diberikan kepada para pelamar untuk menjadi calon karyawan yang professional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender ataupun kondisi fisik. Pada posisi 31 Desember 2020, Perusahaan melakukan rekrutmen SDM sebanyak 30 orang untuk posisi staf sebanyak 29 orang dan kepala bagian umum sebanyak 1 orang As the Company operates, it has established a strategy to always maintain the quality of its human resources through responsible management and competency improvement through appropriate and beneficial training. In an effort to ensure the availability of competent human resources, the Company conducts a human resource recruitment process. Based on Board of Directors Regulation Number: 09/Per-Dir/IX/2014 concerning Employee Procurement at PT Jamkrindo Syariah, the following are several activities for human resource recruitment, including: 1. Determining the number and composition of human resource requirement in accordance with company needs and collaborating with consultants. 2. Collaborating with professional consultants to carry out employee recruitment. 3. Notifying applicants, both those who are accepted and those who are not accepted by the company. 4. The Company is committed to supporting equality in the selection of human resources, where equal opportunities are given to applicants to become professional employees without discrimination based on ethnicity, religion, race, class, gender, or physical condition. As of December 31, 2020, the company recruited 30 people, consisting of 29 staff members and 1 general manager
3	Kebijakan Remunerasi dan Pemberian Manfaat Kebijakan Remunerasi dan Pemberian Manfaat	Dalam rangka meningkatkan motivasi kinerja dan loyalitas Karyawan terhadap Perusahaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan Karyawan, Perusahaan menetapkan remunerasi Karyawan yang didasarkan atas hasil penilaian kinerja dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Pemberian remunerasi Karyawan Perusahaan telah disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk batas Upah Minimum Provinsi (UMP) dan peraturan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait lainnya. Remunerasi yang diberikan kepada Karyawan Perusahaan diantaranya gaji pokok, intensif prestasi serta berbagai tunjangan dan fasilitas, diantaranya: • Asuransi kesehatan • Tunjangan Jabatan • Tunjangan Hari Raya • Tunjangan Bonus Tahunan • Tunjangan Insentif Triwulanan • Tunjangan Komunikasi • Tunjangan Cuti

No	Aspek Tata Kelola SDM Human Resource Management Aspects	Deskripsi Pelaksanaan Tahun 2021 / Description of Implementation in 2021
		In order to increase employee motivation and loyalty to the Company while improving employee welfare, the Company determines employee remuneration based on performance assessments using predetermined indicators. The Company's employee remuneration is in accordance with applicable laws and regulations, including the Provincial Minimum Wage (UMP) and other relevant regulations of the Ministry of Manpower and Transmigration. The remuneration provided to Company employees includes basic salary, performance incentives, and various allowances and facilities, including: • Health insurance • Position allowance • Holiday allowance • Annual bonus allowance • Quarterly incentive allowance • Communication allowance • Leave allowance
5	Turnover Karyawan / Perencanaan SDM	Sepanjang tahun 2021, Perseroan mencatat dinamika jumlah karyawan yang cukup signifikan. Pada awal periode, jumlah karyawan tercatat sebanyak 104 orang. Selama tahun berjalan, Perseroan melakukan rekrutmen untuk mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan bisnis, dengan total karyawan baru yang masuk sebanyak 37 orang. Di sisi lain, terdapat 13 karyawan yang keluar karena berbagai alasan, sehingga tingkat turnover karyawan berada pada level 9,22%, yang masih dalam batas wajar untuk industri keuangan. Dengan adanya penambahan karyawan baru, jumlah karyawan Perseroan pada akhir tahun meningkat menjadi 128 orang. Rasio rekrutmen terhadap total karyawan mencapai 28,91%, mencerminkan komitmen Perseroan dalam memperkuat sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan implementasi strategi perusahaan. Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat karyawan yang diberikan teguran, sanksi, atau peringatan, yang menunjukkan penerapan disiplin kerja dan budaya perusahaan berjalan dengan baik. / Throughout 2021, the Company recorded significant dynamics in the number of employees. At the beginning of the period, the number of employees was recorded at 104 people. During the year, the Company recruited new employees to support its operational and business development needs, with a total of 37 new employees joining the Company. On the other hand, 13 employees left the Company for various reasons, resulting in an employee turnover rate of 9.22%, which is still within the normal range for the financial industry. With the addition of new employees, the number of employees at the end of the year increased to 128. The recruitment ratio to total employees reached 28.91%, reflecting the Company's commitment to strengthening its human resources to support business growth and the implementation of corporate strategies. Throughout 2021, no employees were given reprimands, sanctions, or warnings, indicating that work discipline and corporate culture were well implemented.
6	Pelatihan dan Pengembangan Karyawan Perencanaan SDM	Perseroan menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh seluruh karyawan di semua jenjang jabatan maupun fungsi. Secara umum, jenis dan bentuk pelatihan yang dilaksanakan oleh Perseroan dan diikuti seluruh karyawan adalah: pelatihan wajib, pelatihan bersertifikat, pelatihan Program Orientasi Teknis, dan pelatihan berkompetensi. Tujuan pelatihan dan pengembangan adalah mengembangkan sikap, mental dan keterampilan kompetensi, baik dari sisi keahlian (soft skill) maupun keterampilan (hard skill) SDM sehingga dapat menghadapi tantangan dalam pengembangan Perseroan di masa mendatang. Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan di Perseroan dilakukan secara aktif dan berkesinambungan demi menciptakan sumber daya manusia kompeten, berkualitas dan berkinerja tinggi. Dalam pelaksanaannya, Perseroan memberikan perlakuan yang sama dan setara kepada para karyawan untuk mendapatkan fasilitas serta kesempatan tumbuh dan berkembang bersama Perseroan. Hal ini berlaku untuk jenjang karir dan kesempatan mengikutiprogram pelatihan dan pendidikan yang dijalankan oleh Perseroan. Prinsip kesetaraan ini dijalankan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan sehingga karyawan termotivasi untuk memberikan potensi serta kemampuan terbaiknya bagi Perseroan dan pengguna jasa Perseroan. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 88 pelatihan yang telah diikuti oleh karyawan, berupa program pendidikan, pelatihan, seminar, dan workshop baik di dalam maupun di luar negeri. Total realisasi biaya pendidikan, pelatihan, seminar, dan workshop pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.020.525.000 Program pengembangan SDM yang diikuti karyawan adalah Pelatihan/ Diklat / Seminar / workshop. The Company organizes various education and training activities that are attended by all employees at all job levels and functions. In general, the types and forms of training conducted by the Company and attended by all employees are: mandatory training, certified training, Technical Orientation Program training, and competency training. The purpose of training and development is to develop attitudes, mentalities, and competency skills, both in terms of expertise (soft skills) and skills (hard skills) of human resources so that they can face challenges in the Company's future development. The Company's Education, Training, and Development Program is carried out actively and continuously in order to create competent, high-quality, and high-performing human resources. In its implementation, the Company provides equal treatment to all employees so that they have the same facilities and opportunities to grow and develop together with the Company. This applies to career paths and opportunities to participate in training and education programs run by the Company. This principle of equality is implemented to provide opportunities to all employees so that they are motivated to give their best potential and abilities to the Company and its service users. In 2021, there were 88 training programs attended by employees, in the form of education, training, seminars, and workshops both at home and abroad. The total cost of education, training, seminars, and workshops in 2021 was IDR 1,020,525,000. The human resource development programs participated in by employees were training/education/seminars/workshops.

No	Aspek Tata Kelola SDM Human Resource Management Aspects	Deskripsi Pelaksanaan Tahun 2021 / Description of Implementation in 2021
8	Hubungan Industrial / Perencanaan SDM	Dalam rangka memelihara hubungan yang baik antara karyawan dan manajemen, manajemen Perusahaan menghormati hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Selain itu penyaluran aspirasi karyawan yang baik dan sesuai dengan etika menjadi wujud kebebasan organisasi di Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. 19/Kep-Dir/VII/2016 / Kep-07/DK-Jamsyar/VIII/ 2015 tanggal 3 Agustus 2015. / In order to maintain good relations between employees and management, the Company's management respects the rights and obligations of employees in accordance with applicable laws and regulations. In addition, the proper and ethical channeling of employee aspirations is a manifestation of organizational freedom within the Company as stipulated in the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners No. 19/Kep-Dir/VII/2016 / Kep-07/DK-Jamsyar/VIII/ 2015 dated August 3, 2015.

STRUKTUR PEMEGANG SAHAM
SHAREHOLDER STRUCTURE

KEPEMILIKAN SAHAM JAMSYAR PER 31 DESEMBER 2021
SHARE OWNERSHIP OF JAMSYAR AS OF DECEMBER 31, 2021

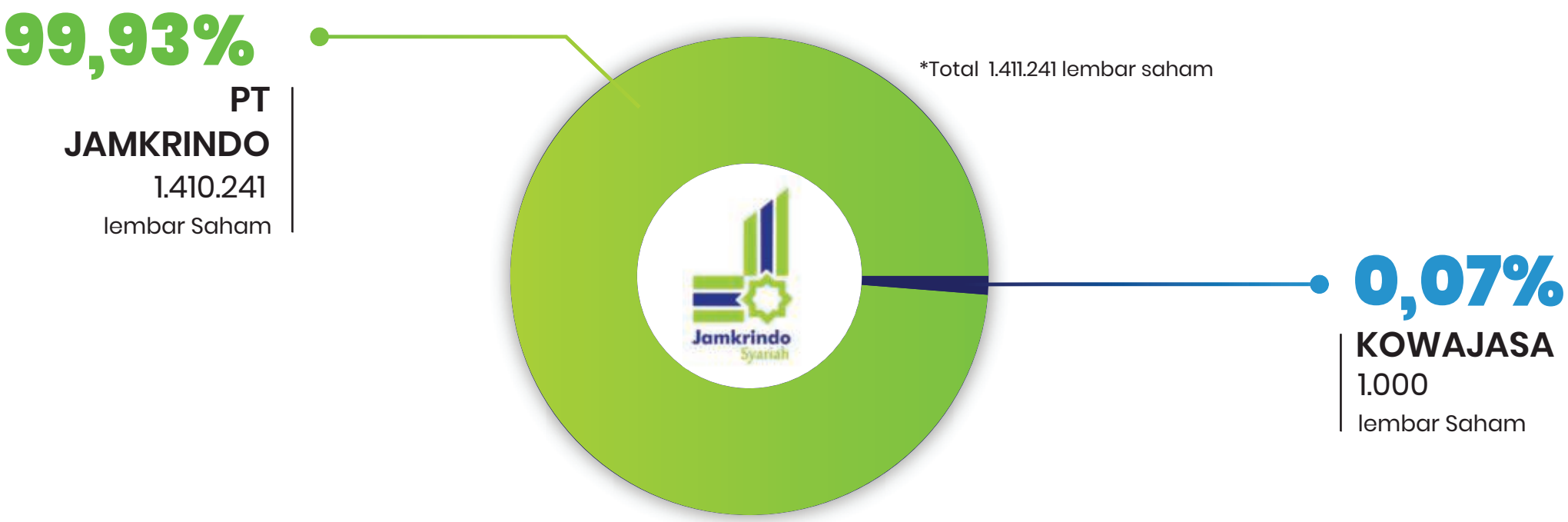

Kepemilikan saham PT Jamkrindo Syariah adalah PT Jamkrindo Syariah sebesar 99,93% atau sebanding dengan 1.410.241 lembar saham dan Koperasi Jamkrindo Sejahtera sebesar 0,07% atau sebanding dengan 1.000 lembar saham.

Hingga akhir tahun 2021, Jamsyar tidak menerbitkan saham untuk dimiliki oleh publik, dan tidak memperdagangkan sahamnya di bursa efek manapun.

The shareholders of PT Jamkrindo Syariah are PT Jamkrindo Syariah with 99.93% or equivalent to 1.410.241 shares and Koperasi Jamkrindo Sejahtera with 0.07% or equivalent to 1.000 sha res.

Until the end of 2021, Jamsyar did not issue any shares to be owned by the public, and did not trade its shares on any stock exchange.

INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI

SHARE OWNERSHIP INFORMATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, SHARIA SUPERVISORY BOARD AND BOARD OF DIRECTORS

Hingga 31 Desember 2021, baik Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah maupun Direksi tidak tercatat memiliki saham Perseroan.

As of December 31, 2021, neither the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board nor the Board of Directors were recorded as owning shares of the Company

Dewan Komisaris dan Direksi / Board of Commissioners and Directors	2021	2020
Dewan Komisaris / Board of Commissioners		
Aribowo	Nihil / N/A	Nihil / N/A
Wildan (Komisaris Independen / Independent Commissioner)	Nihil / N/A	Nihil / N/A
Muhammad Syakir Sula	Nihil / N/A	Nihil / N/A

Dewan Komisaris dan Direksi / Board of Commissioners and Directors	2021	2020
Dewan Pengawas Syariah / Sharia Supervisory Board		
Prof. Dr. Hasanuddin AF, M.A.	Nihil / N/A	Nihil / N/A
Abdul Aziem SH, M.Pd	Nihil / N/A	Nihil / N/A
Direksi / Board of Directors		
Gatot Suprabowo	Nihil / N/A	Nihil / N/A
Achmad Sonhadji	Nihil / N/A	Nihil / N/A
Endang Sri Winarni	Nihil / N/A	Nihil / N/A

URAIAN MENGENAI PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN / ATAU MANAJEMEN SENIOR BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DILAKSANAKAN PERSEROAN

DESCRIPTION OF SHARE OWNERSHIP PROGRAMS BY EMPLOYEES AND/OR SENIOR MANAGEMENT EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY IMPLEMENTED BY THE COMPANY

Hingga akhir tahun 2021, Perseroan tidak memiliki kebijakan terkait Program Kepemilikan Saham Karyawan atau Employee Stock Option (ESOP) dan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen atau Management Stock Option Program (MSOP). Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, serta harga exercise.

As of the end of 2021, the Company does not have an Employee Stock Option Program (ESOP) or a Management Stock Option Program (MSOP). Accordingly, there is no information to report regarding the number of ESOP/MSOP shares, their realization, program duration, eligibility requirements for employees and/or management, or exercise price.

DAFTAR ENTITAS ANAK, INVESTASI/PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA, SERTA INFORMASI TENTANG ENTITAS ASOSIASI
LIST OF SUBSIDIARIES, INVESTMENTS/SHAREHOLDINGS AND JOINT VENTURES, AND INFORMATION ON ASSOCIATES

ENTITAS ANAK
SUBSIDIARIES

Hingga akhir tahun 2021, Perseroan tidak memiliki entitas Anak.

As of the end of 2021, the Company did not have any subsidiaries.

VENTURA BERSAMA
JOINT VENTURE

Sepanjang tahun 2021, Perseroan tidak memiliki Ventura Bersama.

Throughout 2021, the Company did not have any Joint Ventures.

INFORMASI TENTANG ENTITAS ASOSIASI
INFORMATION ABOUT ASSOCIATED ENTITIES

Hingga akhir tahun 2021, Perseroan tercatat sebagai anggota aktif ASIPPINDO (Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia). Keikutsertaan ini menunjukkan komitmen Perseroan untuk berpartisipasi dalam pengembangan industri penjaminan nasional serta memastikan penerapan praktik terbaik sesuai standar asosiasi.

Until the end of 2021, the Company is recorded as an active member of ASIPPINDO (Indonesian Guarantee Companies Association). This participation shows the Company's commitment to participate in the development of the national guarantee industry and ensure the implementation of best practices in accordance with association standards.

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN
COMPANY GROUP STRUCTURE

Jamsyar merupakan satu-satunya anak perusahaan dari Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo Syariah) sebagai pemegang saham pengendali.

Jamsyar is the sole subsidiary of Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo Syariah), the Company's controlling shareholder.

INFORMASI SITUS WEB PERUSAHAAN
WEBSITE INFORMATION

Perseroan memiliki situs web sebagai sumber informasi mengenai kinerja yang disajikan secara transparan bagi investor serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Situs web Perusahaan dapat diakses melalui www.jamkrindosyariah.co.id. Pada situs web tersebut, seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi mengenai:

Perusahaan menyediakan akses informasi pada website resmi www.jamkrindosyariah.co.id yang menyediakan data seperti;

1. Laporan Tahunan;
2. Isi Kode Etik;
3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
4. Laporan keuangan tahunan terpisah (3 tahun terakhir);
5. Profil Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi; dan
6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, dan Unit Audit Internal.

The Company maintains an official website as a transparent source of performance-related information for investors and other stakeholders. The Company's website can be accessed at www.jamkrindosyariah.co.id. Through this platform:

stakeholders may obtain information such as;

1. Annual Report;
2. Code of Conduct;
3. General Meeting of Shareholders (GMS) information;
4. Separate annual financial statements (last 3 years);
5. Charters of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors; and

LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PERUSAHAAN
SUPPORTING PROFESSIONAL INSTITUTIONS

Nama dan Alamat Name and Address	Jenis & Bentuk Jasa Type & Form of Service	Periode Penugasan Assignment Period	Biaya Cost
Akuntan Publik / Public Accountant	Peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Pernyataan Standar Auditing No. 62 (Seksi 801) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Certain laws and regulations and internal controls based on State Financial Audit Standards issued by the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia and Statement of Auditing Standards No. 62 (Section 801) established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.	2021	-
Konsultan Hukum / Legal Consultant	Melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perusahaan yang disampaikan oleh Perusahaan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Conduct a legal examination of the facts regarding the Company submitted by the Company to the Legal Consultant independently in accordance with the norms or professional standards and code of ethics of legal consultants.	2021	-
Broker	PT Reasuransi Indonesia Utama (Reindo) menyediakan perlindungan reasuransi atas risiko penjaminan yang diterbitkan oleh PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Lingkup pekerjaannya meliputi penanggung sebagian risiko sesuai perjanjian reasuransi, memberikan dukungan kapasitas risiko untuk menjaga kesehatan keuangan Perseroan, serta berperan dalam pengelolaan klaim dan pembayaran sesuai ketentuan kontrak. Reindo juga mendukung penerapan manajemen risiko dan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga keberlangsungan usaha penjaminan tetap terjaga. PT Reasuransi Indonesia Utama (Reindo) provides reinsurance protection for guarantee risks issued by PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Its scope of work includes assuming part of the risk in accordance with the reinsurance agreement, providing risk capacity support to maintain the Company's financial health, and playing a role in claims management and payments in accordance with the terms of the contract. Reindo also supports the implementation of risk management and regulatory compliance, thereby ensuring the continuity of the guarantee business.		

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

PT Jamkrindo Syariah tetap berupaya untuk melakukan pengembangan strategi bisnis agar dapat terus tumbuh dan sustain dalam menghadapi tantangan bisnis kedepannya. Meningkatkan kapabilitas SDM yang unggul merupakan salah satu respon Perseroan agar dapat bersaing dan adaptif terhadap dinamika industri. Perseroan sangat menyadari bahwa pengelolaan SDM yang baik merupakan faktor yang sangat fundamental.

PT Jamkrindo Syariah continues to pursue business strategies that support sustainable growth while addressing future challenges. Strengthening the capabilities of its superior human resources is one of the Company's key responses to remaining competitive and adaptive amid industry dynamics. The Company fully recognizes that sound HR management is a fundamental factor in achieving long-term success.

Pengelolaan SDM yang efektif dan efisien diperlukan agar sejalan dengan visi dan misi Perseroan. Karena itu, Perseroan secara serius menempatkan SDM sebagai aset strategis dalam menjalankan kegiatan usaha. Perseroan menjalankan strategi pengelolaan SDM dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk merespon tantangan dan menyesuaikan diri terhadap tuntutan industri yang dinamis, termasuk di dalamnya menjadi yang terdepan dalam Perseroan.

Effective and efficient HR management is essential to aligning with the Company's vision and mission. Therefore, the Company positions HR as a strategic asset in all business activities. Its HR management strategy focuses on mobilizing its full capabilities to respond to challenges and adapt to the industry's evolving demands, ensuring that HR remains at the forefront of the Company's development.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas seluruh karyawan dalam lingkup bisnis yang semakin kompetitif, diharapkan Perseroan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk itu pembinaan SDM fokus terhadap peningkatan kompetensi, dengan melaksanakan program pelatihan dan pengembangan bagi para pekerja yang selaras dengan Business Plan. Perseroan juga memberikan kesempatan bagi pekerja untuk berkembang menjadi pribadi yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi.

To enhance employee capabilities in an increasingly competitive business environment, the Company aims to achieve its established targets. Accordingly, HR development focuses on strengthening competencies through training and development programs aligned with the Business Plan. The Company also provides opportunities for employees to grow into highly qualified individuals with strong competitiveness.

Perseroan secara berkelanjutan mendesain program pengembangan kompetensi karyawan dengan topik dan materi pembelajaran yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada karyawan cukup beragam mulai dari yang bersifat mandatori, pelatihan profesi tenaga ahli bersertifikasi maupun yang bersifat umum sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

The Company continuously designs employee competency development programs with varied topics and learning materials tailored to individual needs. The trainings offered range from mandatory sessions and professional certification programs to general training based on the Company's requirements.

Dengan adanya program pengembangan dan pelatihan karyawan yang efektif, manajemen sekaligus ingin memastikan bahwa Perseroan sudah didukung dengan ketersediaan SDM yang profesional, ahli di bidangnya, serta memiliki kompetensi dan memiliki integritas tinggi. Dengan begitu, posisi dan daya saing Perseroan diharapkan dapat semakin kuat dikancah industri yang digeluti Perseroan.

Through effective employee development and training programs, management seeks to ensure that the Company is supported by professional human resources who are experts in their fields and who demonstrate both competence and high integrity. In doing so, the Company's position and competitiveness in its industry are expected to grow stronger.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT POLICY

Pengelolaan SDM Perseroan mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang disesuaikan juga dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan best practice. Berbagai kebijakan terkait pengelolaan SDM Perusahaan, baik dari regulator maupun produk Perusahaan, yang diadopsi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang no. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Surat Keputusan Direksi terkait kebijakan dalam pengelolaan Sumber Daya manusia;
3. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021;
4. Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Tenaga kerja.

The Company's HR management refers to policies that are aligned with relevant laws, regulations, and best practices. The various policies adopted in relation to HR management, both from regulators and from internal Company provisions, include the following:

1. Law No. 11 of 2020 on Job Creation;
2. Board of Directors Decrees relating to human resource management policies;
3. Government Regulation No. 35 of 2021;
4. Company Regulations approved by the Ministry of Manpower.

Kebijakan pengelolaan SDM menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan perencanaan SDM, rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, penerapan reward and punishment sampai dengan program pensiun. Kebijakan tersebut berupa Peraturan Perusahaan yang dibuat oleh Perusahaan guna mengatur dan mengelola SDM perusahaan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

These HR management policies guide the implementation of HR planning, recruitment, competency development, performance appraisal, rewards and disciplinary measures, and retirement programs. The policy framework, established through the Company Regulations, serves to regulate and manage the Company's human resources in accordance with applicable laws and regulations.

STRUKTUR PENGELOLAAN SDM
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT STRUCTURE

Perseroan memiliki Divisi Human Resources (HR) sebagai pihak yang bertugas dan bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan kompetensi SDM Perseroan secara keseluruhan. Secara struktural, divisi ini bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan. Divisi ini berperan sebagai pelaku keseluruhan pengelolaan perencanaan, perencanaan kebijakan, hingga pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dan sasaran Perseroan.

The Company has a Human Resources (HR) Division that is responsible for managing the overall HR competencies within the organization. Structurally, this division reports directly to the Finance Director. It oversees HR planning, policy formulation, and human resource development to support the Company's goals and objectives.

TUGAS POKOK DIVISI SDM
MAIN DUTIES OF THE HUMAN RESOURCES DIVISION

TUGAS DIVISI PENGELOLA SDM
DUTIES OF HR MANAGEMENT DIVISION

1. Mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan karyawan agar memiliki kinerja yang baik dan efektif;
2. Mengembangkan strategi dan rencana untuk memenuhi kebutuhan pelatihan, dan mengatur pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan kompetensi;
3. Mengembangkan desain dan kurikulum program pelatihan dan pengembangan yang di butuhkan dalam memenuhi kebutuhan pemenuhan dan peningkatan kompetensi;
4. Melaksanakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi dan mengevaluasi hasil dari program tersebut;
5. Merencanakan budget dan jadwal program pelatihan dan pengembangan kompetensi.

1. Identify the competencies required for employees to achieve effective and high-quality performance;
2. Develop strategies and plans to meet training needs, and organize the implementation of training and competency development programs;
3. Design training curricula and development programs to ensure the fulfillment and enhancement of competencies;
4. Implement training and competency development programs and evaluate their outcomes;
5. Plan the budget and scheduling for training and competency development programs.

TANGGUNG JAWAB DIVISI PENGELOLA SDM
RESPONSIBILITIES OF HR MANAGEMENT DIVISION

1. Bertanggung jawab di dalam pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sumber daya manusia, termasuk pengembangan kualitasnya dengan berpedoman pada kebijaksanaan dan prosedur yang berlaku di Perusahaan;
2. Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pembinaan government dan industrial serta mempunyai kewajiban memelihara dan menjaga citra Perusahaan.

1. Manage and develop human resources through planning, implementation, and supervision of HR activities, including quality development, in accordance with applicable Company policies and procedures;
2. Oversee matters related to government and industry development activities, while maintaining and safeguarding the Company's reputation.

TATA KELOLA SDM
HUMAN RESOURCE GOVERNANCE

PERENCANAAN SDM
HR PLANNING

Perseroan memandang bahwa implementasi perencanaan SDM yang tepat dapat menghasilkan bibit-bibit pegawai unggul yang bertalenta dan professional. Hal ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari strategi bisnis Perseroan dalam merealisasikan visi, misi, dan target tahunan, serta untuk mendukung keberlangsungan bisnis Perseroan di masa mendatang, sehingga Perseroan harus memastikan ketersediaan pekerja sesuai dengan kebutuhan bisnis.

The Company believes that proper HR planning enables the development of talented and professional employees. This forms an integral part of the Company's business strategy in achieving its vision, mission, and annual targets, as well as supporting long-term business sustainability. Therefore, the Company must ensure the availability of employees whose competencies align with business needs.

Dalam menyusun perencanaan kebutuhan pekerja sesuai dengan RKAP yang berlaku, Perseroan melakukan koordinasi dengan Divisi HR. Hasil perencanaan SDM tersebut berupa daftar kebutuhan pekerja yang menjadi acuan pelaksanaan rekrutmen pekerja dan memudahkan proses penempatan pekerja menjadi lebih tepat.

In planning workforce requirements according to the applicable Corporate Work Plan and Budget (CWBP), the Company coordinates closely with the HR Division. The output of HR planning is a list of workforce needs that serves as a reference for the recruitment process and facilitates more accurate employee placement.

PENGELOLAAN SDM
HR MANAGEMENT

Dengan kiprahnya sebagai perusahaan publik yang mengusung layanan dan produk dengan kualitas internasional, Perseroan senantiasa berupaya melakukan perencanaan yang terarah dan terukur dalam pengembangan kualitas SDM yang dimilikinya sehingga keberadaan SDM dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai daya dukung untuk membangun dan memperkuat bisnis Perseroan secara berkelanjutan, sehingga Perseroan selalu menilai kebutuhan kapabilitas dan kapasitas tenaga kerja dengan melakukan analisa kebutuhan jumlah maupun keahlian tenaga kerja.

As a public company offering services and products of international quality, the Company continuously endeavors to carry out structured and measurable planning in developing the quality of its human resources. This ensures that the existing workforce can be fully optimized as a key driver in building and strengthening the Company's business sustainably. Accordingly, the Company regularly evaluates workforce capability and capacity by analyzing the required number of employees and the competencies needed.

Adapun faktor-faktur yang menjadi pertimbangan serta rujukan dalam analisa kebutuhan SDM antara lain anggaran kebutuhan SDM, strategi dan perkembangan Perseroan sesuai business plan, jumlah tenaga kerja yang pensiun, jenis pekerjaan dan ketersediaan finansial. Dalam menilai kebutuhan ini tenaga kerja dikelompokkan berdasarkan jabatan, pendidikan, usia, status kepegawaian dan tingkat pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja jangka pendek disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan formasi jabatan yang ada.

The factors considered in analyzing HR needs include the HR budget, the Company's strategy and development plans as outlined in the business plan, the number of retiring employees, job classifications, and financial capacity. In assessing these needs, the workforce is categorized by position, educational background, age, employment status, and qualification level. Short-term staffing needs are fulfilled in line with organizational requirements and existing position structures.

REKRUTMEN KARYAWAN
EMPLOYEE RECRUITMENT

Selaras dengan perkembangan industri dan kebutuhan organisasi, Perseroan merekrut SDM yang berkualitas, berintegritas tinggi, serta mampu beradaptasi pada perubahan dan memiliki kompetensi yang unggul.

In In line with industry developments and organizational needs, the Company recruits human resources who are qualified, possess high integrity, are adaptable to change, and demonstrate superior competencies.

Sistem rekrutmen Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, kewajaran, dan kesetaraan. Perseroan juga melihat kompetensi dan keahlian dari calon karyawan dalam proses seleksi kerja. Perseroan meyakini filosofi equal opportunity dan diversity oleh karena itu Perusahaan selalu membuka kesempatan bagi karyawan dari berbagai macam latar belakang untuk dapat bergabung bersama kami. Lebih lanjut, program rekrutmen yang dilaksanakan secara komprehensif, di mana setiap kandidat akan melalui proses evaluasi yang ketat, meliputi latar belakang, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, media sosial, dan kondisi kesehatan. Proses seleksi juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan kuantitas dan kompetensi yang dimiliki oleh kandidat.

The Company's recruitment system upholds the principles of transparency, fairness, and equal opportunity. Competence and expertise remain the primary considerations in the selection process. Embracing the philosophy of equal opportunity and diversity, the Company provides opportunities for candidates from various backgrounds. The recruitment program is implemented comprehensively, with each candidate undergoing a rigorous evaluation process that includes background checks, educational and employment history reviews, social media screening, and health assessments. The selection process is carried out in accordance with the required number of employees and the competency needs.

Perseroan menggunakan 2 (dua) jalur dalam pelaksanaan rekrutmen pekerja yaitu internal dan eksternal. Promosi dan mutasi pekerja menjadi bagian dari rekrutmen jalur internal.

The Company utilizes two recruitment channels: internal and external. Employee promotion and transfer fall under the internal recruitment channel.

Perseroan merekrut karyawan, mengangkat, menempatkan dan mempertahankan tenaga kerja baru dengan memperhatikan mekanisme sebagai berikut:

- Rekrutmen dan Pengangkatan: didasari atas kebutuhan organisasi sesuai dengan formasi yang ada.
- Penempatan: dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dalam tahapan tes dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

The Company recruits, appoints, places, and retains new employees based on the following mechanisms:

- Recruitment and Appointment: conducted according to organizational needs and existing position structures.
- Placement: carried out after candidates successfully pass the testing stages and complete a three-month probation period.

KEBIJAKAN REMUNERASI DAN PEMBERIAN MANFAAT BAGI KARYAWAN
REMUNERATION AND BENEFIT POLICY FOR EMPLOYEES

Perseroan menerapkan kompensasi dan benefit guna memotivasi dan mempertahankan karyawan-karyawan terbaik serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang berkualitas. Untuk mendukung strategi Perseroan dan mendorong kinerja yang optimal dan berkesinambungan, Perseroan menerapkan remunerasi berbasis kinerja dan risiko yang mengacu pada kinerja karyawan. Selain itu, Perseroan juga menerapkan struktur dan skala upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik Penetapan remunerasi juga dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dari tiap-tiap individu pegawai (based on performance) namun tetap memperhatikan kemampuan Perusahaan.

The Company provides compensation and benefits to motivate and retain the best employees while meeting the need for high-quality human resources. To support the Company's strategy and encourage optimal and sustainable performance, the Company applies performance- and risk-based remuneration. In addition, the Company implements a wage structure and scale aligned with applicable regulations. Remuneration is determined by considering individual employee performance while also ensuring alignment with the Company's financial capacity.

Adapun gaji yang diterima oleh karyawan dengan level terendah di Perseroan dipastikan sudah memenuhi standar ketentuan Upah Minimum Provinsi/ Kabupaten/Kota (UMP/K) yang berlaku di tiap-tiap wilayah operasional. Selain menawarkan pemberian gaji atau upah yang menarik, Perseroan juga memberikan manfaat lain-lain yang diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup setiap karyawan dengan mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, termasuk pemenuhan upah yang berlaku. antara lain:

The salary for the lowest-level employees complies with the applicable Provincial/Regency/City Minimum Wage in each operational area. Beyond competitive salaries, the Company also offers additional benefits designed to support and enhance employees' quality of life, referring to the provisions and regulations of the Ministry of Manpower and Transmigration, including the fulfillment of prevailing wage requirements, among others:

Uraian / Description	**Tetap** Permanent Employee(s)
Perawatan Pengobatan / Medical Treatment	V
Akomodasi & Transportasi / Accommodation & Transportation	V
Kematian & Perhelatan / Death & Celebration	V
Pensiun/Pesangon / Pension/Retirement	V
Cuti Tahunan / Annual Leave	V
BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan / BPJS Healthcare and Social Security	V
THR / Religious Holiday Allowance	V

SISTEM MANAJEMEN KINERJA
PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM

Penerapan sistem manajemen kinerja bertujuan untuk mengelola proses pencapaian kinerja pekerja secara objektif. Salah satu proses dalam sistem manajemen kinerja yaitu penilaian kinerja pekerja, Perseroan melaksanakan proses penilaian kinerja pekerja menggunakan Key indicator Performance yang telah ditetapkan.

The performance management system is intended to objectively manage the process of achieving employee performance. One of the key components of this system is employee performance assessment, which the Company carries out using predetermined Key Performance Indicators (KPIs).

REWARD DAN PUNISHMENT
REWARD AND PUNISHMENT

Pemberlakuan Reward dan Punishment bertujuan untuk meningkatkan kinerja setiap pekerja. Reward diberikan untuk memotivasi pekerja dalam mencapai target kinerja secara optimal sehingga mendukung pencapaian sasaran Perusahaan. Perseroan memberikan reward, baik bersifat finansial maupun non finansial, yang disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan. Insentif performansi adalah salah satu bentuk reward yang diberikan Perseroan kepada pekerja berdasarkan hasil Penilaian Performansi Bulanan dan pencapaian target Key Performance Indicator (KPI). Selain itu, Perseroan juga memberikan apresiasi bagi pekerja berkinerja istimewa berupa penghargaan khusus, bonus, tunjangan kinerja.

The Reward and Punishment system aims to enhance the performance of each employee. Rewards are provided to motivate employees to achieve optimal performance targets and to support the attainment of the Company's objectives. The Company grants both financial and non-financial rewards, adjusted to its capabilities. Performance incentives are given based on the results of the Monthly Performance Assessment and the achievement of KPI targets. In addition, the Company provides appreciation for employees who demonstrate exceptional performance, in the form of special awards, bonuses, and performance allowances.

Punishment diterapkan untuk mencegah segala bentuk pelanggaran dilakukan oleh pekerja sehingga hal-hal yang menghambat atau mengganggu kelancaran aktivitas kerja dapat dihindari. Perseroan memberikan punishment sesuai tingkat dan jenis sanksi yang berlaku. Jenis sanksi yang berlaku meliputi teguran, surat peringatan dan sanksi lainnya yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran.

Punishment is applied to prevent violations that could hinder or disrupt work activities. The Company imposes sanctions in accordance with the applicable levels and types of violations. These sanctions include verbal reprimands, written warnings, and other disciplinary measures aligned with the severity of the infraction.

Sepanjang tahun 2021, terdapat orang karyawan yang diberikan teguran/sanksi/peringatan.

Throughout 2021, a total of employees received reprimands, sanctions, or warnings.

KESETARAAN GENDER DAN KESEMPATAN KERJA
GENDER EQUALITY AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

Perseroan senantiasa menjunjung tinggi penerapan prinsip kesetaraan dan kesempatan yang sama serta tanpa adanya unsur diskriminasi dilakukan berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan. Hal tersebut bertujuan agar perusahaan dapat menghasilkan SDM yang berkualitas, mampu melaksanakan tanggung jawab, dan memberikan kinerja terbaik.

The Company consistently upholds the principles of equality and equal opportunity, ensuring that no form of discrimination is practiced in any employment-related activity. The Company aims to develop qualified human resources who are capable of fulfilling their responsibilities and delivering their best performance.

Perseroan memastikan bahwa setiap karyawan untuk memiliki hak yang sama dalam berkompetisi melalui pengembangan diri secara sehat. Perseroan berkomitmen memberikan kesempatan dan kesamaan hak kepada seluruh karyawan, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi, sejak proses rekrutmen, pengembangan kompetensi dan keahlian, serta penetapan jenjang karir dan remunerasi. Kebijakan yang ditempuh Perseroan sebagai upaya menciptakan dan menjaga hubungan kerja yang harmonis, sehat, dan sinergis, baik antar karyawan maupun karyawan dengan Perusahaan.

The Company guarantees that every employee has equal rights to compete and grow through healthy self-development. It is committed to providing equal opportunities to all employees—regardless of ethnicity, religion, race, social status, gender, or condition—from recruitment to competency development, expertise enhancement, career path determination, and remuneration. These policies are part of the Company's efforts to create and maintain harmonious, healthy, and synergistic working relationships among employees and between employees and the Company.

HUBUNGAN INDUSTRIAL
INDUSTRIAL RELATIONS

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan juga senantiasa menciptakan iklim kerja yang kondusif, terbuka, positif, dan progresif guna terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan adil. Oleh karenanya, Perseroan senantiasa melakukan pengelolaan hubungan industrial dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga mendorong peningkatan produktivitas Perseroan. Komunikasi antara Manajemen dan pekerja menjadi kunci terwujudnya hubungan industrial yang harmonis bagi kedua pihak.

In carrying out its operational activities, the Company strives to cultivate a conducive, open, positive, and progressive work climate that promotes harmonious, dynamic, and fair industrial relations. To this end, the Company continuously manages industrial relations by creating a productive work environment that supports improved corporate performance. Effective communication between Management and employees is key to realizing mutually beneficial industrial relations.

REALISASI PROGRAM KERJA SDM TAHUN 2021
REALIZATION OF HUMAN RESOURCES WORK PROGRAM IN 2021

Adapun realisasi program kerja SDM Perseroan tahun 2021, antara lain:
- Remunerasi
- Pengembangan SDM
- Budaya perusahaan

The implementation of the Company's HR work programs in 2021 included:
- Remuneration
- HR Development
- Corporate Culture

RENCANA FOKUS PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2022
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT FOCUS PLAN FOR 2022

Dalam menghadapi tahun 2022, Perseroan telah menyusun rencana dan strategi fokus dalam pengembangan SDM diantaranya :
- Manajemen Risiko Hukum dan Kepatuhan
- Pengadaan Barang dan Jasa
- Analisis Laporan Keuangan
- Akuntansi dan Perpajakan
- Manajemen Keuangan
- Financial Modelling
- Pengelolaan Piutang
- Dasar-dasar reasuransi/re-guarantee
- Penyusunan Anggaran
- Perencanaan Strategis
- KPKU
- Pelatihan tentang Performance Management Perusahaan
- Pelatihan Layanan Pengaduan
- Pelatihan Persiapan Masa Pensiun
- Public Relation

In In preparing for 2022, the Company has developed plans and strategies with a focus on HR development, including:
- Legal Risk Management and Compliance
- Procurement of Goods and Services
- Financial Statement Analysis
- Accounting and Taxation
- Financial Management
- Financial Modelling
- Accounts Receivable Management
- Basics of Reinsurance/Re-guarantee
- Budgeting
- Strategic Planning
- KPKU
- Training on Corporate Performance Management
- Complaint Handling Training
- Retirement Preparation Training
- Public Relations

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA TI
IT POLICY AND GOVERNANCE

Perseroan memandang penerapan Teknologi Informasi (TI) yang komprehensif pada seluruh lini dapat mendukung Perseroan untuk meraih kinerja yang optimal, mencapai tujuan serta target yang telah ditetapkan, serta mewujudkan visi Perseroan pada jangka panjang. Di tengah kemajuan zaman yang berkembang semakin pesat sekarang ini, tentu keberadaan infrastruktur TI yang kokoh bukan hanya sebagai fungsi pendukung akan tetapi sebagai enabler yang memegang peranan vital dalam mendukung pelaksanaan bisnis yang efektif dan efisien.Perseroan memiliki tata kelola TI yang menjadi dasar acuan dalam pengelolaan dan pengembangan TI perusahaan. Acuan tersebut bertujuan untuk memastikan penerapan TI telah sesuai dengan pencapaian tujuan perusahaan. Tata kelola TI terdiri dari struktur kebijakan dan kumpulan proses yang berguna untuk mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan TI, mengendalikan pengunaan terhadap sumber daya TI, dan mengelola risiko-risiko terkait TI.

The Company believes that the implementation of comprehensive Information Technology (IT) across all functions supports the achievement of optimal performance, enables the attainment of established goals and targets, and contributes to realizing the Company's long-term vision. In today's rapidly evolving environment, a solid IT infrastructure is no longer merely a supporting function but an essential enabler that plays a vital role in ensuring effective and efficient business operations. The Company has established IT governance that serves as the foundational reference for managing and developing corporate IT. This governance framework ensures that IT implementation aligns with corporate objectives. It consists of policy structures and a set of processes designed to optimize IT benefits and opportunities, control IT resource use, and manage IT-related risks.

Perkembangan dunia TI yang sangat dinamis harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM TI sehingga dapat menunjang perkembangan TI di dalam perusahaan. Untuk itu, Perseroan berkomitmen untuk terus memberikan pelatihan internal dan eksternal, khususnya pelatihan yang bersifat teknis yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki. Selain itu, Perseroan juga menjadikan self learning and information seeking sebagai kompetensi dasar bagi SDM TI.

The highly dynamic development of the IT landscape must be supported by continuous improvement in the quality and competence of IT personnel to ensure the Company's technology development runs effectively. For this reason, the Company remains committed to providing internal and external training, particularly technical training that aligns with corporate needs, to enhance the competencies of its IT human resources. In addition, the Company encourages self-learning and proactive information seeking as fundamental competencies for IT employees.

Untuk mencukupi kebutuhan SDM TI, Perseroan juga melakukan proses perekrutan SDM TI yang sesuai dengan kebutuhan seiring dengan perkembangan Perusahaan serta perkembangan TI. Perekrutan dilalui dengan seleksi yang ketat dan kompetitif guna memastikan calon karyawan yang direkrut memiliki level kompetensi sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

To meet IT staffing needs, the Company also conducts recruitment processes aligned with corporate and technological development. Recruitment is carried out through rigorous and competitive selection to ensure that prospective employees possess the required competency levels based on predetermined standards.

Seluruh area kerja Perseroan telah dilengkapi sistem teknologi informasi berupa Cloud Service, yang meliputi penyediaan platform, infrastruktur, dan jaringan. Melalui penyelenggaraan TI tersebut, maka keamanan dan kualitas layanan terhadap pengelolaan informasi semakin baik dan akurat, serta mampu menghasilkan layanan yang unggul dan kompetitif yang dapat memenuhi ekspektasi pelanggan.

All Company operational areas have been equipped with Cloud-based information technology systems, including platform, infrastructure, and network services. Through IT implementation, the security and quality of information management services continue to improve, becoming more accurate, reliable, and capable of producing superior and competitive services that meet customer expectations.

Perseroan secara berkala melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tata kelola TI agar tetap sesuai dengan arah strategi Perusahaan.

The Company regularly evaluates the implementation of IT governance policies to ensure alignment with its strategic direction.

ROADMAP PENGEMBANGAN TI
IT DEVELOPMENT ROADMAP

Mengacu pada Rencana Jangka Panjang Perusaahaan, arah pengembangan Jamkrindo Syariah dalam 5 tahun ke depan diintepretasikan dalam sebuah roadmap strategi sebagai berikut.

Referring to the Company's Long-Term Plan, the development direction of Jamkrindo Syariah over the next five years is outlined in the following strategic roadmap.

AGRESIF MERAIH PERTUMBUHAN BERKESINAMBUNGAN

PENGUATAN DAYA SAING	PENGEMBANGAN DAYA SAING	PERTUMBUHAN BERKESINAMBUNGAN
Perkuatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi informasi yang handal dan terintegrasi.	Pengembangan dan perluasan pasar penjaminan yang berbasis teknologi informasi serta perkuatan penerapan ERM	Pertumbuhan pendapatan & profit berkesinambungan
TAHAP I 2020 – 2021	TAHAP II 2022 – 2023	TAHAP III 2024 dst

TAHAP 1 PENGUATAN DAYA SAING (2020 – 2021)
STAGE 1 STRENGTHENING COMPETITIVENESS (2020 - 2021)

Tahapan awal roadmap strategi Jamkrindo Syariah adalah penguatan daya saing. Pada tahapan ini perusahaan melakukan berbagai inisiatif untuk penguatan kapasitas, efektivitas, efisiensi sumber daya dan penguatan teknologi informasi. Reorganisasi, penguatan jumlah dan kompetensi SDM, dan perbaikan sistem manajemen adalah beberapa program strategis yang dijalankan pada fase ini. Penguatan infrastruktur dan sistem informasi perusahaan juga menjadi tahapan penting pada tahap ini. Penguatan kapabilitas internal kemudian menjadi modal perusahaan untuk mengembangkan daya saing dan penguatan pasar dalam tahap berikutnya.

The initial stage of Jamkrindo Syariah's strategic roadmap focuses on strengthening competitiveness. At this stage, the Company implemented various initiatives to enhance capacity, improve effectiveness, increase resource efficiency, and strengthen information technology. Reorganization, enhancement of the number and competence of human resources, and improvements in management systems were among the key strategic programs carried out during this phase. The strengthening of corporate infrastructure and information systems also became an essential milestone. These efforts to build internal capabilities serve as the foundation for improving competitiveness and expanding market presence in the next phase.

REALISASI PROGRAM TI TAHUN 2021
REALIZATION OF IT PROGRAM IN 2021

Di era globalisasi serta revolusi industri yang terus berjalan menyesuaikan perkembangan zaman, teknologi memiliki peran sentral untuk meningkatkan daya saing yang kuat dalam kegiatan bisnis Perseroan. Perseroan terus mengimplementasikan TI dengan melakukan pemenuhan kebutuhan bisnis, pada saat yang sama tetap memperhatikan keamanan, keandalan, dan kapabilitas internal TI Perseroan. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan perkembangan bisnis yang lebih cepat, terpercaya dan dapat memberikan layanan kepada seluruh pemangku kepentingan.

In In an era of globalization and ongoing industrial transformation, technology plays a central role in enhancing competitiveness across the Company's business activities. The Company continues to implement IT initiatives that support business needs while maintaining security, reliability, and internal IT capability. These efforts are expected to optimize business development, enabling it to become faster, more reliable, and better equipped to deliver quality services to all stakeholders.

Perseroan mengimplementasikan realisasi program pengembangan TI yang mengacu pada kebijakan internal yang berlaku. Sejalan dengan corporate plan, pengembangan TI juga dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung kegiatan operasional bisnis Perseroan.

The Company continues to implement IT development programs in accordance with applicable internal policies. In line with the corporate plan, IT development is carried out on an ongoing basis to support business operations.

Adapun realisasi program TI di lingkungan Perseroan sepanjang tahun 2021. antara lain:

- Telah dilakukan pengembangan aplikasi belanja modal dan inventaris.
- Mengintegrasikan seluruh modul dengan aplikasi keuangan, dalam proses koordinasi dengan SDM & UMUM, serta penetapan user requirement request.
- Telah dilakukan maintenance pada perangkat workstation. Pengecekan office, windows, printer, access point.
- Telah dilakukan pembaruan battery UPS Data Center.
- Telah dilakukan pembaruan antivirus pada Server, PC dan Laptop karyawan.
- Telah dilakukan pengadaan antivirus yang akan digunakan seluruh unit kerja.
- Telah dilakukan sosialisasi pemasangan antivirus kepada seluruh unit kerja
- Telah dilakukan maintenace data backup, serta backup disimpan di storage dan hardisk.
- Telah dilakukan freeze data tiap bulan.
- Telah dilakukan backup data pada cloud.
- Telah dilakukan maintenance pada server DRC setiap bulan.
- Telah dilakukan pembuatan data center di gedung baru.

The implementation of IT development programs throughout 2021 included the following:

- Development of capital expenditure and inventory applications,
- Integration of all modules with financial applications, including coordination with HR & General divisions and determination of user requirements,
- Maintenance of workstation devices, including checks on Office software, Windows, printers, and access points,
- Replacement of Data Center UPS batteries,
- Antivirus updates on servers, PCs, and employee laptop,
- Procurement of antivirus solutions for all work units,
- Socialization of antivirus installation to all work units,
- Execution of data backup maintenance, with backups stored in storage systems and hard drives,
- Monthly data freeze activities,
- Cloud-based data backup,
- Monthly maintenance on the DRC server,
- Construction of a new data center at the new building.

RENCANA FOKUS PENGEMBANGAN TI TAHUN 2022
TI DEVELOPMENT FOCUS PLAN IN 2022

Rencana Pengembangan Teknologi Informasi ditahun 2022, antara lain:

- Pengembangan IT Security
- Optimalisasi Penjaminan secara host to host dengan mitra
- Optimalisasi Aplikasi Penjaminan.

The Information Technology Development Plan for 2022 includes:

- IT Security Development,
- Optimization of host-to-host underwriting with partners,
- Optimization of Guarantee Applications.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
This page is intentionally left blank

Syariah Jamkrindo

04

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Disscussion and Analysis

TINJAUAN UMUM PENJAMINAN
GUARANTEE OVERVIEW

Industri penjaminan syariah terus bertumbuh seiring dengan peningkatan yang terjadi pada kegiatan ekonomi syariah, khususnya pembiayaan syariah. Sebagai pendukung aktivitas ekonomi, terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penjaminan syariah yang pada gilirannya turut memperkuat ekonomi nasional.

The sharia guarantee industry continues to grow in line with the expansion of sharia economic activities, particularly sharia financing. As a supporting pillar of economic activity—especially for the micro, small, and medium enterprises (MSMEs) sector—sharia guarantees play an important role in strengthening the national economy.

Pada 2016, Pemerintah telah membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang merupakan perubahan dari KNKS dengan tujuan untuk peningkatan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah serta menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia.

In 2016, the Government established the National Committee for Sharia Economy and Finance (KNEKS), which evolved from KNKS, with the objective of accelerating the development of the sharia economic and financial ecosystem and positioning Indonesia as a Global Halal Hub.

Dibentuknya KNEKS menjadi salah satu titik cerah perkembangan industri penjaminan syariah karena dengan demikian, sektor usaha akan berkembang dan disinilah sinergi antara industri penjaminan syariah dengan perbankan syariah menjadi hal yang strategis.

The establishment of KNEKS marked a positive milestone for the development of the sharia guarantee industry, as it encourages broader business sector growth and strengthens the strategic synergy between sharia guarantee institutions and sharia banking.

Industri penjaminan di Indonesia selama tahun 2021 masih menghadapi dampak lanjutan dari pandemi COVID-19, tetapi menunjukkan tanda-tanda pemulihan seiring dengan perbaikan ekonomi nasional. Industri ini tetap berperan penting dalam mendukung akses pembiayaan, khususnya bagi UMKM, koperasi, dan sektor-sektor produktif lainnya.

Throughout 2021, the guarantee industry in Indonesia continued to face the prolonged impact of the COVID-19 pandemic, yet began to show signs of recovery in line with improvements in the national economy. The industry maintained its crucial role in supporting access to financing, particularly for MSMEs, cooperatives, and other productive sectors.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo), total penjaminan sepanjang 2021 mencapai sekitar Rp 446 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2020. Kenaikan ini ditopang oleh peran penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) dan penjaminan pembiayaan lainnya yang didorong oleh program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Based on data from the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesian Guarantee Companies Association (Asippindo), total guarantee volume in 2021 reached approximately Rp446 trillion, increasing compared to 2020. This growth was mainly driven by People's Business Credit (KUR) guarantees and other financing guarantees supported by the National Economic Recovery (PEN) program.

Di samping itu, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjaminan seperti Jamkrindo dan Askrindo memperluas penjaminan untuk kredit modal kerja bagi pelaku usaha terdampak COVID-19. Dan dari sisi KUR, penjaminan atas KUR Super Mikro (≤ Rp 10 juta) dan Mikro sangat dominan, dengan subsidi bunga dan tanpa agunan

In addition, the Government, through the Ministry of Finance and guarantee institutions such as Jamkrindo and Askrindo, expanded guarantees for working capital loans aimed at businesses affected by COVID-19. From the KUR segment, guarantees for Super Micro KUR (≤ Rp10 million) and Micro KUR dominated, supported by interest subsidies and without collateral requirements.

KUR Super Mikro adalah merupakan KUR yang utamanya ditujukan kepada pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau Ibu Rumah Tangga (IRT) yang menjalankan usaha produktif. Plafond maksimal KUR Super Mikro adalah sebesar Rp 10 juta.

Super Micro KUR is primarily intended for workers affected by layoffs and housewives operating productive businesses, with a maximum financing plafond of Rp10 million.

Dalam mendukung kegiatan penjaminan baik pembiayaan Modal Kerja PEN maupun KUR, Perseroan menyediakan kemudahan bagi Bank penyalur dalam proses penjaminan melalui penjaminan secara Host to Host maupun Web Application yang dapat diakses secara mudah, dengan tetap menyesuaikan kepada kesiapan dari Bank penyalur.

To support guarantee activities for both PEN working capital financing and KUR, the Company provides convenience for distributing banks through Host-to-Host and Web Application-based guarantee systems, which are easily accessible and tailored to the operational readiness of each partner bank.

Dari sisi kinerja keuangan, pada semester I 2021 Perseroan berhasil mencatat volume penjaminan sebesar Rp 55,08 triliun. Untuk aset per semester I naik menjadi Rp 1,77 triliun, dari posisi tutup buku 2020 sebesar Rp 1,57 triliun. Laba bersih yang dicapai Perseroan pada paruh pertama 2021 sebesar Rp 57,49 miliar

From a financial performance perspective, in the first semester of 2021, the Company recorded a guarantee volume of Rp21.70 trillion. Total assets increased to Rp1.77 trillion, up from Rp1.57 trillion at the end of 2020. The Company achieved a net profit of Rp57.49 billion during the first half of 2021.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL REVIEW BY BUSINESS SEGMENT

Penjaminan Syariah Pada Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan terungkap bahwa penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan. Jamsyar sebagai Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak dibidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan penjaminan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Sharia Guarantee Under Chapter I Article 1 of Law Number 1 of 2016 on Guarantees, a guarantee is defined as an activity of providing assurance by a Guarantor for the fulfillment of the financial obligations of the Guaranteed Party to the Beneficiary. As a Sharia Guarantee Company, Jamsyar is a legal entity operating in the financial sector whose main business activity is providing guarantees based on Sharia Principles. Sharia Principles refer to Islamic legal principles applied in guarantee activities in accordance with fatwas issued by authorized institutions in the field of sharia.

Kegiatan usaha Jamsyar berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan kemudian diperbaharui oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, maka kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan penjaminan syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Jamsyar's business activities are governed by Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 6/POJK.05/2014 on the Implementation of Guarantee Institution Business Activities, as amended by OJK Regulation Number 2/POJK.05/2017. Under these regulations, a Guarantee Company or Sharia Guarantee Company is defined as a legal entity operating in the financial sector whose primary business is providing sharia guarantees as stipulated in Law Number 1 of 2016 on Guarantees.

DSN MUI mengeluarkan fatwa tentang Penjaminan Syariah Nomor: 74/DSN-MUI/I/2009 Tentang Penjaminan Syariah,
dimana definisi Penjaminan Syariah adalah penjaminan antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah. Akad yang digunakan dalam Penjaminan Syariah adalah Kafalah bil Ujroh dengan ketentuan:

- Obyek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian dari:
  1. Kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi syariah.
  2. Hal lain yang dapat dijamin berdasarkan prinsip syariah.
- Pernyataan Ijab & Qobul harus dinyatakan para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (Akad).
- Besaran fee harus ditetapkan dalam Akad berdasarkan kesepakatan.
- Kafalah bil Ujroh bersikap mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak

The National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) issued Fatwa Number 74/DSN-MUI/I/2009 on Sharia Guarantees, which defines sharia guarantee as a guarantee arrangement between parties based on sharia principles. The contract used in sharia guarantee is Kafalah bil Ujrah, subject to the following provisions:
The guaranteed object may include all or part of:
payment obligations (dayn) arising from sharia transactions; and
other matters that may be guaranteed in accordance with sharia principles.
The ijab and qabul (offer and acceptance) must be expressly stated by the parties to demonstrate their intent to enter into the contract (akad).
The fee (ujrah) must be determined in the contract based on mutual agreement.
Kafalah bil Ujrah is binding and may not be unilaterally revoked.

Prinsip-prinsip Transaksi Syariah yang membedakan dengan Transaksi konvensional antara lain adalah:

- Penjaminan Syariah tidak boleh digunakan untuk menjamin transaksi dan obyek yang tidak sesuai dengan syariah.
- Pihak terjamin harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
- Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.
- Dalam hal penjaminan dilakukan oleh bank syariah, maka bank dapat meminta jaminan secara keseluruhan, sebagian, atau menggunakan wa'ad line facility.
- Dalam hal penjaminan dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah, maka pembayaran klaim penjaminan tidak boleh diambil dari dana tabarru' karena bukan kegiatan asuransi syariah.
- Dalam hal terjadi pembayaran klaim penjaminan, maka pihak penjamin berhak menagih kepada pihak terjamin sebesar pembayaran klaim atau melepaskan haknya.
- Tidak boleh memperjualbelikan hak tagih yang timbul dari poin f.
- Penjaminan pada pembiayaan atau akad yang berbasis bagi hasil hanya boleh dilakukan pada nilai pokok (ra'sul maal).
- Penjaminan syariah boleh dilakukan oleh bank syariah, asuransi syariah, lembaga penjaminan syariah, dan LKS lainnya.
- Penjaminan dapat dilakukan -antara lain- atas: kemampuan bayar, kemampuan penyelesaian kualitas dan kuantitas obyek pembiayaan atau pekerjaan.

The key principles of Sharia Transactions that distinguish them from conventional transactions include the following:

- Sharia guarantees may not be used to guarantee transactions or objects that are not compliant with sharia principles.
  The guaranteed party must have the financial capacity to fulfill obligations when due.
- No facilities may be provided that contradict sharia principles.
  If the guarantee is provided by a sharia bank, the bank may require full or partial collateral, or apply a wa'ad line facility.
- If the guarantee is provided by a sharia insurance company, claim payments may not be sourced from tabarru' funds, as guarantee activities are not sharia insurance activities.
- In the event of a guarantee claim payment, the guarantor has the right to recover the claim amount from the guaranteed party or waive such right.
- Receivables arising from such recovery rights may not be traded.
  Guarantees for profit-sharing-based financing or contracts may only cover the principal amount (ra'sul maal).
  Sharia guarantees may be provided by sharia banks, sharia insurance companies, sharia guarantee institutions, and other Islamic financial institutions.
- Guarantees may be provided, among others, for payment capability, as well as the ability to complete the quality and quantity of financed objects or works.

KEGIATAN USAHA JAMSYAR
JAMSYAR BUSINESS ACTIVITIES

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perusahaan sebagaimana disebutkan pada Akta Pendirian Jamsyar No. 68 pasal 3 tanggal 19 September2014 adalah sebagai berikut:t :

1. Penjaminan atas Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang disalurkan oleh LembagaKeuangan dan di luar Lembaga Keuangan;
2. Penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial atau pembiayaan atau pinjaman berdasarkan Prinsip Syariah baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang disalurkan antara lain oleh Koperasi Simpan Pinjam, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, antara lain Baitul Maal Wa Tamwil (BMT),Koperasi Jasa Keuangan Syariah, koperasi lainnya yang menjalankan usaha dengan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung (channeling maupun executing);
3. Penjaminan atas Pembiayaan atau Pinjaman berdasarkan Prinsip Syariah program Kemitraan yang disalurkan oleh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan atau
4. Penjaminan atas Surat Utang;
5. Penjaminan Anjak Piutang/Factoring Syariah;
6. Penjaminan Transaksi Dagang;
7. Benjaminan Distribusi;
8. Penjaminan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Surety Bond);
9. Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi);
10. Penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
11. Penjaminan Letter of Credit (L/C);
12. Penjaminan Kepabeanan (Customs Bond);
13. Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan Syariah; dan
14. Penyediaan informasi/database Terjamin terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan.

1. The business activities carried out by the Company, as stated in Jamsyar's Deed of Establishment No. 68 Article 3 dated 19 September 2014, are as follows:
   Guarantees for financing based on Sharia Principles provided by financial institutions and non-financial institutions;
   Guarantees for the fulfillment of financial obligations, financing, or loans based on Sharia Principles for individuals, business entities, limited liability companies, business units of foundations, cooperatives, and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), distributed, among others, through Savings and Loan Cooperatives, Sharia Microfinance Institutions such as Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Sharia Financial Services Cooperatives, and other cooperatives operating under Sharia Principles, either directly or indirectly
   Guarantees for Sharia-based financing or loans under Partnership Programs distributed by State-Owned Enterprises as part of the Partnership and Community Development Program (PKBL);
   Guarantees for debt securities;
   Sharia receivables financing / factoring guarantees;
   Trade transaction guarantees;
   Distribution guarantees;
   Guarantees for the procurement of goods and/or services (Surety Bonds);
   Bank guarantee coverage (Counter Bank Guarantees);
   Guarantees for Domestic Documentary Letters of Credit (SKBDN);
   Guarantees for Letters of Credit (L/C);
   Customs guarantees (Customs Bonds);
   Management consulting services related to Sharia guarantee business activities; and
   Provision of information and/or databases on guaranteed parties in relation to Sharia guarantee business activities.

MEKANISME PENJAMINAN SYARIAH
SHARIA GUARANTEE MECHANISM

Dalam menjalankan proses penjaminan syariah, Jamsyar selalu menerapkan mekanisme dan alur operasi yang transparan serta sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas bisnis sesuai dengan kepentingan yang melibatkan, yaitu Badan usaha penyalur pembiayaan atau yang menerima jaminan yang disebut Penerima Jaminan (Makfuul Lahu), debitur yang menerima pembiayaan/jaminan disebut Terjamin (makfuul 'anhu), dan Perusahaan Penjamin pembiayaan/pemberi jaminan disebut Penjamin (Kafiil).

Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Adapun mekanisme serta alur operasi penjaminan sebagai berikut:

In carrying out the sharia guarantee process, Jamsyar consistently applies transparent mechanisms and operational workflows as guidelines for conducting business activities in accordance with the interests of the parties involved. These parties include the financing institution or guarantee recipient, referred to as the Beneficiary (Makfuul Lahu); the debtor receiving the financing/guarantee, referred to as the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu); and the financing guarantee company or guarantor, referred to as the Guarantor (Kafiil).

The Guarantor is the party that provides guarantees as stipulated under Law Number 1 of 2016 on Guarantees.

The guarantee mechanism and operational workflow are as follows:

PROSES BISNIS PENJAMINAN SYARIAH
SHARIA GUARANTEE BUSINESS PROCESS

Proses Penjaminan Pembiayaan melibatkan sekurang-sekurangnya tiga pihak, yaitu:
- Badan usaha pemberi pembiayaan yang di dalam hal ini disebut Penerima Jabatan (Makfuul Lahu)
- Debitur Pembiayaan yang dalam hal ini disebut Terjamin (Makfuul Anhu)
- Perusahaan Penjamin Pembiayaan yang dalam hal ini disebut Penjamin (Kafiil)

Mekanisme Proses Penjamin dibagi menjadi dua yaitu:
- Penjaminan Langsung
- Penjaminan Tidak Langsung

- The Financing Guarantee Process involves at least three parties, namely:
  The financing provider, hereinafter referred to as the Beneficiary (Makfuul Lahu);
  The financing debtor, hereinafter referred to as the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu); and
  The financing guarantee company, hereinafter referred to as the Guarantor (Kafiil).

- The guarantee process mechanism is divided into two types:
  Direct Guarantee; and
  Indirect Guarantee.

PERBEDAAN PENJAMINAN LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG DIFFERENCES BETWEEN DIRECT AND INDIRECT GUARANTEES	
PENJAMINAN LANGSUNG Direct Guarantee	**PENJAMINAN TIDAK LANGSUNG** Indirect Guarantee
Calon Terjamin melakukan permohonan langsung kepada Penjamin The prospective Guaranteed Party submits an application directly to the Guarantor.	Permohonan penjaminan melalui Penerima Jaminan The guarantee application is submitted through the Beneficiary.
Tidak harus ada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Penjamin dengan Penerima Jaminan There is no mandatory Cooperation Agreement (PKS) between the Guarantor and the Beneficiary.	Terdapat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Penjamin dengan Penerima Jamninan A Cooperation Agreement (PKS) exists between the Guarantor and the Beneficiary.
IJK dibayarkan secara langsung oleh Terjamin kepada Penjamin The Guarantee Fee (IJK) is paid directly by the Guaranteed Party to the Guarantor.	IJK dibayarkan oleh Terjamin melaui Penerima Jaminan The Guarantee Fee (IJK) is paid by the Guaranteed Party through the Beneficiary.
Analisa terhadap Calon Terjamin dapat dilakukan secara simultan oleh Penjamin dan Penerima Penjamin The analysis of the prospective Guaranteed Party may be conducted simultaneously by the Guarantor and the Beneficiary.	Analisa terhadap Calon Terjamin dilakukan oleh Penerima Jaminan terlebih dahulu. Analisa dilakukan Penjamin terhadap Calon Terjamin dituntut cepat The analysis of the prospective Guaranteed Party is initially conducted by the Beneficiary. The Guarantor's analysis is required to be completed within a short timeframe.
Penjamin telah mengenal Calon Terjamin, sehingga Lembaga Penjamin berfungsi sebagai lembaga yang memberikan "Pasar Pembiayaan" bagi Perbankan/Lembaga keuangan lainnya The Guarantor already has sufficient knowledge of the prospective Guaranteed Party; therefore, the guarantee institution also functions as a financing market enabler for banks and other financial institutions.	Lembaga Penjamin berfungsi sebagai Pelengkap Pembiayaan karena kebutuhan jaminan pembiayaan biasanya hal terakhir yang masih belum dimiliki untuk pemenuhan persyaratan pembiayaan The Guarantee Institution functions as a financing complement, as guarantee requirements are typically the final component needed to fulfill financing eligibility.

1. Proses 1
   - Terjamin (Makfuul 'Anhu) mengajukan permohonan Pembiayaan/ Penjaminan.
   - Terjamin (Makfuul 'Anhu) mengajukan persyaratan pengajuan Pembiayaan/ Penjaminan.
   - Terjamin (Makfuul 'Anhu) memenuhi kewajiban Pembiayaan/ Penjaminan yang ditetapkan oleh Penerima Jaminan (Makfuul Lahu)
2. Proses 2
   - Terjamin (Makfuul 'Anhu) mengajukan permohonan Kafalah Penjaminan secara langsung kepada Penjamin (Kafiil) – Pola Langsung Terjamin (Makfuul 'Anhu) mengajukan Kafâlah permohonan Pembiayaan/Penjaminan melalui Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) – Pola Tidak Langsung
3. Proses 3
   - Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) mengajukan permohonan Penjaminan
   - Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) menyampaikan laporan nominative Pembiayaan secara periodik.
   - Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) menyampaikan angsuran piutang subrogasi dalam hal terdapat angsuran dari Terjamin (Makfuul 'Anhu).

- Process 1
  The Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) submits an application for Financing/Guarantee.The Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) submits the required documents and requirements for the Financing/ Guarantee \application.The Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) fulfills all Financing/Guarantee obligations as stipulated by the Beneficiary (Makfuul Lahu).
- Process 2
  The Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) submits a Kafalah Guarantee application directly to the Guarantor (Kafiil) under the Direct Scheme.
  The Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) submits a Kafalah Guarantee
- Process 3
  The Beneficiary (Makfuul Lahu) submits a Guarantee application.
  The Beneficiary (Makfuul Lahu) submits periodic nominative reports on the financed portfolio.
  The Beneficiary (Makfuul Lahu) submits installments of subrogated receivables, if any installments are received from the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu).

4. Proses 4a
   - Jamsyar memberikan persetujuan penjaminan dan menerbitkan Sertifikat Kafalah kepada Penerima Jaminan (Makfuul Lahu).
   - Jamsyar membayar klaim apabila Pembiayaan mengalami kemacetan sesuai kriteria Bank Indonesia sepanjang semua persyaratan klaim terpenuhi.
5. Proses 4b
   - Jamsyar menjamin Pembiayaan dan/atau Penjaminan Pekerjaan Terjamin (Makfuul 'Anhu) yang dinilai layak
6. Proses 5
   - Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) menyetujui dan mencairkan Pembiayaan kepada Terjamin (Makfuul 'Anhu).
   - Penerima Jaminan (Makfûl Lahu) menerima dan melakukan angsuran Pembiayaan Terjamin (Makfuul 'Anhu).

- Process 4a
  Jamsyar grants the guarantee approval and issues the Kafalah Certificate to the Beneficiary (Makfuul Lahu).
  Jamsyar settles the claim in the event the financing becomes non-performing, in accordance with Bank Indonesia criteria, provided that all claim requirements are fulfilled.
- Process 4b
  Jamsyar provides guarantees for the Financing and/or Work of the Guaranteed (Makfuul 'Anhu) that is assessed as eligible.
  Process 5
  The Beneficiary (Makfuul Lahu) approves and disburses the Financing to the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu).
  The Beneficiary (Makfuul Lahu) receives and administers the installment payments of the financing from the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu).

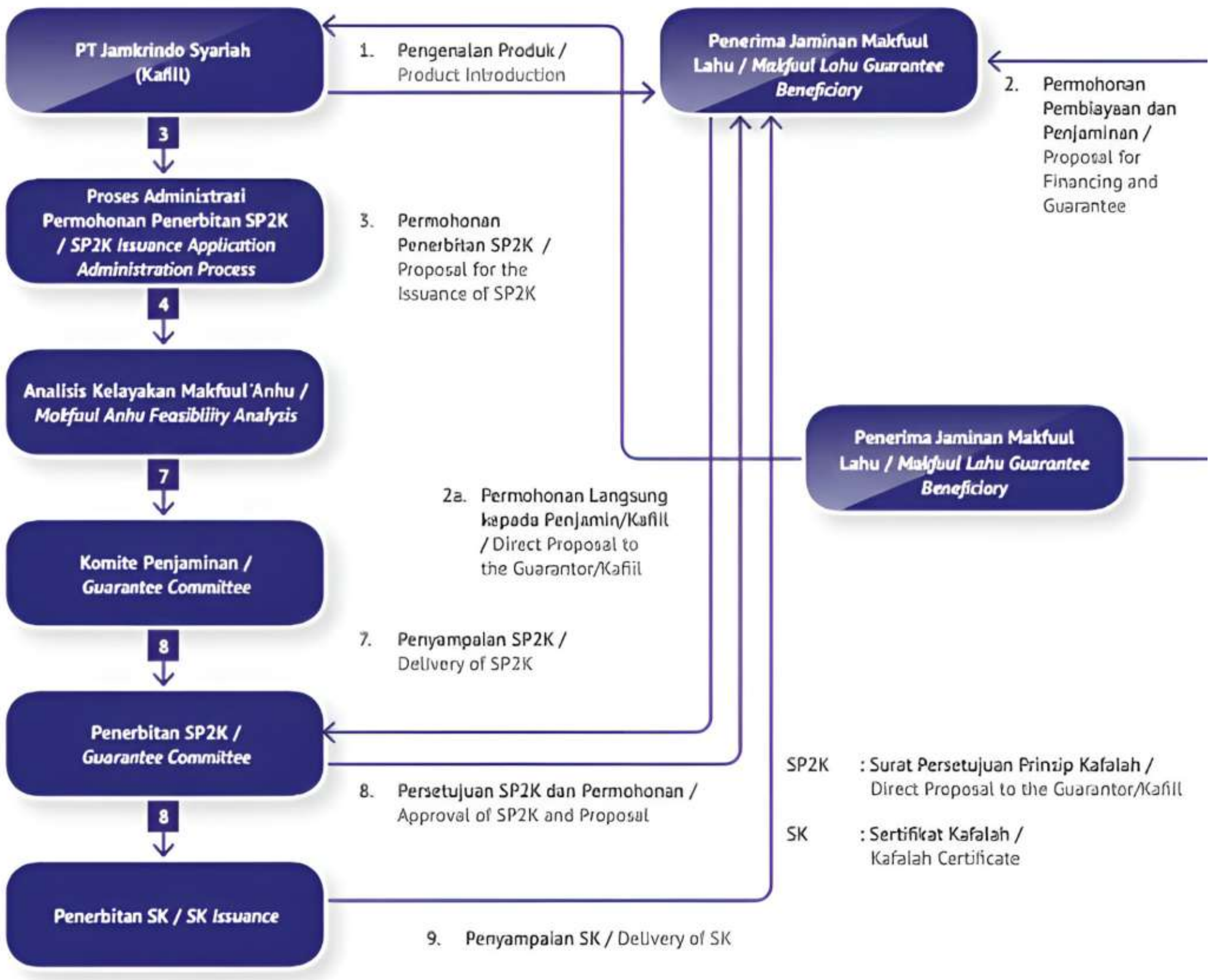

PROSES PENJAMINAN
GUARANTEE PROCESS

Proses Penjaminan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara Jamsyar (Penjamin) dan Penerima Jaminan, yang tertuang dalam Perjanjian kerja sama Penjaminan Pembiayaan dan/atau Surat Persetujuan Prinsip Kafalah (SP2K). Secara umum mekanisme proses penjaminan yang berlaku di Jamsyar adalah sebagai berikut :

- Penjaminan Kasus Per Kasus (Case By Case/CBC)
  Penjaminan Kasus Per Kasus (Case By Case/CBC) adalah penjaminan yang proses persetujuannya dilakukan secara kasus per kasus atas kredit yang diberikan oleh Penerima Jaminan, di mana Jamsyar melakukan evaluasi kelayakan usaha calon Terjamin terlebih dahulu atas setiap pengajuan penjaminan sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Kafalah (SP2K). sebagai bentuk persetujuan penjaminan. Dalam hal ini, Jamsyar dapat menyetujui atau tidak menyetujui pengajuan penjaminan tersebut.
  Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penjaminan kasus per kasus adalah sebagai berikut:
  a. Terjamin dan Penerima Jaminan (mitra kerja bank atau non bank) mengajukan permohonan penjaminan kepada penjamin dengan melampirkan beberapa dokumen, antara lain proposal usaha, identitas dan legalitas usaha pemohon sebagaimana permohonan dari Terjamin kepada Penerima Jaminan.
  b. Setelah melakukan analisis kelayakan penjaminan, Penjamin menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Kafalah (SP2K) kepada Penerima Jaminan yang berisi tentang ketentuan dan persyaratan penjaminan, atau menyampaikan surat penolakan apabila Penjamin tidak menyetujui permohonan penjaminan tersebut.
  c. Penerima Jaminan menyampaikan surat persetujuan atas seluruh ketentuan dalam SP2K Penjamin, apabila menyetujui ketentuan dalam SP2K tersebut.
  d. Penerima Jaminan (mitra kerja bank atau non bank) dapat melakukan perjanjian (akad) dan merealisasikan Pembiayaan kepada nasabah (Terjamin).
  e. Penerima Jaminan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Kafalah (SK) kepada Penjaminan dengan melampirkan beberapa dokumen, antara lain copy Perjanjian (akad) pembiayaan beserta Addendum-nya dan bukti pembayaran Imbal Jasa Kafalah (IJK).
  f. Penjamin menerbitkan Sertifikat Kafalah (SK) kepada Penerima Jaminan.

- Penjaminan Otomatis Bersyarat adalah penjaminan yang diberikan secara otomatis oleh Penjamin (Jamsyar) atas Pembiayaan yang direalisasikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah disepakati yang tertuang dalam Perjanjian kerja sama Penjaminan, antara Jamsyar dengan Penerima Jaminan. Pembiayaan Mikro, Pembiayaan KPR Sejahtera FLPP, Pembiayaan Multiguna, Pembiayaan KUR iB dan Pembiayaan modal kerja PEN.Penjaminan Kasus Per Kasus (Case By Case/CBC) adalah penjaminan yang proses persetujuannya dilakukan secara kasus per kasus atas kredit yang diberikan oleh Penerima Jaminan, di mana Jamsyar melakukan evaluasi kelayakan usaha calon Terjamin terlebih dahulu atas setiap pengajuan penjaminan sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Kafalah (SP2K). sebagai bentuk persetujuan penjaminan. Dalam hal ini, Jamsyar dapat menyetujui atau tidak menyetujui pengajuan penjaminan tersebut.

Selain ketentuan tersebut di atas, untuk produk penjaminan KUR iB dan PEN juga mengikuti ketentuan dari Pemerintah yang berlaku.

The guarantee process is carried out in accordance with the provisions agreed between Jamsyar (the Guarantor) and the Beneficiary, as stipulated in the Financing Guarantee Cooperation Agreement and/or the Letter of Approval of Kafalah Principle (SP2K). In general, the guarantee mechanism applied at Jamsyar is as follows:
Case-by-Case Guarantee (CBC)
Case-by-Case (CBC) Guarantee is a guarantee scheme in which the approval process is conducted on an individual case basis for each financing facility provided by the Beneficiary. Under this mechanism, Jamsyar conducts a feasibility evaluation of the prospective Guaranteed Party for each guarantee application prior to issuing the Letter of Approval of Kafalah Principle (SP2K) as a form of guarantee approval.
The steps involved in the case-by-case guarantee process are as follows:
The Guaranteed Party and the Beneficiary (bank or non-bank partner) submit a guarantee application to the Guarantor, along with supporting documents, including but not limited to a business proposal, identity documents, and business legality, as required by the Beneficiary.
Upon completion of the guarantee feasibility analysis, the Guarantor issues the Letter of Approval of Kafalah Principle (SP2K) to the Beneficiary, outlining the terms and conditions of the guarantee, or issues a rejection letter if the application is not approved.

The Beneficiary submits a written confirmation agreeing to all terms and conditions stated in the SP2K.

The Beneficiary (bank or non-bank partner) enters into the financing agreement (akad) and disburses the financing to the customer (the Guaranteed Party).
The Beneficiary submits a request for the issuance of a Kafalah Certificate (SK) to the Guarantor, accompanied by supporting documents, including a copy of the financing agreement (akad) and its addendum, as well as proof of payment of the Kafalah Fee (IJK).
The Guarantor issues the Kafalah Certificate (SK) to the Beneficiary.

Conditional Automatic Guarantee is a guarantee automatically provided by the Guarantor (Jamsyar) for Financing realized by the Guarantee Recipient to the Guaranteed Party, subject to the agreed terms and conditions set forth in the Guarantee Cooperation Agreement between Jamsyar and the Guarantee Recipient. Micro Financing, FLPP Prosperous Mortgage Financing, Multipurpose Financing, iB KUR Financing, and PEN Working Capital Financing. Case-by-Case Guarantee (CBC) is a guarantee whose approval process is carried out on a case-by-case basis for loans provided by the Guarantee Recipient, whereby Jamsyar first evaluates the business feasibility of the prospective Guarantee Recipient for each guarantee application before issuing a Letter of Principle Approval for Kafalah (SP2K) as a form of guarantee approval. In this case, Jamsyar may approve or reject the guarantee application.

In addition to the above provisions, KUR iB and PEN guarantee products also comply with applicable government regulations.

SEGMEN USAHA
SEGMEN USAHA

Segmentasi usaha perusahaan berdasarkan produk, yaitu :

- Produk Penjaminan Non Cash Loan
  a. Surety Bond
     Pemberian jaminan kepada Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) atas risiko kegagalan/wanprestasi Terjamin (makfuul 'anhu) dalam melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan kepada Penerima Jaminan (Makfuul Lahu).
     Surety Bon terdiri dari :
     1. Surety Bond Penawaran (Jaminan Tender).
     2. Surety Bond Uang Muka (Jaminan Uang Muka)
     3. Surety Bond Pelaksanaan (Jaminan Pelaksanaan)
     4. Surety Bond Pemeliharaan (Jaminan Pemeliharaan)
  b. Costums Bond
     Perikatan penjaminan antara tiga pihak, Penjamin (Kafiil) terikat untuk memenuhi kewajiban- kewajiban yang timbul dari Principal/Terjamin (makfuul 'anhu) terhadap Pemilik Proyek (Obligee) dalam hal Principal/ Terjamin (makfuul 'anhu) tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya
  c. Kontra Bank Garansi/Kafalah Bank Garansi (KBG)
     Pemberian Jaminan sebagai kontra garansi atas fasilitas Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank kepada Terjamin (makfuul 'anhu) KBG terdiri dari Kafalah BG untuk :
     1. KBG Penawaran (Jaminan Tender).
     2. KBG Uang Muka (Jaminan Uang Muka)
     3. KBG Pelaksanaan (Jaminan Pelaksanaan)
     4. BG Pemeliharaan (Jaminan Pemeliharaan)
     5. KBG khusus atau BG-SP2
  d. Penjaminan Keagenan Kargo Penjaminan yang diberikan kepada Penerima jaminan/Obligee (Perusahaan Penyedia Jasa Pengangkutan) atas kewajiban Terjamin/ Principal (Agen Kargo) dalam melakukan pembayaran ongkos angkut barang kepada Penerima Jaminan/ Obligee.

- Produk Penjaminan Cash Loan
  a. Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan Umum
     Penjaminan Pembiayaan yang diajukan untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha/ proyek atau kegiatan investasi yang dilakukan oleh perorangan, perusahaan atau koperasi dengan tujuan untuk mendapat hasil/return dari kegiatan tersebut. Kafalah Pembiayaan Umum terdiri dari Kafalah Pembiayaan Modal Kerja dan Kafalah Pembiayaan Investasi.
  b. Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan Multiguna
     Penjaminan atas Pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) kepada Terjamin (makfuul 'anhu) dengan sumber pengembalian adalah penghasilan tetap/gaji dan pendapatan lain perbulan yang sah dari tempat Terjamin (Makfuul 'Anhu) bekerja.
  c. Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan Mikro
     Penjaminan atas Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk keperluan modal kerja dan/atau investasi dengan Plafond maksimum sebesar Rp250.000.000,- atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) atau sesuai kesepakatan tertulis antara Penjamin (Kafiil) dan Penerima Jaminan (Makfuul Lahu).
  d. Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa Penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) kepada Terjamin (makfuul 'anhu) untuk keperluan tambahan Modal Kerja, usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan kontrak kerja antara Terjamin (makfuul 'anhu) dengan Bouwheer (pemilik proyek)

Business segmentation based on products, namely:

- Non-Cash Loan Guarantee Products
  a. Surety Bond
     Provision of guarantees to the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) against the risk of failure/default of the Guaranteed Party (makfuul 'anhu) in carrying out work in accordance with what has been agreed upon with the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu).
     Surety Bonds consist of:
     1. Bid Bond (Tender Guarantee).
     2. Advance Payment Bond (Advance Payment Guarantee)
     3. Performance Bond (Performance Guarantee
     4. Maintenance Bond (Maintenance Guarantee)
  b. Costums Bond
     A guarantee agreement between three parties, whereby the Guarantor (Kafiil) is bound to fulfill the obligations arising from the Principal/ Guaranteed Party (makfuul 'anhu) to the Project Owner (Obligee) in the event that the Principal/Guaranteed Party (makfuul 'anhu) fails to fulfill their obligations.
  c. Counter Bank Guarantee/Kafalah Bank Guarantee (KBG)
     Provision of a guarantee as a counter guarantee for a Bank Guarantee facility issued by the Bank to the Guaranteed Party (makfuul 'anhu). KBG consists of Kafalah BG for:
     1. KBG Bid (Tender Guarantee).
     2. Advance Payment BG (Advance Payment Guarantee)
     3. Performance BG (Performance Guarantee)
     4. BG Maintenance (Maintenance Guarantee)
     5. Special KBG or BG-SP2
  d. Cargo Agency Guarantee Guarantee provided to the Guarantee Recipient/Obligee (Transport Service Provider Company) for the obligations of the Guaranteed Party/Principal (Cargo Agent) in paying freight costs to the Guarantee Recipient/Obligee.

- Cash Loan Guarantee Products
  a. General Financing Guarantee (Kafalah)
     Financing guarantees submitted to support the smooth running of business activities/projects or investment activities carried out by individuals, companies or cooperatives with the aim of obtaining results/returns from these activities. General Financing Guarantees consist of Working Capital Financing Guarantees and Investment Financing Guarantees.
  b. Multipurpose Financing Guarantee (Kafalah)
     Guarantee on Financing provided by the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) to the Guaranteed Party (makfuul 'anhu) with the source of repayment being a fixed income/salary and other legitimate monthly income from the place where the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) works.
  c. Micro Financing Guarantee (Kafalah)
     Guarantee for financing provided to business actors for working capital and/or investment purposes with a maximum ceiling of IDR 250,000,000 or in accordance with the provisions applicable to each Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) or in accordance with a written agreement between th Guarantor (Kafiil) and the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu).
  d. Guarantee (Kafalah) for Construction and Procurement of Goods
     Services Financing Guarantee on financing provided by the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) to the Guaranteed Party (makfuul 'anhu) for additional working capital, construction services, and procurement of goods/services in accordance with the work contract between the Guaranteed Party (makfuul 'anhu) and the Bouwheer (project owner))

e. Penjaminan SFC (Supplier Chain Financing)
Penjaminan pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan dari Terjamin (makfuul 'anhu) kepada Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) yang kemudian menagih piutang tersebut kepada oblige sesuai prinsip Syariah.

f. Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas
Penjaminan pembiayaan dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diberikan kepada Terjamin Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera Tapak atau Susun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

g. Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR iB)
Pembiayaan modal kerja dan/ atau investasi kepada UMKMK untuk usaha produktif sesuai prinsip syariah dan layak, namun belum bankable. Penjaminan Jamsyar untuk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR iB) dengan plafond sampai dengan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) termasuk dalam kategori KUR Mikro sedangkan untuk plafond pembiayaan lebih dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) termasuk dalam kategori KUR Ritel.

h. Penjaminan (kafalah) Pembiayaan Modal Kerja Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
Penjaminan pembiayaan dalam rangka pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

e. Supplier Chain Financing (SCF) Guarantee
A guarantee for the transfer of settlement of receivables or claims from the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) to the Beneficiary (Makfuul Lahu), who subsequently collects the receivables from the obligee in accordance with Sharia principles

f. KPR Sejahtera Financing Guarantee – Liquidity Facility (FLPP)
A financing guarantee supported by the Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) provided to Low-Income Communities (MBR) for the ownership of subsidized landed houses or apartment units, as regulated under the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing.

g. People's Business Credit Guarantee (KUR iB)
A guarantee for working capital and/or investment financing extended to Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives (MSMECs) for productive and sharia-compliant businesses that are feasible but not yet bankable. Jamsyar provides guarantees for KUR iB financing with a plafond of up to IDR 20 million, classified as Micro KUR, while financing above IDR 20 million up to IDR 500 million is classified as Retail KUR.

h. Working Capital Financing Guarantee under the National Economic Recovery Program (PEN)
A financing guarantee provided as part of the National Economic Recovery (PEN) Program, which constitutes a government financial policy aimed at accelerating the handling of the COVID-19 pandemic and/or addressing threats to national economic stability and the financial system, as well as supporting overall national economic recovery.

KINERJA OPERASI PER SEGMEN USAHA
SHARIA GUARANTEE MECHANISM

Selama tahun 2020, kegiatan usaha perseroan ditunjang oleh beberapa segmen usaha dengan realisasi pencapaian sebagai berikut.

During 2020, the company's business activities were supported by several business segments with the following achievements.

Uraian / Name	2021	2020	2020
Volume Penjaminan	55.081.997.842.382	32.401.268.405.651	70,34%
IJK Cash Basis	959.275.716.316	539.175.960.149	99,91%
IJK Accrual Basis	688.615.366.026	290.593.378.082	136,67%

Perseroan berhasil mencatatkan volume penjaminan sebesar Rp55,08 triliun, naik 70,34% dari tahun 2020 yaitu sebesar Rp32,34 triliun. IJK Cash Basis dan IJK Accrual Basis masing-masing meningkat sebesar 99,91% dan 136,67% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

The company successfully recorded a guarantee volume of IDR 55.08 trillion, up 70.34% from IDR 32.34 trillion in 2020. IJK Cash Basis and IJK Accrual Basis increased by 99.91% and 136.67%, respectively, compared to the same period in the previous year.

Produk / Product	Volume Penjaminan 2021 Guarantee Volume 2021
Cash Loan	
FLPP	8.853.171.974.989
Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB / iB Micro Business Credit (KUR)	2.898.915.253.188
Supply Chain Financing	817.313.087.595
Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa / Construction Financing and Procurement of Goods/Services	584.471.400.000
Pembiayaan Mikro / Microfinance	1.002.813.927.658
Pembiayaan Umum / General Financing	1.347.978.021.200
Pembiayaan Multiguna / Multipurpose Financing	3.293.158.470.833
Total Cash Loan	18.797.822.135.463
Non Cash Loan	
Pembiayaan Kontra Bank Garansi / Bank Guarantee Financing	12.176.915.694.104
Surety Bond	16.643.019.515.831
Custom Bond	1.569.094.843.616
Distribusi Barang / Distribution of Goods	404.453.369
Non Cash Loan	24.692.563.335.462
Grand Total	55.081.997.842.382

Penjaminan cash loan memberikan kontribusi sebesar 44,83% dan penjaminan non cash loan sebesar 55,17% dari total volume penjaminan. Berdasarkan segmen non cash loan, produk yang memberikan kontribusi terbesar adalah Surety Bond sebesar Rp16,64 Triliun atau sebesar 30,21% dari total volume penjaminan, sedangkan kontributor terbesar pada penjaminan cash loan adalah produk FLPP yaitu sebesar 16,07% dari total volume penjaminan.

Cash loan guarantees contributed 44.83% and non-cash loan guarantees contributed 55.17% of the total guarantee volume. Based on the non-cash loan segment, the product that contributed the most was Surety Bond, amounting to IDR 16.64 trillion or 30.21% of the total guarantee volume, while the largest contributor to cash loan guarantees was the FLPP product, amounting to 16.07% of the total guarantee volume.

IMBAL JASA KAFALAH
KAFALAH SERVICE FEE

Pendapatan Imbal Jasa Kafalah (IJK) adalah Imbal Jasa Kafalah yang diterima oleh perusahaan dari terjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan. Besarnya IJK dihitung dari tarif IJK, plafond pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan.
Besarnya tarif IJK ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain: produk penjaminan, risiko yang dijamin dan jangka waktu penjaminan. IJK kredit umum dibayar sekaligus dimuka.
Berdasarkan SE OJK No. 11/SEOJK.05/2013, IJK yang diakui secara akrual selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya sertifikat kafalah (SK). Selama tahun 2021, Jamsyar memperoleh IJK sebesar Rp688,62 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Kafalah Service Fee Income (IJK) is the Kafalah Service Fee received by the company from the guaranteed party in the context of guarantee business activities. The amount of IJK is calculated based on the IJK rate, financing ceiling, and financing period.
The IJK rate is determined by considering, among other things: guarantee products, guaranteed risks, and guarantee period. General credit IJK is paid in advance in a lump sum.
Based on OJK Circular Letter No. 11/SEOJK.05/2013, IJK is recognized on an accrual basis during the guarantee period and allocated based on the month of issuance of the guarantee certificate (SK). During 2021, Jamsyar earned IJK amounting to IDR 688.62 billion with the following details:

No	Produk / Product	IMBAL JASA KAFALAH AKRUAL Dalam jutaan rupiah RECOMPENSE FOR KAFALAH ACCRUAL In millions of rupiah
1	2	8
	Cash Loan	
1	K.Konstruksi & P.Brg/Jasa	3.849
2	FLPP	14.940
3	PEN	359.384
4	SCF	2.857
5	K.Multiguna	54.797
6	KIB	49.380
7	K.Mikro	22.062
8	K.Umum	15.576

No	Produk / Product	IMBAL JASA KAFALAH AKRUAL Dalam jutaan rupiah RECOMPENSE FOR KAFALAH ACCRUAL In millions of rupiah
	JUMLAH CASH LOAN	522.912
	Non Cash Loan	
9	Custom Bond	3.384
10	Surety Bond	42.052
11	Distribusi Brg.	68
12	K.Kontra B.Garansi	120.267
	JUMLAH CASH LOAN	165.703
	SUB TOTAL	688.615

KINERJA OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATION PERFORMANCE BY BUSINES SEGMENT

Pada tahun 2021, nilai Imbal Jasa Kafalah dari segmen Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa tercatat sebesar Rp3,85 miliar, dengan kontribusi sekitar 0,6% terhadap total keseluruhan Imbal Jasa Kafalah. Produk ini menjamin kewajiban finansial terkait proyek konstruksi dan pengadaan barang/jasa, dengan fokus pada validasi kontrak, progres pekerjaan, dan kapasitas pelaksana. Realisasi ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan perlambatan proyek infrastruktur akibat pandemi. Perseroan tetap menjaga kualitas penjaminan melalui pengendalian berlapis, baik on desk monitoring maupun on site monitoring.

In 2021, the value of Kafalah Services from the Construction Financing and Goods/Services Procurement segment was recorded at IDR 3.85 billion, contributing around 0.6% to the total Kafalah Services. This product guarantees financial obligations related to construction projects and goods/services procurement, with a focus on contract validation, work progress, and contractor capacity. This realization shows a decline compared to the previous year, in line with the slowdown in infrastructure projects due to the pandemic. The company continues to maintain the quality of its guarantees through multiple layers of control, both on-desk monitoring and on-site monitoring.

FLPP (FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN)
FLPP (HOUSING FINANCING LIQUIDITY FACILITY)

Sepanjang tahun 2021, segmen FLPP memberikan kontribusi sebesar Rp14,94 miliar, atau sekitar 2,2% dari total Imbal Jasa Kafalah. Produk ini mendukung akses perumahan layak bagi masyarakat melalui pembiayaan KPR subsidi. Penjaminan dilakukan atas kewajiban debitur kepada bank pelaksana, dengan verifikasi kemampuan bayar, legalitas agunan, dan kesesuaian ketentuan program. Realisasi ini mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam mendukung program pemerintah, meskipun pertumbuhan relatif moderat dibandingkan segmen produktif lainnya

Throughout 2021, the FLPP segment contributed Rp14.94 billion, or around 2.2% of the total Guarantee Fee. This product supports access to decent housing for the community through subsidized mortgage financing. Guarantees are provided for debtors' obligations to the executing bank, with verification of payment capacity, collateral legality, and program compliance. This realization reflects the Company's success in supporting government programs, despite relatively moderate growth compared to other productive segments.

PEN (PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL)
PEN (NATIONAL ECONOMIC RECOVERY)

Segmen PEN menjadi kontributor terbesar pada tahun 2021 dengan Imbal Jasa Kafalah sebesar Rp359,38 miliar, atau sekitar 52% dari total keseluruhan. Produk ini mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui penjaminan pembiayaan modal kerja dan investasi bagi pelaku usaha terdampak pandemi. Realisasi ini mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam menjalankan mandat strategis pemerintah, sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan mitigasi risiko melalui pengendalian ketat dan mekanisme klaim-subrogasi.

The PEN segment was the largest contributor in 2021 with a guarantee fee of IDR 359.38 billion, or around 52% of the total. This product supports national economic recovery by guaranteeing working capital and investment financing for businesses affected by the pandemic. This achievement reflects the Company's success in carrying out the government's strategic mandate, while also demonstrating the effectiveness of risk mitigation policies through strict control and subrogation claim mechanisms.

SUPPLY CHAIN FINANCING (SCF)
SUPPLY CHAIN FINANCING (SCF)

Sepanjang tahun 2021, segmen Supply Chain Financing menyumbang Imbal Jasa Kafalah sebesar Rp2,86 miliar, atau sekitar 0,4% dari total keseluruhan Imbal Jasa Kafalah. Produk ini mendukung kelancaran ekosistem rantai pasok melalui penjaminan pembiayaan berbasis invoice dan purchase order.

Throughout 2021, the Supply Chain Financing segment contributed Rp2.86 billion in Kafalah Service Fees, or around 0.4% of the total Kafalah Service Fees. This product supports the smooth running of the supply chain ecosystem through invoice and purchase order-based financing guarantees.

Realisasi tahun 2021 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan dinamika sektor perdagangan yang masih dalam tahap pemulihan. Perseroan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis kelayakan, validasi tagihan, dan monitoring siklus pembayaran untuk menjaga kualitas portofolio.

The 2021 realization shows a decline compared to the previous year, in line with the dynamics of the trade sector which is still in the recovery stage. The Company continues to apply the principle of prudence through feasibility analysis, invoice validation, and payment cycle monitoring to maintain portfolio quality.

MULTIGUNA
MULTIPURPOSE

Sepanjang 2021, segmen Pembiayaan Multiguna memberikan kontribusi sebesar Rp54,80 miliar, atau sekitar 8% dari total Imbal Jasa Kafalah. Produk ini menjamin pembiayaan konsumtif dan multiguna bagi individu maupun korporasi, dengan penekanan pada analisis kemampuan bayar dan riwayat kredit. Realisasi ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam memperluas akses pembiayaan dengan tetap menjaga kualitas risiko.

Throughout 2021, the Multipurpose Financing segment contributed Rp54.80 billion, or around 8% of the total Kafalah Service Fees. This product guarantees consumer and multipurpose financing for individuals and corporations, with an emphasis on payment capacity analysis and credit history. This realization shows stable growth compared to the previous year, reflecting the Company's success in expanding access to financing while maintaining risk quality.

KUR-KIB
KUR-KIB

Segmen KIB mencatat Imbal Jasa Kafalah sebesar Rp49,38 miliar pada tahun 2021, dengan kontribusi sekitar 7,2% terhadap total keseluruhan. Produk ini mencakup penjaminan pada pembiayaan usaha—baik modal kerja maupun investasi—yang memerlukan struktur pembiayaan lebih tailor-made. Penilaian mencakup rencana bisnis, arus kas proyeksi, tingkat leverage, dan profil agunan. Realisasi ini memperlihatkan pertumbuhan sehat seiring membaiknya sentimen investasi.

The KIB segment recorded a guarantee fee income of IDR 49.38 billion in 2021, contributing around 7.2% to the total. This product covers guarantees for business financing—both working capital and investment—that require a more tailor-made financing structure. The assessment includes business plans, projected cash flows, leverage ratios, and collateral profiles. This realization shows healthy growth in line with improving investment sentiment.

MIKRO
MICRO

Segmen Mikro memberikan kontribusi sebesar Rp22,06 miliar, atau sekitar 3,2% dari total Imbal Jasa Kafalah. Produk ini ditujukan untuk UMK dalam skala mikro dengan proses yang ringkas namun akurat. Perseroan memadukan penilaian karakter, kapasitas usaha, dan rekam transaksi sebagai dasar kelayakan. Realisasi ini merefleksikan keberlanjutan dukungan Perseroan terhadap inklusifitas pembiayaan.

The Micro segment contributed Rp22.06 billion, or approximately 3.2% of total Kafalah Service Fees. This product is intended for micro-scale MSMEs with a concise yet accurate process. The Company combines character assessment, business capacity, and transaction records as the basis for eligibility. This realization reflects the Company's continued support for financing inclusivity.

UMUM
GENERAL

Segmen Pembiayaan Umum mencatat Imbal Jasa Kafalah sebesar Rp15,58 miliar pada tahun 2021, dengan kontribusi sekitar 2,3% terhadap total keseluruhan. Segmen ini mencakup penjaminan pembiayaan di luar kategori khusus di atas. Penilaian kelayakan dan manajemen risiko diterapkan sama ketatnya, dengan akad kafalah dan pengendalian sesuai standar SOP. Realisasi ini menunjukkan kontribusi yang konsisten sebagai portofolio penyeimbang.

The General Financing segment recorded a Guarantee Fee of IDR 15.58 billion in 2021, contributing approximately 2.3% to the total. This segment covers financing guarantees outside the special categories above. Eligibility assessment and risk management are applied just as strictly, with guarantee agreements and controls in accordance with SOP standards. This realization demonstrates a consistent contribution as a balancing portfolio.

CUSTOMS BOND
CUSTOMS BOND

Pada tahun 2021, nilai Imbal Jasa Kafalah dari segmen Custom Bond tercatat sebesar Rp3,38 miliar, dengan kontribusi sekitar 0,5% terhadap total keseluruhan Imbal Jasa Kafalah. Produk ini menjamin kewajiban kepabeanan, memastikan terpenuhinya pembayaran bea dan cukai sesuai ketentuan. Perseroan melakukan verifikasi legalitas importir, riwayat kepatuhan, dan transaksi kepabeanan sebelum menerbitkan jaminan dengan akad kafalah. Realisasi ini menunjukkan portofolio yang selektif, dengan fokus pada entitas yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi untuk menjaga kualitas risiko.

In 2021, the value of Kafalah Services from the Custom Bond segment was recorded at IDR 3.38 billion, contributing approximately 0.5% to the total Kafalah Services. This product guarantees customs obligations, ensuring that customs and excise payments are made in accordance with regulations. The company verifies the legality of importers, compliance history, and customs transactions before issuing guarantees with kafalah contracts. This realization demonstrates a selective portfolio, with a focus on entities with high compliance levels to maintain risk quality.

SURETY BOND
SURETY BOND

Segmen Surety Bond mencatat Imbal Jasa Kafalah sebesar Rp42,05 miliar pada tahun 2021, atau sekitar 6,1% dari total keseluruhan. Produk ini menjamin kewajiban kontraktual seperti bid bond, performance bond, dan advance payment bond, dengan dua skema utama: Indemnity (ganti rugi sesuai kerugian riil) dan Penalty Sum (sampai nilai bond). Perseroan menilai kapabilitas kontraktor, track record, rasio kapasitas proyek, dan dukungan agunan sebelum menerbitkan jaminan. Realisasi ini menegaskan kepercayaan pasar terhadap kapasitas penjaminan Perseroan, seiring meningkatnya aktivitas proyek dan pengadaan barang/jasa.

The Surety Bond segment recorded a guarantee fee of IDR 42.05 billion in 2021, or around 6.1% of the total. This product guarantees contractual obligations such as bid bonds, performance bonds, and advance payment bonds, with two main schemes: Indemnity (compensation according to actual losses) and Penalty Sum (up to the bond value). The Company assesses the contractor's capabilities, track record, project capacity ratio, and collateral support before issuing guarantees. This realization confirms the market's confidence in the Company's guarantee capacity, in line with increased project activity and procurement of goods/services.

DISTRIBUSI BARANG
GOODS DISTRIBUTION

Sepanjang tahun 2021, segmen Distribusi Barang memberikan kontribusi sebesar Rp68 juta, atau kurang dari 0,01% terhadap total keseluruhan Imbal Jasa Kafalah. Produk ini menjamin pembayaran terkait perputaran barang dagang dalam skema perdagangan/distribusi. Penilaian dilakukan terhadap kualitas counterparties, siklus kas, dan historis penjualan.

Throughout 2021, the Goods Distribution segment contributed Rp68 million, or less than 0.01% of the total Guarantee Fees. This product guarantees payments related to the turnover of goods in trade/distribution schemes. Assessments are made on the quality of counterparties, cash cycles, and sales history.

VOLUME PENJAMINAN
GUARANTEE VOLUME

Volume penjaminan PT Jamkrindo Syariah pada tahun 2021 per produk adalah sebagai berikut:

Produk Name	**Volume Penjaminan 2021** Name
FLPP	8.853.171.974.989
Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB	2.898.915.253.188
Supply Chain Financing	817.313.087.595
Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa	584.471.400.000
Pembiayaan Mikro	1.002.813.927.658
Pembiayaan Umum	1.347.978.021.200
Pembiayaan Multiguna	3.293.158.470.833
PEN	5.894.741.200.000
Pembiayaan Kontra Bank Garansi	12.176.915.694.104
Surety Bond	16.643.019.515.831
Custom Bond	1.569.094.843.616
Distribusi Barang	404.453.369
Grand Total	55.081.997.842.382

KAPASITAS PENJAMINAN
GUARANTEE CAPACITY

Kapasitas penjaminan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah telah mempertimbangkan indikator pengukuran kesehatan keuangan. Indikator mengacu pada POJK No. 18 /SEOJK.05/2018 Tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin adalah sebagai berikut:

The guarantee capacity of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah has taken into account financial health measurement indicators. The indicators refer to POJK No. 18 /SEOJK.05/2018 concerning the Financial Health of Guarantee Institutions, as follows:

PENGUKURAN KESEHATAN KEUANGAN
FINANCIAL HEALTH MEASUREMENT

- Lembaga Penjamin wajib menjaga kondisi Kesehatan Keuangannya.
- Pengukuran Kesehatan Keuangan bagi Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
  a. Rasio Likuiditas
  b. Gearing Ratio
  c. Rentabilitas
  Penilaian sendiri (self assessment) tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin.
- Kewajiban pemenuhan kondisi Kesehatan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 bagi UUS dilakukan secara terpisah dengan komponen meliputi:
  a. Lembaga Penjamin wajib menjaga tingkat likuiditasnya.
  b. Lembaga Penjamin wajib menjaga Rasio Likuiditas paling rendah 120% (seratus dua puluh per seratus).
  c. Rasio Likuiditas sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihitung dengan menggunakan current ratio.
  d. Current ratio sebagaimana dimaksud pada angka 3 dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dengan utang lancar.
  e. Rincian akun dalam perhitungan aset lancar dan utang lancar sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam perhitungan current ratio mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan lembaga penjamin.

- Guarantee Institutions are required to maintain their financial health.
- The measurement of financial health for Guarantee Institutions as referred to in point 1 includes:
  a. Liquidity Ratio
  b. Gearing Ratio
  c. Profitability
  Self-assessment of good corporate governance for Guarantee Institutions.
- The obligation to fulfill the financial health conditions as referred to in point 1 for UUS is carried out separately with components including:
  a. Guarantee Institutions must maintain their liquidity levels.
  b. Guarantee Institutions must maintain a minimum Liquidity Ratio of 120% (one hundred and twenty percent).
  c. The Liquidity Ratio as referred to in point 2 is calculated using the current ratio.
  d. The current ratio as referred to in point 3 is calculated by comparing current assets with current liabilities.
  e. The details of accounts in the calculation of current assets and current liabilities as referred to in point 4 in the calculation of the current ratio refer to the Financial Services Authority Circular Letter regarding monthly reports of guarantee institutions.

Berikut perhitungan Rasio Likuiditas Perusahaan pada tahun 2021:

Tahun 2021 Name	
Formula Rasio Likuiditas: Aset Lancar/Kewajiban Lancar Name	
Aset Lancar	2.334.270
Kewajiban Lancar	1.160.777
Likuiditas (%)	201,10%

Gearing Ratio
- Lembaga Penjamin wajib menjaga Gearing Ratio untuk penjaminan bagi usaha produktif paling tinggi 20 (dua puluh) kali.
- Lembaga Penjamin wajib menjaga total Gearing Ratio paling tinggi 40 (empat puluh) kali.
- Sesuai POJK No. 2/POJK.05/2017 pasal 30 lembaga penjamin dilarang memberikan pinjaman atau menerima pinjaman, sehingga kebutuhan modal Perseroan sepenuhnya berasal dari modal sendiri. Apabila Perseroan membutuhkan tambahan modal untuk menunjang ekspansi bisnis dan mempertahankan market share maka Perseroan akan meminta tambahan modal kepada pemegang saham. Modal Perseroan saat ini masih cukup untuk melakukan ekspansi penjaminan.
  Pada posisi Per 31 Desember 2021, Gearing Ratio Total Perseroan adalah 27,43 kali. Karena Gearing Ratio masih berada di bawah ketentuan maksimal yang diperkenankan, maka PT Penjaminan Jamkrindo Syariah masih mempunyai kelonggaran kapasitas untuk melakukan penjaminan.
  Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 2/POJK.05/2017 tentang Penyelengaraan Usaha Lembaga Penjaminan, Gearing Ratio adalah batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan Penjamin dalam melakukan kegiatan Penjaminan. Gearing Ratio Penjaminan untuk Usaha Produktif ditetapkan paling tinggi dua puluh kali dari ekuitas Perusahaan dan total Gearing Ratio ditetapkan paling tinggi empat puluh kali dari ekuitas Perusahaan.

Gearing Ratio
- Guarantee Institutions are required to maintain a Gearing Ratio for guarantees for productive businesses of no more than 20 (twenty) times.
- Guarantee Institutions are required to maintain a total Gearing Ratio of no more than 40 (forty) times.
- In accordance with POJK No. 2/POJK.05/2017 article 30, guarantee institutions are prohibited from providing loans or accepting loans, so that the Company's capital requirements come entirely from its own capital. If the Company needs additional capital to support business expansion and maintain market share, the Company will request additional capital from shareholders. The Company's current capital is still sufficient to carry out guarantee expansion.
- As of December 31, 2021, the Company's Total Gearing Ratio was 27.43 times. Since the Gearing Ratio is still below the maximum permitted limit, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah still has the capacity to provide guarantees.
- In accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 2/POJK.05/2017 concerning the Operation of Guarantee Institutions, the Gearing Ratio is a limit set to measure the ability of a Guarantor to carry out Guarantee activities. The Gearing Ratio for productive businesses is set at a maximum of twenty times the company's equity, and the total Gearing Ratio is set at a maximum of forty times the company's equity.

RENTABILITAS
RENTABILITY

- Penilaian terhadap komponen Rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 2 huruf c dan romawi II angka 3 huruf b dilakukan terhadap rasio sebagai berikut:
  a. Rasio return on asset
     Rasio return on asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Lembaga Penjamin dalam menghasilkan laba dari aset yang digunakan untuk mendukung operasional dan permodalan Lembaga Penjamin atau UUS.
  b. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional
     Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan Lembaga Penjamin dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.
  c. Rasio klaim terhadap Imbal Jasa
     Rasio klaim terhadap Imbal Jasa merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja penjaminan.

- Perhitungan rasio Rentabilitas ditetapkan sebagai berikut:
  a. Rasio return on asset dihitung dari perbandingan antara laba atau rugi sebelum pajak terhadap total aset. Rasio return on asset Perusahaan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- The assessment of the Profitability component as referred to in Roman numeral II point 2 letter c and Roman numeral II point 3 letter b is carried out on the following ratios:

  a. Rasio return on asset
     The return on asset ratio is a ratio used to measure the ability of the Guarantee Institution to generate profits from assets used to support the operations and capital of the Guarantee Institution or UUS.
  b. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional
     The Operating Expense to Operating Income Ratio is a ratio used to measure the efficiency and ability of the Guarantee Institution in carrying out its operational activities.
  c. Rasio klaim terhadap Imbal Jasa
     The claims to service fees ratio is a ratio used to measure the level of guarantee performance.

- The profitability ratio is calculated as follows:
  a. The return on assets ratio is calculated from the ratio of profit or loss before tax to total assets. The Company's return on assets ratio in 2021 is as follows:

Tahun 2021 Year 2021	
Formula Return on Assets: Laba Sebelum Pajak/Rata-Rata Aset Return on Assets Formula: Profit Before Tax/Average Assets Return on Assets Formula: Profit Before Tax/Average Assets	
Laba Sebelum Pajak	206.739
Rata-Rata Aset	2.445.582
Return on Assets (%)	8,45%

  a. Untuk perhitungan laba atau rugi sebelum pajak menggunakan perhitungan yang disetahunkan.
     Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut: (laba atau rugi sebelum pajak per posisi Maret/3) x 12.
  b. Laba atau rugi sebelum pajak per posisi
     bulan pelaporan dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban sebelum dikurangi taksiran pajak penghasilan.
  c. Untuk perhitungan total aset menggunakan rata-rata aset sepanjang tahun. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:
     (Penjumlahan total aset dari Januari s.d. Maret)/3.
     1. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional:
        - Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dihitung dari perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional.

  a. To calculate profit or loss before tax, use the annualized calculation. For example, for the March report position,
     the calculation method is as follows: (profit or loss before tax per March position/3) x 12.

  b. Profit or loss before tax per: reporting month position calculated based on the amount of income minus the amount of expenses before deducting estimated income tax.
  c. To calculate total assets, use the average assets throughout the year. For example, for the March report position, the calculation is as follows:
     (Total assets from January to March)/3.
     1. Ratio of operating expenses to operating income:
        - The ratio of operating expenses to operating income is calculated from the comparison between operating expenses and operating income.

Rasio perhitungan Beban Operasional Perusahaan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The Company's Operating Expense Ratio calculation for 2021 is as follows:

Tahun 2021/ Name	
Formula BOPO: (Beban Usaha/ Pendapatan Usaha) x 100%/ Name	
Beban Usaha	100.183.148.890
Pendapatan Usaha	520.385.629.139
BOPO (%)	19,25%

2. Rincian akun dalam perhitungan pendapatan operasional dan beban operasional dalam perhitungan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan lembaga penjamin.
   - Rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa
3. Rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa dihitung dari perbandingan antara beban klaim neto terhadap Imbal Jasa neto.

Rasio Klaim Perusahaan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

2. Account details in the calculation of operating income and operating expenses in the calculation of the ratio of operating expenses to operating income refer to the Financial Services Authority Circular Letter regarding monthly reports of guarantee institutions. Claims to income ratio
   - The claims to income ratio is calculated from the
3. comparison between net claims expenses and net income.

The Company's claims ratio in 2021 is as follows:

Tahun 2021/ Name	
Formula Rasio Klaim: Beban Klaim/IJK/ Name	
Beban Klaim	127.756
IJK	959.276
Rasio Klaim (%)	18,55%

PROFITABILITAS
PROFITABILITY

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari seluruh modal yang dioperasikan Perseroan. Profitabilitas Perusahaan dapat dilihat dari tingkat pengembalian aset (Return on Asset, ROA) dan tingkat pengembalian ekuitas (Return on Equity, ROE).

Profitability is a company's ability to earn profits from all of its operating capital. A company's profitability can be seen from its return on assets (ROA) and return on equity (ROE).

Uraian / Name	**2021**	**2020**	**2020**
Return on Assets(%)	10,80	4,34	2,16
Return on Equity(%)	20,63	7,64	4,01

RoA adalah seberapa efisien Perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama suatu periode dan RoE adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di Perseroan. Pada tahun 2021, tingkat pengembalian aset Perseroan adalah 20,63% naik dari tahun lalu sebesar 4,34%. Sementara, tingkat pengembalian ekuitas Perseroan pada 2021 adalah 24,42% naik dibandingkan tahun 2020 sebesar 7,64%.

RoA is how efficiently the Company manages its assets to generate profits during a period, and RoE is a measure of the Company's ability to generate profits from shareholder investments in the Company. In 2021, the Company's return on assets was 20.63%, up from 4.34% last year. Meanwhile, the Company's return on equity in 2021 was 24.42%, up from 7.64% in 2020.

ANALISA KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS

LAPORAN POSISI KEUANGAN
FINANCIAL POSITION REPORT

Uraian / Description	**2021**	**2020**	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	**Persentase (%)** Percentage (%)
Aset Lancar Current Assets	2.334.270	1.498.613	835.657	55,76%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	111.312	75.266	36.046	47,89%

Uraian / Description	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	Persentase (%) Percentage (%)
Jumlah Aset	2.445.582	1.573.879	871.703	55,39%
Liabilitas Lancar	1.160.777	765.135	395.642	51,71%
Liabilitas Tidak Lancar	307.758	155.551	152.207	97,85%
Jumlah Liabilitas	1.468.535	920.686	547.849	59,50%
Jumlah Ekuitas	977.047	653.191	323.856	49,58%
Jumlah Liabiltas dan Ekuitas	2.445.582	1.573.879	871.703	55,39%

PROFITABILITAS
PROFITABILITY

Total aset Perusahaan per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 2,44 triliun, mengalami peningkatan 55,39% dari total aset 2020 sebesar Rp 1,57 triliun. Peningkatan aset ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas (termasuk kas yang dibatasi penggunaannya) sebesar ±Rp 532,15 miliar, bertambahnya aset penjaminan ulang sebesar Rp 117,74 miliar, kenaikan investasi pada sukuk sebesar Rp 90,95 miliar, serta meningkatnya piutang imbal jasa kafalah sebesar Rp 69,18 miliar. Kenaikan tersebut sejalan dengan lonjakan volume penjaminan 2021 (Rp 55,08 triliun) dan transfer portofolio syariah dari PT Jamkrindo (kas Rp 70,12 miliar, aset penjaminan ulang Rp 55,39 miliar, biaya akuisisi ditangguhkan Rp 13,27 miliar)

The Company's total assets as of December 31, 2021 were recorded at IDR 2.44 trillion, an increase of 55.39% from the 2020 total assets of IDR 1.57 trillion. This increase in assets was mainly due to an increase in cash and cash equivalents (including restricted cash) of approximately IDR 532.15 billion, an increase in reinsurance assets of IDR 117.74 billion, an increase in investments in sukuk of IDR 90.95 billion, and an increase in kafalah service receivables of IDR 69.18 billion. This increase is in line with the surge in the 2021 guarantee volume (IDR 55.08 trillion) and the transfer of the sharia portfolio from PT Jamkrindo (cash of IDR 70.12 billion, reinsurance assets of IDR 55.39 billion, deferred acquisition costs of IDR 13.27 billion).

TOTAL LIABILITAS
TOTAL LIABILITIES

Total liabilitas Perseroan per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp1.468 miliar naik 59,50% dibanding liabilitas tahun 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh besarnya kenaikan pendapatan yang ditangguhkan, utang re-guarantee, dan pembentukan cadangan klaim sesuai ketentuan POJK

The Company's total liabilities as of December 31, 2021, were recorded at IDR 1,468 billion, an increase of 59.50% compared to liabilities in 2020. This increase was mainly due to a significant increase in deferred income, re-guarantee debt, and the establishment of claim reserves in accordance with POJK provisions.

TOTAL EKUITAS
TOTAL EQUITY

Total ekuitas Perseroan per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp977 miliar meningkat 49,58% dari total ekuitas tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya modal saham Perseroan.

The Company's total equity as of December 31, 2021, was recorded at IDR 977 billion, an increase of 49.58% from the total equity in 2020. This increase was due to an increase in the Company's share capital.

LAPORAN LABA RUGI
INCOME STATEMENT

Uraian / Description	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan Penjaminan Guarantee Income	489.416	187.355	302.061	161,22%
Beban Penjaminan Guarantee Expenses	469.860	312.937	156.923	50,15%
Beban Klaim Claims Expenses	127.756	125.407	2.349	1,87%
Pendapatan Investasi Investment Income	56.865	56.451	414	0,73%

Pendapatan Lain-lain	29.315	31.405	-2.090	-6,65%
Beban Usaha & Zakat	107.803	71.411	36.392	50,96%
Laba Sebelum Pajak	**206.739**	**49.464**	157.275	317,96%
Beban Pajak Penghasilan	**38.582**	**4.327**	34.255	791,66%
Laba Tahun Berjalan	**168.157**	**45.137**	123.020	272,55%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	**168.234**	**50.460**	117.774	233,40%

BEBAN PENJAMINAN
GUARANTEE BURDEN

Beban penjaminan terdiri dari beban ujrah pembiayaan Bank, beban re-guarantee, Beban Agen, Beban IJK Loss Limit dan management fee. Beban penjaminan tahun 2021 tercatat sebesar Rp469,86 miliar atau naik 50,15% dari beban penjaminan 2020. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya pendapatan penjaminan pada tahun tersebut.

Guarantee expenses consist of Bank financing fees, re-guarantee fees, agent fees, IJK Loss Limit fees, and management fees. Guarantee expenses in 2021 were recorded at IDR 469.86 billion, an increase of 50.15% from guarantee expenses in 2020. This increase is in line with the increase in guarantee income in that year.

BEBAN KLAIM
CLAIMS BURDEN

Beban klaim Perusahaan pada 2021 tercatat sebesar Rp127,76 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh banyaknya klaim dari produk Kontra Bank Garansi dan adanya beban klaim dari produk baru yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional. Namun berdasarkan hal tadi rasio klaim pada tahun 2021 yaitu sebesar 18,55% ini masih dalam predikat sangat baik apabila dinilai dari tingkat kesehatannya menurut SAL SEOJK

The Company's claim burden in 2021 was recorded at IDR 127.76 billion. This increase was due to the large number of claims from the Bank Guarantee product and claims from a new product, namely National Economic Recovery. However, based on the above, the claim ratio in 2021 of 18.55% is still considered very good in terms of its health level according to SAL SEOJK.

PENDAPATAN INVESTASI
INVESTMENT INCOME

Pendapatan investasi selama tahun 2021 berjumlah Rp56,86 miliar atau naik 0,73% dari pendapatan investasi tahun 2020. Pendapatan investasi diperoleh dari imbal hasil atas penempatan deposito pada Bank- Bank Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara

Investment income during 2021 amounted to Rp56.86 billion, an increase of 0.73% from investment income in 2020. Investment income was derived from returns on deposits placed with Sharia Banks and Sharia Government Securities.

PENDAPATAN LAIN-LAIN BERSIH
OTHER NET INCOME

Pendapatan Lain-lain bersih tahun 2021 sebesar Rp29,31 miliar atau turun 6,65% dari pendapatan lainnya pada tahun 2020. Pendapatan lain-lain terdiri pendapatan subrogasi, dan bonus administrasi kafalah dikurangi beban lain-lain.

Net other income in 2021 amounted to IDR 29.31 billion, down 6.65% from other income in 2020. Other income consists of subrogation income and kafalah administration bonuses, less other expenses.

BEBAN PAJAK PENGHASILAN
INCOME TAX BURDEN

Beban pajak penghasilan pada 2021 terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Beban pajak penghasilan 2021 tercatat sebesar Rp38,58 miliar, naik 791,66% dari beban pajak penghasilan pada tahun 2020.

Income tax expense in 2021 consists of current tax expense and deferred tax expense. Income tax expense in 2021 is recorded at IDR 38.58 billion, an increase of 791.66% from income tax expense in 2020.

LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR

Laba komprehensif tahun berjalan pada 2021 tercatat sebesar Rp168,23 miliar, naik 233,40% dari laba komprehensif tahun berjalan pada 2020. Kenaikan ini disebabkan oleh besarnya kenaikan pendapatan kafalah bersih, sehingga laba perusahaan dapat meningkat secara signifikan.

Comprehensive income for the current year in 2021 was recorded at IDR 168.23 billion, an increase of 233.40% from comprehensive income for the current year in 2020. This increase was due to a significant increase in net guarantee income, which led to a significant increase in the company's profits.

LAPORAN ARUS KAS
CASH FLOW REPORT

Uraian / Description	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	Persentase (%) Percentage (%)
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi Net Cash Flow Used for Operating Activities	482.767	198.473	284.294	143,24%
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Flow Used for Investing Activities	(102.865)	(52.683)	(50.182)	95,25%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	152.248	70.862	81.386	114,85%
Kenaikan Kas dan Setara Kas Increase in Cash and Cash Equivalen	532.150	216.652	315.498	145,62%
Kas dan Setara Kas Awal Periode Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period	863.332	646.680	216.652	33,50%
Kas dan Setara Kas Akhir Periode Cash and Cash Equivalents at End of Period	1.395.482	863.332	532.150	61,64%

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

Pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp 483 miliar, meningkat sekitar 143% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp 198 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba sebelum pajak penghasilan dari Rp 49 miliar menjadi Rp 207 miliar, serta bertambahnya penerimaan imbal jasa kafalah yang belum merupakan pendapatan sebesar Rp 187 miliar dan kenaikan estimasi klaim Rp 118 miliar. Selain itu, perubahan aset dan liabilitas seperti penurunan piutang imbal jasa kafalah dan peningkatan utang klaim turut memperkuat arus kas operasi. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan signifikan aktivitas penjaminan dan efisiensi pengelolaan kas operasional sepanjang tahun 2021

In 2021, it was recorded at Rp 483 billion, an increase of around 143% compared to 2020, which was Rp 198 billion. This increase was mainly due to a rise in profit before income tax from IDR 49 billion to IDR 207 billion, as well as an increase in unearned guarantee service fees of IDR 187 billion and an increase in estimated claims of IDR 118 billion. In addition, changes in assets and liabilities, such as a decrease in guarantee service receivables and an increase in claim liabilities, also strengthened operating cash flow. This increase reflects significant growth in guarantee activities and operational cash management efficiency throughout 2021.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES

Pada tahun 2021 menunjukkan penggunaan kas sebesar Rp 103 miliar, meningkat sekitar 95% dibandingkan tahun 2020 yang tercatat Rp 53 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pembelian investasi menjadi Rp 130 miliar dari Rp 82 miliar pada tahun sebelumnya, serta pelepasan investasi yang menurun dari Rp 82 miliar menjadi Rp 38 miliar. Meskipun pembelian aset tetap dan aset tidak berwujud turun dari Rp 52 miliar menjadi Rp 11 miliar, total penggunaan kas tetap meningkat

In 2021, cash usage amounted to IDR 103 billion, an increase of around 95% compared to 2020, which recorded IDR 53 billion. This increase was mainly due to an increase in investment purchases to IDR 130 billion from IDR 82 billion in the previous year, as well as a decrease in investment disposals from IDR 82 billion to IDR 38 billion. Although purchases of tangible and intangible assets decreased from IDR 52 billion to IDR 11 billion, total cash usage still increased.

signifikan karena strategi perusahaan untuk memperbesar penempatan dana pada instrumen investasi sejalan dengan pertumbuhan kas dan pengelolaan likuiditas.

significant because the company's strategy to increase fund placement in investment instruments is in line with cash growth and liquidity management.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES

Pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp 152 miliar, naik sekitar 115% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp 71 miliar. Peningkatan ini terutama berasal dari penerimaan modal saham yang melonjak menjadi Rp 156 miliar dari Rp 75 miliar pada tahun sebelumnya, sedangkan pembayaran liabilitas sewa menurun dari Rp 4 miliar menjadi Rp 3 miliar. Kenaikan ini mencerminkan dukungan pemegang saham dalam memperkuat struktur permodalan perusahaan untuk mendukung ekspansi penjaminan dan menjaga kesehatan keuangan.

In 2021, it was recorded at Rp 152 billion, an increase of around 115% compared to 2020, which was Rp 71 billion. This increase mainly came from equity capital receipts, which jumped to Rp 156 billion from Rp 75 billion in the previous year, while lease liability payments decreased from Rp 4 billion to Rp 3 billion. This increase reflects shareholder support in strengthening the company's capital structure to support guarantee expansion and maintain financial health.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG
DEBT PAYMENT CAPACITY

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajibannya ditunjukan dengan beberapa rasio keuangan dengan memperhitungkan beberapa indikator keuangan Perseroan.

The Company's ability to fulfill all of its obligations is demonstrated by several financial ratios, taking into account several of the Company's financial indicators.

Uraian / Name	2021	2020	2019
Likuiditas	185,31	199,38	414,96
Solvabilitas	166,53	170,95	180,34

RASIO LIKUIDITAS
LIQUIDITY RATIO

Rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pad saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Dari gambaran rasio likuiditas di atas, dilihat bahwa kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya sangat baik dengan likuiditas sebesar 185,31%.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin Pasal 43 menyatakan: Rasio likuiditas Lembaga Penjaminan ditetapkan paling sedikit 120%. Rasio Likuiditas perusahaan jauh berada di atas batas minimal yang ditetapkan OJK.

The liquidity ratio is an indicator of a company's ability to pay all short-term financial obligations when they fall due using available current assets. From the liquidity ratio description above, it can be seen that the Company's ability to meet its short-term obligations is very good with a liquidity ratio of 185.31%.

Financial Services Authority Regulation Number 2/POJK.05/2017 concerning the Operation of Guarantee Institutions Article 43 states: The liquidity ratio of Guarantee Institutions is set at a minimum of 120%. The Company's liquidity ratio is well above the minimum limit set by the OJK.

RASIO SOLVABILITAS
SOLVENCY RATIO

Solvabilitas suatu Perseroan menunjukkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila sekiranya Perseroan dilikuidasi. Rasio solvabilitas Perseroan dalam periode tahun 2021 sebesar 166,53%. Perseroan dapat mengcover seluruh kewajibannya baik jangka panjang maupun jangka pendek.

The solvency of a Company indicates its ability to meet its short-term and long-term financial obligations in the event that the Company is liquidated. The Company's solvency ratio in the 2021 period was 166.53%. The Company is able to cover all of its long-term and short-term obligations.

Menurut POJK Nomor 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Rasio Solvabilitas perusahaan ditetapkan paling rendah 100%. Rasio Solvabilitas perusahaan jauh berada diatas batas minimal yang ditetapkan OJK.

According to POJK Number 71/POJK.05/2016 concerning the Financial Health of Insurance Companies and Reinsurance Companies, the minimum solvency ratio for companies is set at 100%. The Company's solvency ratio is well above the minimum limit set by the OJK.

KOLEKTIBILITAS PIUTANG
ACCOUNTS RECEIVABLE COLLECTIBILITY

Piutang Perseroan terdiri dari Piutang Co-Guarantee dan Piutang lain-lain. Piutang tersebut memiliki jangka waktu pendek dan berada dalam posisi lancar sehingga Perseroan tidak membentuk cadangan kerugian penurunan piutang.

The Company's receivables consist of Co-Guarantee Receivables and other receivables. These receivables have short maturities and are in good standing, so the Company does not establish a provision for impairment of receivables.

STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE

Struktur modal merupakan perbandingan antara penggunaan modal sendiri dengan pinjaman atau utang yang terdiri dari utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Perusahaan tidak memiliki utang untuk memperkuat struktur modal. Sesuai POJK No. 2/POJK.05/2017 pasal 30 lembaga penjamin dilarang memberikan pinjaman atau menerima pinjaman. Adapun utang yang tercatat dalam liabilitas perusahaan merupakan utang yang timbul dari kegiatan bisnis perusahaan dan bukan merupakan pinjaman.

Capital structure is the ratio between the use of own capital and loans or debt, which consists of short-term debt and long-term debt. The company has no debt to strengthen its capital structure. In accordance with POJK No. 2/POJK.05/2017 article 30, guarantee institutions are prohibited from providing loans or accepting loans. The debt recorded in the company's liabilities is debt arising from the company's business activities and is not a loan.

Struktur modal Perseroan sebagaimana rincian sebagai berikut:

The Company's capital structure is as follows:

Struktur Modal	2021		2020		Kenaikan (Penurunan)	
	Rp-Juta	%	Rp-Juta	%	Rp-Juta	%
Liabilitas	1.468.535	60.05%	550.000	58.50%	547.849	59.50%
Ekuitas	977.047	39.95	653.193	41.50%	323.854	49.58%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	2.445.582	100%	1.573.879	100%	871.703	55.39%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas		150.30%		140.95%		169.17%

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL
MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Sesuai POJK No. 2/POJK.05/2017 pasal 30 lembaga penjamin dilarang memberikan pinjaman atau menerima pinjaman, sehingga kebutuhan modal Perseroan sepenuhnya berasal dari modal sendiri. Apabila Perseroan membutuhkan tambahan modal untuk menunjang ekspansi bisnis dan mempertahankan market share maka Perseroan akan meminta tambahan modal kepada pemegang saham.

In accordance with POJK No. 2/POJK.05/2017 article 30, guarantee institutions are prohibited from providing loans or accepting loans, so that the Company's capital requirements come entirely from its own capital. If the Company needs additional capital to support business expansion and maintain market share, the Company will request additional capital from shareholders.

Modal Perseroan saat ini masih cukup untuk melakukan ekspansi penjaminan. Pada posisi Per 31 Desember 2021, Gearing Ratio Total Perseroan adalah 27,43 kali. Karena Gearing Ratio masih berada di bawah ketentuan maksimal yang diperkenankan, maka PT Penjaminan Jamkrindo Syariah masih mempunyai kelonggaran kapasitas untuk melakukan penjaminan. Untuk penjaminan pembiayaan produktif, kelonggaran penjaminan adalah sebesar Rp9,86 triliun tanpa memperhitungkan pelunasan dari outstanding tahun berjalan.

The Company's current capital is still sufficient to carry out guarantee expansion. As of December 31, 2021, the Company's Total Gearing Ratio was 27.43 times. Since the Gearing Ratio is still below the maximum permitted limit, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah still has the capacity to provide guarantees. For productive financing guarantees, the guarantee capacity is IDR 9.86 trillion, excluding repayments from outstanding amounts for the current year.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL
REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENTS

Untuk meningkatkan pelayanan dan proses operasional, Perseroan melakukan investasi berupa barang modal sebesar Rp 68,78 miliar di sepanjang tahun 2021 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

To improve services and operational processes, the Company invested Rp 68.78 billion in capital goods throughout 2021, as explained in the following table:

Jenis Barang Modal	Nilai Perolehan	Tujuan	Sumber dana	Mata uang
Tanah	35.493.241.552	Operasional	Modal Perusahaan	IDR
Gedung	17.065.762.345	Operasional	Modal Perusahaan	IDR
Inventaris Kantor	15.336.756.509	Operasional	Modal Perusahaan	IDR
Kendaraan	893.188.000	Operasional	Modal Perusahaan	IDR

Seluruh transaksi tersebut menggunakan mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran sehingga Perseroan tidak memiliki resiko mata uang asing.

All transactions use the Rupiah as the currency of payment, so the Company has no foreign currency risk.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI SERTA PROYEKSI 2022
COMPARISON OF TARGETS AND REALIZATIONS AND 2022 PROJECTIONS

Laporan Laba Rugi	Realisasi 2021	Target 2021	Proyeksi 2022 (RKAP 2022)
Pendapatan Penjaminan			
Imbal Jasa Kafalah	688.615.366.026	748.875.291.727	642.861.148.891
Pendapatan Ujrah Re-guarantee	28.693.400.082	21.948.981.125	31.279.003.315
Jumlah Pendapatan Penjaminan	**717.308.766.108**	**770.824.272.852**	**674.140.152.205**
Beban Penjaminan			
Beban Ujrah	42.902.455.909	45.098.404.821	52.392.686.659
Beban Kafalah Lain	45.859.699.931	58.827.561.426	30.057.482.394
Beban Re Guarantee	154.694.817.801	119.893.292.964	202.197.208.672
Beban Klaim	127.756.071.585	201.108.449.256	234.576.537.056
Kenaikan Estimasi Klaim	117.733.278.922	256.405.963.692	39.610.098.166
Subrogasi	-36.173.706.102	-51.062.466.033	-54.509.441.925
Jumlah Beban Penjaminan	**452.772.618.047**	**630.271.206.126**	**504.324.571.022**
Penjaminan Bersih	**264.536.148.061**	**140.553.066.726**	**169.815.581.183**
Pendapatan Investasi Bersih	56.865.277.562	69.317.602.091	82.783.943.222
Pendapatan Lain-lain Bersih	-4.147.952.075	3.636.233.523	2.537.885.784
Beban Usaha	100.183.148.890	100.700.270.265	114.019.928.339

Laporan Laba Rugi	Realisasi 2021	Target 2021	Proyeksi 2022 (RKAP 2022)
Laba Sebelum Pajak	**217.070.324.658**	**112.806.632.075**	**141.117.481.850**
Beban Pajak	48.913.242.473	13.438.499.321	27.697.823.988
Laba Tahun Berjalan	**168.157.082.186**	**99.368.132.754**	**113.419.657.862**
Pendapatan Komprehensif Lainnya	76.456.412	-	-
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	**168.080.625.774**	**99.368.132.754**	**113.419.657.862**

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH LAPORAN
MATERIAL INFORMATION AND FACTS AFTER THE REPORT

Perseroan tidak memiliki informasi dan fakta material yang terjadi setelah Laporan Akuntan.

The Company has no material information or facts that occurred after the Accountant's Report.

PROSPEK USAHA DAN RENCANA PENGEMBANGAN BISNIS
BUSINESS PROSPECTS AND BUSINESS DEVELOPMENT PLANS

Pelaku Industri penjaminan optimis bahwa pada 2022 industri penjaminan diperkirakan akan terus tumbuh. Induk usaha Perseroan sendiri berencana akan meningkatkan sinergi bisnis terutama dengan BUMN, artinya PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dapat membuat sinergi bisnis tersebut.

Guarantee industry players are optimistic that in 2022 the guarantee industry is expected to continue to grow. The Company's parent company itself plans to increase business synergies, especially with state-owned enterprises, which means that PT Penjaminan Jamkrindo Syariah can create these business synergies.

Dalam rangka menyambut pertumbuhan, usaha penjaminan juga akan mempercepat layanan dengan memperkuat proses bisnis termasuk meningkatkan layanan teknologi informasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

In order to welcome this growth, the guarantee business will also accelerate its services by strengthening business processes, including improving information technology services and continuously increasing human resource capacity.

Sesuai data Kementerian Koperasi dan UKM, potensi bisnis penjaminan masih terbuka lebar untuk tumbuh jika dilihat dari jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di Indonesia sebanyak 50,77 juta orang. Dari jumlah itu, UKM yang telah dijamin oleh perusahaan penjaminan baru sekitar 11,8 juta UKM berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2021.

According to data from the Ministry of Cooperatives and SMEs, the potential for the guarantee business to grow remains wide open, considering that there are 50.77 million small and medium enterprises (SMEs) in Indonesia. Of that number, only around 11.8 million SMEs have been guaranteed by guarantee companies, based on data from the Financial Services Authority (OJK) as of December 2021.

ASPEK PEMASARAN
MARKETING ASPECTS

Dalam aspek pemasaran, Jamkrindo Syariahterus memperkuat jangkauan layanan melalui jaringan kerja yang saat ini terdiri atas 15 kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kehadiran jaringan ini dirancang untuk meningkatkan penetrasi produk penjaminan syariah sekaligus memastikan bahwa UMKM dan mitra pembiayaan di seluruh daerah dapat mengakses layanan penjaminan yang sesuai dengan prinsip syariah secara lebih mudah dan merata.
Selain jaringan perusahaan, pemasarannya juga diperkuat melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga keuangan, baik perbankan syariah maupun lembaga non-bank, sehingga
distribusi produk penjaminan semakin luas dan efektif pada tingkat nasional.

In terms of marketing, Jamkrindo Syariah continues to strengthen its service coverage through a network that currently consists of 15 branch offices spread across various regions in Indonesia. This network is designed to increase the penetration of sharia guarantee products while ensuring that MSMEs and financing partners in all regions can access guarantee services that are in accordance with sharia principles more easily and evenly.
In addition to the company's network, its marketing is also strengthened through collaboration with various financial institutions, both sharia banks and non-bank institutions, so that
the distribution of guarantee products is more widespread and effective at the national level.

STRATEGI PEMASARAN
MARKETING STRATEGIES

Meningkatkan pangsa pasar penjaminan eksisting di mitra penerima jaminan yang telah ada melalui upaya pemasaran yang lebih intensif, yaitu

- Melakukan sosialisasi penjaminan kepada Divisi Commercial BRISyariah dalam upaya menjalin Kerjasama KBG, Penjaminan Pembiayaan Konstruksi dan Pembiayaan Umum;
- Penambahan pairing kantor cabang Bank Mandiri dalam upaya penambahan mitra bisnis
- Volume Penjaminan sepanjang tahun 2021 sebesar Rp55,08 Triliun;
- Pencapaian IJK sepanjang tahun 2021 sebesar Rp1.000 Miliar

Increasing the market share of existing guarantees at existing guarantee recipients through more intensive marketing efforts, namely

Conducting guarantee socialization to the Commercial Division of BRISyariah in an effort to establish KBG Cooperation, Construction Financing Guarantees and General Financing;

Adding Bank Mandiri branch office pairings in an effort to increase business partners

The volume of guarantees throughout 2021 amounted to IDR 55.08 trillion;

IJK's achievement throughout 2021 amounted to IDR 1,000 billion.

PANGSA PASAR
MARKET SHARE

Perluasan pangsa pasar serta Pengoptimalan Jaringan Layanan melalui Kantor Pemasaran serta pendirian jaringan kantor baru di wilayah potensial.

Expansion of market share and optimization of the service network through marketing offices and the establishment of a new network of offices in potential areas.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM MANAJEMEN DAN KARYAWAN
SHARE OWNERSHIP PROGRAM MANAGEMENT AND EMPLOYEES

Pada 2021 Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham baik oleh manajemen maupun karyawan ESOP (Employee Stock Option Program) dan MSOP (Management Stock Option Program).

In 2021, the Company did not have any share ownership programs for either management or employees, such as ESOP (Employee Stock Option Program) and MSOP (Management Stock Option Program).

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN AFILIASI
INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS INVOLVING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATES

Dalam melakukan usaha, adakalanya Perusahaan bertransaksi dengan pihak yang terafiliasi dan telah disesuaikan dengan PSAK No. 7 (Revisi 2015) tentang "Pengungkapan pihak-pihak yang berelasi".

In conducting its business, the Company sometimes transacts with affiliated parties and has complied with PSAK No. 7 (Revised 2015) on "Disclosure of Related Parties".

Pihak Afiliasi	Sifat Hubungan	Jenis Transaksi
PT Jamkrindo	Pemegang Saham	Piutang IJK Co Guarantee, Pendapatan Ujrah Re-Guarantee dan Management Fee
BOC & BOD	Manajemen Kunci	Gaji dan Tunjangan

Piutang Co-Guarantee merupakan Piutang Co- Guarantee pihak berelasi. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.18/PKS/Jamsyar/IV/2018 antara PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dengan PT Jamkrindo Indonesia tentang Penjaminan Pembiayaan Bersama.

Perjanjian dengan PT Jamkrindo ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020. Piutang re-guatantee merupakan piutang atas pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan mitra re-guarantee.

Co-Guarantee Receivables are Co-Guarantee Receivables of related parties. Based on Cooperation Agreement No.18/PKS/Jamsyar/IV/2018 between PT Penjaminan Jamkrindo Syariah and PT Jamkrindo Indonesia regarding Joint Financing Guarantees.

This agreement with PT Jamkrindo is valid from January 1, 2018 to December 31, 2020. Re-guarantee receivables are receivables for claim payments to the guarantee recipient that are the responsibility of the re-guarantee partner.

PENGARUH PERUBAHAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PERUSAHAAN
THE EFFECT OF CHANGES IN REGULATIONS AND LEGISLATION ON COMPANIES

a. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan.
1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
b. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan.
1) Dengan adanya Undang - undang no 1 tahun 2016 tentang Penjaminan yang melarang Perusahaan yang tidak mempunyai izin usaha Penjaminan untuk melakukan kegiatan penjaminan paling lambat Januari 2018 maka peluang pasar penjaminan semakin besar

a. Name of the legislation that has undergone changes.
1) Law No. 1 of 2016 concerning Guarantees
b. The impact (quantitative and/or qualitative) on the company (if significant) or a statement that the impact is insignificant.
1) With the enactment of Law No. 1 of 2016 on Guarantees, which prohibits companies that do not have a guarantee business license from conducting guarantee activities by January 2018 at the latest, the opportunities in the guarantee market are increasing.

KEBIJAKAN AKUNTANSI TERHADAP PERUSAHAAN
ACCOUNTING POLICY FOR COMPANIES

Pada tanggal 1 Januari 2018, Perusahaan menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan ("PSAK") dan interpretasi standar akuntansi keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

On January 1, 2018, the Company implemented new and revised financial accounting standards ("PSAK") and financial accounting interpretations ("ISAK") effective as of that date. Changes in the Company's accounting policies have been made as required, in accordance with the transition provisions in each standard and interpretation.

Laporan keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 (Revisi 2011), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 71, 72, 73, 63.

The financial statements of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Financial Accounting Standards (PSAK) No. 101 (Revised 2011), "Presentation of Sharia Financial Statements," PSAK 71, 72, 73, and 63.

Penerapan dari standar dan interpretasi baru berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- Amandemen PSAK 71 : Pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan yang berupa piutang, pinjaman, atau kredit
- Amandemen PSAK 72 : Pengakuan pendapatan kontrak yang tadinya rigid (rule based) menjadi berbasis prinsip (principle based).
- Amandemen PSAK 73 : pembukuan transaksi sewa dari sisi penyewa (lessee)
- Amandemen PSAK 63 : Pernyataan ini diterapkan untuk laporan keuangan, termasuk laporan keuangan konsolidasian, dari setiap entitas yang mata uang fungsionalnya adalah mata uang dari suatu ekonomi yang mengalami hiperinflasi

The application of the following new standards and interpretations did not result in any substantial changes to accounting policies and did not have a significant impact on the amounts reported in the current year or the previous year:

Amendment to PSAK 71: Provisions for impairment of financial assets in the form of receivables, loans, or credits
Amendment to PSAK 72: Recognition of contract revenue, which was previously rule-based, to become principle-based.
Amendment to PSAK 73: Accounting for lease transactions from the lessee's perspective (lessee)
Amendment to PSAK 63: This statement applies to financial statements, including consolidated financial statements, of any entity whose functional currency is the currency of an economy experiencing hyperinflation.

KEPATUHAN PAJAK
TAX COMPLIANCE

Pada tahun 2021 Perseroan telah melakukan kewajiban perpajakan berupa pemungutan dan penyetoran berbagai jenis pajak dengan rincian sebagai berikut:

In 2021, the Company fulfilled its tax obligations in the form of collecting and paying various types of taxes, with the following details:

- Pajak Penghasilan (PPh)
  Tahun 2021 Penjaminan Jamkrindo Syariah melakukan kewajiban PPh pasal 21 dan PPh pasal 23 sedangkan untuk PPh badan belum ada kewajiban membayar PPh Badan dikarenakan secara fiskal perusahaan masih rugi.

Income Tax (PPh)
In 2021, Jamkrindo Syariah Guarantee fulfilled its PPh Article 21 and PPh Article 23 obligations, while there was no obligation to pay corporate income tax (PPh Badan) because the company was still operating at a loss.

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tidak ada kewajiban menerbitkan PPN karena bukan PKP. Atas PPN yang diterima dari rekanan akan dibiayakan pada bulan berjalan.

Value Added Tax (VAT)
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah has no obligation to issue VAT because it is not a VAT taxpayer. VAT received from partners will be expensed in the current month.

Perseroan telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Total kewajiban pajak PPh 21 per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp62.273 juta

The Company has fulfilled its tax obligations in accordance with applicable regulations. Total income tax (PPh 21) obligations as of December 31, 2021 amounted to IDR 62,273 million.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menilai kelangsungan usaha PT Penjaminan Jamkrindo Syariah yaitu;
1. Klaim dan Subrogasi
2. Reasuransi
3. Perhitungan LOB per Produk

Matters to consider in assessing the going concern of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah are as follows:
1. Claims and Subrogation
2. Reinsurance
3. LOB Calculation per Product

Penilaian atas Hal-Hal yang Berpotensi atas Kelangsungan Usaha Perseroan Mengevaluasi beban klaim yang muncul. Dilakukan upaya-upaya penagihan yang intensif sehingga diharapkan tingkat kesuksesan penagihan subrogasi dapat meningkat dan meminimalkan kerugian.

Assessment of Matters that Potentially Affect the Company's Business Continuity Evaluate the claim expenses that arise. Intensive collection efforts are carried out so that the success rate of subrogation collection can be increased and losses minimized.

Pengelolaan manajemen risiko lebih intensif terkait meningkatnya risiko klaim yang dihadapi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Mulai profil risiko, event of default, dan lain-lain, agar dapat dibangun dan diperbaharui sesuai kondisi internal Perseroan.

More intensive risk management related to the increasing claim risks faced by PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Starting from risk profiles, events of default, and others, so that they can be developed and updated in accordance with the Company's internal conditions.

Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan penilaian adalah dengan evaluasi produk penjaminan dan dengan memperhatikan Rasio Klaim dan Default Ratio.

The assumptions used by management in conducting assessments are based on the evaluation of guarantee products and by considering the Claim Ratio and Default Ratio.

Perusahaan juga melakukan evaluasi pengelolaan produk melalui monitoring perhitungan Line of Business (LOB) secara berkala untuk masing-masing produk dan masing-masing Penerima Jaminan, sehingga perusahaan mengetahui kondisi profitabilitas setiap produk.

The company also evaluates product management through regular monitoring of Line of Business (LOB) calculations for each product and each Guarantee Recipient, so that the company is aware of the profitability of each product.

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN
COMPANY HEALTH LEVEL

Total aset 2021 mengalami pertumbuhan menjadi sebesar 55,39% dari tahun 2020. Untuk total liabilitas tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 59,50% dari tahun 2020 sedangkan total ekuitas tumbuh sebesar 49,58% dari tahun 2020. Tingginya pertumbuhan liabilitas disebabkan oleh tingginya pendapatan ditangguhkan. Pendapatan ditangguhkan merupakan Imbal Jasa Kafalah yang akan menjadi pendapatan di tahun mendatang. Pendapatan ditangguhkan akan diakui sebagai pendapatan selama sisa jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Kafalah (SK). Pendapatan ditangguhkan Per 31 Desember 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 41,54%.

Total assets in 2021 grew by 55.39% from 2020. Total liabilities in 2021 grew by 59.50% from 2020, while total equity grew by 49.58% from 2020. The high growth in liabilities was due to high deferred income. Deferred income is Kafalah Service Fees that will become income in the coming year. Deferred income will be recognized as income during the remaining guarantee period and allocated based on the month of issuance of the Kafalah Certificate (SK). Deferred income as of December 31, 2021, grew by 41.54%.

Selain itu, tingkat kesehatan perusahaan juga dalam kategori "SANGAT SEHAT" berdasarkan perhitungan beberapa indikator keuangan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.05/2018 tentang kesehatan keuangan lembaga penjamin, sebagai berikut:

In addition, the company's financial health is also in the "VERY HEALTHY" category based on the calculation of several financial indicators in accordance with the Financial Services Authority Circular Letter Number 18/SEOJK.05/2018 concerning the financial health of guarantee institutions, as follows:

Syariah Jamkrindo

05

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

URAIAN DEWAN KOMISARIS
DESCRIPTION OF COMMISSIONERS

Peran Dewan Komisaris dalam struktur Tata Kelola Perusahaan berfungsi sebagai organ yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan. Dewan Komisaris juga memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktik GCG yang diterapkan Perusahaan. Dengan kata lain, penekanan peran Dewan Komisaris adalah untuk menghidupkan proses check and balances pengelolaan yang dijalankan oleh Manajemen Perusahaan.
Dewan Komisaris bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit.

Sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 68 tanggal 19 September 2014, pasal 14 ayat 1 berbunyi "Perseroan diawasi oleh suatu Dewan Komisaris yang terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama". Hal tersebut juga dimuat dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 108 ayat 3 yang berbunyi "Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih." Dan ayat 4 yang berbunyi "Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris".

The role of the Board of Commissioners in the Corporate Governance structure is to function as an organ that has the authority to conduct general and/or specific supervision in accordance with the Articles of Association and to provide advice to the Board of Directors in managing the Company. The Board of Commissioners also has the task of monitoring the effectiveness of the GCG practices implemented by the Company. In other words, the emphasis of the Board of Commissioners' role is to activate the check and balances process of management carried out by the Company's Management. The Board of Commissioners is collectively responsible for supervising and advising the Board of Directors and ensuring that the Company implements GCG at all levels or tiers of the organization. The positions of each member of the Board of Commissioners, including the President Commissioner, are equal. In order to support the implementation of its duties, the Board of Commissioners is assisted by an Audit Committee

As stated in the Articles of Association of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Number 68 dated September 19, 2014, article 14 paragraph 1 reads "The company is supervised by a Board of Commissioners consisting of at least 3 (three) people, one of whom can be appointed as the Chief Commissioner". This is also stated in Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 dated August 16, 2007 concerning Limited Liability Companies, article 108 paragraph 3, which reads: "The Board of Commissioners shall consist of 1 (one) member or more." And paragraph 4, which reads: "A Board of Commissioners consisting of more than one (1) member is a council, and each member of the Board of Commissioners cannot act independently, but only based on the decisions of the Board of Commissioners."

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS PER 31 DESEMBER 2021
COMPOSITION OF COMMISSIONERS ASDECEMBER 31, 2021

Nama / Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Date
Aribowo	Komisaris / Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Penjaminan Jamkrindo Syariah disingkat PT Jamkrindo Syariah No 19 tanggal 24 Oktober 2019 sebagai Komisaris Utama (2019-2024)Deed of Statement of Decision Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, abbreviated as PT Jamkrindo Syariah No. 19 dated October 24, 2019 as President Commissioner (2019-2024)
Wildan	Komisaris Independent Independent Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Penjaminan Jamkrindo Syariah disingkat PT Jamkrindo Syariah No 19 tanggal 24 Oktober 2019 sebagai Komisaris Independen (2019-2024)Deed of Statement of Decision Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, abbreviated as PT Jamkrindo Syariah No. 19 dated October 24, 2019 as Independent Commissioner (2019-2024)
Muhammad Syakir Sula	Komisaris / Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Penjaminan Jamkrindo Syariah disingkat PT Jamkrindo Syariah No 19 tanggal 24 Oktober 2019 sebagai Komisaris (2019-2024) / Deed of Statement of Decision Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, abbreviated as PT Jamkrindo Syariah No. 19 dated October 24, 2019 as Commissioner (2019-2024)

Profil masing-masing Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

The profiles of each member of the Board of Commissioners can be found in the Board of Commissioners Profile section of the Company Profile chapter in this annual report.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris dijelaskan pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 68 tanggal 19 September 2014 pada Pasal 15 sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas :
   - Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   - Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai degan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan Keputusan Rapat umum Pemegang Saham
   - Untuk melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
   - Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
2. Para anggota Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi surat berharga dan lain-lain, serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Jika dianggap perlu Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
4. Para anggota Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan Direksi wajib membberikan penjelasan
5. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak bisa setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jikalau mereka bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. Pemberhentian semetara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula sedangkan yang diberhentikan sementara itu diberikan kesempatan untuk hadir dan membela diri. Rapat ini dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
6. Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu batal demi hukum.
7. Jikalau karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota komisaris, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mengangkat Dewan Komisaris baru.
8. Dalam hubungannya dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Anggaran Dasar ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
   - Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta perubahan dan tambahannya, laporan berkala dan laporan-laporan lainnya dari Direksi.

The duties, authorities, and obligations of the Board of Commissioners are explained in the Deed of Establishment of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Limited Liability Company Number 68 dated September 19, 2014, in Article 15 as follows:

1. The Board of Commissioners shall:
   - Supervise the management policies of the Company carried out by the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors, including regarding the Company's development plans, the Company's Work Plan and Annual Budget, the implementation of the provisions of the Articles of Association and the Decisions of the General Meeting of Shareholders, and the applicable laws and regulations.
   - Performing duties, authorities, and responsibilities in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the decisions of the General Meeting of Shareholders.
   - To carry out the interests of the Company by taking into account the interests of the shareholders and being accountable to the General Meeting of Shareholders.
   - Examining and reviewing the Annual Report prepared by the Board of Directors and signing the report.
2. The members of the Board of Commissioners, either jointly or individually, shall at all times have the right to enter buildings and yards or other places used or controlled by the Company and shall have the right to examine books, supporting documents, inventories, examine and reconcile cash balances for the purpose of verifying securities and others, as well as to be informed of all actions taken by the Board of Directors.
3. If deemed necessary, the Board of Commissioners has the right to request the assistance of experts in carrying out its duties for a limited period of time at the expense of the Company.
4. The members of the Board of Commissioners have the right to request explanations on all matters asked of the Board of Directors, and the Board of Directors is obliged to provide explanations.
5. The Board of Commissioners, by a majority vote, has the right at any time to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors if they act contrary to these articles of association or neglect their duties or if there are urgent reasons for the Company. The temporary dismissal must be notified in writing to the person concerned, accompanied by the reasons for the action. Within 30 (thirty) days after the temporary dismissal, an Extraordinary General Meeting of Shareholders must be held to decide whether the Board of Directors member concerned will be permanently dismissed or reinstated to their original position, while those who have been temporarily dismissed are given the opportunity to attend and defend themselves. This meeting shall be chaired by one of the Shareholders elected by and from among those present.
6. If the Extraordinary General Meeting of Shareholders is not held within 30 (thirty) days after the temporary dismissal, the temporary dismissal shall be null and void.
7. If, for any reason, the Company does not have any commissioners, then within 30 (thirty) days after the vacancy occurs, an Extraordinary General Meeting of Shareholders must be held to appoint a new Board of Commissioners.
8. In relation to the duties of the Board of Commissioners as referred to in Article 15 of these Articles of Association, the Board of Commissioners shall be obliged to:
   - Provide opinions and advice to Shareholders regarding the Company's development plans, the Company's Work Plan and Annual Budget and any amendments and additions thereto, periodic reports and other reports from the Board of Directors.

- Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Perseroan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikkan yang harus ditempuh.
- Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan.
- Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
- Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan, kecuali apabila anggota Komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa :
  i. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
  ii. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
  iii. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

- Overseeing the implementation of the Company's Work Plan and budget and submitting the results of assessments and opinions to the General Meeting of Shareholders.
- Monitoring the Company's activities and, in the event that the Company shows signs of decline, immediately reporting to the General Meeting of Shareholders with recommendations on corrective measures to be taken.
- Providing opinions and recommendations to the General Meeting of Shareholders on any other matters deemed important for the management of the Company.
- Performing other supervisory duties as determined by the General Meeting of Shareholders.
- Each member of the Board of Commissioners shall be fully personally liable if he/she is guilty of or negligent in performing his/her duties for the benefit and business of the Company, causing loss to the Company, unless the member of the Board of Commissioners concerned can prove that:
  i. The loss was not due to his/her fault or negligence.
  ii. He/she has managed the Company in good faith and with due care for the benefit and in accordance with the aims and objectives of the Company.
  iii. They had no direct conflict of interest in the management actions that resulted in the loss; and they had taken action to prevent the loss from occurring or continuing.

Kemudian dijelaskan juga tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dijelaskan dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor KEP-04/DP-JAMSYAR/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tugas dan tanggung jawab masing-masing Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. **Tugas Komisaris Utama**
   - Pengawasan bidang keuangan dan operasional.
   - Pengawasan bidang bisnis dan Penjaminan.
2. **Tugas Anggota Komisaris**
   - Pengawasan bidang SDM, Umum, dan IT
   - Pengawasan bidang Hukum, Operasional dan Teknik Penjaminan.
3. **Tugas Komisaris Independen**
   - Pengawasan bidang koorporat bisnis dan manajemen risiko.
   - Pengawasan pelaksanaan tatakelola perusaahan yang baik dan benar.

The duties and responsibilities of the Board of Commissioners are also explained in the Decision of the Board of Commissioners of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Number KEP-04/DP -JAMSYAR/II/2020 dated February 21, 2020 concerning the division of duties of the Board of Commissioners of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, the duties and responsibilities of each member of the Board of Commissioners are as follows:

1. **Duties of the President Commissioner**
   - Supervision of finance and operations.
   - Supervision of business and guarantee activities
2. **Duties of the Commissioner Members**
   - Supervision of human resources, general affairs, and IT.
   - Supervision of legal affairs, operational activities, and guarantee techniques.
3. **Duties of the Independent Commissioner**
   - Supervision of corporate business and risk management.
   - Supervision of the implementation of good and proper corporate governance.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS
PERFORMANCE EVALUATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris juga dilakukan penilaian dengan kriteria mencakup;

1. Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak
2. Dewan Komisaris mampu memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
3. Dewan Komisaris mampu memberikan persetujuan dalam hal DPS memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris
4. Dewan Komisaris mampu memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Lembaga Penjamin, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain
5. Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.

The performance of the Board of Commissioners is also assessed based on the following criteria:

1. The Board of Commissioners is capable of performing its supervisory duties and providing advice to the Board of Directors in maintaining a balance of interests among all parties.
2. The Board of Commissioners is capable of monitoring the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance.
3. The Board of Commissioners is able to provide approval in cases where the DPS requires assistance from committee members whose organizational structure is under the Board of Commissioners.
4. The Board of Commissioners is able to ensure that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the internal audit unit of the Guarantee Institution, external auditors, the results of supervision by the Financial Services Authority and/or the results of supervision by other authorities.
5. Members of the Board of Commissioners are able to refrain from conducting transactions that have a conflict of interest with the activities of the Guarantee Institution where the members of the Board of Commissioners in question serve.

6. Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.
7. Anggota Dewan Komisaris mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
8. Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak mencampuri kegiatan operasional Lembaga Penjamin yang menjadi tanggung jawab Direksi.
9. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi secara jelas.
10. Dewan Komisaris mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas. Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan memiliki paling sedikit 1 (satu) Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia
11. Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dan menetap dari instansi berwenang
12. Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain dan tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.
13. Anggota Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
14. Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
15. Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.
16. Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masingmasing anggota Dewan Komisaris dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

6. Members of the Board of Commissioners shall not use their position at the Guarantee Institution where they serve for personal, family, and/or other parties' interests that may harm or reduce the profits of the Guarantee Institution where they serve.
7. Members of the Board of Commissioners are able to avoid taking and/or receiving personal benefits from the Guarantee Institution where the member of the Board of Commissioners serves, other than remuneration and facilities determined based on the decision of the GMS.
8. Members of the Board of Commissioners are able to refrain from interfering in the operational activities of the Guarantee Institution, which are the responsibility of the Board of Directors.
9. The results of the Board of Commissioners' meetings are recorded in the minutes of the Board of Commissioners' meetings, which are joint decisions of all members of the Board of Commissioners and are well documented, including any dissenting opinions that arise.
10. The Board of Commissioners is able to ensure effective, accurate, and quick decision-making and can act independently in carrying out its duties. The Guarantee Institution has at least 2 (two) members of the Board of Commissioners and at least 1 (one) member of the Board of Commissioners who is domiciled in Indonesia.
11. Members of the Board of Commissioners who are foreign nationals have work and residence permits from the competent authorities.
12. Members of the Board of Commissioners of the Guarantee Institution do not hold concurrent positions as members of the Board of Commissioners in more than 3 (three) Guarantee Institutions or other business entities and do not come from active employees or officials of the Financial Services Authority.
13. Members of the Board of Commissioners prepare a report on the activities of the Board of Commissioners, which is part of the report on the implementation of Good Corporate Governance.
14. Members of the Board of Commissioners of the Guarantee Institution hold Board of Commissioners meetings at least once every three (3) months.
15. Members of the Board of Commissioners shall attend at least 75% (seventy-five percent) of the Board of Commissioners' meetings in a period of 1 (one) year.
16. The number of Board of Commissioners' meetings that have been held and the attendance of each member of the Board of Commissioners shall be included in the report on the implementation of Good Corporate Governance.

KOMISARIS INDEPENDEN
INDEPENDENT COMMISSIONERS

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN
CRITERIA FOR DETERMINING INDEPENDENT COMMISSIONERS

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komisaris Independen PT Penjaminan Jamkrindo Syariah berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Indonesia, sebagaimana diatur di POJK Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjaminan, pasal 24 ayat 2. Komisaris Independen PT Penjaminan Jamkrindo Syariah telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who are not affiliated with shareholders, members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners and/or members of the Supervisory Board, i.e. they have no financial, management, share ownership and/or family relationships with shareholders, members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners and/or members of the Supervisory Board or other relationships that could affect their ability to act independently.

The Independent Commissioner of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah is an Indonesian citizen and resides in Indonesia, as stipulated in POJK Number 3/POJK.05/2017 dated January 11, 2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, article 24 paragraph 2. The Independent Commissioner of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah has met the following requirements:

1. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Lembaga Penjamin, dalam Lembaga Penjamin yang sama;
2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
3. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Penjaminan, Penjaminan Syariah, Penjaminan Ulang, dan/atau Penjaminan Ulang Syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; dan
4. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat. (Hal tersebut diatas sesuai dengan POJK Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjaminan, pasal 25).

Komisaris Independen tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana diatur dalam UU PT No.40 Tahun 2007 Pasal 120.

1. Not having any affiliation with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Supervisory Board, or shareholders of the Guarantee Institution, within the same Guarantee Institution;
2. Has never been a member of the Board of Directors, Board of Commissioners, DPS, or held a position one level below the Board of Directors at the same Guarantee Institution or other business entity affiliated with the Guarantee Institution within the last six (6) months;
3. Understands the laws and regulations in the fields of Guarantee, Sharia Guarantee, Re-guarantee, and/or Sharia Re-guarantee and other relevant laws and regulations; and
4. Have a good understanding of the financial condition of the Guarantee Institution where the Independent Commissioner is employed. (The above is in accordance with POJK Number 3/POJK.05/2017 dated January 11, 2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, article 25).

Independent Commissioners are not affiliated with major shareholders, members of the Board of Directors, or other members of the Board of Commissioners as stipulated in Article 120 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.

KOMISARIS INDEPENDEN PERUSAHAAN TAHUN 2021
INDEPENDENT COMPANY COMMISSIONER FOR 2021

Nama / Name	**Dasar Pengangkatan** Date	**Masa Jabatan** Position	**Periode** Position
Wildan	Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Penjaminan Jamkrindo Syariah disingkat PT Jamkrindo Syariah No 19 tanggal 24 Oktober 2019 sebagai Komisaris Utama (2019-2024) / Deed of Statement of Decision Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, abbreviated as PT Jamkrindo Syariah No. 19 dated October 24, 2019 as President Commissioner (2019-2024)	5 Tahun / 5 Years	2019 - 2024

URAIAN DIREKSI
DESCRIPTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING DIREKSI
DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF EACH DIRECTOR

Tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris dijelaskan pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 68 tanggal 19 September 2014 pada Pasal 12 sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Direksi adalah :
   - Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan.
   - Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya utuk kepentingan dan usaha Perseroan.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan.

The duties, authorities, and obligations of the Board of Commissioners are explained in the Deed of Establishment of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Limited Liability Company Number 68 dated September 19, 2014, in Article 12 as follows:

1. The main tasks of the Board of Directors are:
   - Leading and managing the Company in accordance with the Company's objectives and purposes and constantly striving to improve the Company's efficiency and effectiveness.
   - Controlling, maintaining, and managing the Company's assets.
2. The Board of Directors is fully responsible for carrying out its duties in the interests of the Company in achieving its aims and objectives.
3. Each member of the Board of Directors is required to perform their duties in good faith and with full responsibility in the interests and for the benefit of the Company, in compliance with applicable laws and regulations.
4. Each member of the Board of Directors is personally liable for any losses incurred by the Company if they are guilty of misconduct or negligence in performing their duties in the interests and for the benefit of the Company.
5. The Board of Directors has the right to represent the Company in and out of court and to perform all actions and deeds relating to the management and ownership of the Company's assets and to bind the Company to other parties and/or other parties to the Company, subject to the restrictions set forth.

6. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk :
   - Menerima pinjaman jangka pendek dari bank atau Lembaga Keuangan lain.
   - Memberikan pinjaman jangka pendek atas nama Perseroan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf c pasal ini.
   - Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek.
   - Melepaskan dan menghapuskan aktiva bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun dan menghapuskan piutang macet, persediaan barang mati sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
   - Mengadakan kerjasama operasi atau kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun siklus usaha.
   - Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi
7. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan (yang bukan merupakan barang dagangan) baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) hruf c dan d serta ayat (10) huruf d Pasal ini.
8. Direksi dengan dalih apapun tidak dibenarkan untuk memberikan pinjaman kepada pemegang saham.
9. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/ nasional di wilayah Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
10. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikan persetujuan tersebut diberikan setelah mendengar pendapat dan saran dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, yaitu :
    - Mengambil bagian, baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perseroan lain atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru.
    - Melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan Perseroan dalam Perseroan lain atau badan-badan lain.
    - Menerima dan/atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang serta memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional/melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan ayat (6) huruf b.
    - Melepaskan dan/atau menghapuskan aktiva tetap atau mengagunkan aktiva tetap dalam rangka penarikan kredit jangka menengah/panjang dengan memperhatikan ketentuan ayat (6) huruf c dan d serta ayat (7) Pasal ini.
    - Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Owned/BOO) dan Perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan bagi Perseroan yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha.

6. The following actions of the Board of Directors must obtain written approval from the Board of Commissioners:
   - Accepting short-term loans from banks or other financial institutions.
   - Granting short-term loans on behalf of the Company with due regard to the provisions referred to in paragraph (10) letter c of this article.
   - Pledging fixed assets necessary for obtaining short-term credit.
   - Disposing of and writing off movable assets with an economic life of up to 5 (five) years, as is customary in the industry, and writing off bad debts and obsolete inventory up to a certain value determined by the General Meeting of Shareholders.
   - Entering into an operating agreement or management contract for a term not exceeding 1 (one) business cycle.
   - Establishing and adjusting the organizational structure
7. Legal actions to transfer, release rights or make the Company's entire or most of its assets (which are not merchandise) as collateral for debt, whether in a single transaction or several independent or related transactions, must obtain the approval of the General Meeting of Shareholders attended or represented by Shareholders who own at least ¾ (three-quarters) of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights and approved by at least ¾ (three-quarters) of the total number of valid votes cast at the meeting, taking into account the provisions referred to in paragraph (6) letters c and d and paragraph (10) letter d of this Article.
8. The Board of Directors is not permitted to grant loans to shareholders under any circumstances.
9. Legal actions to transfer or use as collateral for debt or release rights to the Company's assets as referred to in paragraph (7) of this Article must also be announced in two Indonesian-language daily newspapers that are published and widely circulated/national in the territory of the Republic of Indonesia no later than thirty (30) days from the date of the legal action.
10. The following actions may only be taken by the Board of Directors after obtaining approval from the General Meeting of Shareholders, and such approval shall be given after hearing the opinions and advice of the Board of Commissioners with due regard to the applicable provisions, namely:
    - Participating, either partially or wholly, in other companies or entities, or establishing new companies.
    - Divesting part or all of the Company's participation in other companies or entities.
    - Receiving and/or granting medium/long-term loans and granting short-term loans that are not operational/exceed a certain amount determined by the General Meeting of Shareholders, with due regard to the provisions of paragraph (6) letter b.
    - Disposing of and/or writing off fixed assets or pledging fixed assets in order to obtain medium/long-term loans, with due regard to the provisions of paragraph (6) letters c and d and paragraph (7) of this Article.
    - Establishing cooperation with business entities or other parties in the form of joint operations, management contracts, licensing agreements, Build, Operate and Transfer (BOT) agreements, Build, Operate and Own (BOO), and other agreements that have a financial impact on the Company and are valid for a period of more than 1 (one) year or 1 (one) business cycle.

- Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan menghapuskan persediaan barang mati yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan ayat (6) huruf d Pasal ini.

11. Selain tersebut dalam ayat (6), ayat (7) dan ayat (10) Pasal ini, Rapat Umum Pernegang Saham dapat menentukan pembatasan- pembatasan dan/atau syarat-syarat lain.-
12. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut, telah disetujui dalam rapat Direksi. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
13. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

15. Dalam hubungannya dengan tugas pokok Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini, maka Direksi berhak untuk:

    - Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengurus Perseroan.
    - Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Rapat Umum Pemegang Saham.
    - Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri maupun bersama- sama atau kepada orang atau badan lain.
    - Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai pengurusan maupun pemilikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Direksi berkewajiban untuk :
    - Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan dan serta kegiatan usahanya.
    - Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk selanjutnya disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat pengesahan.
    - Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan.
    - Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
    - Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

- Binding the Company as a guarantor (surety or avalist) that has financial consequences exceeding a certain amount determined by the General Meeting of Shareholders.
- To no longer collect and to write off bad debts and write off dead stock exceeding a certain value determined by the General Meeting of Shareholders with due regard to the provisions of paragraph (6) letter d of this Article.

11. In addition to those mentioned in paragraphs (6), (7) and (10) of this Article, the General Meeting of Shareholders may determine other restrictions and/or conditions.
12. The President Director shall have the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company, provided that all actions of the President Director have been approved at a Board of Directors meeting. If the President Director is absent or unable to attend for any reason, which does not need to be proven to third parties, one of the Directors appointed by the President Director shall have the authority to act for and on behalf of the Board of Directors.
13. The Board of Directors, for certain actions under its own responsibility, also has the right to appoint one or more persons as its representative or proxy, granting them the authority for certain actions as stipulated in the power of attorney.
14. The division of duties and authorities of each member of the Board of Directors is determined by the General Meeting of Shareholders, and these authorities may be delegated by the General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners.
15. In relation to the main duties of the Board of Directors as referred to in Article 12 of these Articles of Association, the Board of Directors has the right to:
    - Establishing policies in leading and managing the Company.
    - Regulating provisions regarding the Company's personnel, including determining salaries, pensions or old age benefits and other income for Company employees based on applicable laws and regulations and the General Meeting of Shareholders.
    - Appointing and dismissing employees of the Company based on the Company's personnel regulations and applicable laws and regulations.
    - Regulating the transfer of the Board of Directors' authority to represent the Company in and out of court to one or more members of the Board of Directors specifically appointed for that purpose or to one or more employees of the Company, either individually or jointly, or to other persons or entities.
    - Performing other actions related to management and ownership in accordance with the provisions set forth in these Articles of Association and as determined by the General Meeting of Shareholders based on applicable laws and regulations.

16. The Board of Directors is obligated to:
    - Striving for and ensuring the implementation of the Company's business and activities in accordance with its objectives and purposes and business activities.
    - Preparing in a timely manner the Company's development plan, Work Plan and Annual Budget, including other plans related to the implementation of the Company's business and activities, and submitting them to the Board of Commissioners and Shareholders for further submission to the General Meeting of Shareholders for approval.
    - Maintain the Company's books and records in accordance with the practices applicable to a company.
    - Develop an accounting system in accordance with financial accounting standards and based on internal control principles, particularly the functions of management, recording, storage, and supervision.
    - Provide accountability and all information regarding the condition and performance of the Company in the form of an Annual Report to the General Meeting of Shareholders.

- Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Pemegang Saham.
- Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya.
- Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
  i. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  ii. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  iii. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  iv. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

- Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tugas dan tanggung jawab Direksi dijelaskan dalam Keputusan Direksi 027/KepDir/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Perubahan Deskripsi Pekerjaan Jabatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, tugas dan tanggung jawab masing-masing Direktur adalah sebagai berikut :
  a. Tugas Direktur Utama:
     - Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengendalikan kegiatan dibidang pengawasan internal.audit pengendailian mutu, dan pengembangan audit, kegiatan operasional, dan non opersional perusahaan dalam rangka mencapai sistem manajemen perusahaan yang tertib, efektif, efisien, dan bernilai tambah
     - Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengendailkan pengkajian produk dalam aspek hukum, pemberian pendapat huku (legal opinion) bantuan dibidang hukum dan advokasi yang berkaitan dengan perjanjian, peraturan dan regulasi opersional maupun non-opersional perusahaan serta kepatuhan perusahaan pada regulasi internal maupun eksternal.
     - Mengkoordinasikan mengintegrasikan, dan pendampingan kegiatan audit yang dilakukan oleh eksternal audit kepada perusahaan.
  b. Tugas Direktur Operasional:
     - Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengendalikan kegiatan pemasaran, Analisa penjaminan, dan valuasi atas pelaksanaan penjaminan cash loan dan non-cash loan serta penyusunan rekomendasi atau usulan tentang pelaksanaan kebijakan pemasaran penjaminan cash loan dan non-cash loan.
     - Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengendalikan kerjasama pemasaran dengan agen untuk mendukung pencapaian target pemasaran penjaminan
     - Mengkoordinasikan dan Mengendalikan kegiatan pelayanan pengaduan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepatuhan terhadap regulasi
     - Mengkoordinasikan dan Mengendalikan kegiatan pengelolaan jaringan untuk meningkatakan kualitas pelayanan penjaminan dan merket share penjaminan
     - Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengendalikan, kegiatan pemasaran dan evaluasi atas pelaksanaan penjminan serta penyusunan rekomendasi atau usulan tentang pelaksanaan kebijakan pemasaran penjaminan di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya atau sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam keputusan direksi.

- Provide periodic reports in accordance with applicable regulations and other reports whenever requested by Shareholders.

- Prepare a complete organizational structure for the Company, including detailed descriptions of duties.
- Each member of the Board of Directors shall be fully personally liable if he or she is guilty of misconduct or negligence in performing his or her duties for the benefit and business of the Company, causing loss to the Company, unless the member of the Board of Directors concerned can prove that:
  i. The loss was not due to his mistake or negligence;
  ii. He had acted in good faith and with due care for the benefit of and in accordance with the purpose and objectives of the Company;
  iii. He had no direct or indirect conflict of interest in the management action that resulted in the loss; and
  iv. He had taken action to prevent the loss from occurring or continuing.

- Performing other duties in accordance with the provisions set forth in these Articles of Association and as determined by the General Meeting of Shareholders based on applicable laws and regulations.

- The duties and responsibilities of the Board of Directors are described in Board of Directors Decree 027/KepDir/IX/2017 dated September 20, 2017 concerning Changes to the Job Descriptions of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. The duties and responsibilities of each Director are as follows:
  a. Duties of the President Director:
     - Coordinate, integrate, and control activities in the field of internal supervision, quality control audits, and audit development, as well as operational and non-operational activities of the company in order to achieve a corporate management system that is orderly, effective, efficient, and adds value.
     - Coordinate, integrate, and control product reviews in legal aspects, provide legal opinions, legal assistance, and advocacy related to agreements, regulations, and operational and non-operational company regulations, as well as company compliance with internal and external regulations.

     - Coordinate, integrate, and assist in audit activities conducted by external auditors to the company.
  b. Duties of the Chief Operating Officer:
     - Coordinate, integrate, and control marketing activities, guarantee analysis, and valuation of cash loan and non-cash loan guarantees, as well as prepare recommendations or proposals regarding the implementation of cash loan and non-cash loan guarantee marketing policies.

     - Coordinate, integrate, and control marketing cooperation with agents to support the achievement of guarantee marketing targets.
     - Coordinate and control complaint handling activities to improve service quality and regulatory compliance.

     - Coordinate and control network management activities to improve the quality of guarantee services and guarantee market share
     - Coordinate, integrate, and control marketing activities and evaluations of guarantee implementation, as well as prepare recommendations or proposals regarding the implementation of guarantee marketing policies in the DKI Jakarta Province and surrounding areas or in accordance with the provisions stipulated in the board of directors' decision.

- Mengkoordinasikan kegiatan pelayann untuk memenuhi kewajiaban kepada penerima jaminan
- Mengkoordinasikan kegiatan penarikan piutang subrogasi untuk meningkatkan pendapatan perusahaan.
- Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perjanjian kerjasama dengan mitra penerima jaminan dan pelaksanaan rekonsiliasi data outstanding penjaminan.
- Mengkoordinasikan kegiatan pengajuan penjaminan utang / re-asuransi sebagai satah satu mitigasi risiko penjaminan dan pengajuan klaim re-guarantee / re-asuransi.
- Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengendalikan pengelolaan Teknologi Informasi Perusahaan, perumusan dan pengembangan sistem dan jaringan TI di unit-unit kerja baik operasional maupun non operasional demi menunjang perkembangan perusahaan. Mengkoordinasikan, pengkajian sistem TI atas produk untuk mendukung pertumbuhan perusahaan.

c. Tugas Direktur Keuangan, SDM & Umum

- Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengendalikan kegiatan penyusunan pedoman dan manual, RKAP dan pengendalian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Penyusunan laporan keuangan dan melaksanakan fungsi Internal Control di Divisi Keuangan dan Akuntansi.
- Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengendalikan kegiatan pengelolaan administrasi dan pengendalian kegiatan investasi, keuangan dan perpajakan serta pemenuhan kebutuhan likuiditas perusahaan dan target-target bidang keuangan dan investasi sesuai dengan RKAP.
- Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengendalikan kegiatan Manajemen Risiko terkait pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan perusahaan dan perencanaan strategis perusahaan.
- Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengendalikan kegiatan penyusunan pedoman dan manual, RKAP dan pengendalian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Penyusunan laporan keuangan dan melaksanakan fungsi Internal Control di Divisi Keuangan dan Akuntansi.
- Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengendalikan kegiatan pengelolaan administrasi dan pengendalian kegiatan investasi, keuangan dan perpajakan serta pemenuhan kebutuhan likuiditas perusahaan dan target-target bidang keuangan dan investasi sesuai dengan RKAP.
- Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengendalikan kegiatan Manajemen Risiko terkait pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan perusahaan dan perencanaan strategis perusahaan.
- Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengendalikan sumber daya manusia meliputi seluruh fungsi mulai dari perencanaan (manpower planning), sistem rekrutmen, compentation and benefit, penilaian kinerja , performance management, jenjang dan pengembangan karir, Pendidikan dan Latihan (diklat/training), manajemen pengetahuan, talent management, pemutusan hubungan kerja (PHK), sistem SDM lainnya termasuk hubungan industrial (employee relation).
- Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengendalikan bagian umum dalam kegiatan operasional kantor dengan melakukan proses pengadaan barang dan jasa, sarana atau fasilitas penunjang lain, pemeliharaan asset fisik kantor, pengelolaan Gedung kantor, pengelolaan anggaran terkait beban operasional perusahaan (diluar biaya agen).
- Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengendalikan bagian sekretaris perusahaan dalam kegiatan pengelolaan branding perusahaan, penyelenggaraan rapat kerja dan kegiatan perusahaan lainnya, pengelolaan mitra wartawan, pengelolaan media sosial perusahaan.
- Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengendalikan kegiatan zakat perusahaan.

- Coordinate service activities to fulfill obligations to guarantee recipients.
- Coordinate subrogation debt collection activities to increase company revenue.
- Coordinate the preparation of cooperation agreements with guarantee recipient partners and the reconciliation of outstanding guarantee data.
- Coordinate the submission of debt guarantees/reinsurance as a form of guarantee risk mitigation and the submission of re-guarantee/reinsurance claims.
- Coordinate, integrate, and control the management of the Company's Information Technology, the formulation and development of IT systems and networks in both operational and non-operational work units to support the company's development. Coordinate the assessment of IT systems for products to support the company's growth.

c. Duties of the Director of Finance, Human Resources & General Affairs

- Coordinate, integrate, and control the preparation of guidelines and manuals, RKAP and control of the Company's Work Plan and Budget (RKAP), preparation of financial reports and implementation of Internal Control functions in the Finance and Accounting Division.
- Coordinate, integrate, and control activities related to administrative management and control of investment, financial, and taxation activities, as well as meeting the company's liquidity needs and financial and investment targets in accordance with the RKAP.
- Coordinate, integrate, and control Risk Management activities at all levels of the organization and company activities and strategic planning.

- Coordinate, integrate, and control the preparation of guidelines and manuals, RKAP and control of the Company's Work Plan and Budget (RKAP), preparation of financial reports and implementation of Internal Control functions in the Finance and Accounting Division.
- Coordinate, integrate, and control administrative management and control activities for investment, finance, and taxation, as well as meeting the company's liquidity needs and financial and investment targets in accordance with the RKAP.

- Coordinate, integrate, and control Risk Management activities at all levels of the organization and company activities and strategic planning.

- Coordinate, integrate, and control human resources covering all functions ranging from planning (manpower planning), recruitment systems, compensation and benefits, performance appraisal, performance management, career paths and development, education and training, knowledge management, talent management, termination of employment (PHK), other HR systems including industrial relations (employee relations).
- Coordinate, integrate, and control general affairs in office operations by procuring goods and services, other supporting facilities or equipment, maintaining physical office assets, managing office buildings, and managing budgets related to company operating expenses (excluding agency fees).

- Coordinate, integrate, and control the company secretary in activities related to company branding management, organizing work meetings and other company activities, managing media partners, and managing company social media.
- Coordinate, integrate, and control company zakat activities.

Sedangkan Tanggung jawab Direksi diatur dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 68 tanggal 19 September 2014 pada Pasal 12 ayat (16) butir h dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 9 tanggal 26 November 2014 atas perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar PT Penjaminan Jamkrindo Syariah pada butir 3 serta Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 18/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-06/DK-Jamsyar/VIII/2015 tentang Pedoman Bagi Direksi dan Dewan Komisaris (Board of Manual) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah pada Bab III butir 3.1.3 Tanggung jawab, menyebutkan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan yang menyebabkan kerugian bagi Perusahaan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Meanwhile, the responsibilities of the Board of Directors are stipulated in the Deed of Establishment of Limited Liability Company PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Number 68 dated September 19, 2014, in Article 12 paragraph (16) point h and the Deed of Statement of Meeting Decisions of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Number 9 dated November 26, 2014, regarding amendments to several provisions of the Articles of Association of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah in point 3, as well as the Joint Decision of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Number 18/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-06/DK-Jamsyar/VIII/2015 concerning Guidelines for the Board of Directors and Board of Commissioners (Board Manual) of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah in Chapter III point 3. 1.3 Responsibilities, stating that each member of the Board of Directors is fully personally liable if they are guilty of or negligent in performing their duties for the benefit and business of the Company, causing loss to the Company, unless the member of the Board of Directors concerned can prove that:

a. The loss was not due to his mistake or negligence.
b. He had acted in good faith and with due care for the interests and in accordance with the aims and objectives of the Company.
c. He had no direct or indirect conflict of interest in the management actions that resulted in the loss and had taken steps to prevent the loss from occurring or continuing.

SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI
COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sesuai dengan Akta Pendirian PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 68 tanggal 19 September 2014, pasal 11 ayat (1) bahwa "Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama."

In accordance with the Deed of Establishment of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Number 68 dated September 19, 2014, article 11 paragraph (1) states that "The company shall be managed and led by a Board of Directors consisting of at least 3 (three) persons, one of whom may be appointed as President Director."

Nama / Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis for Appointment
Gatot Suprabowo	Direktur Utama / Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Penjaminan Jamkrindo Syariah disingkat PT Jamkrindo Syariah No 19 tanggal 24 Oktober 2019 sebagai Komisaris Utama (2019-2024)Deed of Statement of Decision Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, abbreviated as PT Jamkrindo Syariah No. 19 dated October 24, 2019 as President Commissioner (2019-2024)
Endang Sri Winarni	Direktur Keuangan, SDM & Umum Director of Finance, Human Resources & General Affairs	Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Penjaminan Jamkrindo Syariah disingkat PT Jamkrindo Syariah No 19 tanggal 24 Oktober 2019 sebagai Komisaris Utama (2019-2024)Deed of Statement of Decision Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, abbreviated as PT Jamkrindo Syariah No. 19 dated October 24, 2019 as President Commissioner (2019-2024)
Achmad Sonhadji	Direktur Operasional Operational Director	Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Penjaminan Jamkrindo Syariah disingkat PT Jamkrindo Syariah No 19 tanggal 24 Oktober 2019 sebagai Komisaris Utama (2019-2024)Deed of Statement of Decision Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, abbreviated as PT Jamkrindo Syariah No. 19 dated October 24, 2019 as President Commissioner (2019-2024)

MASA JABATAN DIREKSI
TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF DIRECTORS

Masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan oleh Rapat umum Pemegang Saham. Masa jabatan ini telah diatur dalam Akta Pendirian PT Penjaminan Jamkrindo Syariah No. 68 tanggal 19 September 2014, Pasal 14 ayat 4.

The term of office of the Board of Directors is five (5) years, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss members of the Board of Directors at any time. Upon expiration of their term of office, members of the Board of Directors may be reappointed for one (1) additional term by the General Meeting of Shareholders. This term of office is stipulated in the Deed of Establishment of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah No. 68 dated September 19, 2014, Article 14 paragraph 4.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pelaksanaan tugas Direksi juga dinilai berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) yang ditandatangani pada tahun 2021. Kriteria penilaian kinerja Direksi Berikut indikator yang dipergunakan dalam mengukur kinerja Direksi, meliputi:

Direksi memiliki pengetahuan yang relevan dengan

- Direksi mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional.
- Direksi bertindak untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan.
- Direksi mendahulukan kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan, daripada kepentingan pribadi.
- Direksi mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan.
- Direksi mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Lembaga Penjamin.
- Direksi menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.
- Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Lembaga Penjamin dalam melaksanakan tugasnya.
- Direksi mengelola Lembaga Penjamin sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- Direksi mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.
- Direksi telah memastikan agar Lembaga Penjamin memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan terjamin dan/atau penerima jaminan.
- Direksi telah menyampaikan informasi secara tepat waktu dan lengkap mengenai Lembaga Penjamin kepada Dewan Komisaris dan DPS.
- Direksi telah membantu memenuhi kebutuhan DPS dalam menggunakan anggota komite, karyawan Lembaga Penjamin, dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada dibawah Direksi.
- Direksi mampu menghindarkan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.
- Direksi mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.
- Direksi mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- Direksi mampu untuk menolak permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.
- Hasil rapat Direksi secara rutin telah dituangkan dalam risalah rapat Direksi. Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Direksi telah didokumentasikan dengan baik.
- Keputusan Direksi telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi secara jelas.
- Anggota Direksi Lembaga Penjamin berdomisili di Indonesia.

The performance of the Board of Directors is also assessed based on Key Performance Indicators (KPIs) signed in 2021. The criteria for assessing the performance of the Board of Directors include the following indicators used to measure the performance of the Board of Directors:

The Board of Directors has relevant knowledge of

- The Board of Directors is capable of acting in good faith, honestly, and professionally.
- The Board of Directors acts in the interests of the Guarantee Institution, the guaranteed party, and/or the guarantee recipient.
- The Board of Directors prioritizes the interests of the Guarantee Institution, the guaranteed party, and/or the guarantee recipient over personal interests.
- The Board of Directors is capable of making decisions based on independent and objective assessments for the benefit of the Guarantee Institution, the guaranteed party, and/or the guarantee recipient.
- The Board of Directors is capable of avoiding abuse of authority to obtain undue personal gain or cause loss to the Guarantee Institution.
- The Board of Directors ensures effective, appropriate, and timely decision-making and is able to act independently, without any interests that may interfere with its ability to perform its duties independently and critically.
- The Board of Directors complies with laws and regulations, articles of association, and other internal regulations of the Guarantee Institution in performing its duties.
- The Board of Directors manages the Guarantee Institution in accordance with its authority and responsibilities.
- The Board of Directors is accountable to the General Meeting of Shareholders for the performance of its duties.
- The Board of Directors has ensured that the Guarantee Institution takes into account the interests of all parties, particularly the interests of the guaranteed and/or guarantee recipients.
- The Board of Directors has provided timely and complete information regarding the Guarantee Institution to the Board of Commissioners and the DPS.
- The Board of Directors has assisted in meeting the needs of the DPS in utilizing committee members, employees of the Guarantee Institution, and professional experts whose organizational structure is under the Board of Directors.
- The Board of Directors is able to avoid transactions that have a conflict of interest with the activities of the Guarantee Institution where the Board of Directors member in question serves.
- The Board of Directors is able to refrain from using its position at the Guarantee Institution where the Board of Directors member in question serves for personal, family, and/or other parties' interests that could harm or reduce the profits of the Guarantee Institution where the Board of Directors member in question serves.
- The Board of Directors is able to avoid taking and/or receiving personal benefits from the Guarantee Institution where the Board member serves, other than the remuneration and facilities determined based on the GMS decision.
- The Board of Directors is able to reject shareholder requests related to the operational activities of the Guarantee Institution where the Board member serves, other than those determined in the GMS.
- The results of regular Board of Directors meetings have been recorded in the minutes of the Board of Directors meetings. The minutes of the meetings, which are joint decisions of all members of the Board of Directors, have been properly documented.
- The decisions of the Board of Directors have been recorded in the minutes of the meetings, including any dissenting opinions that have been clearly expressed.
- Members of the Board of Directors of the Guarantee Institution are domiciled in Indonesia.

- Lembaga Penjamin yang didalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia. Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi yang berwenang.
- Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instasi berwenang. Direksi Lembaga Penjamin memiliki komite investasi.
- Anggota Direksi Lembaga Penjamin tidak merangkap jabatan pada Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.
- Anggota Direksi tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.
- Direksi Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Direksi Lembaga Penjamin menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.
- Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi perusahaan harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

- Guarantee Institutions with direct or indirect foreign ownership must have at least 50% (fifty percent) of their Board of Directors consisting of Indonesian citizens. Foreign nationals serving on the Board of Directors must have a permanent residence permit from the competent authority.
- Foreign nationals serving on the Board of Directors must have a work permit from the competent authority. The Board of Directors of Guarantee Institutions must have an investment committee.
- Members of the Board of Directors of the Guarantee Institution shall not hold concurrent positions at the Guarantee Institution or other business entities.
- Members of the Board of Directors shall not be active employees or officials of the Financial Services Authority.
- The Board of Directors of the Guarantee Institution shall hold regular Board of Directors meetings at least once (1) a month.
- The Board of Directors of the Guarantee Institution must attend at least 50% (fifty percent) of the Board of Directors meetings held within a period of one (1) year.
- The number of Board of Directors meetings held and the attendance of each member of the company's Board of Directors must be included in the report on the implementation of Good Corporate Governance.

PEDOMAN KERJA DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS WORK GUIDELINES

Direksi bekerja berdasarkan Pedoman Kerja Direksi yang tercantum dalam Board Manual. Board Manual Jamsyar merupakan hasil kodifikasi dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku agar sesuai dengan perkembangan praktik-praktik terbaik tata kelola Perusahaan, sehingga dapat menunjang pencapaian Visi Perusahaan. Pedoman ini telah disahkan dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Jamsyar dengan Nomor 18/Kep-Dir/VIII/2015-Kep-06/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015. Pedoman ini mengatur, antara lain:

- Tugas, Kewajiban, Hak, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi;
- Ketentuan Jabatan Direksi;
- Komposisi dan Pembagian Kerja Direksi;
- Rapat Direksi;
- Program Pengenalan Direksi;
- Pendidikan Berkelanjutan bagi Direksi;
- Organ Pendukung Direksi

The Board of Directors works based on the Board of Directors Work Guidelines as stated in the Board Manual. The Jamsyar Board Manual is the result of the codification of applicable regulations and legislation to ensure compliance with the latest best practices in corporate governance, thereby supporting the achievement of the Company's Vision. These guidelines were ratified in a Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of Jamsyar Number 18/Kep-Dir/VIII/2015-Kep-06/DK-Jamsyar/VIII/2015 dated August 3, 2015. These guidelines regulate, among other things:

- Duties, Obligations, Rights, Authorities, and Responsibilities of the Board of Directors;
- Provisions Regarding the Position of the Board of Directors;
- Composition and Division of Labor of the Board of Directors;
- Board of Directors Meetings;
- Board of Directors Orientation Program;
- Continuing Education for the Board of Directors;
- Supporting Bodies of the Board of Directors

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
BASICS OF IMPLEMENTING GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tujuan dari penerapan GCG pada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah:

- Mengoptimalkan nilai Perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan.
- Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan.
- Mendorong agar Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.
- Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.
- Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Dalam rangka mendorong penerapan GCG Perusahaan menerapkan Nilai-nilai Utama (Core Value) Sumber Daya Manusia yaitu AKHLAK yang memuat Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

The objectives of implementing GCG at PT Penjaminan Jamkrindo Syariah are:

- Optimizing the Company's value to have strong competitiveness, so that it is able to maintain its existence and sustainable life to achieve the Company's Vision and Mission.
- Encouraging professional, efficient and effective management of the Company as well as empowering the functions and increasing the independence of the Company's organs.
- Encouraging the Company's organs to make decisions and take actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, as well as awareness of the Company's social responsibility to its stakeholders and the preservation of the environment surrounding the Company.
- Increasing the Company's contribution to the national economy.
- Improving the climate conducive to national investment development.

In order to encourage the implementation of GCG, the Company applies Core Values for Human Resources, namely AKHLAK, which stands for Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative.

Pedoman perilaku AKHLAK tertuang dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor: 06/Per-Dir/X/2020 - Kep-34/DK-Jamsyar/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Nilai-nilai Utama (Core Value) Sumber Daya Manusia PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, antara lain sebagai berikut:

1. **Amanah**
   Definisi: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
   Panduan perilaku:
   - Memenuhi janji dan komitmen.
   - Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan.
   - Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
2. **Kompeten**
   Definisi: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
   Panduan perilaku:
   - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
   - Membantu orang lain belajar.
   - Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
3. **Harmonis**
   Definisi: Saling peduli dan menghargai perbedaan.
   Panduan perilaku:
   - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
   - Suka menolong orang lain.
   - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
4. **Loyal**
   Definisi: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
   Panduan perilaku:
   - Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, Perusahaan dan Negara.
   - Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih benar.
   - Patuh kepada pemimpin sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
5. **Adaptif**
   Definisi: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubadan Panduan perilaku:
   - Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
   - Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
   - Bertindak proaktif.
6. **Kolaboratif**
   Definisi: Membangun kerja sama yang sinergis.
   Panduan perilaku:
   - Memberikan kesempatan kepada pihak untuk berkontrubusi.
   - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
   - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

The AKHLAK code of conduct is stipulated in the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Number: 06/Per-Dir/X/2020 - Kep-34/DK-Jamsyar/X/2020 dated October 9, 2020 concerning the Core Values of Human Resources at PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, including the following:

1. **Trust**
   Definition: Holding fast to the trust that has been placed in you.
   Behavioral guidelines:
   - Fulfilling promises and commitments.
   - Taking responsibility for tasks, decisions, and actions.
   - Adhering to moral and ethical values.
2. **Competent**
   Definition: Continue learning and developing capabilities.
   Behavioral guidelines:
   - Improve your skills to respond to ever-changing challenges.
   - Help others learn.
   - Complete tasks with the highest quality.
3. **Harmonious**
   Definition: Caring for one another and respecting differences.
   Behavioral guidelines:
   - Respecting everyone regardless of their background.
   - Enjoying helping others.
   - Building a conducive work environment.
4. **Loyal**
   Definition: Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and State.
   Behavioral guidelines:
   - Maintain the good reputation of fellow employees, leaders, the Company, and the Country.
   - Be willing to make sacrifices to achieve the right goals.
   - Obey leaders as long as it does not conflict with the law and ethics.
5. **Adaptive**
   Definition: Continuously innovating and enthusiastic in driving or facing change. Behavioral guidelines:
   - Quickly adapt to become better.
   - Continuously improve in line with technological developments.
   - Be proactive..
6. **Collaborative**
   Definition: Building synergistic cooperation.
   Behavioral guidelines:
   - Providing opportunities for parties to contribute.
   - Being open to cooperation to generate added value.
   - Mobilizing the utilization of various resources for common goals.

I. Dasar Hukum

Dasar hukum penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 54/SEOJK.05/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan.
- Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 17/Kep-Dir/VIII/2015-Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

I. Legal Basis

The legal basis for the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at PT Penjaminan Jamkrindo Syariah is:

- Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.05/2017 dated January 11, 2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions.
- Financial Services Authority Circular Letter Number 54/SEOJK.05/2017 dated October 12, 2017 concerning Reports on the Implementation of Good Corporate Governance for Guarantee Institutions.
- Joint Decision of the Board of Directors and Board of Commissioners Number 17/Kep-Dir/VIII/2015-Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 dated August 3, 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance at PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

- Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 18/Kep-Dir/VIII/2015-Kep-06/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Pedoman Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Board of Manual PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 19/Kep-Dir/VIII/2015-Kep-07/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Pedoman Perilaku Code of Conduct PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

II. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/Good Corporate Governance (GCG)

Prinsip-prinsip umum Good Governance sejalan dengan prinsip Syariah. Praktik pelaksanaan bisnis yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi Wasallam, menggambarkan sifat dan perilaku beliau, sebagaimana yang disepakati oleh semua ulama yaitu shidiq (benar), fathonah (cerdas), amanah (dapat dipercaya) dan tabligh (menyampaikan) atau disingkat ShiFAT. Dari keempat kesatuan ShiFAT nabi dan rasul dapat diturunkan asas Good Governance Bisnis Syariah yang sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku umum dalam dunia usaha yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta keadilan. Dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) maka tidak lepas dari bagaimana implementasi prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG menjadi mutlak diperlukan dalam mendukung kelangsungan usaha perusahaan. Berkaca dari pelajaran yang ada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah menyadari perlunya untuk terus mempraktekkan dan mengikuti perkembangan praktik GCG sesuai dengan kebutuhan. Pentingnya implementasi prinsip-prinsip GCG menjadikan perusahaan untuk terus berupaya menjalankan sistem yang sehat dengan berlandaskan prinsip-prinsip GCG. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah berkomitmen untuk pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan organisasi dengan berpedoman pada ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan GCG.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan dan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor: 17/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut:

- Transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Lembaga Penjamin, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang penjaminan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.
- Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Lembaga Penjamin sehingga kinerja penyelenggaraan usaha Lembaga Penjamin dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.
- Tanggung jawab, yaitu kesesuaian pengelolaan Lembaga Penjamin dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.
- Independensi, yaitu keadaan Lembaga Penjamin yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat; dan
- Keadilan, yaitu kesetaraan dan keseimbangan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

- Joint Decision of the Board of Directors and Board of Commissioners Number 18/Kep-Dir/VIII/2015-Kep-06/DK-Jamsyar/VIII/2015 dated August 3, 2015 concerning Guidelines for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- Joint Decision of the Board of Directors and Board of Commissioners Number 19/Kep-Dir/VIII/2015-Kep-07/DK-Jamsyar/VIII/2015 dated August 3, 2015 concerning the Code of Conduct for PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

II. Legal Basis

The general principles of Good Governance are in line with the principles of Sharia. The business practices exemplified by the Prophet Muhammad Shalallahu 'alaihi Wasallam, describe his character and behavior, as agreed upon by all scholars, namely shidiq (truthful), fathonah (intelligent), amanah (trustworthy) and tabligh (communicative) or abbreviated as ShiFAT. From the four elements of ShiFAT, the principles of Sharia Business Good Governance can be derived, which are in line with the principles of Good Corporate Governance (GCG) that are commonly applied in the business world, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is inseparable from how the principles of GCG are implemented. The principles of GCG are absolutely necessary in supporting the continuity of a company's business. Reflecting on the lessons learned, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah realizes the need to continue to practice and follow developments in GCG practices in accordance with requirements. The importance of implementing GCG principles has led the company to continuously strive to run a healthy system based on GCG principles. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah is committed to implementing GCG at all levels of the organization by adhering to the provisions related to GCG implementation.

Principles of Good Corporate Governance in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.05/2017 dated January 11, 2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions and Financial Services Authority Circular Letter Number 54/SEOJK. 05/2017 dated October 12, 2017 concerning Reports on the Implementation of Good Corporate Governance for Guarantee Institutions and the Joint Decision of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Number: 17/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 dated August 3, 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance at PT Penjaminan Jamkrindo Syariah are as follows:

- Transparency, namely openness in the decision-making process and openness in the disclosure and provision of relevant information regarding the Guarantee Institution, which is easily accessible to stakeholders in accordance with laws and regulations in the field of guaranteeing as well as standards, principles, and practices of sound business management.
- Accountability, namely clarity of the functions and implementation of the Guarantee Institution's organs so that the performance of the Guarantee Institution's business operations can be carried out in a transparent, fair, effective, and efficient manner.
- Responsibility, namely the compliance of the Guarantee Institution's management with the provisions of laws and regulations in the field of guaranteeing and ethical values as well as standards, principles, and sound business practices.
- Independence, namely the condition of the Guarantee Institution being managed independently and professionally and free from conflicts of interest and influence or pressure from any party that is not in accordance with the provisions of laws and regulations in the field of guaranteeing and ethical values and standards, principles, and sound business practices; and
- Fairness, namely equality and balance in fulfilling the rights of stakeholders arising from agreements, provisions of laws and regulations in the field of guarantee, and ethical values and standards, principles, and practices of sound business management.

III. Penilaian Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah melakukan penilaian atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik setiap tahun. Adapun dasar hukum penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan, Bab XVII Pelaporan, pada pasal 57 "Lembaga Penjamin wajib melakukan penilaian secara mandiri (self assessment) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkala." dan pada pasal 58 "Lembaga Penjamin wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada setiap akhir tahun buku.", maka PT Penjaminan Jamkrindo Syariah wajib melakukan self assessment penerapan GCG dan menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ke Otoritas Jasa Keuangan.

2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 54/SEOJK.05/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan, mengatur ketentuan terkait bentuk dan susunan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Memperhatikan peraturan-peraturan tersebut di atas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah telah melakukan penilaian secara mandiri atas penerapan tata kelola Perusahaan yang baik. Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tersebut terdiri dari:

1. Transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, meliputi:
   a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.
   b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas.
   c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.
   d. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, tata kelola teknologi informasi.
   e. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai.
   f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin.
   g. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.
   h. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.
   i. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan kerja dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat.
   j. Pengungkapan hal penting lainnya.
2. Penilaian secara mandiri (self assessment) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
3. Rencana Tindak (Action Plan).

III. Assessment of Good Corporate Governance

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah conducts an assessment of the implementation of Good Corporate Governance every year. The legal basis for the assessment of the implementation of Good Corporate Governance is:

1. Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.05/2017 dated January 11, 2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, Chapter XVII Reporting, Article 57 "Guarantee Institutions are required to conduct independent assessments (self-assessments) on the implementation of Good Corporate Governance on a regular basis." and Article 58 states that "Guarantee Institutions are required to prepare a report on the implementation of Good Corporate Governance at the end of each fiscal year." Therefore, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah is required to conduct a self-assessment of the implementation of GCG and submit a Report on the Implementation of Good Corporate Governance to the Financial Services Authority.
2. Financial Services Authority Circular Letter Number 54/SEOJK.05/2017 dated October 12, 2017 concerning Reports on the Implementation of Good Corporate Governance for Guarantee Institutions regulates the provisions related to the form and structure of Reports on the Implementation of Good Corporate Governance.

In accordance with the above regulations, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah has conducted an independent assessment of the implementation of good corporate governance. The Good Corporate Governance Implementation Report consists of:

1. Transparency in the implementation of Good Corporate Governance, including:
   a. The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, Board of Commissioners, and DPS.
   b. The completeness and implementation of duties.
   c. The implementation of compliance functions, internal auditors, and external auditors.
   d. The implementation of risk management, internal control systems, and information technology governance.
   e. The implementation of remuneration policies and other facilities for members of the Board of Directors, Board of Commissioners, DPS, and employees.
   f. Transparency of the financial and non-financial conditions of the Guarantee Institution.
   g. Long-term plans as well as work plans and annual budgets.
   h. Disclosure of share ownership of members of the Board of Directors and Board of Commissioners reaching 5%or more, including the type and number of shares.
   i. Disclosure of financial and working relationships and family ties between members of the BOD, members of the BOC, and members of the DPS with other members of the Board of Directors, other members of the BOC, other members DPS, and/or shareholders of Guarantee Institution where the members of the BOD, members of the BOC, and members of the DPS hold office
   j. Disclosure of other important matters.
2. Self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance.Rencana Tindak (Action Plan).
3. Action Plan.

SKOR ASSESSMENT GCG
GCG ASSESSMENT SCORE

Pada tahun 2021 PT Jamkrindo Syariah melaksanakan self assessment yang dilakukan oleh pihak internal Perusahaan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.

In 2021, PT Jamkrindo Syariah conducted a self-assessment carried out by internal parties of the Company based on the Financial Services Authority Circular Letter Number 54/SEOJK.05/2017 dated October 12, 2017 concerning Reports on the Implementation of Good Corporate Governance for Guarantee Institutions.

Hasil self assessment atas penerapan GCG untuk periode tahun 2020, PT Jamkrindo Syariah mencapai predikat SANGAT BAIK dengan capaian skor sebesar 85,51 dari skor maksimal 100 dengan transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik meliputi :

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas:
  1. Komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing, atau
  2. Fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.
- Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.
- Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, tata kelola teknologi informasi.
- Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai.
- Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Lembaga Penjamin.
- Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.
- Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menjabat dan/atau pada badan usaha lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih,
- Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat, dan
- Pengungkapan hal penting lainnya.
  1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal
  2. Transaksi material dengan pihak terkait
  3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi
  4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin
  5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen
  6. Sertifikasi
  7. Tenaga kerja asing
  8. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud)
  9. Permasalahan hukum, dan
  10. Etika bisnis Lembaga Penjamin

The results of the self-assessment on the implementation of GCG for the 2020 period, PT Jamkrindo Syariah achieved a VERY GOOD rating with a score of 85.51 out of a maximum score of 100 with good transparency in the implementation of Corporate Governance, including:

- The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, Board of Commissioners, and DPS.
- Completeness and implementation of duties:
  1. Audit committee for Guarantee Institutions with a national or provincial operational scope, or with foreign ownership, or
  2. Function that assists the Board of Commissioners for Guarantee Institutions with a regency operational scope in monitoring and ensuring the effectiveness of the internal control system.
- Implementation of compliance functions, internal auditors, and external auditors.
- Implementation of risk management, internal control systems, and information technology governance.
- Implementation of remuneration policies and other facilities for members of the Board of Directors, Board of Commissioners, DPS, and Employees.
- Transparency of the financial and non-financial conditions of the Guarantee Institution.
- Long-term plans as well as work plans and annual budgets.
- Disclosure of share ownership of members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and DPS who serve and/or are employed by other business entities located domestically and abroad that reach 5% (five percent) or more.
- Disclosure of financial and family relationships of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and members of the DPS with other members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, other members of the DPS, and/or shareholders of the Guarantee Institution where the members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and members of the DPS serve, and
- Disclosure of other important matters.
  1. Resignation or dismissal of external auditors
  2. Material transactions with related parties
  3. Ongoing and/or potential conflicts of interest
  4. Other material information regarding the Guarantee Institution
  5. Resignation or dismissal of Independent Commissioners
  6. Certification
  7. Foreign workers
  8. Number of internal irregularities (internal fraud)
  9. Legal issues, and
  10. Business ethics of the Guarantee Institution

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

RUPS Perseroan terdiri dari dua jenis, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah berakhirnya tahun buku, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, RUPS Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Proses penyelenggaraan RUPS Perseroan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, yang mengatur tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada Perusahaan Terbuka. Penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan tujuan memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta memfasilitasi partisipasi aktif dari para pemegang saham dalam pengambilan keputusan strategis yang berdampak pada perkembangan dan keberlanjutan Perseroan.

There are two types of General Meetings of Shareholders, namely Annual General Meetings and Extraordinary General Meetings. Annual General Meetings must be held no later than six months after the end of the financial year, in accordance with applicable regulations. Meanwhile, an Extraordinary GMS may be held at any time as required by the Company. The process of holding a GMS follows the provisions set forth in Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020, which regulates the Planning and Conduct of General Meetings of Shareholders in Public Companies. The GMS is held with the aim of ensuring transparency and accountability, as well as facilitating the active participation of shareholders in strategic decision-making that impacts the Company's development and sustainability.

Sepanjang tahun 2021, Perseroan menyelenggarakan RUPS dengan detail sebagai berikut:

Throughout 2021, the Company held GMS with the following details:

Tanggal / Date	Agenda / Schedule	Keputusan RUPS / GMS Decision
29 Januari 2021 January 29, 2021	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2021 Approving the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for Fiscal Year 2021	Dengan demikian Para Pemegang Saham Perseroan, dengan ini menyatakan telah menerima pemberitahuan tertulis mengenai usulan-usulan tersebut dan memberikan persetujuan untuk hal-hal sebagai berikut: 1. Mengesahkan RKAP PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2021 dengan perincian sebagai berikut: a. RKAP 2021 Penjaminan

PRODUK	VOLUME	IJK AKRUAL
Cash Loan		
FLPP	4.393.443.944.620	22.552.060.654
KUR	2.353.124.594.165	44.330.948.998
Supply Financing	2.628.251.913.376	5.208.547.011
Konstruksi	415.148.982.665	3.783.209.351
Mikro	2.165.025.474.550	20.756.485.677
Umum	1.131.011.243.227	9.222.985.218
Multiguna	4.644.116.866.447	59.652.463.991
PEN	5.862.673.990.500	438.883.962.553
Jumlah Cash Loan	**23.592.797.009.550**	**604.390.663.453**
Non Cash Loan	-	-
KBG	9.341.218.390.833	108.343.100.101
Surety	12.473.473.032.892	34.520.264.121
Customs	358.476.227.586	1.570.217.898
Distribusi	-	51.046.154
Jumlah Non Cash Loan	**22.173.167.651.312**	**144.484.628.274**
TOTAL	**45.765.964.660.861**	**748.875.291.727**

b. Laba Rugi RKAP 2021

URAIAN	RKAP 2021
PENDAPATAN PENJAMINAN	
Imbal Jasa Kafalah	748.875.291.726,80
Pendapatan Ujrah	21.948.981.125,10
Pendapatan Jasa Co Guarantee KUR	-
Jumlah Pendapatan Penjaminan	**770.824.272.851,91**
BEBAN PENJAMINAN	
Beban Ujrah Pembiayaan Bank	4.390.539.000,24
Beban Ujrah Agen	40.707.865.821,26
Premi Re Guarantee	119.893.292.964,39
Management Fee	1.165.632.627,92
Beban IJK Loss Limit	57.661.928.798,26
Beban Klaim	409.112.504.767,94
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	48.401.908.180,39
Pendapatan Subrogasi	- 51.062.466.032,65
Jumlah Beban Kafalah	**630.271.206.127,74700**
PENJAMINAN BERSIH	140.553.066.724,16
PENDAPATAN INVESTASI BRUTO	**69.317.602.091,41**
PENDAPATAN LAIN-LAIN BERSIH	3.636.233.522,66
BEBAN USAHA	
Beban Operasional	21.668.339.723,61
Beban SDM	54.183.235.443,00
Beban Administrasi dan Umum	20.925.208.769,73
Beban Sistek dan Pengembangan	3.923.486.328,82
Jumlah Beban Usaha	**100.700.270.265,16**
LABA SEBELUM PAJAK	**112.806.632.073,07**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
Beban Pajak Kini	**24.824.317.277,37**
Beban Pajak Tangguhan	- **11.385.817.956,58**
Jumlah Beban Pajak	13.438.499.320,78
LABA TAHUN BERJALAN	**99.368.132.752,29**

Tanggal / Date	Agenda / Schedule	Keputusan RUPS / GMS Decision

c. Posisi Keuangan RKAP 2021

URAIAN	RKAP 2021
ASET	
Kas dan Setara Kas	1.230.791.573.488
Investasi	208.915.683.247
Piutang UK Co Guarantee	-
Piutang Re Guarantee	102.278.126.192
CKPN Piutang Re	-
Piutang Lain-Lain	6.593.639.351
CKPN Piutang Lain-lain	-
Biaya Dibayar Dimuka	323.000.468.578
Aset Tetap	70.721.158.563
Aset Pajak Tangguhan	17.841.282.004
Aset Lain-Lain	215.761.435.517
Jumlah Aset	**2.175.903.366.940**
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
Utang Klaim	8.523.177.183
Cadangan Klaim	70.211.445.278
Imbalan Pasca Kerja	839.836.295
Pendapatan Ditangguhkan	733.342.885.527
Utang Pajak	13.620.177.852
Utang Re Guarantee	40.901.284.480
Utang Lain-Lain	26.070.236.943
Jumlah Liabilitas	**893.509.043.559**
EKUITAS	
Modal Saham	1.050.000.000.000
Cadangan Umum	125.522.415.343
Laba Tahun Lalu	-
Komponen Ekuitas Lainnya	7.503.775.286
Laba Tahun Berjalan	99.368.132.752
Jumlah Ekuitas	**1.282.394.323.381**
umlah Liabilitas dan Ekuitas	**2.175.903.366.940**

d. Tingkat Kesehatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2021 dengan perincian sebagai berikut:

INDIKATOR	RUMUS	RKAP		BOBOT		Kriteria Nilai	NILAI
		Nilai	%				
LIKUIDITAS	Aset Lancar / Hutang Lancar	1.734.714.185.563 / 326.106.169.458	531,95%		10%	1,00	0,10
GEARING RATIO	Outstanding Penjaminan / Saldo Ekuitas	37.894.117.594.913 / 1.282.394.323.381	29,55		35%	2,00	0,70
RENTABILITAS					35%	1,00	0,35
ROA	Laba Sebelum Pajak / Total Aset	112.806.632.074 / 2.175.903.366.940	5,18%	30%		1,00	
BOPO	Beban Operasional / Pendapatan Operasional	100.700.270.265 / 616.322.615.731	16,34%	35%		1,00	
Rasio Klaim	Beban Klaim / UK	201.108.449.256 / 748.875.291.727	26,85%	35%		1,00	
GCG					20%	2,00	0,40
TOTAL							**1,55**

Menyetujui anggaran belanja modal Tahun 2021 / Approving the 2021 capital expenditure budget

1. Tingkat Kesehatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2021 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Inventaris Kantor	5.029.965.000
2	Kendaraan	190.000.000
3	Renovasi Gedung Kantor	5.000.000.000
	Total	**10.219.965.000**

Tanggal / Date	Agenda / Schedule	Keputusan RUPS / GMS Decision
	Menetapkan Key Performance Indicator (KPI) Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2021 / Establishing Key Performance Indicators (KPIs) for the Board of Directors of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah for Fiscal Year 2021	Key Performance Indicator (KPI) Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2021 dengan perincian sebagai berikut:

Kategori		No	Strategic Initiative	Indikator	Satuan	Formula	Bobot	RKAP 2021
Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia	Finansial	1	-Membangun bisnis yang sehat, profitable dan pencadangan cukup. -Pertumbuhan pangasa Pasar	BOPO	%	Biaya Usaha dibagi dengan Pendapatan IJK Bruto	6	17.11
		2		ROE	%	Laba Bersih setelah pajak dibagi dengan rata-rata Total Ekuitas	6	10.09
		3		Laba Bersih	Rp Miliar	Laba Tahun Berjalan (Laba Bersih)	8	99.37
	Operasional	1	-Efisiensi proses kerja -Meningkatkan penerimaan hak subrogasi -Penerapan manajemen resiko yang prudent	Pertumbuhan IJK Netto	%	IJK Netto (n) - IJK Netto (n-1) / IJK Netto (n-1)	5	100.08
		2		*Combined Ratio*	%	Loss Ratio (Nett) + Commission Ratio (Nett) + Opex Ratio	5	93.01
		3		*Recovery Rate* dari Subrogation	%	Pendapatan Subrogasi x 100% / Klaim yang dibayarkan	5	12.48
		4		Skor *Risks Maturity Level*	Skor	Hasil penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen risiko	5	3
	Sosial	1	-Penjaminan KUR -Penjaminan KMK PEN	Penjaminan KUR & Penjaminan Kredit UMKM melalui PEN	Rp Triliun	Volume Penjaminan untuk KUR & KMK PEN	5	8.22
		2		*Customer Engagement Index*	%	Net Promoters Score	5	70
Inovasi Model Bisnis		1	-Membangun model bisnis baru non KUR	*Underwriting Yield KUR*	%	Penjaminan Bersih KUR/IJK Bruto KUR	3	35.67
		2		*Underwriting Yield Non KUR*	%	Penjaminan Bersih Non KUR/IJK Bruto Non KUR	3	16.75
		3		Kenaikan Pengguna Aplikasi Host to Host	%	Penggunaan Host to Host 2021 - Pengguna 2020 x 100% / Pengguna Host to Host 2020	4	50
Kepemimpinan dan Teknologi		1	-Otomasi proses bisnis	*IT Governance Maturity Level*	Skor	Skor IT Maturity level sesuai hasil assessment menggunakan framework COBIT	5	3
		2		Integrasi IT	Waktu	% pencapaian berdasarkan milestone 0% - 20% BRS 21% - 40% FSD 41% - 60% 61% - 80% UAT & Training 100% Live	5	Apr-21
Peningkatan Investasi		1	-Fokus peningkatan imbal hasil investasi perusahaan	*Yield on Investment*	%	Hasil investasi dibagi Rata-rata total dana investasi	5	5.25
		2		Perumbuhan AUM	%	Selisih AUM tahun periode berjalan dikurangi dengan tahun periode sebelumnya lalu dibagi dengan nilai total aum investasi periode tahun sebelumnya	5	44.08
Pengembangan Talenta		1	-Perubahan struktur organisasi dan transformasi budaya perusahaan	*Employee Engagement Rate*	%	Hasil survey keterikatan karyawan	5	3.35
		2	- Peningkatan ketersediaan talent dalam rangka suksesi jabatan	% Top Talent Muda (<40 Thn)	%	Jumlah top talent < 40 tahun x 100% / Jumlah top talent	5	15
		3		% BOD-1 Perempuan	%	Jumlah BOD-1 Perempuan x 100% / Jumlah-BOD	5	20

	Penambahan Modal Perseroan / Capital Increase of the Company	Para Pemegang Saham secara prinsip menyetujui penambahan modal sebesar maksimal Rp 400 Miliar (empat ratus miliar rupiah) untuk mendukung ekspansi penjaminan dan mem-back up pengalihan portofolio penjaminan Unit Usaha Syariah PT Jaminan Kredit Indonesia. Untuk teknis pelaksanaannya agar dilakukan berdasarkan kajian bisnis atas penambahan modal tersebut. / The Shareholders in principle approved a capital increase of up to IDR 400 billion (four hundred billion rupiah) to support the expansion of guarantees and back up the transfer of the guarantee portfolio of the Sharia Business Unit of PT Jaminan Kredit Indonesia. The technical implementation should be carried out based on a business review of the capital increase.
		Menyetujui penghapusan aset tetap yang telah habis umur ekonomisnya. Pelaksanaan penghapusan aset tetap tersebut dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. / Approving the disposal of fixed assets that have reached the end of their economic life. The disposal of fixed assets is carried out in accordance with the Company's Articles of Association.
		Terhadap penggunaan dana Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan (TBDSP), Direksi wajib melakukan kajian hukum secara mendalam sebelum digunakan dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Pengawas Syairah. Angka nominal dana Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan (TBDSP) yang terkumpul sampai dengan tahun 2020 agar dikonfirmasikan terlebih dahulu dan diaudit oleh auditor independen. / Regarding the use of funds that cannot be recognized as income (TBDSP), the Board of Directors is required to conduct an in-depth legal review before use and subsequently seek approval from the Sharia Supervisory Board. The nominal amount of funds that cannot be recognized as income (TBDSP) collected up to 2020 must first be confirmed and audited by an independent auditor.

Tanggal / Date	Agenda / Schedule	Keputusan RUPS / GMS Decision
31 Desember 2021 December 31, 2021	Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020. / Approval of the Annual Report, Ratification of the Company's Financial Statements for the 2020 Fiscal Year, and Ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2020 Fiscal Year.	**Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020** Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya nomor 01332/2.1025/AU.1/09/0222-1/1/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material" **Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the 2020 Fiscal Year and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2020 Fiscal Year** Approving the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report for the Financial Year ending on December 31, 2020, and ratifying the Company's Financial Statements for the Financial Year ending on December 31, 2020, which have been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners as stated in its report number 01332/2.1025/AU.1/09/0222-1/1/VII/2021 dated July 22, 2021 with an opinion of "fair, in all material respects."
	Pemberian Pembebasan Tanggung Jawab (Acquit et Decharge) Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Pengelolaan dan Pengawasan PT Jamkrindo Syariah untuk Tahun Buku 2020 Granting of Acquittal and Discharge to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Management and Supervision of PT Jamkrindo Syariah for the 2020 Fiscal Year	**Pemberian Pembebasan Tanggung Jawab (Acquit et Decharge) Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Pengelolaan dan Pengawasan PT Jamkrindo Syariah untuk Tahun Buku 2020** Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung Jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan tersebut. **Granting of Acquittal and Discharge to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Management and Supervision of PT Jamkrindo Syariah for the 2020 Fiscal Year** To grant full acquittal and discharge to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Management and Supervision Actions of the Company that have been carried out in the Fiscal Year ending on December 31, 2020, as long as such actions are not criminal acts and are reflected in the Report.
	Penetapan Zakat Perseroan Determination of Corporate Zakat	**Penetapan Zakat Perseroan** a. Menyetujui penetapan zakat atas Tahun Buku 2020 sebesar 2,5% dari laba tahun berjalan sehingga zakat yang dibebankan dan dibayarkan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp45.135.252.010 x 2,5% = Rp 1.128.381.300 (satu milyar seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu sepuluh rupiah) b. Menyetui penetapan zakat atas Tahun Buku 2021 sebesar 2,5% dari laba tahun berjalan yang dibebankan pada tahun buku 2021. **Determination of Corporate Zakat** a. Approving the determination of zakat for the 2020 Fiscal Year at 2.5% of current year profits, so that the zakat charged and paid in 2021 is Rp45,135,252,010 x 2.5% = Rp 1,128,381,300 (one billion one hundred thirty-five million two hundred fifty-two thousand ten rupiah). b. Approve the determination of zakat for the 2021 Fiscal Year at 2.5% of the current year's profit charged in the 2021 fiscal year.
6 September 2021 September 6, 2021	Penambahan Penyertaan Modal kepada PT Jamkrindo Syariah dan Pengalihan Portofolio Unit Usaha Syariah Additional Capital Contribution from PT Jamkrindo to PT Jamkrindo Syaria	Setelah dilakukan pembahasan, Direksi bersepakat dan menyetujui: 1. Penambahan penyertaan modal kepada PT Jamkrindo 155.133.192.192,- (seratus lima puluh lima miliar seratus tiga sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), berikut: a. Dana sebesar Rp155.133.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dicatat sebagai modal disetor; b. Dana sebesar Rp192.192,- (seratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) dicatat sebagai Uang Muka Modal Disetor PT Jamkrindo. After discussion, the Board of Directors agreed and approved: 1. Additional capital participation in PT Jamkrindo 155,133,192,192 (one hundred fifty-five billion one hundred thirty-three million ninety-two thousand one hundred ninety-two rupiah), as follows: a. Funds amounting to IDR 155,133,000,000 (one hundred fifty-five billion one hundred thirty-three million rupiah) are recorded as paid-in capital; b. Funds amounting to IDR 192,192 (one hundred ninety-two thousand one hundred ninety-two rupiah) are recorded as Advance Payment of Paid-in Capital of PT Jamkrindo..

Tanggal / Date	Agenda / Schedule	Keputusan RUPS / GMS Decision
		2. Dalam hal PT Jamkrindo akan menambah kembali modal disetor kepada PT Jamkrindo Syariah, dana sebagaimana angka 1 huruf b diatas akan diperhitungkan sebagai penambah modal disetor berikutnya. 3. Perubahan modal disetor Jamkrindo yang semula sebesar Rp550.000.000.000,- menjadi Rp705.620.500.000,- dan terdapat setoran untuk Uang Muka Modal Disetor sebesar Rp192.192,- 4. Pelaksanaan pengalihan portofolio UUS PT Jamkrindo kepada PT Jamkrindo Syariah melalui perjanjian pengalihan portofolio tersendiri, setelah direalisasikannya penambahan penyertaan modal kepada PT Jamkrindo Syariah. 5. Memberikan kuasa kepada Direktur Bisnis Penjaminan dan Direktur Operasional dan Jaringan mewakili Direksi untuk menetapkan nilai portofolio yang akan dialihkan termasuk jika terjadi koreksi atau perubahan di kemudian hari berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, melaksanakan pengalihan portofolio dan menandatangani dokumen-dokumen berikut perubahannya yang diperlukan dalam rangka pengalihan portofolio. 6. Guna efektifitas penutupan Unit Usaha Syariah PT Jamkrindo, Direksi menugaskan: a. Tim Pendamping Phase Out untuk melakukan langkah-langkah penutupan Unit Usaha Syariah PT Jamkrindo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Direktur Operasional dan Jaringan untuk melakukan pengawasan kepada Tim Pendamping Phase Out dalam melaksanakan penutupan Unit Usaha Syariah PT Jamkrindo hingga tuntas. 7. Adanya penambahan penyertaan modal sesuai butir 1 (satu) dan dengan tujuan pengembangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah diwajibkan dalam pengelolaan korporasi selalu berdasarkan azas-azas Good Corporate Governance (GCG) dan dapat menumbuh kembangkan tujuan korporasi secara berkelanjutan dan berorientasi pada profitabilitas. 2. In the event that PT Jamkrindo increases its paid-up capital to PT Jamkrindo Syariah, the funds referred to in point 1 letter b above shall be calculated as an increase in the next paid-up capital. 3. The change in Jamkrindo's paid-up capital, which was originally (five hundred fifty billion rupiah), to (seven hundred five billion six hundred twenty million five hundred thousand rupiah) and there is a deposit for the Down Payment of Paid-up Capital amounting to (one hundred ninety-two thousand one hundred ninety-two rupiah). 4. The implementation of the transfer of the UUS portfolio of PT Jamkrindo to PT Jamkrindo Syariah through a separate portfolio transfer agreement, following the completion of the capital increase contribution to PT Jamkrindo Syariah. 5. Granting authority to the Director of Guarantee Business and the Director of Operations and Network to represent the Board of Directors in determining the value of the portfolio to be transferred, including any corrections or changes that may occur in the future based on verifiable evidence, executing the portfolio transfer, and signing the necessary documents and their amendments in connection with the portfolio transfer. 6. To ensure the effectiveness of the closure of the Syariah Business Unit of PT Jamkrindo, the Board of Directors assigns: 7. For the effectiveness of the closure of the Sharia Business Unit of PT Jamkrindo, the Board of Directors assigns

URAIAN MENGENAI KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

DESCRIPTION OF REMUNERATION POLICY FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

1. **Pengungkapan mengenai Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.**
   a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya yang diberikan untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah mengacu pada:
   - Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
   - Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-06/MBU/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
   - Peraturan Direksi Nomor 17/Per-Dir/XI/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Ketentuan Penghasilan dan Fasilitas Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
   - Peraturan Direksi Nomor 18/Per-Dir/XI/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Ketentuan Penghasilan dan Fasilitas Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
   - Peraturan Direksi Nomor 19/Per-Dir/XI/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Ketentuan Penghasilan dan Fasilitas Dewan Pengawas Syariah PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

1. **Disclosure regarding Remuneration Policy and Other Facilities for Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and DPS.**
   a. Remuneration in non-cash form, including salaries and other fixed income, such as benefits, share-based compensation, bonuses, and other forms of remuneration provided to the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board refers to:
   - Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and Board of Supervisors of State-Owned Enterprises.
   - Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-06/MBU/06/2018 dated June 4, 2018 concerning the Third Amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Board of Supervisors of State-Owned Enterprises.
   - Board of Directors Regulation Number 17/Per-Dir/XI/2014 dated November 27, 2014 concerning Provisions on the Income and Facilities of the Board of Directors of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
   - Board of Directors Regulation Number 18/Per-Dir/XI/2014 dated November 27, 2014 concerning Provisions on the Income and Facilities of the Board of Commissioners of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
   - Board of Directors Regulation No. 19/Per-Dir/XI/2014 dated November 27, 2014 concerning the Provisions on Income and Facilities for the Sharia Supervisory Board of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Sesuai peraturan-peraturan tersebut diatas, remunerasi dalam bentuk non natura untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

In accordance with the above regulations, non-cash remuneration for the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board is as follows:

Direksi / Board of Directors	**Dewan Komisaris** / Board of Commissioners	**Dewan Pengawas Syariah** Sharia Supervisory Board
Gaji Tunjangan Tahunan: 1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2. Tunjangan Asuransi Purna Jabatan 3. Tunjangan Pakaian/Seragam 4. Tantiem **Annual Allowance Salary:** 1. Religious Holiday Allowance 2. Post-Employment Insurance Allowance 3. Clothing/Uniform Allowance 4. Tantiem	**Honorarium Tunjangan Tahunan:** 1. Tunjangan Hari Raya 2. Asuransi Purna Jabatan 3. Tantiem **Tunjangan Bulanan:** Tunjangan Transportasi **Annual Honorarium Allowance:** 1. Holiday Allowance 2. Retirement Insurance 3. Tantiem **Monthly Allowance:** Transportation Allowance	**Honorarium Tunjangan Tahunan:** 1. Tunjangan Hari Raya 2. Tantiem **Annual Honorarium Allowance:** 1. Holiday Allowance 2. Tantiem

b. Fasilitas lain dalam bentuk natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya. Fasilitas yang diberikan perusahaan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah terdiri dari:

b. Other benefits in kind are other non-fixed income, including allowances for housing, transportation, health insurance, and other facilities. The benefits provided by the company to the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board consist of:

Direksi / Board of Directors	**Dewan Komisaris** / Board of Commissioners	**Dewan Pengawas Syariah** Sharia Supervisory Board
• Kendaraan dinas beserta biaya operasionalnya • Pemeliharaan kesehatan • Bantuan hukum (bila diperlukan) • Komunikasi • Kepesertaan pada perkumpulan profesi • Keanggotaan Club Membership/Corporate member • Biaya representatif • Perjalanan dinas	• Pemeliharaan kesehatan • Bantuan hukum • (bila diperlukan) • Kepesertaan pada perkumpulan profesi • Perjalanan dinas • (at cost)	• Pemeliharaan kesehatan • Bantuan hukum (bila diperlukan) • Transportasi rapat • Perjalanan dinas • (at cost)
• Official vehicles and their operating costs • Healthcare • Legal assistance (if needed) • Communication • Membership in professional associations • Club membership/corporate membership • Representative expenses • Business travel	• Healthcare • Legal assistance • (if needed) • Membership in professional associations • Business travel • (at cost)	• Healthcare • Legal assistance (if needed) • Meeting transportation • Business travel • (at cost)

2. Pengungkapan Paket atau Kebijakan Remunerasi Dalam 1 (Satu) Tahun

a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) ditetapkan dalam RUPS tanggal tentang Pengesahan Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2020, diantaranya adalah mengusulkan gaji/honorarium per bulan untuk Direksi dan Dewan Komisaris untuk PT Penjaminan Jamkrindo Syariah untuk tahun buku 2021. Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas
   - Direksi
     Gaji Direktur Utama (Direktur Utama) ditetapkan sebesar Rp. 82.500.000 (Delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Gaji Direktur sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
   - Dewan Komisaris
     Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama, sedangkan honorarium Anggota Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama.
   - Dewan Pengawas Syariah (DPS)
     Honorarium Ketua Dewan Pengawas Syariah sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) sedangkan honorarium Anggota Dewan Pengawas Syariah 90% dari honorarium Ketua Dewan Pengawas Syariah.
   - Tunjangan dan/atau fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
   - Gaji/honorarium bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun 2021 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021.

b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitaslain.
   Berikut daftar rincian remunerasi yang diterima oleh Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah dalam tahun 2021.
   Remunerasi dan fasilitas lain untuk Dewan Komisaris, Direksi dan DPS ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham RUPS yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 23 Juli 2020.Tahun Buku 2020, diantaranya adalah mengusulkan gaji/honorarium per bulan untuk Direksi dan Dewan Komisaris untuk PT Penjaminan Jamkrindo Syariah untuk tahun buku 2021. Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2021 adalah sebagai berikut:
   -

2. Disclosure of Remuneration Package or Policy Within 1 (One) Year

a. Remuneration packages or policies and other benefits for members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board (DPS) as determined by the GMS. The remuneration package and other benefits for members of the Board of Directors, Supervisory Board, and Sharia Supervisory Board (DPS) are determined in the GMS dated regarding the Approval of the Audited Financial Statements for the 2020 Fiscal Year, including proposing monthly salaries/honoraria for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah for the 2021 fiscal year. The determination of the income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board for 2021 is as follows:

1. Salary/Honorarium, Allowances, and Facilities
   - Board of Directors
     The salary of the President Director (President Director) is set at Rp. 82,500,000 (eighty-two million five hundred thousand rupiah) per month. The salary of the Director is 85% of the salary of the President Director.
   - Board of Commissioners
     The honorarium for the President Commissioner is 45% of the President Director's salary, while the honorarium for Commissioner Members is set at 90% of the President Commissioner's honorarium.
   - Dewan Pengawas Syariah (DPS)
     The honorarium for the Chair of the Sharia Supervisory Board is IDR 25,000,000 (twenty-five million rupiah), while the honorarium for members of the Sharia Supervisory Board is 90% of the honorarium for the Chair of the Sharia Supervisory Board.
   - Allowances and/or facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners.
   - Salaries/honoraria for the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board for 2021 are effective as of January 1, 2021.

b. Remuneration and other benefits for all members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and DPS shall at least include the number of members of the Board of Directors, the number of members of the Board of Commissioners, the number of members of the DPS, and the total amount of remuneration and other benefits.The following is a detailed list of remuneration received by the Board of Directors, Board of Supervisors, and Sharia Supervisory Board in 2021. Remuneration and other benefits for the Board of Commissioners, Board of Directors, and DPS were determined at the General Meeting of Shareholders (GMS) held on July 23, 2020. For the 2020 fiscal year, this included proposing monthly salaries/honoraria for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah for the 2021 fiscal year. The determination of the income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board for 2021 is as follows:
   -

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lainnya Amount of Remuneration and Other Benefits	Jumlah yang diterima selama periode Januari s.d. Desember 2021 Amount received during the period from January to December 2021					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		DPS DPS	
	Orang People	(Rp) Juta (IDR) Million	Orang People	(Rp) Juta (IDR) Million	Orang People	(Rp) Juta (IDR) Million
Remunerasi / Remuneration	3	2.277.30	3	3.785.58	2	570
Fasilitas lain yang didapat / Other facilities available		545,22		2.566,33		

c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagaiberikut:

c. The number of members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and DPS who received remuneration packages in one (1) year, grouped according to income level, is as follows:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai Total remuneration per person in one (1) year in cash	Jumlah Direksi Number of Directors	Jumlah Komisaris Number of Comissioners	Jumlah DPS Total DPS
Di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Above Rp2,000,000,000.00 (two billion rupiah)			
Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Above Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah) to Rp2,000,000,000.00 (two billion rupiah)	3		
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Above Rp500,000,000.00 (five hundred million rupiah) to Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah)		3	
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kebawah Below Rp500,000,000.00 (five hundred million rupiah)			2

3. Rasio Gaji Tertinggi danTerendah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab I Pasal 1 ayat 30 disebutkan bahwa Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Gaji/Upah yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan Desember tahun 2021 PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Besar gaji Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tahun 2021 sebagaimana disampaikan dalam uraian sebelumnya. Sedangkan gaji karyawan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah sebagaimana dalam Peraturan Direksi Nomor 001/Per-Dir/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Sistem Penggajian Karyawan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, terdiri dari:

- Gaji Pokok
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Operasional
- Tunjangan Uang Makan
- Tunjangan Komunikasi

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

3. Highest and Lowest Salary Ratios

According to Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 dated March 25, 2003 concerning Manpower, Chapter I Article 1 paragraph 30 states that wages are the rights of workers/laborers that are received and stated in the form of money as compensation from employers or employers to workers/laborers that are determined and paid according to a work agreement, agreement, or legislation, including allowances for workers/laborers and their families for work and/or services that have been or will be performed. The salaries/wages compared in the salary ratio are the compensation received by members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees in December 2021 at PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

The amount of the 2021 salary of the Board of Directors of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah is as stated in the previous description. Meanwhile, the salaries of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah employees, as stipulated in Board of Directors Regulation Number 001/Per-Dir/I/2020 dated January 2, 2020, concerning the Employee Salary System of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, consist of:

- Base Salary
- Position Allowance
- Operational Allowance
- Meal Allowance
- Communication Allowance

The highest and lowest salary ratios, on the following scale:

No	Keterangan / Description	Gaji Terendah / Lowest Salary	Gaji Tertinggi / Hihghest Salary
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah The highest and lowest employee salary ratios	1	7,22
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah The highest and lowest salary ratios of Board members	1	1,13
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah The highest and lowest salary ratios of Board of Commissioners members	1	1,08
4	Rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi The ratio of the highest salary of a member of the Board of Directors and the highest salary of an employee	1	3,64

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji dimaksud di atas, adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai perbulan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

The salary compared in the above salary ratio is the employee's entitlement received and stated in the form of money as compensation from the company received by members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and employees per month, which is determined and paid in accordance with an employment agreement, agreement, or legislation, including allowances for work and/or services that have been performed.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT
FREQUENCY AND ATTENDANCE RATE OF MEETINGS

Kebijakan rapat Dewan Komisaris Jamsyar telah memenuhi minimal 1 kali rapat dalam 1 bulan, Direksi juga telah mengadakan rapat satu kali dalam sebulan. Selain itu, Perusahaan juga mengadakan rapat gabungan yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
Berikut rinciannya;

The Jamsyar Board of Commissioners' policy requires at least one meeting per month, and the Board of Directors has also held one meeting per month. In addition, the Company also holds joint meetings attended by the Board of Commissioners and the Board of Directors. The details are as follows:;

RAPAT DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

No	Periode Rapat Meeting Period	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Kehadiran Attendance	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	Januari January	29 Januari 2021 January 29, 2021	• Aribowo • Wildan • M. Syakir Sula • Siti Maesaroh	Pembahasan Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah s.d Desember 2020 Discussion of the Performance of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah up to December 2020
2	Februari February	24 Februari 2021 February 24, 2021	• Aribowo • Wildan • M. Syakir Sula • Siti Maesaroh	Pembahasan Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Bulan Januari 2021 Discussion of the Performance of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah for January 2021
3	Maret March	30 Maret 2021 March 30, 2021	• Aribowo • Wildan • M. Syakir Sula • Eddy Rachmadi • Siti Maesaroh	Pembahasan Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Bulan Februari 2021 Discussion of the Performance of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah for February 2021
4	April April	30 April 2021 April 30, 2021	• Aribowo • Wildan • M. Syakir Sula • Eddy Rachmadi • Siti Maesaroh	Pembahasan Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Bulan Maret 2021 Discussion of the Performance of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah for March 2021
5	Mei May	31 Mei 2021 May 31, 2021	• Aribowo • Wildan • M. Syakir Sula • Siti Maesaroh	• Pembahasan Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah s.d April 2021 • Pembahasan terkait Potensi Klaim Penjaminan PT Barata Indonesia dan PT Waskita Karya • Discussion of the Performance of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah up to April 2021 • Discussion on the Potential Guarantee Claims of PT Barata Indonesia and PT Waskita Karya
6	Juni June	2 Juni 2021 June 2, 2021	• Aribowo • Wildan • M. Syakir Sula • Siti Maesaroh	• Pembahasan Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Bulan Mei 2021 • Pembahasan terkait *Gearing Ratio* • Pembahasan terkait penambahan modal • Discussion of the Performance of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah for May 2021 • Discussion on the Gearing Ratio • Discussion on Capital Injection
7	Juli July	29 Juli 2021 July 29, 2021	• Aribowo • Wildan • M. Syakir Sula • Eddy Rachmadi • Siti Maesaroh	Pembahasan Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Bulan Juli 2021 Discussion on Reinsurance of the PEN Guarantee Products
8	Agustus Agust	31 Agustsus 2021 August 31, 2021	• Aribowo • Wildan • M. Syakir Sula • Eddy Rachmadi • Siti Maesaroh	• Pembahasan Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Bulan Juli 2021 • Pembahasan terkait Reasuransi Produk Penjaminan PEN • Discussion of the Performance of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah for August 2021
9	September September	21 September 2021 September 21, 2021	• Aribowo • Wildan • M. Syakir Sula • Eddy Rachmadi • Siti Maesaroh	• Pembahasan Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Bulan Agustus 2021 • Discussion of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah's Performance in August 2021

No	Periode Rapat Meeting Period	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Kehadiran Attendance	Agenda Rapat Meeting Agenda
10	Oktober October	28 Oktober 2021 October 28, 2021	• Aribowo • Wildan • M. Syakir Sula • Eddy Rachmadi • Siti Maesaroh	• Pembahasan Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Bulan September 2021 • Pembahasan terkait Penjaminan PT Barata Indonesia • Pembahasan terkait Penyelesaian Phase Out UUS dari PT Jamkrindo • Kunjungan lapangan dalam rangka sampling Kantor Cabang Upaya preventif dan kuratif dalam penanganan Covid-19 Omicron • Discussion of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah's Performance in September 2021 • Discussion related to PT Barata Indonesia's Guarantee • Discussion related to the Phase Out UUS Settlement from PT Jamkrindo • Field visit for sampling Branch Offices Preventive and curative measures in handling Covid-19 Omicron
11	November November	7 Desember 2021 December 7, 2021	• Aribowo • Wildan • M. Syakir Sula • Eddy Rachmadi • Siti Maesaroh	• Pembahasan Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Bulan Oktober 2021 • Progress Renovasi Gedung Kantor Pusat • Strategi antisipasi dari dampak penjaminan PT Barata Indonesia • Discussion of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah's Performance in October 2021 • Progress of the Renovation of the Head Office Building • Anticipatory strategy for the impact of PT Barata Indonesia's guarantees
12	Desember December	30 Desember 2021 December 30, 2021	• Aribowo • Wildan • M. Syakir Sula • Eddy Rachmadi • Siti Maesaroh	• Pembahasan Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Bulan November 2021 • Progress Renovasi Gedung Kantor Pusat • Rencana sampling • evaluasi kinerja 1 Kantor Cabang yang belum terlaksana • PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Performance Discussion for November 2021 Head Office Building Renovation Progress Sampling plan Performance evaluation of 1 branch office that has not been implemented

Nama Peserta Participant Name	Jabatan Position	% Kehadiran Rapat Meeting Attendance
Gatot Suprabowo	Direktur Utama President Director	100%
Endang Sri Winarni	Direktur Keuangan, SDM & Umum Director of Finance, Human Resources & General Affairs	100%
Achmad Sonhadji	Direktur Operasional Operational Director	100%
Aribowo	Komisaris Utama / President Commissioner	100%
Muhammad Syakir Sula	Komisaris / Commissioner	100%
Wildan	Komisaris Independen / Independent Commissioner	100%

RAPAT DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS MEETING

No	Periode Rapat Meeting Period	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Kehadiran Attendance	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	Januari	14 Januari 2021	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Bulan Desember 2020 • Pembahasan terkait Renovasi Gedung Kantor Pusat • Discussion of Performance in December 2020 • Discussion related to the Renovation of the Head Office Building
2	Februari	17 Februari 2021	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Periode Bulan Januari 2021 • Pembahasan terkait Pengadaan Pemeringkatan Perusahaan • Discussion of Performance for the Period of January 2021 • Discussion related to Company Rating Procurement

No	Periode Rapat Meeting Period	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Kehadiran Attendance	Agenda Rapat Meeting Agenda
3	Maret	17 Maret 2021	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Periode Bulan Februari 2021 • Pembahasan terkait Pemeringkatan Perusahaan • Pembahasan terkait Pengurusan Peraturan Perusahaan • Discussion of Performance for the Period of February 2021 • Discussion related to Company Ranking • Discussion related to Company Regulation Management
4	April	21 April 2021	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Periode Bulan Maret 2021 • Pembahasan terkait Pemeringkatan Perusahaan • Pembahasan terkait Pengurusan Peraturan Perusahaan • Discussion of Performance for the Period of March 2021 • Discussion related to Company Ranking • Discussion related to Company Regulation Management
5	Mei	18 Mei 2021	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Periode Bulan April 2021 • Pembahasan terkait Pemeringkatan Perusahaan • Pembahasan terkait Pengurusan Peraturan Perusahaan • Pembahasan terkait Rapat Kerja Evaluasi TW I dan Action Plan TW II 2021 • Pembahasan terkait Re-alokasi Anggaran Belanja Modal 2021 • Discussion of Performance for the Period of April 2021 • Discussion related to Company Ranking • Discussion related to Company Regulation Management • Discussion related to the First Semester Evaluation Meeting and Second Semester Action Plan for 2021 • Discussion related to the Reallocation of the 2021 Capital Expenditure Budget
6	Juni	25 Juni 2021	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Periode Bulan Mei 2021 • Pemeringkatan Perusahaan • Re-alokasi Anggaran Belanja Modal • Discussion of Performance for the Period of May 2021 • Company Ranking • Reallocation of Capital Expenditure Budget
7	Juli	23 Juli 2021	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Periode Bulan Juni 2021 • Renovasi Gedung Pusat • Discussion of Performance for the Period of June 2021 • Renovation of the Central Building
8	Agustus	12 Agustsus 2021	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Periode Bulan Juli 2021 • Pengadaan Kontraktor Pelaksanan Renovasi • Discussion of Performance for the Period of July 2021 Procurement of Contractors for Renovation Work
9	September	14 September 2021	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Periode Bulan Agustus 2021 • Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Jamsyar • Discussion of Performance for the Period of August 2021 • Implementation of the Jamsyar Building Renovation Project
10	Oktober	12 Oktober 2021	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Periode Bulan September 2021 • Progres Pekerjaan Renovasi Gedung Jamsyar • Discussion of Performance for the Period of September 2021 • Progress of the Jamsyar Building Renovation Work
11	November	16 November 2021	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Periode Bulan Oktober 2021 • Progres Pekerjaan Renovasi Gedung Jamsyar • Discussion of Performance for the Period of October 2021 • Progress of the Jamsyar Building Renovation Work
12	Desember	15 Desember 2021	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Periode Bulan November 2021 • Progres Pekerjaan Renovasi Gedung Jamsyar • Usulan Struktur Organisasi Baru • Performance Discussion for November 2021 • Progress of Jamsyar Building Renovation • Proposed New Organizational Structure

RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH
SHARIA SUPERVISORY BOARD MEETING

No	Periode Rapat Meeting Period	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Kehadiran Attendance	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	Januari	14 Januari 2021	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Bulan Desember 2020 • Pembahasan terkait Renovasi Gedung Kantor Pusat • Discussion of Performance in December 2020 • Discussion related to the Renovation of the Head Office Building
2	Februari	17 Februari 2021	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Periode Bulan Januari 2021 • Pembahasan terkait Pengadaan Pemeringkatan Perusahaan • Discussion of Performance for the Period of January 2021 • Discussion related to Company Rating Procurement
3	Maret	17 Maret 2021	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Periode Bulan Februari 2021 • Pembahasan terkait Pemeringkatan Perusahaan • Pembahasan terkait Pengurusan Peraturan Perusahaan • Discussion of Performance for the Period of February 2021 • Discussion related to Company Ranking • Discussion related to Company Regulation Management
4	April	21 April 2021	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Periode Bulan Maret 2021 • Pembahasan terkait Pemeringkatan Perusahaan • Pembahasan terkait Pengurusan Peraturan Perusahaan • Discussion of Performance for the Period of March 2021 • Discussion related to Company Ranking • Discussion related to Company Regulation Management
5	Mei	18 Mei 2021	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Periode Bulan April 2021 • Pembahasan terkait Pemeringkatan Perusahaan • Pembahasan terkait Pengurusan Peraturan Perusahaan • Pembahasan terkait Rapat Kerja Evaluasi TW I dan Action Plan TW II 2021 • Pembahasan terkait Re-alokasi Anggaran Belanja Modal 2021 • Discussion of Performance for the Period of April 2021 • Discussion related to Company Ranking • Discussion related to Company Regulation Management • Discussion related to First Semester Evaluation Meeting and Sec Semester Action 2021 • Discussion related to the Reallocation of the 2021 Capital Expenditure Budget
6	Juni	25 Juni 2021	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Periode Bulan Mei 2021 • Pemeringkatan Perusahaan • Re-alokasi Anggaran Belanja Modal • Discussion of Performance for the Period of May 2021 • Company Ranking • Capital Budget Reallocation
7	Juli	23 Juli 2021	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Periode Bulan Juni 2021 • Renovasi Gedung Pusat • Discussion of Performance for the Period of June 2021 • Renovation of the Central Building
8	Agustus	12 Agustsus 2021	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Periode Bulan Juli 2021 • Pengadaan Kontraktor Pelaksanan Renovasi • Discussion of Performance for the Period of July 2021 • Procurement of Contractors for Renovation Work
9	September	14 September 2021	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Periode Bulan Agustus 2021 • Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Jamsyar • Discussion of Performance for the Period of August 2021 • Implementation of the Jamsyar Building Renovation Project
10	Oktober	12 Oktober 2021	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Periode Bulan September 2021 • Progres Pekerjaan Renovasi Gedung Jamsyar • Discussion of Performance for the Period of September 2021 • Progress of the Jamsyar Building Renovation Work

No	Periode Rapat Meeting Period	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Kehadi ran Attendance	Agenda Rapat Meeting Agenda
11	November	16 November 2021	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Periode Bulan Oktober 2021 • Progres Pekerjaan Renovasi Gedung Jamsyar • Discussion of Performance for the Period of October 2021 • Progress of the Jamsyar Building Renovation Work
12	Desember	15 Desember 2021	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang S. Winarni	• Pembahasan Kinerja Periode Bulan November 2021 • Progres Pekerjaan Renovasi Gedung Jamsyar • Usulan Struktur Organisasi Baru • Discussion of Performance for the Period of November 2021 • Progress of the Jamsyar Building Renovation • Proposal for a New Organizational Structure

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI
MAJOR SHAREHOLDERS AND CONTROLLERS

Berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 11 Oktober 2021, Pemegang saham utamadan pengendali Perusahaan Jamkrindo Syariah adalah Perseroan Terbatas (PT) Jaminan Kredit Indonesia dengan kepemilikan sebanyak 1.410.241 (satu juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh satu) lembar saham dan Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera (KOWAJASA) dengan kepemilikan sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham

Based on Deed No. 15 dated 11 October 2021, the principal and controlling shareholders of Jamkrindo Syariah are Perseroan Terbatas (PT) Jaminan Kredit Indonesia, holding 1,410,241 (one million four hundred ten thousand two hundred forty-one) shares, and Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera (KOWAJASA), holding 1,000 (one thousand) shares.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI
DISCLOSURE OF AFFILIATED RELATIONSHIPS

	Dewan Pengawas Sya riah Sharia Supervisory Board	Dewan Komisa ris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Utama/Pengendali Major Shareholder/Controlling Shareholder
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board		X	X	X
Dewan Komisaris Board of Commissioners	X		X	X
Direksi Board of DIrectors	X	X		X

2. Informasi Rangkap Jabatan
   Sebagaimana dalam profil Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi Perseroan tidak terdapat rangkap jabatan. Hal ini mengacu pada:
   - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan, pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa Anggota Direksi Lembaga Penjaminan dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Penjaminan atau Badan Usaha lain.
   - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan, pasal 19 ayat (3) menerangkan bahwa Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain. Pasal 19 ayat (4) menerangkan bahwa tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:

     a. Anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau
     b. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin.

2. Information on Multiple Positions
   As stated in the profiles of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors, there are no dual positions within the Company. This refers to:
   - Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.05/2017 dated January 11, 2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, article 14 paragraph (1) states that members of the Board of Directors of Guarantee Institutions are prohibited from holding concurrent positions in Guarantee Institutions or other Business Entities.
   - Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.05/2017 dated January 11, 2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, Article 19 paragraph (3) explains that members of the Board of Commissioners of Guarantee Institutions are prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Commissioners in more than 3 (three) Guarantee Institutions or other business entities. Article 19 paragraph (4) explains that concurrent positions as referred to in paragraph (3) do not include the following:

     a. Members of the Board of Commissioners who are not Independent Commissioners perform the functional duties of shareholders of the Guarantee Institution in the form of a legal entity within their business group; and/or
     b. Members of the Board of Commissioners hold positions in non-profit organizations or institutions, as long as they do not neglect their duties and responsibilities as members of the Board of Commissioners of the Guarantee Institution.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan, pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa Anggota DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS yang sama. Juga pada pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa Anggota DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.

- Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.05/2017 dated January 11, 2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, Article 35 paragraph (1) states that DPS members are prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners in Sharia Guarantee Companies, Sharia Re-guarantee Companies, and Guarantee Companies that have the same UUS. Article 35 paragraph (2) also states that DPS members are prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or members of the DPS in more than 4 (four) other Islamic financial institutions.

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Komite Audit merupakan organ tata kelola perusahaan yang berfungsi memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris atas pengelolaan Perusahaan oleh Direksi serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah memiliki Komite Audit yang dibentuk pada tanggal 12 Februari 2020, sesuai dengan surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-02/DK-JAMSYAR/II/2020 tentang Pengangkatan Komite Audit Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.Pembentukan Komite Audit dimaksudkan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya serta bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

The Audit Committee is a corporate governance body that provides independent professional opinions to the Board of Commissioners on the management of the Company by the Board of Directors and identifies matters that require the attention of the Board of Commissioners. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah has an Audit Committee that was formed on February 12, 2020, in accordance with the Board of Commissioners' Decree Number: KEP-02/DK-JAMSYAR/II/2020 concerning the Appointment of the Audit Committee of the Board of Commissioners of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. The Audit Committee was established to assist the Board of Commissioners in carrying out its duties and is independent in both the performance of its duties and reporting, and is directly responsible to the Board of Commissioners.

PROFIL KOMITE AUDIT
PROFIL AUDIT COMMITTEE

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017, tanggal 11 Januari 2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan pasal 29 menyatakan bahwa:

- Ayat (1) : "Lembaga Penjamin wajib membentuk komite audit dalam hal:
  a. memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi; atau
  b. terdapat kepemilikan asing."
- Ayat (2) : "Salah seorang anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Komisaris Independen yang sekaligus berkedudukan sebagai ketua komite."

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah memiliki Komite Audit yang dibentuk pada tanggal 10 Oktober 2017, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor: KEP-02/DK-JAMSYAR/X/2017 tentang Penetapan Ketua Komite Audit PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Komite Audit PT Penjaminan Jamkrindo Syariah terdiri dari:

1. Ketua Komite Audit yang sekaligus merupakan Komisaris Independen.
2. Anggota Komite Audit.

Ketua dan anggota Komite Audit memiliki keahlian yang memadai di bidang penjaminan dan keuangan.

Based on Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.05/2017, dated January 11, 2017, concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, Article 29 states that:

- Paragraph (1): "The Guarantee Institution shall establish an audit committee in the event of:
  a. has a national or provincial operational area; or
  b. has foreign ownership.
- Paragraph (2): "One of the members of the audit committee as referred to in paragraph (1) shall be an Independent Commissioner who also serves as the chair of the committee."

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah has an Audit Committee that was formed on October 10, 2017, in accordance with the Board of Commissioners' Decree number: KEP-02/DK-JAMSYAR/X/2017 concerning the Appointment of the Chair of the Audit Committee of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

The Audit Committee of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah consists of:

1. Chairman of the Audit Committee who is also an Independent Commissioner.
2. Member of the Audit Committee.

The chairperson and members of the Audit Committee have adequate expertise in assurance and finance.

WILDAN	
KOMISARIS INDEPENDEN | KETUA Independent Commissioner | Chairman	
Periode Jabatan Term of Office	2019 - Sekarang / Present
Data Pribadi Personal Data	Warganegara : Indonesia Usia : 58 Tahun Kelahiran : Padang, 11 Maret 1962 Domisili : DKI Jakarta

EDDY RACHMADI	
ANGGOTA KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE MEMBER	
Periode Jabatan Term of Office	2019 - Sekarang / Present
Data Pribadi Personal Data	Warganegara : Indonesia Usia : 63 Tahun Kelahiran : Jakarta, 26 Juli 1957 Domisili : DKI Jakarta

DIANA MAYAWATI
ANGGOTA KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE MEMBER

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE AUDIT
INDEPENDENCE OF AUDIT COMMITTEE MEMBERS

Komite Audit menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu anggota Komite Audit Jamkrindo Syariah juga memenuhi kriteria;

- Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa non audit pada Jamsyar dalam 1 (satu) tahun terakhir
- Tidak memiliki kepentingan/ keterikatan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Jamsyar, Direksi dan Dewan Komisaris
- Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Jamsyar.

The Audit Committee carries out its duties and responsibilities professionally and independently, without interference from any party in accordance with laws and regulations. In addition, members of the Jamkrindo Syariah Audit Committee also meet the following criteria:

- Not a member of a Public Accounting Firm that has provided non-audit services to Jamsyar within the last 1 (one) year.
- Has no personal interests/ties that could have a negative impact and cause a conflict of interest with the relevant state-owned enterprise.
- Has no affiliation with Jamsyar, its Board of Directors, or Board of Commissioners.
- Has no direct or indirect business relationship related to Jamsyar's business activities.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT
DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

Tugas dan tanggungjawab Komite Audit sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan, tanggal 11 Januari 2017, pasal 29 adalah:

- Ayat (3): "Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan."

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut:

a. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.

The duties and responsibilities of the Audit Committee in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.05/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, dated January 11, 2017, article 29 are:

- Paragraph (3): "The Audit Committee as referred to in paragraph (1) shall assist the Board of Commissioners in monitoring and ensuring the effectiveness of the internal control system and the performance of internal and external auditors by monitoring and evaluating the planning and implementation of audits in order to assess the adequacy of internal controls, including the financial reporting process."

The duties and responsibilities of the Audit Committee of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah are as follows:

a. Assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the performance of external auditors and internal auditors.

b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal maupun Auditor Eksternal.
c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya.
d. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan.
e. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Pemilik Modal.
f. Melakukan identifikasi hal - hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas - tugas Dewan Komisaris lainnya.
g. Melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, antara lain:
   1. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perusahaan, Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, laporan manajemen dan informasi lainnya.
   2. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan.

b. Assessing the implementation of activities and the results of audits conducted by the Internal Audit Unit and External Auditors.
c. Providing recommendations on improving the internal control system and its implementation.
d. Ensuring that there are satisfactory evaluation procedures for all information released by the company.
e. Providing recommendations regarding the appointment of Public Accountants and Public Accounting Firms to the Board of Commissioners to be submitted to the Shareholders.
f. Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners.
g. Performing other duties in accordance with the provisions of laws and regulations and/or as determined by the Board of Commissioners, including:
   1. Reviewing information about the Company, Long-Term Plans, Company Work Plans and Budgets, management reports, and other information.
   2. Reviewing complaints related to the Company.

RAPAT KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE MEETING

Selama tahun 2021, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat secara pertemuan langsung dan daring sebagai berikut:

During 2021, the Audit Committee held the following meetings in person and online:

No	Periode Rapat Meeting Period	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Kehadiran Attendance	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	April	8 April 2021	• Wildan • Muhammad Syakir Sula • Achmad Sonhadji • Siti Maesaroh • Juli Sumartana • Iwan Hermawan • Eddy Rachmadi	• Update Progress audit PwC • Hal-hal lain yang perlu didiskusikan • PwC audit progress update • Other matters to discuss
2	Agusutus	12 Agustus 2021	• Wildan • Eddy Rachmadi • Juli Sumartana • Ibrahim Nur Setiawan • Aziz Noordiono • Adhytia Ramadhan • Yosi Dwi Apriliani Dita • Fatimah Medina • Mulia Mahardika	• Rencana Pencapaian Rencana Audit Internal Tahun 2021 • Temuan hasil audit dan tindak lanjut penyelesaian (jika masih ada) • Rencana kerja Audit Internal tahun 2022 • Hal-hal lain yang perlu didiskusikan • Internal Audit Plan for 2021 • Audit findings and follow-up actions (if any) • Internal Audit Work Plan for 2022 • Other matters to be discussed
3	November	24 November 2021	• Wildan • M. Syakir Sula • Diana Mayawati • Eddy Rachmadi • Juli Sumartana • Ibrahim Nur Setiawan • Adhytia Ramadhan • Yosi Dwi Apriliani Dita • Fatimah Medina • Mulia Mahardika	• Kegiatan pengawasan Satuan Pengawasan Internal • Hal-hal lain yang perlu didiskusikan • Internal Oversight Unit activities • Other matters to be discussed

Frekuensi rapat Komite Audit dan kehadiran anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

The frequency of Audit Committee meetings and the attendance of Audit Committee members are as follows:

No	Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance		% Kehadiran Rapat Total Attendance
		Fisik Physical	Sarana Media Elektronik Electronic Media	
1	Wildan	1	1	100%
2	Eddy Rachmadi	1	1	100%
3	Diana Mayawati	1	1	100%

ORGAN DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
ORGANIZATIONS UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Jamkrindo Syariah terus mengevaluasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Sepanjang tahun 2021, Perusahaan belum membentuk komite lain yang berada dibawah Dewan Komisaris. Fungsi komite lainnya telah dijalankan oleh Dewan Komisaris dan seluruh unit terkait. Organ yang membantu Dewan Komisaris secara fungsional adalah Sekretaris Dewan Komisaris.

Jamkrindo Syariah continues to evaluate the implementation of good corporate governance. Throughout 2021, the Company has not formed any other committees under the Board of Commissioners. The functions of other committees have been carried out by the Board of Commissioners and all relevant units. The body that assists the Board of Commissioners functionally is the Secretary to the Board of Commissioners.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
PROFILE OF THE SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

SITI MAESAROH	
SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS Secretary of the Board of Commissioners	
Periode Jabatan Term of Office	2019 - Sekarang /Now
Data Pribadi Personal Data	Warganegara : Indonesia Usia : 49 Tahun Kelahiran : Magelang, 26 Mei 1971 Domisili : DKI Jakarta

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Sebagaimana tercantum pada 18/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-06/DK-Jamsyar/VIII/2015 (BOM), berikut merupakan tugas dan tanggung jawan Dewan Komisaris Perseroan, antara lain:

- Menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi dan tugasnya selaku Dewan Komisaris.
- Menghadiri Rapat Dewan Komisaris, baik rapat internal maupun Rapat Gabungan Direksi dengan, kecuali rapat khusus yang hanya boleh dihadiri oleh Direksi dan atau Dewan Komisaris.
- Bertanggungjawab atas penyampaian berbagai informasi yang terkait dengan agenda yang akan dibahas dan bertanggungjawab terhadap pembuatan, pengadministrasian dan penyampaian Risalah Rapat.
- Bersama-sama Perusahaan merencanakan Program Pengenalan dan Pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat.

As stated in 18/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-06/DK-Jamsyar/VIII/2015 (BOM), the following are the duties and responsibilities of the Company's Board of Commissioners, among others:

- Performing administrative and secretarial duties related to all activities of the Board of Commissioners in carrying out its functions and duties as the Board of Commissioners.
- Attending Board of Commissioners meetings, both internal meetings and Joint Board of Directors meetings, except for special meetings that may only be attended by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
- Responsible for conveying various information related to the agenda to be discussed and responsible for the preparation, administration, and delivery of Meeting Minutes.
- Together with the Company, plan an Introduction and Training Program for newly appointed members of the Board of Commissioners.

PELAKSANAAN KEGIATAN SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
IMPLEMENTATION OF BOARD OF COMMISSIONERS SECRETARY ACTIVITIES

Sepanjang 2021, Sekretaris Dewan Komisaris telah membantu Dewan Komisaris dalam mengatur jadwal pertemuan dan kunjungan tugas Dewan Komisaris ke wilayah kerja Jamsyar.

Throughout 2021, the Secretary of the Board of Commissioners has assisted the Board of Commissioners in arranging the schedule of meetings and working visits of the Board of Commissioners to Jamsyar's working areas.

SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY

Fungsi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Kepala Divisi SDM & Umum. Selama tahun 2021 Sekretaris Perusahaan memiliki kewenangan dan kewajiban sebagai berikut:

During 2021, the Secretary of the Board of Commissioners assisted the Board of Commissioners in arranging meeting schedules and working visits to Jamsyar's working areas.

1. Pengusulan Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Sekretaris Perusahaan
2. Membina dan mengevaluasi Karyawan di Bagian Sekretaris Perusahaan
3. Menyusun, mereviu dan menyempurnakan kebijakan dan Standard Operating Procedure (SOP) Bagian Sekretaris Perusahaan
4. Menggunakan dan memelihara alat/sarana fisik Bagian Sekretaris Perusahaan
5. Mengusulkan KPI di Bagian Sekretaris Perusahaan
6. Pengawasan dan Pengendalian internal setiap tugas dan fungsi di Bagian Sekretaris Perusahaan
7. Kegiatan manajemen risiko sesuai dengan bidang tugasnya
8. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip dan pedoman GCG
9. Melakukan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan bidang tugasnya
10. Kewenangan lain sesuai dengan Peraturan Direksi yang berlaku

1. Proposing Work Plans and Budgets for the Corporate Secretary Division
2. Fostering and evaluating employees in the Corporate Secretary Division
3. Developing, reviewing, and refining policies and Standard Operating Procedures (SOPs) for the Corporate Secretary Division
4. Using and maintaining physical tools/facilities for the Corporate Secretary Division
5. Proposing KPIs for the Corporate Secretary Division
6. Supervising and controlling internal tasks and functions in the Corporate Secretary Division
7. Risk management activities in accordance with the scope of duties
8. Performing tasks and functions in accordance with GCG principles and guidelines
9. Managing data and information in accordance with the scope of duties
10. Other authorities in accordance with applicable Board of Directors regulations

PELAKSANA FUNGSI SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY

MARIA ULFAH	
SEKRETARIS PERUSAHAAN / KEPALA DIVISI SDM & UMUM CORPORATE SECRETARY / HEAD OF HUMAN RESOURCES & GENERAL AFFAIRS DIVISION	
Periode Jabatan Term of Office	2019 - Sekarang
Data Pribadi Personal Data	Warganegara : Indonesia Usia : 49 Tahun Kelahiran : Magelang, 26 Mei 1971 Domisili : DKI Jakarta
Riwayat Penunjukan Appointment History	Kepdir Nomor 020 tanggal 31 maret 2021
Pendidikan Education	Sarjana Hukum, Universitas Merdeka (1998)
Riwayat Jabatan Employment History	Saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Sekretaris Dewan Komisaris Jamsyar. Sebelumnya beliau pernah menempati sejumlah posisi, antara lain sebagai berikut: • Kepala Bagian Legal PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2015 – 2018) • Kepala KUP Lampung PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2018 – 2020) • Plt. Kepala Divisi SDM & Umum PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2020 – sekarang) Currently, he serves as Chairman of the Board of Commissioners of Jamsyar. Previously, he held a number of positions, including the following: • Head of Legal Department at PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2015 – 2018) • Head of KUP Lampung at PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2018 – 2020) • Acting Head of Human Resources & General Affairs Division at PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2020 – present)

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN
DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CORPORATE SECRETARY

1. Mengkoordinasikan pengelolaan tata persuratan dan dokumen perusahaan
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan protokoler perusahan
3. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Rapat Kerja Perusahaan, RUPS dan Kegiatan perusahaan lainnya
4. Mengkoordinasikan pengelolaan brand perusahaan
5. Mengkoordinasikan kegiatan publikasi dan penanganan media tentang perusahaan dan pameran
6. Mengkoordinasikan kegiatan pameran dan media promosi lainnya
7. Mengkoordinasikan perbuatan materi promosi
8. Mengkoordinasikan pengelolaan media social perusahaan
9. Melakukan Penyaluran zakat perusahaan

1. Coordinate the management of company correspondence and documents.
2. Coordinate the implementation of company protocols.
3. Coordinate the implementation of company work meetings, general meetings of shareholders, and other company activities.
4. Coordinating the management of the company's brand
5. Coordinating publication activities and media coverage of the company and exhibitions
6. Coordinating exhibitions and other promotional media activities
7. Coordinating promotional materials
8. Coordinating the management of the company's social media
9. Distributing the company's zakat (alms)

UNIT AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT UNIT

Audit Intern atau Satuan Pengawasan Internal (SPI) merupakan organ perusahaan yang berfungsi memberikan keyakinan (assurance) dan konsultasi secara independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan. Penilaian Audit Internal dilakukan melalui pendekatan yang sistematis dalam pelaksanaan audit, evaluasi dan review untuk menilai efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan proses tata kelola.

Internal Audit or Internal Audit Unit (SPI) is a corporate body that provides assurance and consultation independently and objectively, with the aim of increasing value and improving company operations. Internal Audit assessments are conducted through a systematic approach in the implementation of audits, evaluations, and reviews to assess the effectiveness of risk management, internal controls, and governance processes.

PROFIL KEPALA SPI
SPI HEAD PROFILE

JULI SUMARTANA	
KEPALA SATUAN PENGAWAS INTERNAL HEAD OF INTERNAL UNIT	
Periode Jabatan Term of Office	2019 - Sekarang
Data Pribadi Personal Data	Warganegara : Indonesia Usia : 49 Tahun Kelahiran : Klaten/5Juli 1972 Domisili : DKI Jakarta
Riwayat Penunjukan Appointment History	Kep-Dir Nomor 028 tanggal 16 September 2020
Pendidikan Education	Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Diponegoro pada tahun 2001
Riwayat Jabatan Employment History	Saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala SPI Jamsyar.Sebelumnya beliau pernah menempati sejumlah posisi, antara lain sebagai Staf Tetap Kanca Semarang PT Jamkrindo Syariah tahun 1998, Kabag. Operasional Kanca Samarinda PT Jamkrindo Syariah tahun 2009, Kabag. Adm & Keuangan Kanca Samarinda tahun 2010, Kabag. Penjaminan Syariah PT Jamkrindo Syariah tahun 2012, Kepala Cabang Jambi PT Jamkrindo Syariah tahun 2014, Kepala Cabang Medan PT Jamkrindo Syariah tahun 2015, Kepala Cabang Surabaya PT Jamkrindo Syariah tahun 2017 , Kepala Divisi Klaim & Hukum PT Jamkrindo Syariah tahun 2018, dan Kepala Divisi SDM dan Umum Jamsyar tahun 2020. / He currently serves as Head of SPI Jamsyar. Previously, he held a number of positions, including Permanent Staff at the Semarang Branch of PT Jamkrindo Syariah in 1998, Head of Operations at the Samarinda Branch of PT Jamkrindo Syariah in 2009, Head of Administration & Finance at the Samarinda Branch in 2010, Head of Sharia Guarantee at PT Jamkrindo Syariah in 2012, Head of the Jambi Branch of PT Jamkrindo Syariah in 2014, Head of the Medan Branch of PT Jamkrindo Syariah in 2015, Head of the Surabaya Branch of PT Jamkrindo Syariah in 2017, Head of the Claims & Legal Division at PT Jamkrindo Syariah in 2018, and Head of the Human Resources and General Affairs Division at Jamsyar in 2020.

KOMPOSISI SPI
SPI COMPOSITION

Nama / Name	**Jabatan** / Position	**Jumlah** / Total
Juli Sumartana	Kepala Divisi Satuan Pengawasan Internal	1
Ibrahin Nur Setiawan	Kepala Bagian Satuan Pengawasan Internal	1
Raddy raditya djatnika	Kepala Bagian Hukum dan Kepatuhan	1
Adhytia Ramadhan, Aziz Noordiono, Yosi Dwi A	Staf Satuan Pengawasan Internal	3
Adi Pranawira	Staf Hukum dan kepatuhan	1

SERTIFIKASI PROSESI AUDIT
AUDIT PROCESS CERTIFICATION

Kepala Satuan Pengawas Internal Jamsyar telah memiliki sertifikasi profesi audit intern (PIA) Auditor pada Satuan Pengawasan Intern telah mengikuti pelatihan-pelatihan audit sebagai berikut.

The Head of Jamsyar's Internal Supervisory Unit has obtained professional certification as an internal auditor (PIA). Auditors in the Internal Supervisory Unit have participated in the following audit training courses.

No	Nama Personil / Staff Name	Jabatan / Position	Sertifikasi / Certification
1	Juli Sumartana	Kepala Divisi Satuan Pengawasan Internal	Program Sertifikasi QIA Tingkat Dasar
2	Aziz Noordiono	Staf Satuan Pengawasan Internal	Audit Investigasi
3	Adhtya Ramadhan	Staf Satuan Pengawasan Internal	Perangkat & Teknik Audit Internal

KEDUDUKAN SPI
POSITION OF SPI

Struktur Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagaimana dalam Peraturan Direksi Peraturan Direksi Nomor 013/Per-Dir/IX/2021 tanggal 17 September 2021 tentang Struktur Organisasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, Satuan Pengawasan Internal membawahi:
1. Bagian Audit Internal, yang membawahi staf dibawahnya.
2. Bagian Hukum dan Kepatuhan, yang membawahi staf dibawahnya.

Kedudukan Satuan Pengawasan Internal PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dijelaskan pada Piagam Satuan Pengawasan Internal Butir 3 tentang Kedudukan Satuan Pengawasan Internal:
1. Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
2. Satuan Pengawasan Internal bertanggung jawab secara struktural langsung kepada Direktur Utama.

Bagan Struktur Organisasi Direktorat Utama Perusahaan adalah sebagai berikut:

The structure of the Internal Audit Unit (SPI) as stipulated in Board of Directors Regulation Number 013/Per-Dir/IX/2021 dated September 17, 2021 concerning the Organizational Structure of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, the Internal Audit Unit oversees:
1. Internal Audit Division, which supervises its staff.
2. Legal and Compliance Division, which supervises its staff.

The position of the Internal Audit Unit of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah is explained in the Internal Audit Unit Charter, Point 3, regarding the Position of the Internal Audit Unit:
1. The Internal Audit Unit is led by a Head of Internal Audit who is appointed and dismissed by the President Director.
2. The Internal Audit Unit is structurally responsible directly to the President Director.

The organizational structure chart of the Company's Main Directorate is as follows:

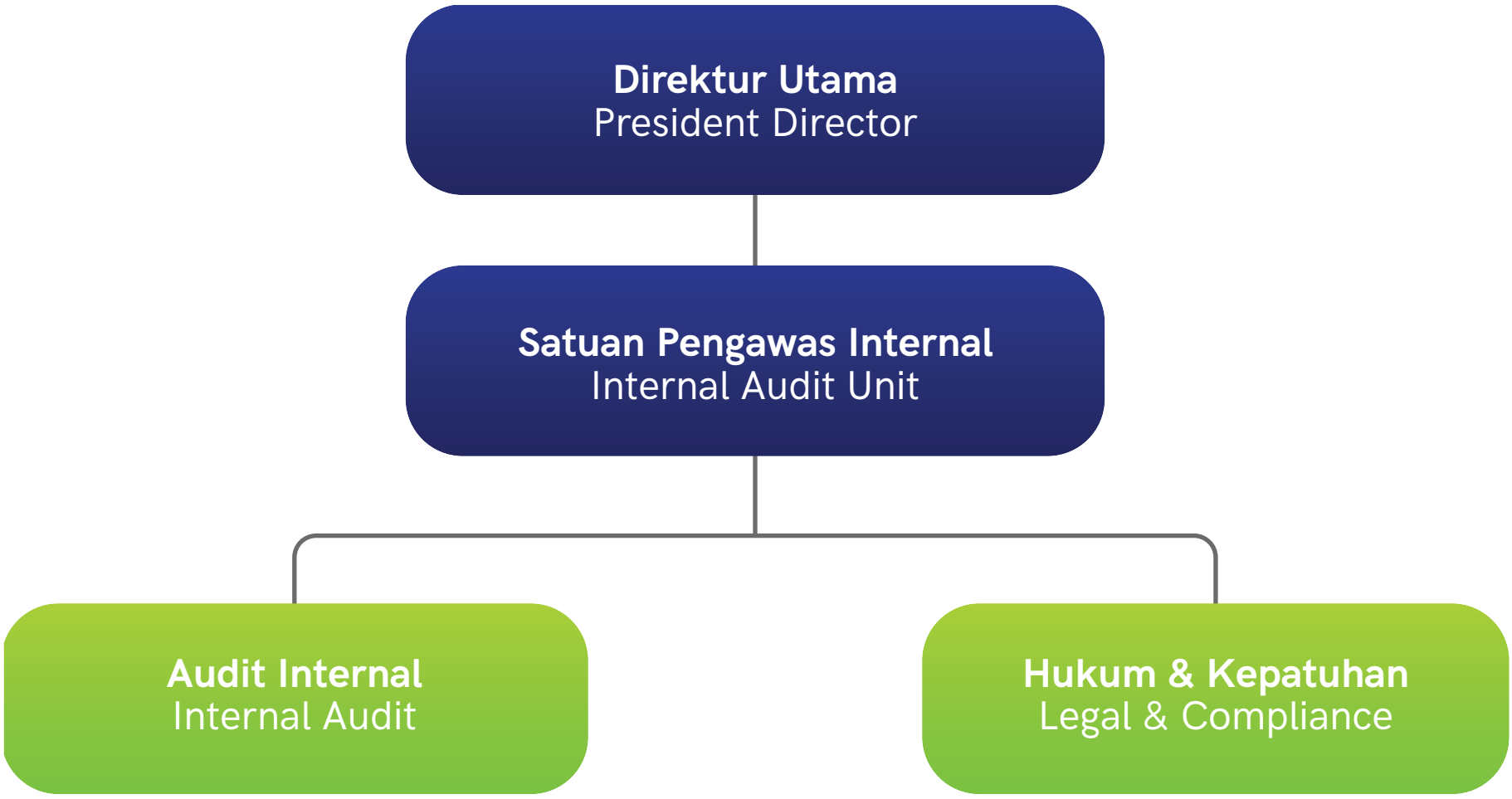

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SPI
DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF SPI

Satuan Pengawasan Intern dan Kepatuhan merupakan organ tata kelola perusahaan yang bertugas dan berwenang melakukan pengawasan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola Perusahaan sesuai perundang-undangan dan kebijakan perusahaan. SPI dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Uraian tugas Satuan Pengawasan Internal dijelaskan dalam Peraturan Direksi Nomor 007/Per-Dir/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Deskripsi Pekerjaan Jabatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)/Program Kerja Audit Tahunan (PKAT).
2. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada unit-unit kerja yang telah ditetapkan dalam PKPT/PKAT yang bersifat pemeriksaan umum maupun pemeriksaan khusus sesuai arahan dan penugasan Direktur Utama.
3. Mengkoordinasikan dengan unit kerja lainnya atas pelaksanaan dan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi /saran dari Auditor eksternal.
4. Melakukan evaluasi efektifitas sistem pengendalian internal (internal control).
5. Melaksanakan koordinasi dengan Dewan Komisaris terkait kegiatan SPI.
6. Memberikan jasa konsultasi yang obyektif kepada manajemen dan unit kerja lainnya sesuai dengan fungsi pengawasan.
7. Membuat Laporan Assessment *Good Corporate Governance* bersama dengan Kepala Bagian Hukum dan Kepatuhan.

The Internal Audit and Compliance Unit is a corporate governance body tasked with and authorized to oversee the effectiveness of internal controls, risk management, and corporate governance processes in accordance with laws and regulations and company policies. The Internal Audit and Compliance Unit is led by a head who is appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanisms with the approval of the Board of Commissioners.

The duties of the Internal Audit Unit are described in Board of Directors Regulation No. 007/Per-Dir/XII/2019 dated December 31, 2019, concerning the Job Description of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah as follows:

1. Developing the Annual Supervision Work Program (PKPT)/Annual Audit Work Program (PKAT).
2. Conducting audits on work units specified in the PKPT/PKAT, both general and special audits, in accordance with the instructions and assignments of the President Director.
3. Coordinating with other work units on the implementation and fulfillment of recommendations/suggestions from external auditors.
4. Evaluating the effectiveness of the internal control system.
5. Coordinating with the Board of Commissioners regarding SPI activities.
6. Providing objective consulting services to management and other work units in accordance with the supervisory function.
7. Preparing a Good Corporate Governance Assessment Report together with the Head of the Legal and Compliance Division.

PIAGAM SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
CHARTER OF INTERNAL AUDIT UNIT

Dalam melaksanakan tugasnya SPI berpedoman pada Piagam Satuan Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) yang telah disahkan pada oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. Piagam Satuan Pengawasan Internal merupakan pedoman kerja audit internal yang memuat maksud, visi, misi, struktur dan hubungan kerja, fungsi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kualifikasi auditor internal, ruang lingkup, kebijakan, standar kode etik kerahasiaan, evaluasi dan penyempurnaan.

Adapun ruang lingkup tugas SPI meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja audit internal dan rencana pengembangan kemampuan dan keterampilan auditor.
2. Menilai efisiensi dan efektivitas sistem pengendalian intern dan mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan.
3. Melaksanakan audit operasional untuk mengukur efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah di dalam mencapai visi, misi dan tujuannya.
4. Melaksanakan Audit Khusus atas indikasi penyimpangan yang terjadi.
5. Membuat dan menyampaikan laporan hasil audit dan rekomendasi kepada manajemen.
6. Memberikan bantuan dan dukungan bagi penyusunan atau penyempurnaan sistem, prosedur, rencana, anggaran dan kebijakan yang diperlukan bagi tercapainya efisiensi dan efektivitas kegiatan-kegiatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
7. Mendampingi auditor eksternal dan komite audit dalam pelaksanaan tugasnya.
8. Melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit Satuan Pengawasan Internal maupun eksternal auditor.

In carrying out its duties, SPI is guided by the Internal Audit Charter, which has been approved by the President Director and President Commissioner. The Internal Audit Charter is a guideline for internal audit work that contains the purpose, vision, mission, structure and working relationships, functions, duties and responsibilities, authority, qualifications of internal auditors, scope, policies, code of ethics and confidentiality, evaluation and improvement.

The scope of the SPI's duties includes the following:

1. Developing internal audit work plans and plans for developing auditor capabilities and skills.
2. Assessing the efficiency and effectiveness of internal control systems and encouraging continuous improvement of internal controls.
3. Conducting operational audits to measure the efficiency and effectiveness of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah's activities in achieving its vision, mission, and objectives.
4. Conducting special audits on indications of irregularities.
5. Prepare and submit audit reports and recommendations to management.
6. Provide assistance and support for the preparation or refinement of systems, procedures, plans, budgets, and policies necessary for achieving the efficiency and effectiveness of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah's activities.
7. Assist external auditors and the audit committee in carrying out their duties.
8. Monitoring the implementation of follow-up actions on the results of audits by the Internal Audit Unit and external auditors.

PELAKSANA KEGIATAN SPI
SPI ACTIVITY IMPLEMENTER

Selama 2021, SPI telah melakukan pengawasan intern terhadap kegiatan operasional dan menindaklanjuti hasil temuan.

A. Pelaksanaan Audit Internal

Dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2021, terdapat 6 (enam) Surat Perintah Tugas (SPT) sebagai berikut:

1. Surat Perintah Tugas Nomor: 046/SPT/1/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Pengawasan di Divisi Penunjang Bisnis.
2. Surat Perintah Tugas Nomor: 056/SPT/1/IX/2021 tanggal 17 September 2021 tentang Pengawasan di Kantor Cabang Makassar.
3. Surat Perintah Tugas Nomor: 064/SPT/1/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Pengawasan di Kantor Cabang Medan.
4. Surat Perintah Tugas Nomor: 070/SPT/1/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pengawasan di Kantor Cabang Surabaya.
5. Surat Perintah Tugas Nomor: 076/SPT/1/XI/2021 tanggal 25 November 2021 tentang Pengawasan di Kantor Cabang Utama.
6. Surat Perintah Tugas Nomor: 077/SPT/I/XI/2021 tanggal 25 November 2021 tentang Pengawasan di Divisi SDM dan Umum.

Atas kegiatan audit sebagaimana tersebut diatas, telah disusun Laporan Hasil Pengawasan yang disampaikan ke Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. LHP Divisi Penunjang Bisnis No. 01/LHP-JAMSYAR/IX/2021, tanggal 1 September 2021.
2. LHP Kantor Cabang Makassar No. 02/LHP-JAMSYAR/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021.
3. LHP Kantor Cabang Medan No. 03/LHP-JAMSYAR/XI/2021, tanggal 1 November 2021.
4. LHP Kantor Cabang Surabaya No. 04/LHP-JAMSYAR/XI/2021, tanggal 25 November 2021.
5. LHP Kantor Cabang Utama No. 005/LHP-JAMSYAR/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021.
6. LHP Divisi SDM dan Umum No. 006/LHP-JAMSYAR/XII/2021, tanggal 24 Desember 2020.

B. Kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Temuan

Throughout 2021, SPI has conducted internal oversight of operational activities and followed up on findings.

A. Implementation of Internal Audit

In the context of implementing the 2021 Annual Supervision Work Program (PKPT), there are 6 (six) Task Orders (SPT) as follows:

1. Assignment Letter Number: 046/SPT/1/VIII/2021 dated August 13, 2021 regarding Supervision in the Business Support Division.
2. Assignment Letter Number: 056/SPT/1/IX/2021 dated September 17, 2021 regarding Supervision at the Makassar Branch Office.
3. Assignment Letter Number: 064/SPT/1/X/2021 dated October 4, 2021 regarding Supervision at the Medan Branch Office.
4. Assignment Letter Number: 070/SPT/1/X/2021 dated October 26, 2021 regarding Supervision at the Surabaya Branch Office.
5. Assignment Letter Number: 076/SPT/1/XI/2021 dated November 25, 2021 regarding Supervision at the Main Branch Office.
6. Assignment Letter Number: 077/SPT/I/XI/2021 dated November 25, 2021 regarding Supervision at the Human Resources and General Affairs Division.

Based on the audit activities mentioned above, a Supervision Report has been prepared and submitted to the Board of Directors and Board of Commissioners as follows:

1. Business Support Division Audit Report No. 01/LHP-JAMSYAR/IX/2021, dated September 1, 2021.
2. Makassar Branch Office Audit Report No. 02/LHP-JAMSYAR/X/2021, dated October 29, 2021.
3. Medan Branch Office LHP No. 03/LHP-JAMSYAR/XI/2021, dated November 1, 2021.
4. Surabaya Branch Office LHP No. 04/LHP-JAMSYAR/XI/2021, dated November 25, 2021.
5. LHP Main Branch Office No. 005/LHP-JAMSYAR/XII/2021, dated December 10, 2021.
6. LHP Human Resources and General Affairs Division No. 006/LHP-JAMSYAR/XII/2021, dated December 24, 2020.

B. Follow-up Monitoring Activities

No	**Kegiatan Pemeriksaan** / Inspection Activities	**Penyelesaian Tindak Lanjut** / Follow-up Resolution
1	Kegiatan pemeriksaan internal:	
	Pemeriksaan tahun 2020	100%
	Pemeriksaan tahun 2021	100%
2	Kegiatan pemeriksaan eksternal:	
	KAP HGK tahun buku 2020	100%

C. Rekapitulasi Monitoring Tindak Lanjut Audit Eksternal – KAP

C. Recapitulation of External Audit Follow-up Monitoring – KAP

No	Auditor / Auditor	Jumlah Temuan Total Findings	Tindak Lanjut / Follow Up			Penyelesaian Tindak Lanjut / Follow-up Resolution
			Sudah selesai Completed	Belum selesai Not Completed	Belum Ditindaklanjuti Not Yet Followed Up	
1	Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) /	2	2	0	0	100%

AKUNTAN PUBLIK
PUBLIC ACCOUNTANT

Berdasarkan Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, romawi I Umum dinyatakan bahwa "Dalam rangka peningkatan kualitas informasi keuangan tersebut, Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan menggunakan jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

- Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan sesuai perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan.
- Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.

Dengan demikian, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik memiliki peran yang penting sebagai penunjang kegiatan sektor jasa keuangan dalam penegakan disiplin pasar". Fungsi pengawasan independen sebenarnya sudah dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang memiliki fungsi sebagai berikut:

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah diperkuat oleh Auditor Eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP). Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan pihak yang bertanggung jawab melaksanakan audit terhadap laporan keuangan tahunan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Direksi dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan (stakeholders). Untuk menunjang fungsi auditor eksternal, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah telah membantu menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan-asasan, dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Sejak awal berdiri hingga saat ini, Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut:

Based on the Explanation of Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services in Financial Services Activities, Roman I General states that "In order to improve the quality of financial information, Parties Conducting Financial Services Activities shall use the services provided by Public Accountants and Public Accounting Firms.

- Evaluation of the effectiveness of internal control, risk management, and corporate governance processes in accordance with laws and regulations and Company policies.
- Examination and assessment of efficiency and effectiveness in finance, operations, human resources, information technology, and other activities.

Thus, Public Accountants and Public Accounting Firms play an important role in supporting the financial services sector in enforcing market discipline. The independent supervisory function is actually carried out by the Internal Supervisory Unit (SPI), which has the following functions:

The independent supervisory function over the financial aspects of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah is reinforced by an External Auditor, namely a Public Accounting Firm (KAP). The Public Accounting Firm (KAP) is responsible for auditing the annual financial statements of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. The External Auditor must be free from the influence of the Board of Directors and stakeholders in the Company. To support the function of the external auditor, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah has helped provide all accounting records and supporting data required by the external auditor so that the external auditor can provide an opinion on the fairness, compliance, and conformity of the Company's financial statements with Financial Accounting Standards.

Since its inception to date, the Public Accounting Firm that has audited the financial statements of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah is as follows:

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan dan Nomor Pendaftaran di OJK Accountant Name and Registration Number at OJK	Biaya Auditor Eksternal External Auditor Fees
2016	KAP Hertanto, Grace & Karunawan	Nama Akuntan • Drs. Hertanto, MS.,Ak.,CPA., CPMA.,CA (AP. 0136) • Grace Octavia, SE.,CPA.,CA (AP. 0151) • Bambang Karunawan, SE.,Ak, CPA (AP. 0912) Nomor Pendaftaran di OJK adalah 308	Biaya Jasa Audit adalah sebesar Rp67.000.000,- belum termasuk PPN 10%.
2017	KAP Hertanto, Grace & Karunawan	Nama Akuntan • Drs. Hertanto, MS.,Ak.,CPA., CPMA.,CA (AP. 0136) • Grace Octavia, SE.,CPA.,CA (AP. 0151) • Bambang Karunawan, SE.,Ak, CPA (AP. 0912) Nomor Pendaftaran di OJK adalah 308	Biaya Jasa Audit adalah sebesar Rp67.000.000,- belum termasuk PPN 10%.
2018	KAP Hertanto, Grace & Karunawan	Nama Akuntan • Drs. Hertanto, MS.,Ak.,CPA., CPMA.,CA (AP. 0136) • Grace Octavia, SE.,CPA.,CA (AP. 0151) • Bambang Karunawan, SE.,Ak, CPA (AP. 0912) Nomor Pendaftaran di OJK adalah 308	Biaya Jasa Audit adalah sebesar Rp74.000.000,- belum termasuk PPN 10%.
2019	KAP Hertanto, Grace & Karunawan	Nama Akuntan • Drs.Hertanto, MS.,Ak.,CPA., CPMA.,CA (AP. 0136) • Grace Octavia, SE.,CPA.,CA (AP. 0151) • Bambang Karunawan, SE.,Ak, CPA (AP. 0912) Nomor Pendaftaran di OJK adalah 308	Biaya Jasa Audit adalah sebesar Rp74.000.000,- belum termasuk PPN 10%.
2016	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Nama Akuntan: • M. Jusuf Wibisana (AP.0222), • Eddy Rintis, S.E., CPA (AP. 0230), • Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA (AP. 0226) Nomor Pendaftaran di OJK adalah STTD.KAP-04PM.222018	Biaya Jasa Audit adalah Rp1.825.000.000 sudah termasuk PPN 10 % namun belum termasuk biaya OPE 3%
2017	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Nama Akuntan • M. Jusuf Wibisana (AP.0222), • Eddy Rintis, S.E., CPA (AP. 0230), • Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA (AP. 0226) Nomor Pendaftaran di OJK adalah 308	Biaya Jasa Audit adala Rp1.189.650.000 sudah termasuk PPN 10 %, namun belum termasuk biaya OPE 3%.

Pada 2021, Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tidak memberikan jasa lain selain Jasa Audit Laporan Keuangan Tahunan pada Tahun Buku 2021.

In 2021, Public Accounting Firms and Public Accountants did not provide any services other than Annual Financial Statement Audit Services for the 2021 Fiscal Year.

MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN
CORPORATE RISK MANAGEMENT

Sistem manajemen risiko yang telah dilakukan dapat membantu Perusahaan untuk memitigasi risiko yang dihadapi Perusahaan. Risiko Perusahaan dapat menghambat tercapainya tujuan dari aktivitas atau proses yang dilakukan Perusahaan. Sistem Manajemen Risiko menciptakan secara jelas faktor-faktor deteren (penghambat) yang bisa mencegah kemungkinan terjadinya suatu kejadian risiko yang bisa merugikan perusahaan, dan sebagai sarana pengambilan keputusan strategis maupun operasional perusahaan. Proses Manajemen Risiko pada Perusahaan meliputi :

- Identifikasi Risiko, Penilaian Risiko, Penanganan Risiko, dan Monitoring Risiko,
- Pemberian pendapat/opini manajemen risiko atas aktivitas perusahaan yang bersifat strategik
- Pelaporan Pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan setiap semester.
- Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen risiko setiap semester.

The risk management system that has been implemented can help the Company mitigate the risks it faces. Company risks can hinder the achievement of the objectives of the Company's activities or processes. The Risk Management System clearly identifies deterrent factors that can prevent the possibility of a risk event that could harm the company, and serves as a means of strategic and operational decision-making for the company. The Risk Management Process at the Company includes:

- Risk Identification, Risk Assessment, Risk Treatment, and Risk Monitoring,
- Providing risk management opinions on the Company's strategic activities.
- Risk Management Implementation Reports are submitted every semester.
- Monitoring and evaluation of risk management implementation is conducted every semester.

PROSEDUR DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT PROCEDURES AND POLICIES

Prosedur dan Kebijakan manajemen Risiko di Jamsyar meliputi:

- Peraturan Direksi No. 11/Per-Dir/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- Peraturan Direksi No. 12/Per-Dir/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang Panduan Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- Peraturan Direksi No. 13/Per-Dir/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang Komite Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- Peraturan Direksi No. 14/Per-Dir/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- Peraturan Direksi No. 08/Per-Dir/XII/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pendapat (Opini) Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- Peraturan Direksi No. 09/Per-Dir/XII/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- Peraturan Direksi No. 15/Per-Dir/XI/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor 08/Per-Dir/IV/2016 tentang Pendapat (Opini) Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Pelaksanaan manajemen risiko di Jamsyar meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, penanganan risiko, dan evaluasi. Pengidentifikasian risiko dilakukan oleh unit kerja pada level Divisi, Kantor Cabang, Kantor Unit Pelayanan, dan Bagian. Risiko yang teridentifikasi dikelompokkan dalam 7 kelompok risiko, yaitu :

- Risiko Kepengurusan
- Risiko Tata Kelola
- Risiko Strategi
- Risiko Operasional
- Risiko Aset dan Liabilitas
- Risiko Penjaminan
- Risiko Dukungan Dana

Penilai risiko dilakukan berdasarkan probabilitas atau kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan. Sesuai Peraturan Direksi Jamsyar, probabilitas dan dampak terjadinya risiko dikelompokkan menjadi lima skala. Probabilitas terjadinya risiko diukur dengan skala 0 (tidak mungkin terjadi) sampai dengan 1 (pasti terjadi) dan dikelompokkan dalam lima skala: Bagian

Risk management procedures and policies at Jamsyar include:

- Board of Directors Regulation No. 11/Per-Dir/XII/2015 dated December 1, 2015 concerning the Implementation of Risk Management at PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- Board of Directors Regulation No. 12/Per-Dir/XII/2015 dated December 1, 2015 concerning Risk Management Guidelines at PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- Board of Directors Regulation No. 13/Per-Dir/XII/2015 dated December 1, 2015 concerning the Risk Management Committee of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- Board of Directors Regulation No. 14/Per-Dir/XII/2015 dated December 1, 2015 concerning the Standard Operating Procedure (SOP) for Risk Management at PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- Board of Directors Regulation No. 08/Per-Dir/XII/2016 dated April 1, 2016 concerning the Risk Management Opinion of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- Board of Directors Regulation No. 09/Per-Dir/XII/2016 dated April 1, 2016 concerning Guidelines for Reporting on the Implementation of Risk Management at PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- Board of Directors Regulation No. 15/Per-Dir/XI/2020 dated November 30, 2020 concerning Amendments to Board of Directors Regulation No. 08/Per-Dir/IV/2016 concerning Risk Management Opinions of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
-

Risk management at Jamsyar includes risk identification, risk assessment, risk management, and evaluation. Risk identification is carried out by work units at the Division, Branch Office, Service Unit Office, and Department levels. Identified risks are grouped into 7 risk categories, namely:

- Management Risk
- Governance Risk
- Strategic Risk
- Operational Risk
- Asset and Liability Risk
- Guarantee Risk
- Funding Risk

Risk assessment is conducted based on the probability or likelihood of a risk occurring and the impact it would have. In accordance with Jamsyar Board of Directors Regulations, the probability and impact of a risk occurring are grouped into five scales. The probability of a risk occurring is measured on a scale of 0 (impossible) to 1 (certain) and grouped into five scales: Section

Nilai Risiko Risk Value	Tingkat Risiko Risk Level	Keterangan Description
0<NR1	Rendah Low	Probabilitas kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada relatif rendah. Perusahaan diindikasikan sangat sehat dan penerima jaminan. / The probability of the company failing to meet its obligations is relatively low. The company is indicated to be very healthy and a good recipient of guarantees.
1<NR1,5	Sedang Rendah Currently Low	Probabilitas kegagalan memenuhi perusahaan dalam kewajibannya berada di tingkat sedang ke arah rendah. Secara umum perusahaan sehat, tetapi terdapat potensi kegagalan untuk memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan. The probability of the company failing to meet its obligations is moderate to low. In general, the company is healthy, but there is a potential for failure to meet its obligations to guarantee recipients.
1,5<NR2	Sedang Tinggi Currently High	Probabilitas kegagalan memenuhi perusahaan dalam kewajibannya berada di tingkat sedang ke arah tinggi. Secara umum perusahaan kurang sehat dan terdapat potensi kegagalan yang cukup kecil untuk memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan. / The probability of the company failing to meet its obligations is moderate to high. In general, the company is not in good financial health and there is a slight possibility that it will fail to meet its obligations to the guarantor.
2<NR3	Tinggi High	Probabilitas kegagalan memenuhi perusahaan dalam kewajibannya berada di tingkat tinggi. Secara umum Perusahaan tidak sehat dan memiliki potensi kegagalan yang cukup besar dalam memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan. The probability of the company failing to meet its obligations is high. In general, the company is not healthy and has a significant potential for failure in meeting its obligations to the guarantee recipients.
3<NR4	Sangat Tinggi Very High	Probabilitas kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya berada di tingkat sangat tinggi. Secara umum perusahaan tidak sehat dan memiliki potensi kegagalan yang sangat besar dalam memenuhi kewajiban kepada penerima jaminan. The probability of companies failing to meet their obligations is very high. In general, companies are unhealthy and have a very high potential of failing to meet their obligations to guarantee recipients.

PROBABILITAS TERJADINYA RISIKO
PROBABILITY OF RISK OCCURRENCE

0,1 Rare	0,2 Unlikely	0,4 Moderate	0,6 Likely	0,8 Almost Certain

DAMPAK YANG DITIMBULKAN DIUKUR DENGAN SKALA
IMPACT MEASURED ON A SCALE

1 INSIGNIFICANT	2 MINOR	3 MODERATE	4 MAJOR	5 CATASTROPIC

NILAI RISIKO ADALAH PERKALIAN ANTARA PROBABILITAS DENGAN DAMPAK. NILAI RISIKO DIKELOMPOKKAN SEBAGAI BERIKUT:
RISK VALUE IS THE PRODUCT OF PROBABILITY AND IMPACT. RISK VALUE IS CATEGORIZED AS FOLLOWS:

Ringan Light	0 < Nilai Risiko ≤ 1 0 < Risk Value ≤ 1	
Sedang Ringan Moderate Light	1 < Nilai Risiko ≤ 1,5 1 < Risk Value ≤ 1,5	
Sedang Tinggi Medium High	1,5 < Nilai Risiko ≤ 2 1,5 < Risk Value ≤ 2	
Tinggi High	2 < Nilai Risiko ≤ 3 3 < Risk Value ≤ 3	
Sangat Tinggi Very High	3 < Nilai Risiko ≤ 4 3 < Risk Value ≤ 4	

PETA RISIKO
RISK MAP

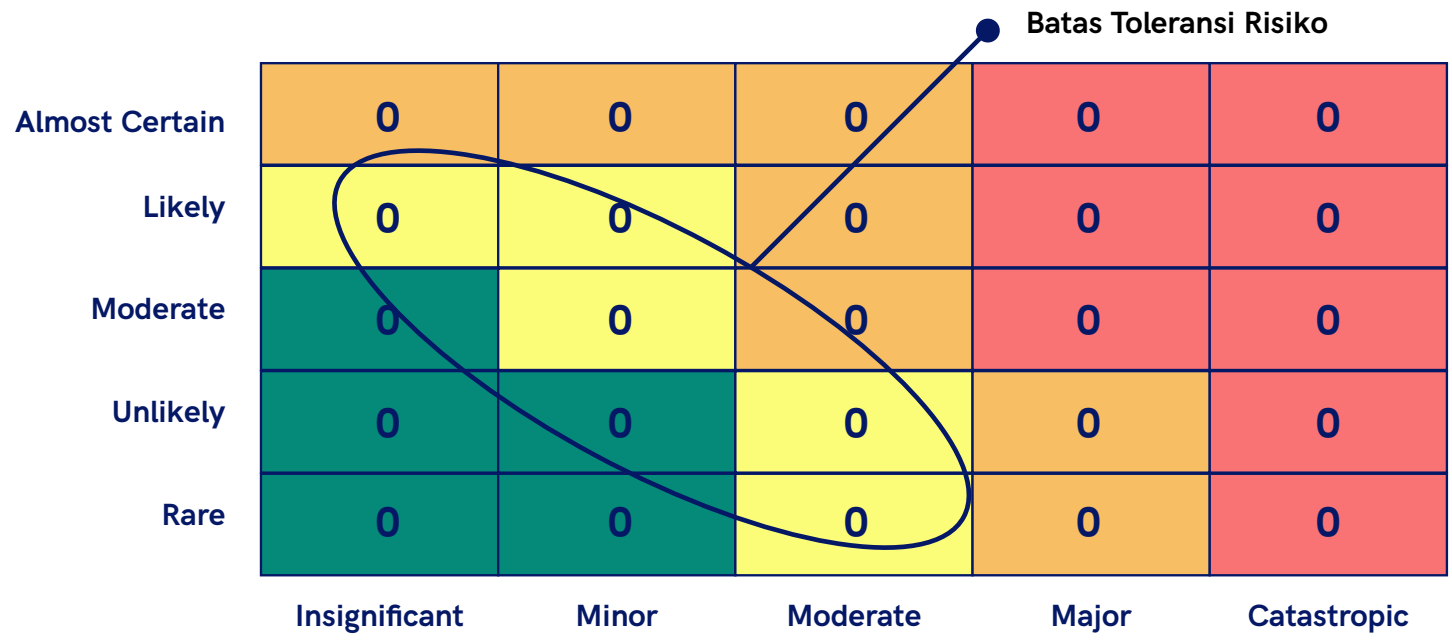

KETERANGAN TINGKAT RISIKO
RISK LEVEL STATEMENT

	Ekstrim
	Tinggi
	Menengah
	Rendah

RISIKO-RISIKO PERUSAHAAN
LEVEL OF RISK DESCRIPTION

- Risiko Aset dan Liabilitas adalah risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan kepada penerima jaminan. Fokus utama dalam mengelola risiko Aset dan Liabilitas adalah Risiko Likuiditas, yaitu risiko yang terjadi karena ketidakmampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Risiko likuiditas timbul jika terjadi ketidaksesuaian antara jumlah kewajiban yang tempo dengan ketersediaan aset lancar untuk memenuhinya.
- Risiko Penjaminan adalah potensi kegagalan Perusahaan Penjaminan untuk memenuhi kewajiban kepada penerima jaminan sebagai akibat dari ketidakcukupan proses analisa risiko, penetapan Imbal Jasa Kafalah (IJK) penggunaan reasuransi/reguarantee dan/atau penanganan klaim. Pengelolaan risiko penjaminan dilakukan sejak awal proses penjaminan, yaitu dalam proses Analisa, melakukan diversifikasi penjaminan, dan melakukan re-asuransi.
- Risiko Strategi yaitu risiko yang timbul dari ketidakmampuan institusi atau organisasi untuk mengimplementasikan dengan tepat strategi, rencana bisnis, pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, serta ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis.

- Asset and Liability Risk is the risk that arises due to the potential failure in the management of the Company's assets and liabilities, resulting in a shortage of funds to fulfill the Company's obligations to the collateral recipients. The main focus in managing Asset and Liability Risk is Liquidity Risk, which is the risk that arises due to the Company's inability to meet its maturing obligations. Liquidity risk arises when there is a mismatch between the amount of maturing obligations and the availability of current assets to meet them.
- Guarantee Risk is the potential failure of the Guarantee Company to fulfill its obligations to the guarantee recipient as a result of inadequate risk analysis processes, determination of Guarantee Fees (IJK), use of reinsurance/reguarantee and/or claim handling. Guarantee risk management is carried out from the beginning of the guarantee process, namely in the analysis process, by diversifying guarantees, and by conducting reinsurance.
- Strategy risk is the risk that arises from the inability of an institution or organization to properly implement strategies, business plans, decision making, resource allocation, and the inability to adapt to changes in the business environment.

MITIGASI RISIKO
RISK MITIGATION

Pengelolaan Risiko Aset dan Liabilitas Sebagai mitigasi terhadap risiko likuiditas, Perusahaan mengatur ketersediaan aset lancar dengan mengatur komposisi jenis investasinya, melalui Peraturan Direksi Nomor 02/Per-Dir/IX/2014 tentang 02/Per-Dir/IX/2014. Peraturan Direksi tersebut antara lain mengatur batas maksimal investasi perusahaan sebagai berikut:

Asset and Liability Risk Management As a mitigation measure against liquidity risk, the Company manages the availability of current assets by regulating the composition of its investments through Board of Directors Regulation No. 02/Per-Dir/IX/2014 concerning 02/Per-Dir/IX/2014. Among other things, this Board of Directors Regulation stipulates the following maximum investment limits for the Company:

Jenis /Type	Investasi Batas Maksimal Maximum Investment Limit
Deposito Berjangka dan Deposit On Call (DOC) pada Bank Umum Syariah dan pembiayaan rakyat syariah Time Deposits and On Call Deposits (DOC) at Sharia Commercial Banks and Sharia People's Financing	100%
Surat Berharga Syariah Negara State Sharia Securities	50%
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia Sharia Securities Issued by Bank Indonesia	50%
Sukuk Korporasi yang masuk peringkat investasi (Investment Grade) Corporate Sukuk with Investment Grade ratings	20%
Saham yang tercatat di bursa efek Indonesia dan masuk dalam daftar Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) Shares listed on the Indonesia Stock Exchange and included in the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI)	20%
Reksadana Syariah Sharia Mutual Funds	20%
Efek beragun aset syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Sharia asset-backed securities listed on the Indonesia Stock Exchange	20%
Investasi Dalam Bentuk Penyertaan Langsung Pada Perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia Investments in the Form of Direct Participation in Companies in the financial services sector in Indonesia	10%

Investasi dalam bentuk Deposito adalah investasi yang sangat likuid sehingga bisa dicairkan kapan saja saat dibutuhkan, termasuk jika dibutuhkan untuk membayar kewajiban Perusahaan kepada Penerima Jaminan. Pengelolaan likuiditas yang sehat dapat mengurangi kemungkinan Perusahaan menghadapi masalah likuiditas serius yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perusahaan. Di Perusahaan, unit kerja yang bertangung jawab dalam memonitor risiko likuiditas adalah Divisi Keuangan dan Akuntansi. Kondisi likuiditas Perusahaan terlihat pada rasio keuangan, khususnya Rasio Likuiditas, yang bersumber dari Laporan Keuangan bulanan.

Investments in the form of time deposits represent highly liquid instruments, as they can be withdrawn at any time when required, including to fulfill the Company's obligations to the Guarantee Beneficiaries. Sound liquidity management plays a crucial role in reducing the risk of liquidity constraints that may affect the Company's business continuity. Within the Company, the monitoring of liquidity risk is carried out by the Finance and Accounting Division. The Company's liquidity condition is reflected in its financial ratios, particularly the Liquidity Ratio, as presented in the monthly Financial Statements.

Langkah lain yang dilakukan oleh Perusahaan dalam upaya mengelola risiko likuiditas adalah pembentukan cadangan klaim. Cadangan klaim merupakan pembentukan cadangan atas klaim yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun mendatang atas penjaminan yang belum jatuh tempo.

In addition, the Company manages liquidity risk through the establishment of claim reserves. Claim reserves represent provisions for potential claims that may arise in future periods related to outstanding guarantees.

Cadangan klaim pada tahun 2021 dibentuk ditetapkan berdasarkan dengan Peraturannya Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, yaitu penjumlahan dari 100% dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat Klaim dilaporkan, dengan Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (incurred but not reported).

In 2021, claim reserves were established in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 2/POJK.05/2017 concerning the Implementation of Guarantee Institution Business Activities, calculated as the total of 100% of the self-retained guarantee value at the time the claim is reported, plus claims that have been incurred but not yet reported (incurred but not reported).

Klaim yang sudah terjadi (incurred but not reported) sebagaimana dimaksud diatas, dihitung berdasarkan rata-rata Klaim ditanggung sendiri yang telah dibayarkan pada 3 (tiga) bulan terakhir. Cadangan klaim pada Desember 2021 adalah sebesar Rp 151,96 Miliar.

Claims that have been incurred but not reported are calculated based on the average claims borne by the Company and paid over the last three (3) months. As of December 2021, the claim reserve amounted to IDR 151.96 billion.

PENGELOLAAN RISIKO PENJAMINAN
GUARANTEE RISK MANAGEMENT

Proses penjaminan diawali dari analisa kelayakan. Hasil dari analisa kelayakan tersebut menjadi dasar dalam memberikan keputusan untuk menerima penjaminan atau menolak. Jamsyar melaksanakan pengelolaan risiko penjaminan sejak awal, yaitu dalam memberikan keputusan menjamin, melalui penetapan batas kewenangan dalam keputusan melakukan penjaminan. Batas kewenangan memutus diberikan secara berjenjang mulai dari kewenangan pada Kepala Cabang, Kepala Divisi, Direktur Bisnis, sampai kewenangan pada Dewan Direksi, dengan mempertimbangkan besarnya nilai yang akan dijamin. Pengaturan terkait batas kewenangan memberikan keputusan penjaminan pada Jamsyar adalah:

The guarantee process begins with a feasibility analysis. The results of this feasibility analysis form the basis for the decision to accept or reject the guarantee. Jamsyar manages guarantee risks from the outset, namely in making guarantee decisions, by setting limits on the authority to make guarantee decisions. The authority to make decisions is granted in stages, starting from the authority of the Branch Head, Division Head, Business Director, up to the authority of the Board of Directors, taking into account the amount to be guaranteed. The regulations related to the authority to make guarantee decisions at Jamsyar are:

Jenis /Type	Pejabat Berwenang Memutus / Authorized Officials Decide			
	Kepala Cabang Branch Manager	Kepala Divisi Division Manager	Direktur Bisnis Business Director	Dewan Direksi Board of Directors
Umum / General	s.d. Rp10 M up to IDR 10 million	s.d. Rp12,5 M up to IDR 12,5 million	Rp12,5 M s.d. Rp25 M IDR 12,5 million up to IDR 25 million	> Rp25 M > IDR 25 million
Produktif / Productive	s.d. Rp10 M up to IDR 10 million	s.d. Rp12,5 M up to IDR 12,5 million	Rp12,5 M s.d. Rp25 M IDR 12,5 million up to IDR 25 million	> Rp25 M > IDR 25 million
Konstruksi / Construction	s.d. Rp10 M up to IDR 10 million	s.d. Rp12,5 M up to IDR 12,5 million	Rp12,5 M s.d. Rp25 M IDR 12,5 million up to IDR 25 million	> Rp25 M > IDR 25 million
Distribusi Barang / Goods Distribution	s.d. Rp10 M up to IDR 10 million	s.d. Rp12,5 M up to IDR 12,5 million	Rp12,5 M s.d. Rp25 M IDR 12,5 million up to IDR 25 million	> Rp25 M > IDR 25 million
Anjak Piutang / Factoring	s.d. Rp10 M up to IDR 10 million	s.d. Rp12,5 M up to IDR 12,5 million	Rp12,5 M s.d. Rp25 M IDR 12,5 million up to IDR 25 million	> Rp25 M > IDR 25 million
Bank Garansi / Bank Guarantee	s.d. Rp10 M up to IDR 10 million	s.d. Rp12,5 M up to IDR 12,5 million	Rp12,5 M s.d. Rp230M IDR 12,5 million up to IDR 25 million	> Rp25 M > IDR 25 million
Custom Bond / Custom Bond	s.d. Rp10 M up to IDR 10 million	s.d. Rp12,5 M up to IDR 12,5 million	Rp12,5 M s.d. Rp30 M IDR 12,5 million up to IDR 25 million	> Rp25 M > IDR 25 million

Dalam melaksanakan pengelolaan risiko Penjaminan, Jamsyar berkomitmen menjaga agar penjaminan tidak terkonsentrasi pada satu kelompok Top terjamin, baik individu maupun kelompok. Perusahaan mengelola risiko konsentrasi penjaminan dengan melakukan diversifikasi penjaminan berdasarkan sektor usaha yang dijamin dan berdasarkan produk penjaminan. Perusahaan mengelola risiko Penjaminan dengan cara membatasi total penjaminan yang dapat diberikan kepada sektor industri tertentu, sehingga eksposur yang berlebihan terhadap suatu sektor industri tertentu dapat dihindari. Volume penjaminan selama tahun 2021 berdasarkan sektor adalah sebagai berikut:

In managing guarantee risks, Jamsyar is committed to ensuring that guarantees are not concentrated on a single group of top guarantees, whether individuals or groups. The company manages guarantee concentration risk by diversifying guarantees based on the business sector being guaranteed and based on the guarantee product.
The company manages guarantee risks by limiting the total guarantees that can be provided to a particular industrial sector, thereby avoiding excessive exposure to a particular industrial sector. The volume of guarantees during 2021 based on sector is as follows:

No	Sektor Sector	Produk Product	Volume Penjamin guarantee volume
1	Agribisnis / Agribusiness	Pembiayaan Mikro /Micro Financing	475.815.000.000,00
2	Agribisnis / Agribusiness	Pembiayaan Umum /General Financing	2.422.500.000,00
3	Agribisnis / Agribusiness	Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB / eople's Business Credit (KUR) iB	68.296.830.000,00
4	Industri & Pertambangan / Industry & Mining	Pembiayaan Kontra Bank Garansi / Bank Guarantee Financing	42.992.491.373,00
5	Industri & Pertambangan / Industry & Mining	Pembiayaan Mikro / Micro Financing	23.928.600.000,00
6	Industri & Pertambangan / Industry & Mining	Pembiayaan Multiguna /Multipurpose Financing	1.688.000.000,00
7	Industri & Pertambangan / Industry & Mining	Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB /People's Business Credit (KUR) iB	56.365.750.000,00
8	Industri & Pertambangan / Industry & Mining	Pembiayaan Umum / General Financing	239.000.000,00
9	Jasa & Perdagangan / Services & Trade	*Custom Bond*	644.840.733.781,00
10	Jasa & Perdagangan / Services & Trade	Distribusi Barang /Goods Distribution	159.850.000.000,00
11	Jasa & Perdagangan / Services & Trade	*FLPP*	2.041.660.873.135,99
12	Jasa & Perdagangan / Services & Trade	Keagenan Cargo / Cargo Agency	600.000.000,00
13	Jasa & Perdagangan / Services & Trade	Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB / People's Business Credit (KUR) iB	259.248.161.200,00
14	Jasa & Perdagangan / Services & Trade	Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa / Construction and Goods/Services Procurement Financing	243.827.127.232,50
15	Jasa & Perdagangan / Services & Trade	Pembiayaan Kontra Bank Garansi / Bank Guarantee Financing	3.732.539.295.322,49
16	Jasa & Perdagangan / Services & Trade	Pembiayaan Mikro / Micro Financing	808.820.705.000,00
17	Jasa & Perdagangan / Services & Trade	Pembiayaan Multiguna /Multipurpose Financing	3.314.448.425.925,41
18	Jasa & Perdagangan / Services & Trade	Pembiayaan Umum / General Financing	2.729.232.624.024,44
19	Jasa & Perdagangan / Services & Trade	Supply Chain Financing / Supply Chain Financing	139.806.947.543,00

No	Sektor Sector	Produk Product	Volume Penjamin guarantee volume
20	Jasa & Perdagangan / Services & Trade	*Surety Bond*	3.788.110.723.818,53
21	Konstruksi / Construction	Pembiayaan Kontra Bank Garansi / Bank Guarantee Financing	200.000.000,00
22	Konstruksi / Construction	Pembiayaan Multiguna /Multipurpose Financing	605.000.000,00
23	Konstruksi / Construction	Supply Chain Financing / Supply Chain Financing	1.014.180.820.397,00
	Total / Total		**19.531.719.608.753,40**

Selain berdasarkan sektor penjaminan, Jamsyar juga menghindari konsentrasi penjaminan pada satu produk tertentu. Perusahaan melakukan pengelolaan risiko penjaminan dengan menyebar portofolio penjaminan pada banyak produk penjaminan dan bukan hanya pada satu produk penjaminan saja. Berikut ini adalah volume penjaminan berdasarkan produk selama tahun 2021:

In addition to being based on the guarantee sector, Jamsyar also avoids concentrating guarantees on a single product. The company manages guarantee risks by spreading its guarantee portfolio across many guarantee products rather than just one. The following is the guarantee volume by product for 2021:

No	Jenis Investasi / Type of Investment	Maksimal / Maximum
1	Keagenan Cargo / Cargo Agency	600.000.000,00
2	Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB / People's Business Credit (KUR) iB	383.910.741.200,00
3	Pembiayaan Multiguna / Multipurpose Financing	3.316.741.425.925,41
4	Pembiayaan Umum / General Financing	2.731.894.124.024,45
5	Distribusi Barang /Goods Distribution	159.850.000.000,00
6	Supply Chain Financing / Supply Chain Financing	1.153.987.767.940,00
7	Pembiayaan Kontra Bank Garansi / Bank Guarantee Financing	3.775.731.786.695,49
8	Pembiayaan Mikro / Micro Financing	1.290.564.305.000,00
9	*Custom Bond*	644.840.733.781,00
10	*Surety Bond*	3.788.110723.818,53
11	Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa / Construction and Goods/Services Procurement Financing	243.827.127.232,50
12	*FLPP*	2.041.660.873.135,99
	Total / Total	**19.531.719.608.753,40**

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko penjaminan adalah dengan menghitung klaim ratio, yaitu perbandingan antara jumlah klaim yang dibayar pada suatu periode dengan jumlah IJK yang diterima pada periode yang sama. Pada posisi Desember 2021, klaim ratio Perusahaan adalah 43,16% yang berasal dari beban klaim sebesar Rp 125,41 Miliar dan jumlah IJK sebesar Rp 290.59 Miliar.

As part of guarantee risk management, the claim ratio is calculated, which is the ratio between the total claims paid in a period and the total IJK received in the same period. As of December 2021, the Company's claim ratio was 43.16%, which came from claim expenses of IDR 125.41 billion and IJK of IDR 290.59 billion.

PENGENDALIAN RISIKO TERHADAP PERPANJANGAN PKS ATAU PKS BARU

RISK CONTROL FOR PKS EXTENSION OR NEW PKS

Pengendalian Risiko terhadap Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau PKS baru. Jamsyar melakukan kajian dan memberikan opini Manajemen Risiko atas Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama dengan mitra penjaminan maupun dalam membuat Perjanjian Kerja Sama yang baru. Hal ini dimaksudkan agar dalam perpanjangan PKS maupun penandatanganan PKS baru telah mempertimbangkan faktor risiko dan manajemen risiko.

Opini Manajemen Risiko yang telah diberikan selama tahun 2021 adalah :

1. Pendapat MR tentang Kerjasama Penjaminan Distribusi Barang dengan PT Semen Gresik.
2. Pendapat MR tentang Kerjasama Penjaminan Distribusi Barang dengan PT Semen Tonasa.

Risk Control for the Extension of Cooperation Agreements (PKS) or new PKS. Jamsyar conducts studies and provides Risk Management opinions on the Extension of Cooperation Agreements with guarantee partners and in creating new Cooperation Agreements. This is intended so that the extension of PKS and the signing of new PKS have taken into account risk factors and risk management.

Opini Manajemen Risiko yang telah diberikan selama tahun 2021 adalah :

1. Pendapat MR tentang Kerjasama Penjaminan Distribusi Barang dengan PT Semen Gresik.
2. Pendapat MR tentang Kerjasama Penjaminan Distribusi Barang dengan PT Semen Tonasa.

3. Pendapat MR tentang Kerjasama Penjaminan Fasilitas Supplier Financing dengan PT Bank Syariah Mandiri.
4. Pendapat MR tentang Kerjasama Penjaminan Pembiayaan dengan PT Radana Bhaskara Finance.
5. Pendapat MR tentang Addendum PKS Induk dengan PT Bank Syariah Mandiri.
6. Pendapat MR tentang draft PKS & Juknis Cogar dengan PT Jamkrindo Syariah.
7. Pendapat MR tentang Kerjasama Penjaminan Pembiayaan dengan PT Bank Sumut.
8. Pendapat MR tentang Kerjasama Penjaminan Anjak Piutang dengan PT BNI Syariah.
9. Pendapat MR tentang Kerjasama Penjaminan Pembiayaan Modal Kerja dengan PT PPA
10. Pendapat MR tentang Kerjasama Penjaminan Pembiayaan dengan Bank NTB.
11. Pendapat MR tentang draft MOU dengan Bank Nagari.
12. Pendapat MR tentang Kerjasama Penjaminan PPR dengan Bank BPD Jateng.
13. Pendapat MR tentang Kerjasama Penjaminan Co-Branding dengan Asuransi Takaful.
14. Pendapat MR tentang Kerjasama Penjaminan Multiguna Multijasa dengan Bank Aceh.
15. Pendapat MR tentang Kerjasama Penjaminan Pembiayaan Konsumen dengan PT Bank Syariah Mandiri.

3. MR's opinion on the Supplier Financing Facility Guarantee Cooperation with PT Bank Syariah Mandiri.
4. MR's opinion on the Financing Guarantee Cooperation with PT Radana Bhaskara Finance.
5. MR's opinion on the Addendum to the Master Cooperation Agreement with PT Bank Syariah Mandiri.
6. MR's opinion on the draft PKS & Juknis Cogar with PT Jamkrindo Syariah.
7. MR's opinion on the Financing Guarantee Cooperation with PT Bank Sumut.
8. MR's opinion on the Factoring Guarantee Cooperation with PT BNI Syariah.
9. MR's opinion on the Working Capital Financing Guarantee Cooperation with PT PPA.
10. MR's opinion on the Financing Guarantee Cooperation with Bank NTB.
11. MR's opinion on the draft MOU with Bank Nagari.
12. MR's opinion on PPR Guarantee Cooperation with Bank BPD Jateng.
13. MR's opinion on Co-Branding Guarantee Cooperation with Takaful Insurance.
14. MR's opinion on Multipurpose Multiservice Guarantee Cooperation with Bank Aceh.
15. MR's opinion on Consumer Financing Guarantee Cooperation with PT Bank Syariah Mandiri..

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sistem pengendalian internal yang ada di Perusahaan berfungsi sebagai pencegah terjadinya kecurangan (fraud) dalam proses bisnis dengan meningkatkan dan memperkuat lingkup pengendalian internal. Sistem pengendalian Internal yang diterapkan di Perusahaan merupakan proses penyatuan tindakan serta kegiatan secara berkesinambungan baik oleh pimpinan perusahaan maupun pegawai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan melalui kinerja yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

The internal control system in place at the Company serves as a deterrent to fraud in business processes by enhancing and strengthening the scope of internal control. The internal control system implemented in the Company is a process of integrating actions and activities on an ongoing basis by both company management and employees to provide assurance that objectives are achieved through effective and efficient performance, reliable financial reporting, asset security, and compliance with laws and regulations.

SISTEM PENGENDALIAN OPERASIONAL DAN KEUANGAN
OPERATIONAL AND FINANCIAL CONTROL SYSTEM

Sistem pengendalian keuangan dan operasional Perusahaan diselenggarakan secara berjenjang yang meliputi organ tata kelola yang ada di Perusahaan seperti Dewan Komisaris, Direksi, Satuan Pengawasan Internal, serta Komite Audit.

- Dewan Komisaris, melakukan pengawasan dan memberikan saran terkait proses pengelolaan Perusahaan, pengembangan usaha, serta pengelolaan risiko dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
- Direksi mengembangkan sistem pengendalian internal perusahaan agar dapat berfungsi secara efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan.
- Satuan Pengawasan Internal membantu Direktur Utama dalam melaksanakan audit intern keuangan dan operasional Perusahaan serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanannya serta memberikan saran-saran perbaikan.
- Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan Audit Internal, memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajeman serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas.
- Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan Kerangka COSO

The Company's financial and operational control system is implemented in a structured manner and involves the Company's governance bodies, including the Board of Commissioners, the

- Board of Directors, the Internal Audit Unit, and the Audit Committee. The Board of Commissioners carries out its supervisory role and provides guidance and input related to the Company's management processes, business development, and risk management by applying prudential principles. The Board of Directors is responsible for developing and ensuring the effective implementation of the Company's internal control system to safeguard the Company's investments and assets. The Internal Audit Unit assists the President Director in conducting internal audits of the Company's financial and operational activities, evaluating internal control and management processes, and providing recommendations for improvement. The Audit Committee reviews the implementation of activities and audit results conducted by Internal Audit, provides recommendations to enhance the management control system, and identifies matters requiring the attention of the Board of Commissioners. The Company's Internal Control System is designed and implemented in accordance with the COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) framework.

- Mengupayakan efisiensi dan efektivitas operasi Perusahaan (operational objectives)
- Mengembangkan keandalan dan kelengkapan informasi akuntansi/ finansial dan manajemen (information objectives); serta
- Menjamin kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku (compliance objectives).

- Striving for efficiency and effectiveness in Company operations (operational objectives)
- Developing reliability and completeness of accounting/financial and management information (information objectives); and
- Ensuring compliance with applicable policies and procedures as well as laws and regulations (compliance objectives).

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN KERANGKA COSO
COMPLIANCE OF INTERNAL CONTROL SYSTEMS WITH THE COSO FRAMEWORK

- Sistem pengendalian keuangan dan operasional Perusahaan sejalan dengan sistem pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO). Sistem pengendalian tersebut mencakup berbagai kebijakan, prosedur, kegiatan pemantauan dan komunikasi, serta standar perilaku dan berbagai inisiatif yang ditujukan untuk:
- Mengamankan aset (security objectives)
- Mengupayakan efisiensi dan efektivitas operasi Perusahaan (operational objectives)
- Mengembangkan keandalan dan kelengkapan informasi akuntansi/ finansial dan manajemen (information objectives); serta
- Menjamin kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku (compliance objectives).

- The Company's financial and operational control system is in line with the internal control system according to the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). The control system includes various policies, procedures, monitoring and communication activities, as well as behavioral standards and various initiatives aimed at:
- Securing assets (security objectives)
- Promoting the efficiency and effectiveness of the Company's operations (operational objectives)
- Developing the reliability and completeness of accounting/financial and management information (information objectives); and
- Ensuring compliance with applicable policies and procedures as well as laws and regulations (compliance objectives).

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL SYSTEMS

Perusahaan meyakini bahwa sistem pengendalian internal yang efektif dimulai dengan kepatuhan terhadap standar-standar perilaku etika yang belaku di Perusahaan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Mengingat pentingnya sistem pengendalian internal dalam kelangsungan usaha suatu bisnis, maka Perusahaan mewajibkan adanya sistem pengendalian Internal yang efektif guna mengamankan aset dan investasi Perusahaan serta melakukan pengujian secara berkala.

The Company believes that an effective internal control system begins with compliance with the ethical standards that apply within the Company, both verbally and in writing. Given the importance of internal control systems in the continuity of a business, the Company requires an effective internal control system to secure the Company's assets and investments and to conduct regular testing.

Evaluasi atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan dengan cara melaksanakan monitoring atas tindak lanjut hasil pemeriksaan operasional dan menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Direksi dan Kantor Cabang untuk segera ditindaklanjuti yang akhirnya bertujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

The effectiveness of the Internal Control System is evaluated by monitoring the follow-up of operational audit results and submitting the follow-up results to the Board of Directors and Branch Offices for immediate action, with the ultimate goal of safeguarding the Company's assets, verifying the accuracy and correctness of accounting data, promoting efficiency, and helping to ensure compliance with established management policies.

Pengujian sistem pengendalian internal Perusahaan, sejalan dengan kerangka yang diakui secara internasional melalui COSO, dilakukan dalam rangka melihat tingkat efektivitasnya yang meliputi:

1. **Lingkungan Pengendalian (Control Environment)**
   Lingkungan pengendalian internal merupakan keseluruhan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap Manajemen Eksekutif, Dewan Komisaris dalam melaksanakan kegiatan usaha. Dalam Penerapannya, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah telah membuat dan melakukan update atas berbagai kebijakan internal sejalan dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan Perusahaan. Internal Environment yang efektif tercermin pada perekrutan pegawai, penetapan wewenang dan tanggung jawab, dan evaluasi kinerja seluruh pegawai. Pelaporan kondisi keuangan dan kegiatan Perusahaan secara transparan.

Testing of the Company's internal control system, in line with the internationally recognized COSO framework, is conducted to assess its effectiveness, which includes:

1. Control Environment
   The internal control environment comprises all actions, policies, and procedures that reflect the overall attitude of the Executive Management and Board of Commissioners in conducting business activities. In its implementation, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah has created and updated various internal policies in line with developments within the Company. An effective internal environment is reflected in the recruitment of employees, the determination of authority and responsibilities, and the performance evaluation of all employees. Financial conditions and Company activities are reported transparently.

2. **Aktivitas Pengendalian (Control Activities)**
   Kebijakan dan prosedur yang membantu manajemen dalam menjamin bahwa arahannya dilaksanakan untuk menghadapi risiko. Kegiatan pengendalian meliputi kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi.
   - Kegiatan Pengendalian:
     Kegiatan pengendalian melibatkan seluruh insan Perusahaan mencakup perencanaan, penetapan kebijakan dan prosedur, penerapan pengendalian serta proses verifikasi dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah dipatuhi secara konsisten.
   - Pemisahan Fungsi:
     Dilakukan agar setiap insan Perusahaan melakukan tugasnya sesuai dengan jabatannya. Direksi dan Pegawai memiliki job description yang memadai yang memuat fungsi, tugas, wewenang dan tanggung
3. **Aktivitas Pengendalian (Control Activities)**
   Kebijakan dan prosedur yang membantu manajemen dalam menjamin bahwa arahannya dilaksanakan untuk menghadapi risiko. Kegiatan pengendalian meliputi kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi.
   - Kegiatan Pengendalian:
     Kegiatan pengendalian melibatkan seluruh insan Perusahaan mencakup perencanaan, penetapan kebijakan dan prosedur, penerapan pengendalian serta proses verifikasi dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah dipatuhi secara konsisten.
   - Pemisahan Fungsi:
     Dilakukan agar setiap insan Perusahaan melakukan tugasnya sesuai dengan jabatannya. Direksi dan Pegawai memiliki job description yang memadai yang memuat fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab.
4. **Informasi dan Komunikasi (Communication and Information)**
   Informasi meliputi pemilihan sistem informasi yang relevan dan kualitas informasi yang dihasilkan. Sedangkan komunikasi mencakup pemahaman peran dan tanggung jawab invidual berkenaan dengan pengendalian internal.
   - Informasi:
     Informasi menyeluruh mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko, kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, informasi pasar atau kondisi eksternal. Informasi mengenai keuangan dan kegiatan operasional Perusahaan dapat di komunikasikan dengan tepat waktu dan transparan, dilaporkan secara periodik kepada pihak internal maupun pihak eksternal.
   - Komunikasi:
     Komunikasi dua arah diantara stakeholders yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, seperti Otoritas Jasa Keuangan, auditor eksternal, pemegang saham dan stakeholder mengenai informasi keuangan dan kegiatan operasional Perusahaan.
5. **Pemantauan (Monitoring)**
   Proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Aktivitas pemantauan dilakukan terus menerus dan terdapat kegiatan evaluasi secara terpisah. Pemantauan risiko, efektifitas rencana penanganan risiko, strategi dan sistem manajemen dirancang untuk mengendalikan penerapan penanganan risiko. Hasil pemantauan digunakan untuk penyesuaian proses manajemen risiko, baik berupa kebijakan maupun prosesnya sesuai dengan kondisi Perusahaan.

2. **Aktivitas Pengendalian (Control Activities))**
   Policies and procedures that assist management in ensuring that its directives are implemented to address risks. Control activities include control activities and segregation of duties.
   Control Activities:
   Control activities involve all Company employees and include planning, establishing policies and procedures, implementing controls, and conducting preliminary verification processes to ensure that policies and procedures are followed consistently. Segregation of Duties: This is done so that each staff member performs their duties in accordance with their position. Directors and employees have adequate job descriptions that cover their functions, duties, and authoritiess
3. **Aktivitas Pengendalian (Control Activities)**
   Policies and procedures that assist management in ensuring that its directives are implemented to address risks. Control activities include control activities and segregation of duties..
   - Control Activities: Control activities involve all Company personnel and include planning, establishing policies and procedures, implementing controls, and early verification processes to ensure that policies and procedures are consistently followed.
   - Separation of Functions: This is done so that every member of the Company performs their duties in accordance with their position. Directors and employees have adequate job descriptions that include their functions, duties, authorities, and responsibilities.s
4. **Informasi dan Komunikasi (Communication and Information)**
   Information includes the selection of relevant information systems and the quality of information produced. Communication includes understanding individual roles and responsibilities with regard to internal control.
   - Information:
     Comprehensive information regarding business activities, financial conditions, risk management implementation, compliance with applicable rules and regulations, market information, and external conditions. Information regarding the Company's finances and operational activities can be communicated in a timely and transparent manner, reported periodically to both internal and external parties.
   - Comunication:
     Two-way communication between stakeholders that is able to provide information to all internal and external stakeholders, such as the Financial Services Authority, external auditors, shareholders and stakeholders regarding the Company's financial information and operational activities..
5. **Pemantauan (Monitoring)**
   The process that determines the quality of internal control performance over time. Monitoring activities are carried out continuously and there are separate evaluation activities. Risk monitoring, the effectiveness of risk management plans, strategies, and management systems are designed to control the implementation of risk management. The results of monitoring are used to adjust the risk management process, both in terms of policy and process, in accordance with the Company's conditions.

PERKARA PENTING
IMPORTANT MATTER

Sepanjang 2021, Perusahaan serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak menghadapi perkara hukum baik pidana maupun perdata.

Throughout 2021, the Company and members of the Board of Commissioners and Board of Directors did not face any criminal or civil lawsuits.

AKSES INFORMASI
INFORMATION ACCESS

Dalam mendukung penerapan keterbukaan informasi, Jamsyar menyediakan berbagai akses informasi melalui kantor pusat, website dan media lainnya. Selain itu, informasi tentang Jamsyar juga telah dimuat oleh media cetak dan elektronik. Informasi tentang Jamsyar dapat diperoleh melalui;

In supporting the implementation information disclosure, Jamsyar provides access to information through its head office, website, and other media. In addition, information about Jamsyar has also been published by print and electronic media. Information about Jamsyar can be obtained through:

Gedung JamSyar
Jl LetJend Suprapto No 20 Blok AII/4, RT.6/RW.5, Cemp. Putih, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10510
Telepon : (+62-21)-6540386
Fax : (+62-21)-6540389
E-mail : info@jamkrindosyariah.co.id
Website : www.jamkrindosyariah.co.id
Sekretaris Perusahaan yang dirangkap oleh Kepala Divisi SDM & Umum

KODE ETIK
CODE OF ETHICS

Dalam upaya penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan menyusun suatu Pedoman Perilaku (Code of Conduct) sebagai wujud komitmen seluruh insan Perusahaan dalam mengemban amanah Perusahaan. Pedoman Perilaku ini menjabarkan Tata Nilai Unggulan Perusahaan ke dalam perilaku yang terkait dengan perilaku Perusahaan dan perilaku pegawai Perusahaan.

Pedoman Perilaku ini menjadi acuan tata perilaku bagi bagi semua level organisasi baik Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, maupun karyawan Perusahaan. Pedoman Perilaku diatur dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor Nomor 19/Kep-Dir/VIII/2015 dan Kep-07/ DK Jamsyar/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct). Dalam Keputusan Bersama tersebut diatur tentang Standar Perilaku Perusahaan dan Standar Perilaku Insan Perusahan.

In an effort to implement good corporate governance, the Company has developed a Code of Conduct as a manifestation of the commitment of all Company personnel in carrying out the Company's mandate. This Code of Conduct outlines the Company's Core Values in terms of behavior related to the Company and the behavior of Company employees.

This Code of Conduct serves as a reference for the conduct of all levels of the organization, including the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Board of Directors, and employees of the Company. The Code of Conduct is regulated in the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commission

LINGKUP STANDAR PERILAKU PERUSAHAAN
SCOPE OF CORPORATE CONDUCT STANDARDS

1. Menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama.
2. Menerapkan Standar Etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/ GCG).
3. Senantiasa berperilaku secara profesional dalam rangka pemberian jasa yang bermutu tinggi kepada pelanggan.
4. Memperlakukan semua stakeholder sebagai mitra.
5. Selalu berusaha meningkatkan kualitas jasa, proses kerja dan Karyawan dalam rangka mencapai prestasi terbaik.

1. Placing customer satisfaction as the top priority.
2. Implementing Ethical Standards in all business activities based on the principles of Good Corporate Governance (GCG).
3. Always behaving professionally in order to provide high-quality services to customers.
4. Treating all stakeholders as partners.
5. Always striving to improve service quality, work processes, and employees in order to achieve the best performance.

POKOK-POKOK KODE ETIK
KEY POINTS OF THE CODE OF ETHICS

- Etika Perusahaan dengan Stakeholders
  Dalam pedoman ini diatur pola perilaku terhadap pemangku kepentingan yaitu dengan memenuhi hak-hak stakeholders, meningkatkan nilai bagi stakeholders, menjaga kerahasiaan informasi dan data stakeholder serta berusaha melayani dan mengantisipasi kebutuhan pemangku kepentingan dengan baik;

- Corporate Ethics with Stakeholders
  This guideline regulates patterns of behavior towards stakeholders, namely by fulfilling the rights of stakeholders, increasing value for stakeholders, maintaining the confidentiality of stakeholder information and data, and striving to serve and anticipate the needs of stakeholders properly.

- Etika Perusahaan dengan Karyawan
  Beberapa pola perilaku yang diatur dalam pedoman ini, adalah penegakan K3, peningkatan kualitas dan kesejahteraan karyawan dan pemenuhan hak-hak karyawan secara proporsional. Selain itu, Perusahaan menjamin kesempatan kerja yang sama kepada semua karyawan, kesempatan untuk mengembangkan diri dan dapat aktif pada kegiatan sosial kemasyarakatan, keanggotaan profesi, asosiasi dan sejenisnya. Perusahaan juga memberikan penghargaan kepada karyawan berdasarkan kompetensi dan kinerja karyawan.
- Etika Perusahaan Dengan Mitra Kerja (Pelanggan)
  Dalam pedoman ini diatur upaya Perusahaan dalam menjalankan praktik usaha yang saling menguntungkan dengan mitra kerja berdasarkan perjanjian kerjasama yang berimbang, membangun komunikasi untuk mencari solusi terbaik, menjaga hubungan yang kondusif dengan mitra kerja sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta menghindari penyalahgunaan hubungan kemitraan.
- Etika Perusahaan Dengan Penyedia Barang/Jasa (Supplier)
  Dalam pedoman ini diatur etika hubungan Perusahaan dengan supplier dimana Perusahaan memperlakukan penyedia barang/jasa (supplier) termasuk proses pengadaan sesuai prinsip bisnis yang sehat, terbuka, tidak memihak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Perusahaan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- Etika Perusahaan dengan Pesaing
  Perusahaan harus melaksanakan persaingan usaha yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan kualitas layanan, menentang kesepakatan atau kesepahaman yang bersifat anti kompetisi serta tidak melakukan kerjasama tanpa alasan yang dapat diterima dan wajar.
- Etika Perusahaan dengan Pemerintah
  Perusahaan senantiasa berusaha mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah serta mendukung program-program Pemerintah sesuai dengan Peraturan dan undang- undang yang berlaku
- Etika Perusahaan Dengan Masyarakat
  Perusahaan berupaya memelihara lingkungan, mendukung kegiatan sosial, memberdayakan ekonomi masyarakat, mengoptimalkan penyaluran program-program tanggung jawab sosial Perusahaan kepada masyarakat serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung diskriminasi SARA.
- Etika Perusahaan dengan Media Massa
  Perusahaan wajib memberikan informasi yang relevan, menjadikan media masa sebagai mitra serta menerima dan menindaklanjuti secara proporsional terhadap kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa.

- Corporate Ethics with Employees
  Some of the behavioral patterns regulated in these guidelines are the enforcement of occupational health and safety, improvement of employee quality and welfare, and proportional fulfillment of employee rights. In addition, the Company guarantees equal employment opportunities to all employees, opportunities for self-development and active participation in social activities, professional membership, associations, and the like. The Company also rewards employees based on their competence and performance.
- Corporate Ethics with Business Partners (Customers) This guideline regulates the Company's efforts in conducting mutually beneficial business practices with business partners based on balanced cooperation agreements, establishing communication to find the best solutions, maintaining conducive relationships with business partners in accordance with applicable laws and regulations, and avoiding abuse of partnership relationships. Corporate Ethics with Goods/Service Providers (Suppliers)
- This guideline regulates the ethics of the Company's relationship with suppliers, whereby the Company treats goods/service providers (suppliers), including the procurement process, in accordance with sound, open, and impartial business principles based on applicable regulations. The Company does not engage in corruption, collusion, or nepotism in the procurement of goods and services.

- Corporate Ethics with Competitors
- Companies must engage in fair business competition by promoting product excellence and service quality, opposing anti-competitive agreements or understandings, and refraining from cooperation without acceptable and reasonable grounds. Corporate Ethics with the Government
- Companies shall always strive to comply with applicable laws and regulations, foster good relations and communication with the Government, and support Government programs in accordance with applicable regulations and laws. Corporate Ethics with the Community
- The company strives to preserve the environment, support social activities, empower the community economically, optimize the distribution of the company's social responsibility programs to the community, and refrain from actions that contain discrimination based on ethnicity, religion, race, or social class. Corporate Ethics with the Mass Media
- The company is obliged to provide relevant information, treat the mass media as a partner, and accept and respond proportionally to constructive criticism conveyed through the mass media.

PENYEBARLUASAN KODE ETIK

CODE OF ETHICS DISSEMINATION

Penerapan kode etik dilaksanakan oleh seluruh Insan Jamsyar. Untuk itu, Jamsyar melaksanakan sosialisasi dan internalisasi untuk memastikan kode etik diketahui dan dijalankan oleh seluruh Insan Perusahaan.

Pada tahun 2021, Perusahaan melakukan sosialisasi Kode etik melalui:
1. Tatap Muka melalui Sosialisasi GCG
2. Website
3. Portal Intranet
4. Sosial Media Forum Komunikasi Jamsyar melalui gadget/smartphone
5. Pernyataan Komitmen
6. Contact Center
7. Dan lain sebagainya

The code of ethics is implemented by all Jamsyar employees. To that end, Jamsyar conducts socialization and internalization to ensure that the code of ethics is known and implemented by all Company employees.

In 2021, the Company disseminated the code of ethics through:
1. Face-to-face through GCG Dissemination
2. Website
3. Intranet Portal
4. Social Media Jamsyar Communication Forum via gadgets/smartphones
5. Statement of Commitment
6. Contact Center
7. And so on

UPAYA PENEGAKAN KODE ETIK

ENFORCEMENT OF THE CODE OF ETHICS

Upaya penegakkan Code of Conduct dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Melaksanakan program induksi karyawan baru untuk memastikan setiap karyawan baru mengetahui tentang pedoman Code of Conduct.
2. Melaksanakan komunikasi berkala.
3. Memasukkan Code of Conduct ke dalam website Jamsyar.
4. Melakukan pemantauan efektifitas program Code of Conduct Program ini diaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI).

Efforts to enforce the Code of Conduct are carried out in several ways, including::

1. Implementing a new employee induction program to ensure that every new employee is aware of the Code of Conduct guidelines.
2. Conducting regular communication.
3. Incorporating the Code of Conduct into the Jamsyar website.
4. Monitoring the effectiveness of the Code of Conduct program. This program is implemented by the Internal Audit Unit (SPI)..

SANKSI PELANGGAR KODE ETIK

SANCTIONS FOR VIOLATORS OF THE CODE OF ETHICS

1. Seluruh Insan Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku (Code of Conduct) akan dikenakan sanksi :
   - Bagi karyawan, sanksi diberikan oleh Majelis Pertimbangan Karyawan
   - Bagi Direksi, sanksi diberikan oleh Dewan Komisaris
   - Bagi Dewan Komisaris, sanksi diberikan oleh Pemegang Saham
2. Sanksi akan diberikan kepada seluruh Insan Perusahaan yang melanggar tanpa pengecualian dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan.
3. Bentuk sanksi atas pelanggaran Pedoman Perilaku (Code of Conduct) diatur dan ditetapkan sebagai berikut :
   - Pelanggaran oleh karyawan, bentuk sanksi ditetapkan dalam rapat Majelis Pertimbangan Karyawan
   - Pelanggaran oleh Direksi, bentuk sanksi ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris
   - Pelanggaran oleh Dewan Komisaris, bentuk sanksi ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

1. All Company Personnel who are proven to have violated the Code of Conduct will be subject to sanctions :
   - For employees, sanctions are imposed by Employee Advisory Council.
   - For the Board of Directors, sanctions are imposed byVCommissioners.
   - For thE Commissioners, sanctions are imposed by Shareholders.
2. Sanctions will be imposed on all Company Personnel who violate this policy without exception, while still observing the principle of fairness.
3. The forms of sanctions for violations of the Code of Conduct are regulated and determined as follows:
   - Violations by employees: the form of sanctions is determined in a meeting of the Employee Advisory Council.
   - Violations by the Board of Directors: the form of sanctions is determined in a meeting of the Board of Commissioners.
   - Violations by the Board of Commissioners: the form of sanctions is determined in a General Meeting of Shareholders (GMS).

PELANGGARAN KODE ETIK 2021
ETHICS CODE VIOLATIONS 2021

Sepanjang 2021, seluruh insan Perusahaan mematuhi kode etik yang berlaku dan tidak terdapat pelanggaran atas penerapan kode etik.

Throughout 2021, all Company personnel complied with the applicable code of ethics and there were no violations of the code of ethics.

KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
GRATUITY CONTROL POLICY

Jamsyar telah menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Jamsyar yang tertuang dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 17/Kep-Dir/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Agar seluruh Insan Perusahaan komitmen pada Ketentuan tentang Anti gratifikasi, Perusahaan menetapkan sanksi sebagai berikut :
1. Bagi karyawan yang menerima/memberi gratifikasi yang dianggap suap dan tidak melaporkannya diberikan sanksi oleh Direksi.
2. Bagi Direksi yang menerima/memberi gratifikasi yang dianggap suap dan tidak melaporkannya, diberikan sanksi oleh Dewan Komisaris.
3. Sanksi sebagaimana tersebut butir a dan b dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Jamsyar has implemented a Gratuity Control Program as outlined in the Jamsyar Good Corporate Governance Implementation Guidelines contained in the Joint Decision of the Board of Directors and Board of Commissioners Number 17/Kep-Dir/VIII/2015 dated August 3, 2015 concerning the Implementation Guidelines for Good Corporate Governance of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

To ensure that all Company personnel are committed to the provisions on anti-graft, the Company has established the following sanctions::
1. Employees who receive/give gratuities that are considered bribes and do not report them will be sanctioned by the Board of Directors.
2. Members of the Board of Directors who receive/give gratuities that are considered bribes and do not report them will be sanctioned by the Board of Commissioners.
3. The sanctions referred to in points a and b shall be imposed with due regard to the applicable laws and regulations.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
VIOLATION REPORTING SYSTEM

Perusahaan menyediakan sarana pelaporan untuk menyampaikan pengaduan pelanggaran melalui media dibawah ini:
1. Surat Tertulis PO BOX 107123 JKP 10610 UP Divisi Bisnis Penjaminan Syariah II PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
2. SMS/Whatsapp 0857-6848-2118
3. Email noncashloan.jamsyar@gmail.com

The company provides reporting facilities for submitting complaints of violations through the following media:
1. Written Letter PO BOX 107123 JKP 10610 UP Sharia Guarantee Business Division II PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
2. SMS/Whatsapp 0857-6848-2118
3. Email noncashloan.jamsyar@gmail.com

PENANGANAN PENGADUAN
COMPLAINT HANDLING

Lingkup Pengaduan Pelanggaran yang akan ditindaklanjuti oleh WBS adalah pelanggaran terkait hal-hal bersifat professional dan operasional yang meliputi KKN, Kecurangan (fraud) termasuk penipuan, penggelapan aset dan pembocoran informasi, benturan kepentingan, pencurian dan atau pembiaran pelanggaran, pelanggaran hukum, ketentuan perundang-undangan dan peraturan internal perusahaan.

Laporan pengaduan pelanggaran sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:

Laporan pengaduan pelanggaran sekurangkurangnya memuat informasi sebagai berikut:
- Identitas pelapor (Tidak Wajib)
- Bentuk Pelanggaran atau penyimpangan
- Kapan dan dimana terjadinya (lokasi, kejadian/transaksi)
- Siapa saja yang diduga terlibat (Nama, Jabatan/ Unit Kerja)
- Kerugian (materil dan non materil) akibat pelanggaran atau penyimpangan.

The scope of complaints regarding violations that will be followed up by WBS are violations related to professional and operational matters, including corruption, fraud (including deception, embezzlement of assets, and information leaks), conflicts of interest, theft and/or negligence of violations, violations of laws, regulations, and internal company rules.

Complaint reports must contain at least the following information::

The violation complaint report shall contain at least the following information::
- Identity of the reporter (Not mandatory)
- Type of violation or irregularity
- When and where it occurred (location, incident/transaction)
- Who is suspected of being involved (name, position/work unit)
- Losses (material and non-material) resulting from the violation or irregularity.

Perusahaan memberikan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor pelanggaran yang beritikad baik dengan tidak menyampaikan identitas pelapor ke pihak manapun baik internal maupun eksternal. Perusahaan merahasiakan informasi yang dilaporkan dan hanya akan menggunakan informasi tersebuut sebagai sumber informasi awal dalam proses investigasi tanpa mengungkapkan identitas pelapor. khusus untuk pelapor internal, perusahaan tidak hanya memberikan perlindungan kepada pelapor tetapi dapat diperluas hingga ke anggota keluarga dari tekanan, penundaan kenaikan pangkat, mutasi, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, segala bentuk diskriminasi hingga tindakan fisik.

The company protects the confidentiality of the identity of whistleblowers acting in good faith by not disclosing the identity of the whistleblower to any party, either internal or external. The company keeps the reported information confidential and will only use the information as a source of preliminary information in the investigation process without revealing the identity of the reporter. Specifically for internal reporters, the company not only provides protection to the reporter but can also extend it to family members from pressure, postponement of promotion, transfer, dismissal, lawsuits, property, all forms of discrimination, and even physical violence.

Kriteria Pelanggaran

1. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh karyawan maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan langsung kepada Direktur Utama.
2. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh anggota Direksi maka laporan pelanggaran disampaikan kepada Komisaris Utama.
3. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, organ pendukungnya, dan Dewan Pengawas Syariah maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan kepada Direktur Utama, untuk disampaikan ke Pemegang Saham.

Violation Criteria

1. In the event of a violation committed by an employee, the violation report shall be submitted directly to the President Director.
2. In the event of a violation committed by a member of the Board of Directors, the violation report shall be submitted to the President Commissioner.
3. In the event of a violation committed by a member of the Board of Commissioners, its supporting organs, and the Sharia Supervisory Board, the violation report shall be submitted to the President Director, to be conveyed to the Shareholders.

PERLINDUNGAN PELAPOR
WHISTLEBLOWER PROTECTION

Perusahaan akan memberikan perlindungan terhadap pelapor atas laporan-laporan yang masuk. Perlindungan tersebut meliputi:

- Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan
- Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor

Jaminan perlindungan dari kemungkinan adanya tindakan balas dendam, pemecatan atau perilaku diskriminatif lainnya. Pelapor yang menyampaikan laporan pelanggaran dengan sarana yang telah ditetapkan dalam mekanisme WBS dapat memperoleh informasi progres penanganan tindak lanjut atas informasi pelanggaran yang disampaikan dalam WBS.

The company will provide protection to whistleblowers for reports submitted. Such protection includes:

- Secrecy of reporter's identity and content of report submitted
- Guarantee of protection against treatment that is detrimental to the reporter

Guaranteed protection from possible retaliation, dismissal, or other discriminatory behavior. Reporters who submit reports of violations using the means specified in the WBS mechanism can obtain information on the progress of follow-up actions on the violations reported in the WBS.

PENGADUAN
COMPLAINTS

Dalam rangka mengelola pelaporan Pelanggaran, Perusahaan membentuk Tim Pengelola WBS yang independen dari operasional Perusahaan seharihari, yang bertanggungjawab kepada Direksi dengan struktur keanggotaan sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI).
2. Anggota Kepala Divisi yang membidangi SDM & Umum, dan Kepala Divisi yang membidangi Hukum/Kepatuhan.
3. Sekretaris SDM dari Satuan Pengawasan Internal yang ditunjuk oleh Kepala SPI untuk melaksanakan tugas-tugas administratif.
4. Jabatan ketua dan anggota pengelola WBS adalah bersifat ex-officio.

In order to manage the reporting of violations, the Company has formed a WBS Management Team that is independent from the Company's daily operations and is responsible to the Board of Directors with the following membership structure:

1. Head of Internal Audit (SPI).
2. Members of the Head of Division in charge of Human Resources & General Affairs, and Head of Division in charge of Legal/Compliance.
3. Human Resources Secretary from Internal Audit appointed by the Head of SPI to carry out administrative tasks.
4. The positions of chair and member of the WBS management are ex-officio.

LAPORAN PELANGGARAN
VIOLATION REPORT

Selama 2021, Perusahaan tidak menerima laporan atas pelanggaran terkait Perusahaan.

During 2021, the Company did not receive any reports of violations related to the Company.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
DIVERSITY POLICY FOR THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS AND SHARIA SUPERVISORY BOARD

Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Jamsyar memiliki komposisi yang beragam dari segi pendidikan, pengalaman kerja, usia dan gender. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Jamsyar mengedepankan profesionalisme dan kemampuan dalam pengelolaan penjaminan syariah.

The Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board of Jamsyar have a diverse composition in terms of education, work experience, age, and gender. The diversity of the composition of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board of Jamsyar promotes professionalism and competence in sharia guarantee management.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
This page is intentionally left blank

Syariah Jamkrindo

06

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE

Dalam menjalankan operasionalnya, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah senantiasa berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan aktivitas bisnis tidak hanya berfokus pada pencapaian kinerja perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Perseroan meyakini bahwa penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan bagian penting dalam menciptakan nilai jangka panjang yang selaras dengan prinsip syariah, tata kelola yang baik, serta mendukung tujuan pembangunan nasional.

Sebagai lembaga penjaminan berbasis syariah, Jamkrindo Syariah mengelola zakat perusahaan sebagai salah satu instrumen utama pelaksanaan TJSL. Pengelolaan zakat ini diarahkan untuk memberikan manfaat nyata dan tepat sasaran kepada masyarakat, khususnya melalui penyaluran kepada delapan golongan penerima zakat (asnaf) sesuai ketentuan syariah, dengan fokus pada pencapaian dampak sosial yang berkelanjutan. Melalui pengelolaan zakat tersebut, Jamkrindo Syariah turut berperan aktif dalam mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama pada pilar sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan TJSL yang terintegrasi dengan pengelolaan zakat perusahaan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif beserta perubahannya, serta POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Dengan berlandaskan regulasi tersebut, Jamkrindo Syariah memastikan bahwa seluruh pelaksanaan TJSL dan penyaluran zakat dilakukan secara akuntabel, transparan, serta sesuai prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah.

Melalui pendekatan ini, Jamkrindo Syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga penjaminan syariah, tetapi juga sebagai entitas yang berkontribusi aktif dalam memperkuat ketahanan sosial, mendorong pemerataan kesejahteraan, dan menciptakan kebermanfaatan yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

In carrying out its operations, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah remains firmly committed to ensuring that every policy and business activity not only focuses on achieving corporate performance, but also delivers sustainable benefits to stakeholders and the wider community. The Company believes that the implementation of Social and Environmental Responsibility (SER) is an integral part of creating long-term value that is aligned with sharia principles, good corporate governance, and the achievement of national development objectives.

As a sharia-based guarantee institution, Jamkrindo Syariah manages corporate zakat as one of the primary instruments for the implementation of its SER programs. The management of corporate zakat is directed toward delivering tangible and well-targeted benefits to society, particularly through distribution to the eight eligible zakat beneficiary groups (asnaf) in accordance with sharia provisions, with a focus on achieving sustainable social impact. Through this zakat management, Jamkrindo Syariah actively contributes to the attainment of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly within the social pillar and community empowerment initiatives.

The implementation of SER, which is integrated with the management of corporate zakat, is conducted in compliance with applicable laws and regulations, including Law No. 23 of 2011 on Zakat Management, Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 52 of 2014 on the Procedures for Calculating Zakat Mal and Zakat Fitrah and the Utilization of Zakat for Productive Activities, along with its amendments, as well as Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies. By adhering to these regulations, Jamkrindo Syariah ensures that all SER activities and zakat distributions are carried out in an accountable, transparent manner, and in accordance with prudential principles and sharia compliance.

Through this approach, Jamkrindo Syariah not only serves as a sharia-based guarantee institution, but also acts as an entity that actively contributes to strengthening social resilience, promoting equitable welfare distribution, and creating sustainable benefits for society and the environment.

PRINSIP PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

PRINCIPLES OF ZAKAT MANAGEMENT AS A SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM

1. Pengelolaan zakat Perusahaan dilaksanakan berdasarkan prinsip berikut:
   a. Syariat Islam
      Pengelolaan zakat perusahaan dilaksanakan dengan berlandaskan ketentuan syariat Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa dan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas syariah yang berwenang. Penyaluran zakat dilakukan secara tepat sasaran kepada delapan golongan penerima (asnaf) yang telah ditetapkan, sehingga tujuan zakat sebagai instrumen ibadah dan pemberdayaan sosial dapat tercapai secara optimal.
   b. Amanah
      Jamkrindo Syariah mengelola zakat perusahaan dengan penuh tanggung jawab dan kepercayaan. Seluruh dana zakat yang dihimpun disalurkan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, melalui mekanisme yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.
   C. Kemanfaatan
      Pengelolaan zakat diarahkan untuk memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi penerima zakat serta masyarakat luas. Penyaluran zakat tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup, ketahanan sosial, dan kemandirian ekonomi penerima manfaat sesuai dengan kebutuhan yang relevan.
   d. keadilan
      Prinsip keadilan diterapkan dengan memastikan penyaluran zakat dilakukan secara proporsional, objektif, dan tidak diskriminatif. Jamkrindo Syariah berupaya agar manfaat zakat dapat dirasakan secara merata oleh kelompok penerima yang berhak, sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masing-masing.
   e. kepastian hukum
      Pengelolaan zakat perusahaan dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, peraturan pelaksananya, serta ketentuan regulator terkait. Hal ini memberikan landasan hukum yang jelas dan memastikan seluruh proses pengelolaan zakat berjalan secara tertib dan sesuai ketentuan.
   f. terintergerasi
      Pelaksanaan pengelolaan zakat perusahaan dilakukan secara terintegrasi dengan program TJSL perusahaan serta kebijakan keberlanjutan yang telah ditetapkan. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan bahwa program zakat selaras dengan visi, misi, dan strategi perusahaan dalam memberikan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
   g. akuntabilitas.
      Jamkrindo Syariah memastikan pengelolaan zakat perusahaan dilakukan secara akuntabel melalui pencatatan, pelaporan, dan evaluasi yang transparan. Pertanggungjawaban pengelolaan zakat disampaikan kepada pemangku kepentingan sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap tata kelola yang baik dan penerapan prinsip good corporate governance.

1. Corporate zakat management is carried on the following principles:
a. Islamic law
Corporate zakat management is carried out based on Islamic law as stipulated in the Qur'an, Hadith, and fatwas and provisions established by the competent sharia authorities. Zakat distribution is carried out in a targeted manner to the eight designated recipient groups (asnaf), so that the objectives of zakat as an instrument of worship and social empowerment can be optimally achieved.

b. Trustworthy
Jamkrindo Syariah manages corporate zakat with full responsibility and trust. All zakat funds collected are distributed in accordance with their objectives and purposes, through transparent and accountable mechanisms, as a manifestation of the company's commitment to maintaining the trust of its stakeholders.

C. Benefits
Zakat management is directed at providing tangible and sustainable benefits for zakat recipients and the wider community. Zakat distribution is not only charitable in nature, but also aimed at supporting improvements in the quality of life, social resilience, and economic independence of beneficiaries in accordance with relevant needs.

d. justice
The principle of fairness is applied by ensuring that zakat distribution is carried out proportionally, objectively, and without discrimination. Jamkrindo Syariah strives to ensure that the benefits of zakat are felt equally by eligible recipient groups, in accordance with their respective levels of need and socioeconomic conditions.
e. legal certainty
Corporate zakat management is carried out in accordance with applicable laws and regulations, including Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management, its implementing regulations, and relevant regulatory provisions. This provides a clear legal basis and ensures that the entire zakat management process runs in an orderly manner and in accordance with the provisions.
f. Integrated
The implementation of corporate zakat management is integrated with the company's TJSL program and established sustainability policies. This synergy aims to ensure that the zakat program is aligned with the company's vision, mission, and strategy in providing sustainable social contributions.

g. Accountability.
Jamkrindo Syariah ensures that corporate zakat management is carried out in an accountable manner through transparent recording, reporting, and evaluation. Accountability for zakat management is communicated to stakeholders as part of the company's commitment to good governance and the application of good corporate governance principles.

.

PELAKSANAAN PROGRAM TJSL DAPAT MENERAPKAN PRINSIP SEBAGAI BERIKUT:
IMPLEMENTATION THE TJSL PROGRAM CAN APPLY THE FOLLOWING PRINCIPLES:

2. Pelaksanaan program TJSL dapat menerapkan prinsip sebagai berikut:X
   a. Terarah
      Program TJSL dilaksanakan dengan arah dan tujuan yang jelas, selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai PT Jamkrindo Syariah. Penetapan fokus program dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan sosial dan lingkungan, serta relevansinya dengan peran Perusahaan sebagai lembaga penjaminan syariah. Dengan arah yang terencana, program TJSL diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal dan mendukung pencapaian sasaran strategis Perusahaan secara berkelanjutan.
   b. Terukur Dampaknya
      Setiap pelaksanaan program TJSL dirancang agar memiliki dampak yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan evaluasi atas kontribusi dan hasil dari program yang dijalankan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Pengukuran dampak ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa program TJSL tidak hanya bersifat kegiatan sesaat, tetapi mampu menghasilkan perubahan positif, nilai tambah, serta keberlanjutan manfaat bagi masyarakat dan Perusahaan.
   c. Akuntabilitas
      Pelaksanaan program TJSL dilandasi oleh prinsip akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh proses perencanaan, penyaluran, hingga pelaporan program TJSL dilakukan secara tertib dan terdokumentasi dengan baik guna meminimalkan potensi penyalahgunaan dan penyimpangan. Jumlah dan bentuk penyaluran dana TJSL ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Perusahaan, sehingga memastikan penggunaan dana yang efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan program.

3. Sumber dana zakat perusahaan
   Besaran zakat Perusahaan ditetapkan sebesar 2,5% dari Laba Perusahaan.

4. Mekanisme pengelolaan zakat Perusahaan
   Zakat Perusahaan dikelola oleh Unit Kerja pengelola zakat Perusahaan dan TJSL bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi atau dapat disalurkan secara langsung oleh Perusahaan jika memenuhi ketentuan syariah.

5. Pilar utama program TJSL
   Pelaksanaan program TJSL didasarkan pada 4 (empat) Pilar Utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang memuat 17 (tujuh belas) butir TPB sebagai berikut
   a. Sosial
      Tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pilar sosial meliputi tujuan:
      - Mengentaskan kemiskinan (TPB1)
      - Mengakhiri kelaparan (TPB 2);
      - Kehidupan sehat dan sejahtera (TPB
      - Pendidikan berkualitas (TPB 4); dan
      - Kesetaraan gender (TPB 5).

2. The implementation the TJSL program can apply the following principles:
   a. Focused
      The TJSL program is implemented with clear direction and objectives, in line with the vision, mission, and values of PT Jamkrindo Syariah. The focus of the program is determined based on social and environmental priorities, as well as its relevance to the Company's role as a sharia guarantee institution. With a well-planned direction, the TJSL program is expected to make an optimal contribution and support the achievement of the Company's strategic objectives in a sustainable manner.
   b. Measurable Impact
      Each TJSL program is designed to have a measurable impact and provide tangible benefits to stakeholders. The Company evaluates the contributions and results of the programs implemented, from social, economic, and environmental aspects. This impact measurement is the basis for ensuring that the TJSL program is not just a temporary activity, but is capable of producing positive changes, added value, and sustainable benefits for the community and the Company.

   c. Accountability
      The implementation of TJSL programs is based on the principle of accountability, which means that they are transparent and in accordance with applicable regulations. The entire process of planning, distribution, and reporting of TJSL programs is carried out in an orderly manner and well documented to minimize the potential for misuse and irregularities. The amount and form of TJSL fund distribution are determined based on the results of evaluations that have been conducted.

Sources of corporate zakat funds
The amount of corporate zakat is set at 2.5% of the company's profits.

4. Corporate Zakat Management Mechanism
   Corporate Zakat is managed by the Corporate Zakat Management Work Unit and TJSL in collaboration with an official Zakat Institution (LAZ) or can be distributed directly by the Company if it meets sharia requirements.

5. Main pillars of the TJSL program
   The implementation of the TJSL program is based on the 4 (four) Main Pillars of Sustainable Development Goals (SDGs), which contain 17 (seventeen) SDG items as follows
   a. Sosial
      Achieving the fulfillment of quality basic human rights in a fair and equitable manner to improve the welfare of the entire community. The social pillar includes the following objectives:
      - Eradicate poverty (SDG 1)
      - End hunger (SDG 2);
      - Good health and well-being (SDG
      - Quality education (SDG 4); and
      - Gender equality (SDG 5).

b. Lingkungan

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Pilar lingkungan meliputi:

- Penyediaan air bersih dan sanitasi layak (TPB 6);
- Pembangunan kota dan pemukiman yang layak (TPB 11);
- Proses konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab (TPB 12);
- Penanganan perubahan iklim (TPB 13);
- Menjaga ekosistem kelautan (TPB 14); dan
- Menjaga ekosistem daratan (TPB 15).

c. Ekonomi

Tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih dan terjangkau, dan didukung kemitraan. Pilar ekonomi meliputi tujuan:

- Penggunaan energi bersih dan terjangkau (TPB 7);
- Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (TPB 8);
- Industri, ekonomi dan infrastruktur (TPB 9);
- Mengurangi kesenjangan (TPB 10); dan
- Melakukan kemitraan untuk mencapai tujuan (TPB 17).

d. Hukum dan Tata Kelola

Terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Pilar hukum dan tata kelola meliputi tujuan perdamaian, keadilan yang tangguh (TPB 16).

6. Program Zakat dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan

Realisasi Anggaran pengelolaan zakat sebagai bagian program TJSL pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

b. Environment

Sustainable management of natural resources and the environment as the foundation of all life. Environmental pillars include:

- Provision of clean water and adequate sanitation (SDG 6);
- Development of adequate cities and settlements (SDG 11);
- Responsible consumption and production processes (SDG 12);
- Addressing climate change (SDG 13);
- Conserving marine ecosystems (SDG 14); and
- Conserving terrestrial ecosystems (SDG 15).).

c. Economy

Achieving quality economic growth through sustainable employment and business opportunities, innovation, inclusive industries, adequate infrastructure, clean and affordable energy, and supported by partnerships. economic pillar includes the following goals:

- economic pillar includes the following goals:
- Use of clean and affordable energy (SDG 7);
- Decent work and economic growth (SDG 8);
- Industry, economy and infrastructure (SDG 9);
- Reducing inequality (SDG 10); and
- Partnerships for the goals (SDG 17)..

d. Law and Governance

The realization of legal certainty and effective, transparent, accountable, and participatory governance to create security stability and achieve a state based on law. The law and governance pillar includes the goals of peace and justice (SDG 16).
.

6. Zakat and Environmental Social Responsibility Programs

No	Tanggal Date	Kegiatan Activity	Sasaran Target		
			Miskin Poor	*Fisabilillah*	*Amil*
1	06-May-21	Pemberian Bantuan Pendidikan / Pemberian Bantuan Pendidikan		Rp 100.000.000	
2	31-May-21	Pemberian Bantuan Pengadaan Sembako dan Covid Kit Untuk Relawan Covid / Provision of Basic Food Supplies and Covid Kits for Covid Volunteers		Rp 52.660.000	Rp 7.810.000
3	17-Sep-21	Pemberian Santunan kepada Santri di Pondok Pesantren Al-Kautsar Bogor / Providing Compensation to Students at Al-Kautsar Islamic Boarding School in Bogor	Rp 135.000.000		
		Total	**Rp 135.000.000**	**Rp 152.660.000**	**Rp 7.810.000**

Penyaluran zakat perusahaan sebagai program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The distribution of corporate zakat as a Corporate Social Responsibility (CSR) program in 2021 is as follows:

No	Tanggal Date	Kegiatan Activity	*Nominal*	*SDGsl*
1	06-May-21	Pemberian Bantuan Pendidikan / Pemberian Bantuan Pendidikan	Rp 100.000.000	Pendidikan
2	31-May-21	Pemberian Bantuan Pengadaan Sembako dan Covid Kit Provision of Basic Food Supplies and Covid Kits	Rp 60.470.000	Sosial
3	17-Sep-21	Pemberian Santunan kepada Santri di Pondok Pesantren Al-Kautsar Bogor Providing Compensation to Students at Al-Kautsar Islamic Boarding School in Bogor	Rp 135.000.000	Sosial
		Total	**Rp 295.470.000**	

Sepanjang tahun 2021, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah telah merealisasikan penyaluran zakat perusahaan sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Penyaluran ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan syariah dan diarahkan kepada golongan penerima zakat (asnaf) yaitu miskin, fisabilillah, dan amil. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemberian bantuan pendidikan, bantuan pengadaan sembako dan Covid Kit untuk relawan Covid, serta santunan kepada santri di Pondok Pesantren Al-Kautsar Bogor. Total zakat yang disalurkan mencapai Rp 295.470.000, dengan fokus mendukung pilar pendidikan dan sosial sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Melalui program ini, Jamkrindo Syariah tidak hanya memenuhi kewajiban syariah, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan sosial, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Throughout 2021, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah has distributed corporate zakat as part of its Social and Environmental Responsibility (TJSL) program. This distribution was carried out in accordance with sharia provisions and was directed to the recipients of zakat (asnaf), namely the poor, fisabilillah, and amil. Activities carried out included providing educational assistance, assistance in procuring basic necessities and Covid Kits for Covid volunteers, as well as compensation for students at the Al-Kautsar Islamic Boarding School in Bogor. The total zakat distributed reached IDR 295,470,000, with a focus on supporting the pillars of education and social welfare in line with the Sustainable Development Goals (SDGs). Through this program, Jamkrindo Syariah not only fulfills its sharia obligations but also plays an active role in improving community welfare, strengthening social resilience, and providing sustainable benefits.

Syariah Jamkrindo

07

Laporan Keuangan
Financial Report

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

LAPORAN KEUANGAN/
FINANCIAL STATEMENTS

31 DESEMBER/*DECEMBER* 2021

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021	2020	
ASET				***ASSETS***
Kas dan setara kas	4	685,349	443,899	*Cash and cash equivalents*
Investasi	5	262,270	171,320	*Investments*
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	6	710,133	419,433	*Restricted cash in banks*
Piutang imbal jasa kafalah	7	106,504	37,323	*Kafalah fee receivables*
Piutang penjaminan ulang	8	48,161	36,684	*Re-guarantee receivables*
Piutang hasil investasi	9	5,703	3,735	*Investment income receivables*
Piutang lain-lain - bersih		237	93	*Other receivables - net*
Aset penjaminan ulang	10	426,201	308,457	*Re-guarantee assets*
Biaya akuisisi ditangguhkan	11	89,013	76,124	*Deferred acquisition costs*
Biaya dibayar dimuka		699	1,545	*Prepaid expenses*
Aset tetap - bersih	12	68,443	59,552	*Fixed assets - net*
Aset tidak berwujud - bersih		636	215	*Intangible assets - net*
Aset pajak tangguhan	13c	42,233	15,499	*Deferred tax assets*
JUMLAH ASET		2,445,582	1,573,879	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Utang klaim		22,611	962	*Claim payables*
Utang pajak	13a	62,273	9,529	*Tax payables*
Utang penjaminan ulang	14	55,555	41,531	*Re-guarantee payables*
Imbal jasa kafalah ditangguhkan	15	903,458	632,799	*Unearned kafalah fees*
Pendapatan komisi ditangguhkan	16	42,981	35,869	*Deferred commission income*
Estimasi klaim	17	303,763	151,957	*Estimated claims*
Liabilitas imbalan kerja	18	3,995	3,594	*Employee benefit liabilities*
Akrual dan utang lain-lain	19	73,899	44,445	*Accruals and other payables*
TOTAL LIABILITAS		1,468,535	920,686	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp 500.000 (nilai penuh) per saham	20			*Share capital - Rp 500,000 (full amount) par value per share*
Modal dasar - 2.000.000 saham				*Authorised 2,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor - 1.411.241 saham (2020: 1.100.000 saham)	20	705,620	550,000	*Issued and paid-up - 1,411,241 shares (2020: 1,100,000 shares)*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak		424	(610)	*Remeasurement of employee benefit liabilities, after tax*
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak		6,003	6,960	*Unrealised gain on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income, after tax*
Saldo laba				*Retained earnings*
- Ditentukan penggunaannya		96,843	51,706	*Appropriated -*
- Tidak ditentukan penggunaannya		168,157	45,137	*Unappropriated -*
JUMLAH EKUITAS		977,047	653,193	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		2,445,582	1,573,879	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021	2020	
PENDAPATAN KAFALAH				***KAFALAH INCOME***
Imbal jasa kafalah bruto	21	959,276	500,292	*Gross kafalah fees*
Premi penjaminan ulang bruto	22	(282,873)	(172,811)	*Gross re-guarantee premiums*
Kenaikan atas imbal jasa kafalah yang belum merupakan pendapatan	23	(186,987)	(140,126)	*Increase in unearned kafalah fees*
Jumlah pendapatan kafalah		489,416	187,355	*Total kafalah income*
BEBAN KAFALAH				***KAFALAH EXPENSES***
Klaim bruto	24	(277,105)	(258,588)	*Gross claims*
Klaim penjaminan ulang	25	149,349	133,181	*Re-guarantee claims*
Beban ujrah	26	(42,902)	(32,224)	*Ujrah expenses*
Pendapatan ujrah penjaminan ulang	27	28,693	17,935	*Re-guarantee ujrah income*
Pendapatan subrogasi	28	36,174	40,698	*Subrogation income*
Beban kafalah lain		(1,355)	(1,727)	*Other kafalah expenses*
Kenaikan estimasi klaim	29	(117,734)	(12,913)	*Increase in estimated claims*
Jumlah beban kafalah		(224,880)	(113,638)	*Total kafalah expenses*
Pendapatan kafalah bersih		264,536	73,717	*Net kafalah income*
Pendapatan investasi	30	56,865	56,451	*Investment income*
Beban usaha	31	(101,345)	(70,497)	*Operating expenses*
Beban lain-lain - bersih	32	(6,859)	(9,293)	*Other expenses - net*
LABA SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK PENGHASILAN		213,197	50,378	***INCOME BEFORE ZAKAT AND INCOME TAX***
Zakat	34	(6,458)	(914)	*Zakat*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		206,739	49,464	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				***INCOME TAX EXPENSES***
Beban pajak kini	13b	(65,338)	(6,286)	*Current income tax*
Manfaat pajak tangguhan	13b	26,756	1,959	*Deferred tax benefit*
Jumlah beban pajak penghasilan		(38,582)	(4,327)	***Total tax expense***
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		168,157	45,137	***NET PROFIT FOR THE YEAR***
Penghasilan komprehensif lainnya				*Other comprehensive income*
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
- Pengukuran kembali imbalan kerja	18	1,326	(384)	*Remeasurements of - employee benefits*
- Efek pajak terkait		(292)	85	*Related tax effect -*
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will be reclassified to profit or loss:*
- (Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		(1,227)	7,208	*Unrealised (loss)/gain on marketable - securities measured at fair value through other comprehensive*
- Efek pajak terkait		270	(1,586)	*Related tax effect -*
Pendapatan komprehensif lainnya		77	5,323	*Other comprehensive income*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		168,234	50,460	*Total comprehensive income for the year*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

			Pendapatan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*		Saldo laba/ *Retained earnings*			
	Catatan/ *Note*	Modal saham/ *Share capital*	Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak / *Unrealised gain on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income, after tax*	Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak/ *Remeasurement of employee benefit liabilities, after tax*	Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019		475,000	1,338	(311)	34,502	17,204	527,733	***Balance as at 1 January 2020/ 31 December 2020***
Penambahan modal saham	20	75,000	-	-	-	-	75,000	*Additional share capital*
Pembentukan cadangan umum	20	-	-	-	17,204	(17,204)	-	*Allowances for general reserve*
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	45,137	45,137	*Net profit for the year*
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak		-	5,622	-	-	-	5,622	*Unrealised gain on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income, after tax*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak		-	-	(299)	-	-	(299)	*Remeasurement of employee benefit liabilities, after tax*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020		550,000	6,960	(610)	51,706	45,137	653,193	***Balance as at 31 December 2020***
Penambahan modal saham	20	155,620	-	-	-	-	155,620	*Additional share capital*
Pembentukan cadangan umum	20	-	-	-	45,137	(45,137)	-	*Allowances for general reserve*
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	168,157	168,157	*Net profit for the year*
Kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak		-	(957)	-	-	-	(957)	*Unrealised loss on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income, after tax*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak		-	-	1,034	-	-	1,034	*Remeasurement of employee benefit liabilities, after tax*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021		705,620	6,003	424	96,843	168,157	977,047	***Balance as at 31 December 2021***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021	2020	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES***
Laba sebelum pajak penghasilan		206,739	49,464	*Income before income tax*
Ditambah unsur yang tidak mempengaruhi arus kas operasi:				*Add items not affecting operating cash flows:*
Depresiasi		6,086	3,472	*Depreciation*
Kenaikan atas imbal jasa kafalah yang belum merupakan pendapatan	23	186,987	140,126	*Increase in unearned kafalah fee*
Kenaikan estimasi klaim	29	117,734	12,913	*Increase in estimated claims*
Liabilitas imbalan kerja	18	1,727	1,225	*Employee benefit liabilities*
Arus kas operasi sebelum perubahan aset dan liabilitas		519,273	207,200	*Operating cash flow before changes in assets and liabilities*
Perubahan asset dan liabilitas:				*Changes in assets and liabilities:*
Piutang imbal jasa kafalah		(69,181)	(33,165)	*Kafalah fee receivables*
Piutang penjaminan ulang		(11,477)	4,645	*Re-guarantee receivables*
Piutang hasil investasi		(1,968)	(845)	*Investment income receivables*
Piutang lain-lain - bersih		(144)	(11)	*Other receivables - net*
Biaya akuisisi ditangguhkan		(12,889)	(9,068)	*Deferred acquisition costs*
Biaya dibayar dimuka		846	428	*Prepaid expenses*
Utang klaim		21,649	(366)	*Claim payables*
Utang pajak		(12,594)	(34)	*Tax payables*
Utang penjaminan ulang		14,024	8,820	*Re-guarantee payables*
Pendapatan komisi ditangguhkan		7,112	10,214	*Deferred commission income*
Akrual dan utang lain-lain		28,116	10,655	Accruals and other payables
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		482,767	198,473	***Net cash flows provided from operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pelepasan investasi		37,941	81,917	*Sale of investment*
Pembelian investasi		(130,119)	(82,377)	*Purchase of investment*
Pembelian aset tetap dan aset tidak berwujud		(10,687)	(52,223)	*Purchase of fixed assets and intangible assets*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(102,865)	(52,683)	***Net cash flows used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran liabilitas sewa		(3,372)	(4,138)	*Payment for lease liabilities*
Penerimaan modal saham	20	155,620	75,000	*Receipts of additional share capital*
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		152,248	70,862	***Net cash flows provided from financing activities***
Kenaikan bersih kas dan setara kas		532,150	216,652	***Net increase in cash and cash equivalents***
Kas dan setara kas pada awal tahun		863,332	646,680	***Cash and cash equivalents at the beginning of year***
Kas dan setara kas pada akhir tahun		1,395,482	863,332	***Cash and cash equivalents at the end of year***
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:				*Cash and cash equivalents at the end of the year consist of:*
Kas dan setara kas		685,349	443,899	*Cash and cash equivalents*
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya		710,133	419,433	*Restricted cash in banks*
		1,395,482	863,332	

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTIONS OF ZAKAT FUNDS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	2020	
Sumber dana zakat			*Sources of zakat fund*
Zakat perusahaan atas laba tahun 2019	-	914	*Zakat from 2019 profit*
Zakat perusahaan atas laba tahun 2020	1,128	-	*Zakat from 2020 profit*
Zakat perusahaan atas laba tahun 2021	5,330	-	*Zakat from 2021 profit*
	6,458	914	*Increase/(decrease) in zakat funds*
Penyaluran dana zakat			*Distribution of zakat fund*
Disalurkan melalui lembaga zakat	(295)	(914)	*Distributed through zakat institution*
Saldo awal dana zakat	-	-	*Beginning balance of zakat funds*
Saldo akhir dana zakat	6,163	-	*Ending balance of zakat funds*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	2020	
Sumber dana kebajikan			***Sources of qardhul hasan funds***
Pendapatan non-halal	12	17	*Non-halal income*
Kenaikan dana kebajikan	12	17	*Increase in qardhul hasan funds*
Saldo awal dana kebajikan	26	9	*Beginning balance of qardhul hasan funds*
Saldo akhir dana kebajikan	38	26	*Ending balance of qardhul hasan funds*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

1. INFORMASI UMUM

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Perusahaan") didirikan sesuai dengan akta Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Nomor 68 tanggal 19 September 2014. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-26462.40.10.2014 tanggal 24 September 2014 dan telah mendapat Izin Pendirian Usaha dari Dewan Komisioner Otorisasi Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-134/D.05/2014 tanggal 7 November 2014.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 15 tanggal 11 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.P.A., Notaris di Jakarta, tentang penambahan modal disetor sebesar Rp 155.620 atau sebanyak 311.241 lembar saham. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0462802 Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021.

Perusahaan menyelenggarakan usaha jasa penjaminan dengan prinsip syariah.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat terletak di Gedung Jamkrindo Syariah Jl. Letjend Suprapto No 20, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat.

Perusahaan memiliki 15 kantor cabang dan 11 kantor cabang serta 3 kantor unit pelayanan di beberapa kota di Indonesia masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (tidak diaudit).

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan masing-masing memiliki 190 dan 104 karyawan (tidak diaudit).

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, komposisi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("the Company") was established in accordance with the deed of Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. No. 68 dated 19 September 2014. The deed has been agreed by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-26462.40.10.2014 dated 24 September 2014 and has got permit from Bord Commissioner of The Financial Services Authority accordance to Decree No. KEP-134/D.05/2014 dated 7 November 2014.

The Company's Articles of Association have been amended several times, the latest by Deed No. 15 dated 11 October 2021 made before Dewantari Handayani, S.H., M.P.A., Notary in Jakarta, regarding additional share capital of Rp 155,620 or as many as 311,241 shares. The deed has been agreed by Minister of Law and Human Rights of Republic Indonesia based on Decree No. AHU-AH.01.03-0462802 Year 2021 dated 19 October 2021.

The Company is engaged in sharia-principle guarantee service business.

The company is located in Jakarta, which Head Office located in Jamkrindo Syariah Building Jl. Letjend Suprapto No 20, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat.

The Company has 15 branch offices and 11 branch offices and 3 marketing offices located in several cities in Indonesia as at 31 December 2021 and 2020, respectively (unaudited).

As at 31 December 2021 and 2020, the Company has 190 and 104 employees, respectively (unaudited).

As at 31 December 2021 and 2020, the composition of the Company's Board of Commisioners, Directors, and Sharia Supervisory Board are as follows:

	2021 dan/*and* 2020	
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Aribowo	*President Commissioner*
Komisaris	Muhammad Syakir Sula	*Commissioner*
Komisaris Independen	Wildan	*Independent Commissioner*
Direksi		***Directors***
Direktur Utama	Gatot Suprabowo	*President Director*
Direktur Operasional	Achmad Sonhadji	*Operational Director*
Direktur Keuangan	Endang Sri Winarni	*Finance Director*
Dewan Pengawas Syariah		***Sharia Supervisory Board***
Ketua	Hasanuddin AF	*Chairman*
Anggota	Abdul Aziem	*Member*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Transfer aset dari PT Jaminan Kredit Indonesia

Pada tanggal 30 September 2021, berdasarkan Perjanjian Nomor 073/PKS/JAMSYAR/IX/2021 dan 42/PKS/Non-OP/IX/2021 antara PT Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo") dengan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Perusahaan"), telah dilakukan pengalihan portofolio penjaminan syariah milik Jamkrindo kepada Perusahaan. Jumlah saldo penjaminan yang dialihkan adalah sebesar Rp 5.601.335, imbal jasa kafalah ditangguhkan sebesar Rp 138.777, aset penjaminan ulang sebesar Rp 55.388, biaya akuisisi ditangguhkan sebesar Rp 13.272 dan kas di bank sebesar Rp 70.117. Perusahaan mencatat pengalihan ini sebagai aset transfer efektif sejak 1 November 2021. Portofolio penjaminan syariah yang dialihkan meliputi produk Mikro, Multiguna, Umum, FLPP dan Kontra Bank Garansi.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

Asset transfer from PT Jaminan Kredit Indonesia

On 30 September 2021, based on Agreement Number 073/PKS/JAMSYAR/IX/2021 and 42/PKS/ Non-OP/IX/2021 between PT Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo") and PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (the "Company"), the Jamkrindo's sharia guarantee portfolio has been transferred to the Company. The total balance of the guaranteed financing transferred is amounting to Rp 5,601,335, unearned kafalah fees amounting to Rp 138,777, re-guarantee assets amounting to Rp 55,388, deferred acquisition costs amounting to Rp 13,272 and cash in bank amounting to Rp 70,117. The Company recorded this transfer as an asset transfer effective 1 November 2021. The sharia guarantee portfolio transferred includes Micro, Multipurpose, General, FLPP and Contra Bank Guarantee products.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan Perusahaan disusun dan diotorisasi oleh Direksi untuk terbit pada tanggal 22 April 2022.

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah seperti yang dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan Perusahaan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 101 (Revisi 2016), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 110 (Revisi 2020) "Akuntansi Sukuk" dan PSAK lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, disajikan dalam jutaan Rupiah.

Pos-pos yang disertakan dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The financial statements of the Company were prepared and authorised by the Directors for issuance on 22 April 2022.

The principal accounting policies adopted in the preparation of these financial statements are set out below:

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with Indonesia Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No. 101 (Revised 2016), "Presentation of Sharia Financial Statements", SFAS No. 110 (Revised 2020) "Sukuk Accounting" and other SFAS as long as not contradict with sharia principle.

The financial statements have been prepared in accordance with the Indonesian financial accounting standards. The financial statements have been prepared under the historical cost convention except for financial assets measured at fair value through other comprehensive income. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the statement of cash flows.

Figures in the financial statements are expressed in million Rupiah, unless otherwise stated.

Items included in the financial statements of the Company are measured using the currency at the primary economy environment in which the Company operates ("functional currency"). The functional currency of the Company is Rupiah.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi nilai aset dan liabilitas dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, dan jumlah pendapatan dan beban selama periode laporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula (lihat Catatan 3).

Berdasarkan PSAK No. 101 (Revisi 2016), laporan keuangan perusahaan syariah terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

(i) Laporan posisi keuangan
(ii) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
(iii) Laporan perubahan ekuitas
(iv) Laporan arus kas
(v) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat
(vi) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan
(vii) Catatan atas laporan keuangan

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Perusahaan sesuai prinsip syariah.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas dan kas di bank dan kas di bank yang dibatasi penggunaannya.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyaluran dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

a. Basis of preparation of the financial statements *(continued)*

The preparation of financial statements requires the use of estimates and assumptions that affects the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements, and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates (refer to Note 3).

Based on SFAS No. 101 (Revised 2016), the financial statements of sharia company should include the following:

(i) Statement of financial position
(ii) Statement of profit or loss and other comprehensive income
(iii) Statement of changes in equity
(iv) Statement of cash flows
(v) Statement of sources and distributions of zakat funds
(vi) Statement of sources and uses of qardhul hasan funds, and
(vii) Notes to the financial statements

Statement of financial positions, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of cash flows, and statement of changes in equity represent the financial statements reflecting the Company's commercial activities in accordance with sharia principle.

The statement of cash flows is prepared based on the indirect method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash and cash in banks and restricted cash in banks.

Statement of sources and distribution of zakat funds shows the source of funds, distribution during the year and undistributed zakat fund as at point in time.

Statement of sources and uses of qardhul hasan funds shows the sources and uses of qardhul hasan during the year and the remaining balance qardul hasan funds as at point in time.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Indonesia ("DSAK-IAI") telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021 sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 1: "Penyajian laporan keuangan";
- Amandemen PSAK 22: "Kombinasi bisnis";
- Amandemen PSAK 55: "Instrumen keuangan";
- Amandemen PSAK 60: "Instrumen keuangan: Pengungkapan";
- Amandemen PSAK 62: "Kontrak asuransi";
- Amandemen PSAK 73: "Konsensi sewa terkait Covid-19";
- Amandemen PSAK 111: "Akuntansi wa'd"; dan
- PSAK 112: "Akuntansi wakaf".

Implementasi dari standar-standar tersebut di atas tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

Siaran Pers atas Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") mengeluarkan siaran pers mengenai Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa (PSAK 24, "Imbalan Kerja").

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Perusahaan masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari siaran pers ini. Perusahaan akan mengevaluasi lebih lanjut serta akan melakukan penyesuaian atas imbalan kerja yang dibutuhkan terhadap laporan keuangan Perusahaan sesuai dengan panduan yang diberikan oleh siaran pers terkait.

c. Penjabaran mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada laporan laba rugi.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued revision of the following accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standards which are effective as at 1 January 2021 as follows:

- *Amendment SFAS 1: "Presentation of financial statements";*
- *Amendment SFAS 22: "Business combination";*
- *Amendment to SFAS 55: "Financial instrument";*
- *Amendment SFAS 60: "Financial instrument: Disclosure";*
- *Amendment SFAS 62: "Insurance contract";*
- *Amendment SFAS 73: "Lease concession related to Covid-19";*
- *Amendment SFAS 111: "Wa'd accounting"; and*
- *SFAS 112: "Accounting for endowments".*

Except for the changes as explained below, the implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material impact to the financial statements for current year or prior financial years.

Press release of Attributing Benefit to Periods of Service

In April 2022, Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") issued a press release regarding Attributing Benefit to Periods of Service (SFAS 24, "Employee Benefits").

As at the authorisation date of this financial statement, the Company is still evaluating the potential impact of the implementation of this press release and will create necessary adjustments to the Company's financial statement in line with the respective press release's guidance.

c. Foreign currency translation

Transactions denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rate prevailing at the date of the transactions. At the statement of financial position date, monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rates prevailing at statement of financial position date.

Exchange gains and losses arising from transactions in foreign currencies and from the translation of foreign currencies monetary assets and liabilities are recognised in the statement of profit or loss.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kurs nilai tukar yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia dan masing-masing adalah Rp 14.269 dan Rp 14.105 untuk 1 Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS").

d. Akad penjaminan syariah

Akad yang digunakan dalam penjaminan syariah adalah akad *kafalah*.

Imbal jasa kafalah (IJK)

Imbal jasa kafalah dari terjamin dicatat sebesar nilai bersih, setelah diskonto, sesuai dengan ketentuan pada kontrak.

IJK ditangguhkan merupakan bagian dari IJK yang berkaitan dengan persyaratan belum berakhirnya cakupan penjaminan.

Pembentukan imbal jasa kafalah ditangguhkan dihitung berdasarkan IJK neto sesuai dengan proporsi jumlah hari sampai dengan sertifikat kafalah berakhir (proporsional harian).

Kenaikan atas imbal jasa kafalah yang belum merupakan pendapatan adalah selisih antara IJK belum menjadi hak periode berjalan dan periode lalu.

Penyajian imbal jasa kafalah dalam laporan laba rugi menunjukkan jumlah imbal jasa bruto.

Pendapatan ujrah penjaminan ulang

Pendapatan ujrah penjaminan ulang merupakan ujrah yang diterima dari mitra penjaminan ulang dengan persentase tertentu dari jumlah premi yang dibayar ke mitra penjaminan ulang.

Ujrah penjaminan ulang dicatat sebagai pendapatan ditangguhkan dan diamortisasi selama jangka waktu penjaminan.

Jika terdapat pelunasan dipercepat atau terjadi klaim atas pembiayaan yang dijaminkan, jumlah pendapatan imbalan jasa kafalah dan pendapatan ujrah penjaminan ulang yang masih ditangguhkan diakui seluruhnya ke laporan laba rugi tahun berjalan.

Pendapatan jasa administrasi kafalah

Pendapatan jasa administrasi kafalah diakui seluruhnya saat sertifikat kafalah ("SK") diterbitkan.

Beban ujrah

Ujrah diberikan kepada agen dan penerima jaminan sehubungan dengan penutupan pertanggungan. Beban ujrah besarnya dinyatakan sebagai persentase tertentu dari IJK. Beban ujrah dicatat sebagai biaya dibayar dimuka dan diamortisasi sesuai dengan periode penjaminan.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Foreign currency translation *(lanjutan)*

As at 31 December 2021 and 2020, the exchange rate used are the Bank Indonesia middle rate of Rp 14,269 and Rp 14,105, respectively, for 1 United States Dollar ("USD").

d. Sharia guarantee contract

The contract used for sharia guarantee contract is kafalah.

Kafalah fees

Kafalah fees from guarantee are accounted for, net of any discounts, in accordance with the terms of contracts.

Unearned kafalah fees represent portion of the kafalah fee written relating to the unexpired terms of coverage guarantee.

Unearned kafalah fees are determined and calculated based on net kafalah fees in proportion to the number of days until the kafalah certificate expires (daily proportion).

Increase/(decrease) in unearned kafalah fees represent the difference between the balance of unearned kafalah fees for current and prior period.

Presentation of kafalah fees in the profit or loss statement represents gross fees.

Re-guarantee ujrah income

Re-guarantee ujrah income is ujrah receipt from re-guarantee partner with certain percentage of premium paid to re-guarantee partner.

Re-guarantee ujrah is recorded as unearned revenue and amortised over the period of the guarantee.

If there is an accelerated repayment or there is a claim of the guarantee receivables, the amount of kafalah fees and deferred re-guarantee ujrah income are entirely recognised to profit or loss for the current year.

Kafalah administrative service income

Kafalah administrative service income is fully recognised when kafalah certificates ("SK") was issued.

Ujrah expenses

Ujrah given to agents and recipient of the guarantee related to insurance coverage. Ujrah expenses is expressed as a certain percentage of the IJK. Ujrah expenses is recorded as prepaid expenses and amortised over the guarantee period.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Akad penjaminan syariah (lanjutan)

Premi penjaminan ulang

Premi penjaminan ulang merupakan beban atas premi yang dibayarkan kepada mitra penjaminan ulang guna mengalihkan risiko klaim. Besaran premi penjaminan ulang yang menjadi hak mitra penjaminan ulang ditentukan berdasarkan jenis produk penjaminan.

Premi penjaminan ulang dicatat sebagai aset penjaminan ulang dan diamortisasi sesuai dengan periode penjaminan ulang.

Klaim

Estimasi klaim adalah jumlah yang menjadi tanggungan Perusahaan sehubungan dengan klaim yang masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. Disajikan dalam laporan posisi keuangan berdasarkan penelaahan secara teknis asuransi.

Klaim meliputi klaim disetujui (*settled claims*), klaim dalam proses penyelesaian, termasuk estimasi atas klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan ("IBNR") dan beban penyelesaian klaim. Klaim tersebut diakui sebagai beban pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim. Bagian klaim yang diperoleh dari reasuradur diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

Penyajian beban klaim dalam laporan laba rugi menunjukkan jumlah klaim bruto, klaim penjaminan ulang, dan kenaikan/penurunan estimasi klaim. Klaim penjaminan ulang disajikan sebagai pengurang klaim bruto.

Cadangan atas estimasi klaim bruto dibuat berdasarkan taksiran beban klaim yang akan dibayar sesuai dengan klaim yang diterima Perusahaan sampai dengan tanggal laporan. Pemulihan klaim dari reasuradur untuk cadangan atas estimasi klaim bruto dicatat sebagai estimasi klaim penjaminan ulang pada aset penjaminan ulang.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Sharia guarantee contract *(continued)*

Re-guarantee premiums

Re-guarantee premiums are premium expenses paid to re-guarantee company to transfer the claim risk. Amount of re-guarantee premium is defined based on type of product guarantee.

Re-guarantee premiums are recorded as re-guarantee asset and amortised over the period of re-guarantee.

Claims

Estimated claims represent outstanding claims and the Company's estimate of claims already incurred but not yet reported. This account is stated in the statement of financial position based on the insurance technical review.

Claims consist of settled claims, outstanding claims including claims incurred but not yet reported ("IBNR") and claim settlement expenses. Claims are recognised as expenses when incurred. Re-guarantee claims received from re-guarantee companies are recognised as deduction from claim expenses in the same period as the recognition of claim expenses. Subrogated rights are recognised as deduction from claim expenses upon realisation.

Claim expenses in the statement of profitr or loss represent gross claims, re-guarantee claims and increase/decrease in estimated claims. Re-guarantee claims are presented as deduction from gross claims.

Provision for estimated gross claims is made for the full estimated costs of claims to be paid in respect of claims notified to the Company until the date of the reporting period. Reinsurance recoveries of the provision for estimated gross claims is recorded as estimated re-guarantee claims in re-guarantee assets.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Akad penjaminan syariah (lanjutan)

Klaim (lanjutan)

Perusahaan menetapkan cadangan berdasarkan lini usaha ("LoB"). Ada dua kategori cadangan: cadangan untuk klaim yang sudah dilaporkan dan cadangan untuk klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan ("IBNR").

Cadangan Perusahaan untuk klaim yang sudah dilaporkan adalah berdasarkan pada estimasi pembayaran di masa mendatang untuk menyelesaikan klaim yang sudah dilaporkan. Perusahaan membuat estimasi tersebut berdasarkan pada fakta-fakta yang tersedia pada saat cadangan ditetapkan.

Perusahaan membentuk cadangan IBNR dengan menggunakan metode triangulasi dan metode gabungan (seperti *Bornhuetter-Ferguson*), termasuk asumsi tingkat diskonto, rasio klaim, dan rasio biaya.

Perubahan jumlah estimasi liabilitas klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan.

Piutang penjaminan ulang

Piutang penjaminan ulang merupakan piutang atas pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan mitra penjaminan ulang.

e. Kas dan setara kas

Kas dan kas di bank mencakup kas dan kas di bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak digunakan sebagai jaminan.

f. Investasi

Deposito berjangka

Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal. Deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan dicatat sebagai investasi.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Sharia guarantee contract *(continued)*

Claims (continued)

Company establishes its reserves by line of business ("LoB"). There are two categories of reserve: reserves for reported losses and reserves for incurred but not yet reported ("IBNR") losses.

Company's reserves for reported losses are based on estimates of future payments to settle reported claims. The Company bases such estimates on the facts available at the time the reserves are established.

The Company establishes IBNR reserves using triangulation method and hybrid methods (such as Bornhuetter-Ferguson), include discount rate assumptions, claim ratio, and expense ratio.

Changes in the amount of estimated total claim liabilities as a result of further review and differences between estimated claims and claims paid are recognised in the profit or loss in the period when the changes occur.

Re-guarantee receivables

Re-guarantee receivables represent receivables for the payment of claims to the recipient of the guarantee which is the responsibility of the re-guarantee partner.

e. Cash and cash equivalents

Cash on hand and cash in banks include cash on hand and cash in banks which are not restricted and not pledged as collaterals for borrowings.

f. Investments

Time deposits

Time deposits are stated at nominal value. Time deposits with period more than three months are recorded as investments.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Investasi (lanjutan)

Investasi pada efek-efek

Efek-efek adalah investasi pada efek-efek yang terdiri dari sukuk. Efek-efek diklasifikasikan atas dasar tujuan investasi atau intensi dari manajemen.

Surat Berharga Syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain Surat Berharga Syariah Negara dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Investasi pada surat berharga, khususnya sukuk, diklasifikasikan berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Unit Syariah berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK No. 110 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1) Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

2) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

3) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Investments *(continued)*

Investments in marketable securities

Marketable securities are investments in securities which consist of sukuk. Securities are classified on the basis of investment objectives or management's intentions.

Sharia Securities are proof of investment based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including Goverment Islamic Securities and other securities following sharia principles.

Investment in marketable securities, specifically sukuk, are classified based on business model defined by Sharia Unit in accordance with SFAS No. 110 on "Accounting for Sukuk" as follows:

1) At cost securities are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity.

2) At fair value securities are stated at fair value through profit or loss. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year statement of profit or loss.

3) At fair value through other comprehensive income securities are stated at fair value. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year other comprehensive income.

Determination of fair value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Investasi (lanjutan)

Penentuan nilai wajar (lanjutan)

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar investasi dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut.

Investasi dianggap memiliki kuotasi pasar aktif, jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

Nilai wajar untuk investasi yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan menggunakan harga yang dipublikasikan secara rutin dan berasal dari sumber yang terpercaya, seperti harga kuotasi di Bursa Efek dan IBPA ("*Indonesia Bond Pricing Agency*").

Untuk investasi yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar terkini investasi lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas estimasian terhadap aset bersih investasi tersebut.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa investasi mengalami penurunan nilai. Investasi diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa (atau peristiwa-peristiwa) yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas investasi yang dapat diestimasi secara andal.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Investments *(continued)*

Determination of fair value *(continued)*

When available, the Company measures the fair value of investments using the quoted price in an active market for that instrument.

Investment is regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid-offer spread or significant increase in the bid-offer spread or there are few recent transactions.

The fair value of investment traded in active markets is determined based on quoted market prices at the statement of financial position date, from credible sources. This includes quoted market price in Stock Exchange and IBPA ("Indonesia Bond Pricing Agency").

For investment with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another investment which substantially has the same characteristic or is calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset of the investment.

Impairment of investments

The Company assesses at each statement of financial position date whether there is objective evidence that investment is impaired. Impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occured after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the investment that can be reliably estimated.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Investasi (lanjutan)

Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun penyisihan penurunan nilai. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan investasi dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset tersebut berakhir, atau ketika investasi tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Perusahaan melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan).

g. Piutang lain-lain

Piutang dinyatakan sebesar jumlah nilai nominal setelah dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu. Penyisihan piutang ragu-ragu dibentuk berdasarkan penelaahan terhadap keadaan masing-masing akun. Apabila terdapat piutang yang benar-benar tidak tertagih, maka piutang tersebut dihapuskan dan dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

h. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Aset tetap - bersih

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi. Biaya akuisisi meliputi semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan aset tersebut. Aset tetap didepresiasi menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat ekonomis dari aset tetap tersebut sebagai berikut:

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Investments *(continued)*

Impairment of investments *(continued)*

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised (such as an improvement in the debtor's credit rating), the previously recognised impairment loss is reversed by adjusting the impairment provision account. The amount of the reversal is recognised in statement of profit or loss and other comprehensive income.

Derecognition

Investmentas are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (that is, if substantially all the risks and rewards have not been transferred, Company evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition).

g. Other receivables

Receivables are stated at their nominal value net of allowance for impairment losses. Allowance for impairment losses is estimated based on a review of the status of the individual receivables accounts. Uncollectible receivables, if any, will be written-off and charged to the current year's profit or loss.

h. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortised over the periods of benefit using the straight-line method.

i. Fixed assets - net

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Acquisition cost covers expenditures that is directly attributable to the acquisitions of the assets. Fixed assets are depreciated using the straight-line method over the estimated useful life of the assets as follows:

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Aset tetap - bersih (lanjutan)

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi. Biaya akuisisi meliputi semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan aset tersebut. Aset tetap didepresiasi menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat ekonomis dari aset tetap tersebut sebagai berikut: (lanjutan)

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

i. Fixed assets - net *(continued)*

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Acquisition cost covers expenditures that is directly attributable to the acquisitions of the assets. Fixed assets are depreciated using the straight-line method over the estimated useful life of the assets as follows: (continued)

	Tahun/*Years*	
Gedung	20-30	*Buildings*
Perlengkapan kantor	5	*Office equipments*
Kendaraan bermotor	5	*Vehicles*
Perlengkapan lainnya	5	*Other equipments*

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke laporan laba rugi di periode yang sama pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset dikapitalisasi dan didepresiasi.

Repair and maintenance expenses are charged to the statement of profit or loss during the financial period in which they are incurred. Expenditure which extends the useful life of the assets or provides further economic benefits are capitalised and depreciated.

Apabila aset tetap dihentikan penggunaannya atau dijual, harga perolehan dan akumulasi depresiasi yang terkait dengan aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya dari laporan keuangan dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements and any resulting gains or losses are recognised in the statement of profit or loss.

Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, dengan menggunakan nilai tertinggi antara harga jual neto dengan nilai pakai.

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount, which is determined based on the higher of net selling price or value in use.

Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi selesai. Depresiasi mulai dibebankan pada tanggal yang sama.

The accumulated costs of the construction of fixed assets are capitalised as construction in progress. These costs are reclassified to the fixed assets accounts when the construction is completed. Depreciation is charged from such date.

j. Zakat dan dana kebajikan

Zakat menurut istilah *syara* (hukum Islam) adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *syara*.

Perusahaan tidak mengakui penerimaan pendapatan yang berasal dari denda dan penerimaan non-halal lainnya. Pendapatan yang diperoleh dari denda dan penerimaan non-halal lainnya dialokasikan untuk dana kebajikan dan dicatat sebagai liabilitas Perusahaan.

j. Zakat and* qardhul hasan *funds

Zakat according to syara *(the Islamic law) means expending an amount of certain posession by giving to people, who have rights to accept under terms determined by* syara.

The Company does not recognise income from fines and other non-halal income. Income received from fines and other non-halal income are allocated for qardhul hasan funds and recognised as liabilities of the Company.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Beban usaha

Beban usaha dan beban lain-lain diakui sesuai masa manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (*accrual basis*).

l. Liabilitas imbalan kerja

Perusahaan diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam UU No. 13/2003, yang merupakan liabilitas imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan UU No. 13/2003 lebih besar, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun. Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program manfaat pasti.

Liabilitas imbalan pensiun merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal posisi keuangan dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang dimana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial (pengukuran kembali) dikreditkan atau dibebankan seluruhnya di ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Biaya pemutusan kontrak kerja dan keuntungan/kerugian kurtailmen diakui pada periode di saat Perusahaan menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program.

m. Perpajakan

Beban pajak terdiri atas pajak kini dan tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

k. Operating expense

Operating and other expenses are recognised according to beneficial period in the current year (accrual basis).

l. Employee benefits liabilities

The Company is required to provide minimum pension benefits as stipulated in the Law No. 13/2003 which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits based on Law No. 13/2003 are higher, the difference is recorded as part of the overall pension benefits obligation. Since the Labor Law sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Labor Law represents defined benefit plans.

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at the financial position date, together with adjustments for unrecognised actuarial gains or losses and past service costs. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds that are denominated in Rupiah in which the benefits will be paid, and that have terms of maturity similar to the related pension liability.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions (remeasurement) are credited or charged to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Termination costs and curtailment gain or loss are recognised in the period when the Company are demonstrably committed to make a material reduction in the number of employees covered by a plan.

m. Taxation

The tax expense comprise current and deferred tax. Tax is recognised in the statement of profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Perpajakan (lanjutan)

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen mengevaluasi secara periodik implementasi terhadap peraturan perpajakan yang berlaku terutama yang memerlukan interpretasi lebih lanjut mengenai pelaksanaannya termasuk juga evaluasi terhadap surat ketetapan pajak yang diterima dari kantor pajak. Lebih lanjut, manajemen membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Akumulasi pajak yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara bersih.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

m. Taxation *(continued)*

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. The Management periodically evaluates the implementation of prevailing tax regulations especially those that are subject to further interpretation on its implementation, including evaluation on tax assessment letters received from tax authorities. Furthermore, where appropriate, management establishes provisions based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Accumulated tax loss carry forward is recognised as a deferred tax asset when it is probable that there will be future taxable profit available against which the unused tax losses can be utilised.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Perpajakan (lanjutan)

Koreksi atas liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, apabila diajukan keberatan dan/atau banding, maka koreksi diakui pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding tersebut diterima. Manajemen juga dapat membentuk provisi terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan provisi tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

n. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan yang memenuhi persyaratan berikut:

1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
   ii. memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
   iii. merupakan personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk dari Perusahaan.

2) Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. entitas dan Perusahaan adalah anggota dari grup yang sama;
   ii. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu grup yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

m. Taxation *(continued)*

Corrections to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined. Management provides provision for future tax liability at the amount that will be payable to the tax office on probable tax exposure, based on assessment as at the date of statement of financial position. Assumptions and estimations used in the provision calculations may involve element of uncertainty.

n. Transactions with related parties

The Company enters into transactions with related parties as defined in SFAS 7 (Revised 2015) "Related Party Disclosures". The nature of transactions and balance of accounts with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

A related party is an individual or entity related with the Company that meets the following requirements:

1) A person or a close member of that person's family is related to the Company *if that person:*
   i. has control or joint control over the Company;
   ii. has significant influence over the Company; or
   iii. is a member of the key management personnel of the Company or parent entity of the Company.

2) An entity is related to the Company if any of the following conditions applies:
   i. the entity and the Company are members of the same group;
   ii. one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
   iii. both entities are joint ventures of the same third party;

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan yang memenuhi persyaratan berikut: (lanjutan)

2) Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)
   iv. suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan. Jika Perusahaan adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut. maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perusahaan;
   vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oteh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Definisi pihak-pihak berelasi untuk Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah yang memiliki pengendalian, atau pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan, atas entitas pelapor; dan
b. entitas lain yang merupakan pihak berelasi karena dikendalikan atau dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah yang sama atas entitas pelapor dan entitas lain tersebut.

Pemerintah yang dimaksud oleh Perusahaan sebagai pihak berelasi adalah Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan Milik Negara yang dimiliki langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan anak perusahaan namun tidak termasuk Perusahaan Milik Pemerintah Daerah.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 33.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

n. Transactions with related parties *(continued)*

A related party is an individual or entity related with the Company that meets the following requirements: (continued)

2) An entity is related to the Company if any of the following conditions applies: (continued)

iv. one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;

v. the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the Company or an entity related to the Company. If the Company is itself such a plan. the sponsoring employers are also related to the Company;

vi. the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); or person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

The definition of related parties for the Company is as follows:

a. The Government that has control of, or joint control, or significant influence over, the reporting entity; and

b. other entity that is a related party because it is controlled or jointly controlled, or is significantly influenced by the same government over the reporting entity and the other entity.

The Government referred to by the Company as a related party is the Government of the Republic of Indonesia and State-Owned Companies which are directly owned by the Government of Indonesia and their subsidiaries but do not include Local Government-Owned Companies.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 33.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Transaksi sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Perusahaan dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

- sewa jangka-pendek; dan
- sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan harus menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan

- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
  1. Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
  2. Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima dan didiskontokan menggunakan suku bunga inkremental penyewa pada tanggal penerapan awal.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

o. Leases

At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is or contains a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration. The Company can choose not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for:

- *short term lease; and*
- *low value asset*

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company shall assess whether:

- *The Company has the right to obtain substantially all the economic benefit from use of the asset throughout the period of use; and*

- *The Company has the right to direct the use of the asset. The Company has described when it has a decision-making right that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:*
  1. *The Company has the right to operate the asset;*
  2. *The Company has designed the asset in a way that predetermine how and for what purpose it will be used.*

The Company recognises a right-of-use asset and a leases liability at the leases commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the leases liability adjusted for any leases payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and the estimated costs that will be incurred to dismantle and transfer the underlying asset or to restore the underlying asset to the required and lease conditions, less any rental incentives received and discounted at the lessee's incremental interest rate at the initial application date.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Transaksi sewa (lanjutan)

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap tahun.

Perusahaan menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari aset tetap dan liabilitas sewa sebagai bagian dari liabilitas lain-lain di dalam laporan posisi keuangan.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Modifikasi sewa

Perusahaan mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- Modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih;
- Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

o. Leases *(continued)*

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that right cannot be readily determined, using incremental borrowing rate.

In general, the Company uses the incremental loan interest rate as the discount rate.

Leases payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the leases period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Company presents right-of-use assets as part of fixed assets and leases liabilities as part of other liabilities in the statement of financial position.

If the leases transfers ownership of the underlying asset to the Company by the end of the leases term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Company will exercise a purchase option, the Company depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Company depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the leases term.

Lease modification

The Company account for a lease modification as a separate lease if both:

- *The modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets;*
- *The consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Keuangan adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

a. Estimasi klaim

Estimasi klaim dicatat di laporan posisi keuangan berdasarkan perhitungan aktuaris dengan menggunakan asumsi aktuarial.

b. Aset penjaminan ulang

Aset yang timbul dari kontrak penjaminan ulang juga dihitung dengan menggunakan metode di atas. Selain itu, pemulihan aset ini dinilai secara periodik untuk memastikan bahwa jumlahnya mencerminkan jumlah yang pada akhirnya akan diterima, mempertimbangkan faktor-faktor seperti *counterparty* dan risiko kredit. Penurunan nilai diakui di mana terdapat bukti objektif bahwa Perusahaan tidak dapat menerima jumlah yang terhutang untuk itu dan jumlah ini dapat diukur secara andal.

c. Liabilitas imbalan kerja

Liabilitas imbalan kerja ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuarial. Perhitungan aktuaria mengunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements where require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amount of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with Financial Accounting Standard are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experience and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

a. Estimated claims

Estimated claims are stated in the statement of financial position in accordance with the actuarial calculation based on certain actuarial assumptions.

b. Re-guarantee assets

Assets arising from re-guarantee contracts are also computed using the above methods. In addition, the recoverability of these assets are assessed on a periodic basis to ensure that the balance is reflective of the amounts that will ultimately be received, taking into consideration factors such as counterparty and credit risk. Impairment is recognised where there is objective evidence that the Company may not receive amounts due to it and these amounts can be reliably measured.

c. Employee benefits liabilities

Employee benefits liabilities are determined based on actuarial valuation. The actuary valuation involves making assumptions about discount rate, expected rate of return on investments, future salary increases, mortality rate, resignation rate and others.

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	2021	2020	
Kas	1,213	836	***Cash on hand***
Kas di bank			***Cash in bank***
Rupiah			***Rupiah***
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	13,433	8,730	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Jabar Banten Syariah	10,475	127	*PT Bank Jabar Banten Syariah*
PT BPD Jawa Tengah, Unit Syariah	3,854	289	*PT BPD Jawa Tengah, Sharia Unit*
PT Bank Syariah Bukopin	1,663	1,348	*PT Bank Syariah Bukopin*
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Unit Syariah	1,546	745	*PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Sharia Unit*
PT BPD Kalimantan Barat, Unit Syariah	1,205	711	*PT BPD Kalimantan Barat, Sharia Unit*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	992	322	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	604	22	*PT Bank Rakyat IndonesiaTbk*
PT BPD Lampung	573	147	*PT BPD Lampung*
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Unit Syariah	519	362	*PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Sharia Unit*
PT Bank BTPN Syariah	507	75	*PT Bank BTPN Syariah*
PT Bank Mega Syariah	486	1	*PT Bank Mega Syariah*
BPRS HIK Parahyangan	262	-	*BPRS HIK Parahyangan*
PT Bank NTB Syariah	223	124	*PT Bank NTB Syariah*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Unit Syariah	190	180	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Sharia Unit*
PT Bank KB Bukopin	135	124	*PT Bank KB Bukopin*
PT Bank BPD Sulselbar	125	-	*PT Bank BPD Sulselbar*
PT Bank Aceh Syariah	122	171	*PT Bank Aceh Syariah*
PT Bank BPRS Dinar Ashri	110	-	*PT Bank BPRS Dinar Ashri*
PT BPD Jawa Timur Tbk, Unit Syariah	106	171	*PT Bank Jawa Timur, Sharia Unit*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	106	120	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
PT BPD Sumatera Utara Unit Syariah	39	157	*PT BPD Sumatera Utara, Sharia Unit*
PT BPRS Amanah Bangsa	12	307	*PT BPRS Amanah Bangsa*
Lain-lain	389	199	*Others*
	37,676	14,432	
Deposito			***Time deposits***
Rupiah			***Rupiah***
PT Bank Mega Syariah	157,600	-	*PT Bank Mega Syariah*
PT Bank BTPN Syariah Tbk	117,510	53,710	*PT Bank BTPN Syariah Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	65,015	115,213	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Unit Syariah	63,625	12,575	*PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Sharia Unit*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	60,000	100	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
PT Bank NTB Syariah	44,600	62,500	*PT Bank NTB Syariah*
PT BPD Jawa Tengah, Unit Syariah	38,900	26,500	*PT BPD Jawa Tengah, Sharia Unit*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Unit Syariah	28,224	63,894	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Sharia Unit*
PT Bank Aceh Syariah	16,551	20,259	*PT Bank Aceh Syariah*
PT BPD Kalimantan Selatan, Unit Syariah	11,950	10,725	*PT BPD Kalimantan Selatan, Sharia Unit*
PT Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Unit Syariah	9,500	9,100	*PT Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Sharia Unit*
PT BPD Sumatera Utara, Unit Syariah	6,330	11,750	*PT BPD Sumatera Utara, Sharia Unit*
PT BPD Jawa Timur Tbk, Unit Syariah	5,305	5,205	*PT BPD Jawa Timur Tbk, Sharia Unit*
PT Bank Jabar Banten Syariah	5,300	13,650	*PT Bank Jabar Banten Syariah*
PT BPD Kalimantan Barat, Unit Syariah	5,050	5,850	*PT BPD Kalimantan Barat, Sharia Unit*
PT Bank Syariah Bukopin	4,700	11,150	*PT Bank Syariah Bukopin*
PT BPRS Artha Madani	2,150	2,150	*PT BPRS Artha Madani*
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Syariah	2,050	2,350	*PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Sharia Unit*
Dipindahkan	644,360	426,681	*Carried forward*

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)*

Deposito (lanjutan) / ***Time deposits*** (continued)

	2021	2020	
Dipindahkan	644,360	426,681	*Carried forward*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1,000	1,000	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, Unit Syariah	500	500	*PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, Sharia Unit*
PT Bank BPRS Dinar Ashri	400	-	*PT Bank BPRS Dinar Ashri*
PT BPRS Amanah Bangsa	200	450	*PT BPRS Amanah Bangsa*
	646,460	428,631	
	685,349	443,899	

5. INVESTASI / *5. INVESTMENTS*

	2021	2020	
Sukuk	262,270	171,320	*Sukuk*
Sukuk			***Sukuk***
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			***Fair value through other comprehensive income***
SBSN seri PBS028	99,838	72,125	*SBSN seri PBS028*
SBSN seri PBS032	55,316	-	*SBSN seri PBS032*
SBSN seri PBS029	50,792	-	*SBSN seri PBS029*
SBSN seri PBS015	29,762	30,148	*SBSN seri PBS015*
SBSN seri PBS021	14,156	14,226	*SBSN seri PBS021*
SBSN seri PBS011	5,386	5,511	*SBSN seri PBS011*
SBSN seri PBS023	4,654	4,795	*SBSN seri PBS023*
SBSN seri PBS019	2,366	2,403	*SBSN seri PBS019*
SBSN seri PBS022	-	21,748	*SBSN seri PBS022*
SBSN seri PBS012	-	20,364	*SBSN seri PBS012*
	262,270	171,320	

6. KAS DI BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA / *6. RESTRICTED CASH IN BANKS*

	2021	2020	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	567,639	269,639	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Unit Syariah	73,094	73,094	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Sharia Unit*
PT Bank BTPN Syariah Tbk	30,000	30,000	*PT Bank BTPN Syariah Tbk*
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Unit Syariah	20,500	17,800	*PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Sharia Unit*
PT BPD Kalimantan Barat, Unit Syariah	17,400	17,400	*PT BPD Kalimantan Barat, Sharia Unit*
PT Bank Jabar Banten Syariah	-	10,000	*PT Bank Jabar Banten Syariah*
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Unit Syariah	1,500	1,500	*PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Sharia Unit*
	710,133	419,433	

Kas di bank yang dibatasi penggunaannya adalah deposito berjangka yang dimiliki Perusahaan tetapi dibatasi penggunaannya sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan mitra bank.

Restricted cash in banks are time deposits owned by the Company but are restricted in accordance with an agreement with the bank partners.

7. PIUTANG IMBAL JASA KAFALAH

7. KAFALAH FEE RECEIVABLES

Piutang imbal jasa kafalah terdiri atas jumlah yang terhutang kepada Perusahaan oleh pemegang sertifikat penjaminan, Pemerintah Republik Indonesia (program PEN), atau agen-agen.

Kafalah fee receivables consist of amounts of owed to the Company by the guarantee certificate holder, Government of Indonesia, or agents.

	2021	2020	
Pihak berelasi	73,525	33,047	*Related parties*
Pihak ketiga	32,979	4,276	*Third parties*
	106,504	37,323	

Direksi berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai piutang imbal jasa kafalah pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

The Directors believe that there is no impairment of kafalah fee receivables as of 31 December 2021 and 2020.

Lihat Catatan 33 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 33 for details of related parties balance and transactions.

8. PIUTANG PENJAMINAN ULANG

8. RE-GUARANTEE RECEIVABLES

	2021	2020	
Pihak ketiga	48,161	36,684	*Third parties*

Direksi berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai piutang penjaminan ulang pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

The Directors believe that there is no impairment of re-guarantee receivables as of 31 December 2021 and 2020.

Lihat Catatan 33 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 33 for details of related parties balance and transactions.

9. PIUTANG HASIL INVESTASI

9. INVESTMENT INCOME RECEIVABLES

	2021	2020	
Sukuk	4,631	2,689	*Sukuk*
Deposito berjangka	1,072	1,046	*Time deposits*
	5,703	3,735	

10. ASET PENJAMINAN ULANG

10. RE-GUARANTEE ASSETS

	2021	2020	
Imbal jasa kafalah ditangguhkan	306,101	222,429	*Unearned kafaah fees*
Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	98,914	75,421	*Claims incurred but not yet reported*
Klaim dalam proses	21,186	10,607	*Claims in process*
	426,201	308,457	

Direksi berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset penjaminan ulang pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

The Directors believe that there is no impairment of re-guarantee assets as of 31 December 2021 and 2020.

11. BIAYA AKUISISI DITANGGUHKAN / *11. DEFERRED ACQUISITION COSTS*

	2021	2020	
Kontra bank garansi	9,397	7,283	*Contra bank guarantee*
FLPP	13,457	3,205	*FLPP*
Multiguna	61,935	60,987	*Multipurpose*
Bond	1,427	1,222	*Bond*
Umum dan konstruksi	1,867	1,955	*General and construction*
Mikro	930	1,472	*Micro*
	89,013	76,124	

12. ASET TETAP - BERSIH / *12. FIXED ASSETS - NET*

Aset tetap terdiri dari: / *Fixed assets consist of:*

	2021	2020	
Kepemilikan langsung	62,230	53,921	*Direct ownership*
Aset hak-guna	6,213	5,631	*Right-of-use assets*
	68,443	59,552	

	2021					
	1 Januari/ *January 2021*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	31 Desember/ *December 2021*	
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Biaya perolehan						***Acquisition costs***
Tanah	35,493	-	-	-	35,493	*Land*
Gedung	11,811	5,255	-	-	17,066	*Buildings*
Perlengkapan kantor	10,126	4,904	-	300	15,330	*Office equipments*
Kendaraan bermotor	856	37	-	-	893	*Motor vehicles*
Perlengkapan lainnya	7	-	-	-	7	*Other equipments*
Aset dalam penyelesaian	300	-	-	(300)	-	*Assets in progress*
	58,593	10,196	-	-	68,789	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Perlengkapan kantor	(4,105)	(1,741)	-	-	(5,846)	*Office equipments*
Kendaraan bermotor	(566)	(146)	-	-	(712)	*Motor vehicles*
Perlengkapan lainnya	(1)	-	-	-	(1)	*Other equipments*
	(4,672)	(1,887)	-	-	(6,559)	
Nilai buku bersih	53,921				62,230	***Net book value***

	2021				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Aset hak-guna					***Right-of-use assets***
Biaya perolehan					***Acquisition costs***
Gedung	4,548	730	-	5,278	*Buildings*
Kendaraan bermotor	3,302	4,174	(272)	7,204	*Motor vehicles*
	7,850	4,904	(272)	12,482	
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Gedung	(1,248)	(1,299)	-	(2,547)	*Buildings*
Kendaraan bermotor	(971)	(2,799)	48	(3,722)	*Motor vehicles*
	(2,219)	(4,098)	48	(6,269)	
Nilai buku bersih	5,631	806	(224)	6,213	***Net book value***

12. ASET TETAP - BERSIH (lanjutan) / *12. FIXED ASSETS - NET (continued)*

	2020				
	1 Januari/ *January 2020*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	31 Desember/ *December 2020*	
Kepemilikan langsung					***Direct ownership***
Biaya perolehan					***Acquisition costs***
Tanah	-	35,493	-	35,493	*Land*
Gedung	-	11,811	-	11,811	*Buildings*
Perlengkapan kantor	5,746	4,380	-	10,126	*Office equipments*
Kendaraan bermotor	716	140	-	856	*Motor vehicles*
Perlengkapan lainnya	7	-	-	7	*Other equipments*
Aset dalam Penyelesaian	-	300	-	300	*Assets in progress*
	6,469	52,124	-	58,593	
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Perlengkapan kantor	(3,044)	(1,061)	-	(4,105)	*Office equipments*
Kendaraan bermotor	(404)	(162)	-	(566)	*Motor vehicles*
Perlengkapan lainnya	(1)	-	-	(1)	*Other equipments*
	(3,449)	(1,223)	-	(4,672)	
Nilai buku bersih	3,020			53,921	***Net book value***

	2020						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dampak PSAK 73/ *Impact of SFAS 73*	Saldo awal yang disesuaikan/ *Adjusted beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Aset hak-guna							***Right-of-use assets***
Biaya perolehan							***Acquisition costs***
Gedung	-	4,283	4,283	265	-	4,548	*Buildings*
Kendaraan bermotor	-	1,284	1,284	2,018	-	3,302	*Motor vehicles*
	-	5,567	5,567	2,283	-	7,850	
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Gedung	-	(103)	(103)	(1,145)	-	(1,248)	*Buildings*
Kendaraan bermotor	-	(41)	(41)	(930)	-	(971)	*Motor vehicles*
	-	(144)	(144)	(2,075)	-	(2,219)	
Nilai buku bersih	-	5,423	5,423	208	-	5,631	***Net book value***

Jumlah pengeluaran kas untuk sewa selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp 3.372 dan Rp 4.138.

The total cash outflow for leases for the period ended 31 December 2021 and 2020 were Rp 3,272 and Rp 4,138.

Seluruh aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya. Direksi berpendapat bahwa jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

All fixed assets were insured against fire, theft and other possible risk. The Directors believe that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Berdasarkan evaluasi Direksi, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Based on the Directors' evaluation, there have been no events or changes in circumstances which may indicate impairment in value of fixed assets as at 31 December 2021 and 2020.

13. PERPAJAKAN / *13. TAXATION*

a. Utang pajak lainnya / *a. Tax payables*

	2021	2020	
Pajak penghasilan badan:			***Corporate income tax:***
Tahun 2018	-	2,118	*Year 2018*
Tahun 2019	-	518	*Year 2019*
Tahun 2020	-	6,286	*Year 2020*
Tahun 2021	60,623	-	*Year 2021*
	60,623	8,922	
Pajak lainnya:			***Other taxes:***
Pasal 21	1,397	508	*Article 21*
Pasal 23	137	83	*Article 23*
Pasal 4(2)	116	16	*Article 4(2)*
	1,650	607	
	62,273	9,529	

b. (Beban)/manfaat pajak penghasilan / *b. Income tax (expenses)/benefit*

	2021	2020	
Kini	(65,338)	(6,286)	*Current*
Tangguhan	26,756	1,959	*Deferred*
	(38,582)	(4,327)	

Rekonsiliasi antara beban pajak Perusahaan dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak Perusahaan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the Company's total tax expenses and the amounts computed by applying the statutory tax rates to the Company's income before tax are as follows:

	2021	2020	
Laba sebelum pajak penghasilan	206,739	49,464	*Profit before income tax*
Pajak dihitung menggunakan tarif pajak yang berlaku	45,483	10,882	*Tax calculated with applicable tax rate*
Perbedaan permanen:			*Permanent difference:*
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(12,571)	(12,528)	*Income subject to final tax*
Biaya yang tidak diperkenankan	5,670	4,168	*Non-deductible expenses*
Lain-lain	(31,681)	5,837	*Others*
Penyesuaian tarif pajak	-	(1,804)	*Adjustment on tax rate*
Beban pajak penghasilan	(38,582)	(4,327)	*Income tax expense*

13. PERPAJAKAN (lanjutan) / *13. TAXATION (continued)*

b. (Beban)/manfaat pajak penghasilan (lanjutan) / *b. Income tax (expenses)/benefit (continued)*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan dengan rugi pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliations between the Company's profit before income tax and the taxable loss are as follows:

	2021	2020	
Laba sebelum pajak penghasilan	206,739	49,464	*Profit before income tax*
Beda tetap:			***Permanent differences:***
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(57,141)	(56,944)	*Income subject to final tax*
Beban pajak final	10,331	10,423	*Final tax expenses*
Biaya yang tidak diperkenankan	15,443	8,523	*Non-deductible expenses*
	(31,367)	(37,998)	
Beda waktu:			***Timing differences:***
Depresiasi aset tetap	308	(478)	*Fixed asset depreciation*
Estimasi klaim	117,733	12,912	*Estimated claims*
Liabilitas imbalan kerja	1,727	1,225	*Employee benefit liabilities*
Cadangan bonus	1,850	3,448	*Provision for bonus*
	121,618	17,107	
Penghasilan kena pajak	296,990	28,573	*Taxable income*
Beban pajak penghasilan	65,338	6,286	*Income tax expenses*
Dikurangi:			*Less:*
Pajak penghasilan dibayar dimuka	(4,715)	-	*Prepaid income tax*
Pajak penghasilan kurang bayar	60,623	6,286	*Income tax underpayment*

c. Pajak tangguhan / *c. Deferred tax*

Aset dan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Deferred tax assets and liabilities at reporting dates consist of the following:

	2021				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dibebankan/ (dikreditkan) ke laporan laba rugi/ *Charged/(credited) to profit and loss*	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya/ *Credited to other comprehensive income*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Depresiasi aset tetap	(10)	68	-	58	*Fixed asset depreciation*
Estimasi klaim	14,504	25,901	-	40,405	*Estimated claims*
Liabilitas imbalan kerja	791	380	(292)	879	*Employee benefit liabilities*
Nilai wajar surat berharga tersedia untuk dijual	(1,978)	-	270	(1,708)	*Fair value on financial asset available for sale*
Cadangan bonus	2,192	407	-	3,222	*Provision for bonus*
	15,499	26,756	(22)	42,233	

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAXATION (continued)

c. Pajak tangguhan (lanjutan)

c. Deferred tax (continued)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Deferred tax assets and liabilities at reporting dates consist of the following: (continued)

	2020					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dibebankan/ (dikreditkan) ke laporan laba rugi/ *Charged/ (credited) to profit and loss*	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lainnya/ *Credited to other comprehensive income*	Dampak penurunan tarif pajak/ *Impact on changes in tax rate*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Depresiasi aset tetap	108	(105)	-	(13)	(10)	*Fixed asset depreciation*
Estimasi klaim	13,254	2,840	-	(1,590)	14,504	*Estimated claims*
Liabilitas imbalan kerja	496	270	85	(60)	791	*Employee benefit liabilities*
Nilai wajar surat berharga tersedia untuk dijual	(446)	-	(1,586)	54	(1,978)	*Fair value on financial asset available for sale*
Cadangan bonus	1,629	758	-	(195)	2,192	*Provision for bonus*
	15,041	3,763	(1,501)	(1,804)	15,499	

Direksi berkeyakinan bahwa saldo aset pajak tangguhan di atas dapat digunakan di masa yang akan datang.

The Directors believe that the deferred tax assets balance above can be recovered.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020, serta menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dan berlaku sejak tanggal 19 Juni 2020. Aturan tersebut menetapkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dari 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya.

On 31 March 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 which has become Law (UU) No. 2 of 2020, and stipulates Government Regulation (PP) No. 30 of 2020 concerning Reduction of Income Tax Rates for Domestic Corporate Taxpayers in the Form of a Public Company and effective as of 19 June 2020. The regulation stipulates a reduction in the income tax rate of domestic corporate taxpayers from 25% to 22% for the fiscal year 2020 and 2021 and 20% for the Fiscal Year 2022 onwards.

Pada 29 Oktober 2021, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang di dalamnya menetapkan tarif PPh Badan untuk tahun 2022 adalah sebesar 22%, dimana pemerintah membatalkan peraturan sebelumnya yaitu UU No. 2 Tahun 2020 yang menyebutkan tarif PPh Badan sebesar 20%.

On 29 October 2021, the Government has ratified Law No. 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations, which stipulates that the corporate income tax rate for 2022 is 22%, wherein the government canceled the previous regulation, Law No. 2 of 2020 which stated that the corporate income tax rate was 20%.

d. Administrasi

d. Administration

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

14. UTANG PENJAMINAN ULANG / *14. RE-GUARANTEE PAYABLES*

	2021	2020	
Pihak berelasi	55,555	22,727	*Related parties*
Pihak ketiga	-	18,804	*Third parties*
	55,555	41,531	

Lihat Catatan 33 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 33 for details of related parties balance and transactions.

15. IMBAL JASA KAFALAH DITANGGUHKAN / *15. UNEARNED KAFALAH FEES*

	2021			2020			
	Bruto/*Gross*	Aset Penjaminan Ulang/ *Re-guarantee assets*	Bersih/*Net*	Bruto/*Gross*	Aset Penjaminan Ulang/ *Re-guarantee assets*	Bersih/*Net*	
PEN	164,603	(32,306)	132,297	129,668	(44,739)	84,929	*PEN*
Kontra bank garansi	65,431	(28,083)	37,348	36,451	(14,870)	21,581	*Contra bank guarantee*
FLPP	130,147	(39,041)	91,106	20,911	(4,580)	16,331	*FLPP*
KUR	125,420	(29,159)	96,261	71,988	(14,387)	57,601	*KUR*
Multiguna	335,693	(136,566)	199,127	323,100	(124,360)	198,740	*Multipurpose*
Bond	11,489	(4,176)	7,313	6,268	(2,696)	3,572	*Bond*
Umum dan konstruksi	42,568	(25,531)	17,037	13,530	(6,227)	7,303	*General and construction*
Mikro	28,107	(11,239)	16,868	30,883	(10,570)	20,313	*Micro*
	903,458	(306,101)	597,357	632,799	(222,429)	410,370	

16. PENDAPATAN KOMISI DITANGGUHKAN / *16. DEFERRED COMMISSION INCOME*

	2021	2020	
PEN	398	5,436	*PEN*
Kontra bank garansi	5,617	2,973	*Contra bank guarantee*
FLPP	6,191	815	*FLPP*
KUR	5,828	2,860	*KUR*
Multiguna	20,759	20,582	*Multipurpose*
Bond	835	487	*Bond*
Umum dan konstruksi	2,342	941	*General and construction*
Mikro	1,011	1,775	*Micro*
	42,981	35,869	

17. ESTIMASI KLAIM / *17. ESTIMATED CLAIMS*

Cadangan klaim merupakan pembentukan cadangan atas klaim yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun mendatang atas penjaminan yang belum jatuh tempo.

The claim reserves is the reserve of claim that might occur in the coming years onto the guarantee that has not mature yet.

Cadangan klaim dicatat di laporan posisi keuangan berdasarkan perhitungan aktuaris dengan menggunakan asumsi aktuarial. Termasuk dalam cadangan klaim adalah klaim dalam proses dan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (IBNR).

Reserves for claims are recorded in the statement of financial position based on actuarial calculations using actuarial assumptions. Included in the reserves for claims are claims in process and claim incurred but not yet reported (IBNR).

17. ESTIMASI KLAIM (lanjutan)

17. ESTIMATED CLAIMS (continued)

	2021			2020			
	Klaim bruto/ Gross claims	Aset penjaminan ulang/ *Re-guarantee assets*	Estimasi klaim retensi sendiri/ *Estimated own retention claim*	Klaim bruto/ *Gross claims*	Aset penjaminan ulang/ *Re-guarantee assets*	Estimasi klaim retensi sendiri/ *Estimated own retention claim*	
PEN	128,341	(10,742)	117,599	23,493	(5,400)	18,093	*PEN*
Kontra bank garansi	24,822	(24,822)	-	27,712	(19,450)	8,262	*Contra bank guarantee*
FLPP	23,975	(6,831)	17,144	16,156	(4,205)	11,951	*FLPP*
KUR	11,293	(2,877)	8,416	11,134	(2,633)	8,501	*KUR*
Multiguna	48,432	(35,575)	12,857	39,430	(31,726)	7,704	*Multipurpose*
Bond	5,248	(5,248)	-	8,053	(7,126)	927	*Bond*
Umum dan konstruksi	5,755	(2,827)	2,928	8,940	(4,382)	4,558	*General and construction*
Mikro	55,897	(31,178)	24,719	17,039	(11,106)	5,933	*Micro*
	303,763	(120,100)	183,663	151,957	(86,028)	65,929	

Pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk dalam estimasi klaim adalah estimasi klaim yang terjadi namun belum dilaporkan sebesar Rp 154.577 (2020: Rp 48.665).

As at 31 December 2021, included in estimated claims is estimated claims incurred but not yet reported amounting to Rp 154,577 (2020: Rp 48,665).

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA

18. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dihitung oleh aktuaris independen, Kantor Konsultan Aktuaria Nandi dan Sutama, dengan menggunakan metode *"Projected Unit Credit"*.

Perusahaan menunjuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang pendiriannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-084/KM.10/2007 tanggal 23 April 2007. Iuran pensiun yang ditanggung oleh Perusahaan adalah 6%, sedangkan yang ditanggung oleh karyawan adalah 4%, masing-masing dari gaji pokok bulanan karyawan.

Asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

The liability for employee benefits as at 31 December 2021 and 2020 are calculated by an independent actuary, Kantor Konsultan Aktuaria Nandi dan Sutama, using the "Projected Unit Credit" method.

The Company has appointed Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk whose establishment has been approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia based on Decision Letter No. KEP-084/KM.10/2007 dated 23 April 2007. Portion of contributions borne by the Company is 6%, while portion of contributions borne by the employees are 4%, of the employees' gross monthly salaries.

The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	2021		2020		
Asumsi Aktuaria:					***Actuarial Assumption:***
Tingkat diskonto	7.00% & 3.06%		7.00%		*Discount rate*
Tingkat kenaikan upah	8.00%		8.00%		*Salary incremental rate*
Tingkat mortalita	TMI IV 2019		TMI IV 2019		*Mortality rate*
Tingkat cacat	5% of TMI IV 2019		5% of TMI IV 2019		*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri	Usia/*Age*	Tingkat/*Rate*	Usia/*Age*	Tingkat/*Rate*	*Resignation rate*
	20 - 39	5.0%	20 - 39	5.0%	
	40 - 44	3.0%	40 - 44	3.0%	
	45 - 49	2.0%	45 - 49	2.0%	
	50 - 54	1.0%	50 - 54	1.0%	
	> 54	0.0%	> 54	0.0%	
Usia pensiun normal	55 tahun		55 tahun		*Normal retirement age*
Metode penilaian aktuaria	*Projected Unit Credit*		*Projected Unit Credit*		*Actuarial valuation method*

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

18. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Berikut ini adalah hal-hal penting yang diungkapkan dalam laporan aktuaris untuk mengestimasi liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

The following are the key matters disclosed in the actuarial report to estimate employee benefits liabilities as at 31 December 2021 and 2020.

	2021			
	UU No.13/2013	Penghargaan masa kerja/ *Long service reward*	Jumlah/ *Total*	
Nilai kini liabilitas yang didanai	3,007	988	3,995	*Present value of funded obligation*

	2020			
	UU No.13/2013	Penghargaan masa kerja/ *Long service reward*	Jumlah/ *Total*	
Nilai kini liabilitas yang didanai	3,029	565	3,594	*Present value of funded obligation*

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The movements of employee benefits liabilities recognised in the statement of financial position are as follows:

	2021			
	UU No. 13/2003	Penghargaan masa kerja/ *Long services award*	Jumlah/ *Total*	
Pada awal tahun	3,029	565	3,594	*At the beginning of the year*
Jumlah yang dibebankan pada laporan laba rugi	1,304	423	1,727	*Total charged to the profit or loss*
Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	(1,326)	-	(1,326)	*Total amount recognised in other comprehensive income*
	3,007	988	3,995	

	2020			
	UU No. 13/2003	Penghargaan masa kerja/ *Long services award*	Jumlah/ *Total*	
Pada awal tahun	1,677	308	1,985	*At the beginning of the year*
Jumlah yang dibebankan pada laporan laba rugi	968	257	1,225	*Total charged to the profit or loss*
Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	384	-	384	*Total amount recognised in other comprehensive income*
	3,029	565	3,594	

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The amount recognised in profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2021			
	UU No. 13/2003	Penghargaan masa kerja/ *long services award*	Jumlah/ *Total*	
Laporan laba rugi:				***Profit or loss:***
Beban jasa kini	618	237	855	*Current service costs*
Beban jasa lalu	474	-	474	*Past service costs*
Beban bunga	212	39	251	*Interest cost*
Kerugian aktuarial yang diakui	-	147	147	*Recognised actuarial loss*
	1,304	423	1,727	
Penghasilan komprehensif lain:				***Other comprehensive income:***
Keuntungan yang timbul dari perubahan asumsi aktuarial	1,326	-	1,326	*Gain arising from changes in actuarial assumptions*

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

18. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The amount recognised in profit or loss and other comprehensive income are as follows: (continued)

	2020			
	UU No. 13/2003	Penghargaan masa kerja/ *Long services award*	Jumlah/ *Total*	
Laporan laba rugi:				***Profit or loss:***
Beban jasa kini	834	162	996	*Current service costs*
Beban bunga	134	25	159	*Interest cost*
Keuntungan aktuarial yang diakui	-	70	70	*Recognised actuarial gain*
	968	257	1,225	
Penghasilan komprehensif lain:				***Other comprehensive income:***
Kerugian yang timbul dari perubahan asumsi aktuarial	384	-	384	*Loss arising from changes in actuarial assumptions*

Pada tanggal 31 Desember 2021, durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas imbalan kerja adalah 21,17 tahun (2020: 20,78 tahun).

As of 31 December 2021, the weighted average duration of the defined benefits liabilities was 21.17 years (2020: 20.78 years).

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan pada asumsi aktuaria yang relevan, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas imbalan kerja:

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in relevant actuarial assumptions, with all other variables held constant, to the liabilities of employee benefits:

	Dampak terhadap imbalan kerja 31 Desember 2021 / *Impact on employee benefits 31 December 2021*		
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *Present value of benefit obligation*	
Tingkat diskonto	Kenaikan/*Increase* 1%	(525)	*Discount rate*
	Penurunan/*Decrease* 1%	627	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*Increase* 1%	584	*Salary incremental rate*
	Penurunan/*Decrease* 1%	(499)	

	Dampak terhadap imbalan kerja 31 Desember 2020 / *Impact on employee benefits 31 December 2020*		
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *Present value of benefit obligation*	
Tingkat diskonto	Kenaikan/*Increase* 1%	(338)	*Discount rate*
	Penurunan/*Decrease* 1%	403	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*Increase* 1%	378	*Salary incremental rate*
	Penurunan/*Decrease* 1%	(325)	

19. AKRUAL DAN UTANG LAIN-LAIN

19. ACCRUALS AND OTHER PAYABLES

	2021	2020	
Beban yang masih harus dibayar	23,303	12,200	*Accrued expense*
Titipan imbal jasa kafalah	19,973	10,123	*Kafalah fee deposits*
Setoran jaminan	17,080	9,090	*Deposit guarantee*
Utang lain-lain	7,801	6,141	*Other payable*
Liabilitas sewa	5,050	3,712	*Lease liabilities*
Utang komisi agen	578	3,075	*Agent's commission payable*
Lain-lain	114	104	*Others*
	73,899	44,445	

20. MODAL SAHAM

20. SHARE CAPITAL

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as of 31 December 2021 and 2020 are as follows:

	2021			
Pemegang saham	Jumlah saham (nilai penuh) /*Number of shares (full amount)*	Persentase/ *Percentage*	Jumlah/ *Amount*	*Shareholders*
PT Jaminan Kredit Indonesia	1,410,241	99.9290%	705,120	*PT Jaminan Kredit Indonesia*
Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera	1,000	0.0710%	500	*Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera*
	1,411,241	100%	705,620	

	2020			
Pemegang saham	Jumlah saham (nilai penuh) /*Number of shares (full amount)*	Persentase/ *Percentage*	Jumlah/ *Amount*	*Shareholders*
PT Jaminan Kredit Indonesia	1,099,975	99.9977%	549,987	*PT Jaminan Kredit Indonesia*
Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera	25	0.0023%	13	*Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera*
	1,100,000	100%	550,000	

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tanggal 16 September 2021 yang dinotarisasi dengan Akta Notaris Dewantari Handayani, S.H., M.P.A., Nomor 15 tanggal 11 Oktober 2021, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan Perusahaan sebesar 311.241 lembar saham dengan jumlah nominal Rp 155.620. Saham baru sebanyak 311.241 lembar saham ini telah diterbitkan dan dibayar penuh oleh PT Jaminan Kredit Indonesia (310.266 lembar) dan Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera (975 lembar). Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0462802 Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021.

Based on Resolution of Shareholders dated 16 September 2021 which notarised by Notarial Deed of Dewantari Handayarani, S.H., M.P.A., No.15 dated 11 October 2021 the shareholders approved the increase of the Company's share capital of 311,241 shares with the nominal value of Rp 155,620. The issuance of 311,241 new shares has been issued and fully paid by PT Jaminan Kredit Indonesia (310,266 shares) and Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera (975 shares). These changes have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-AH.01.03-0462802 Year 2021 dated 19 October 2021.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tanggal 24 Oktober 2019 yang dinotarisasi dengan Akta Notaris Dewantari Handayani, S.H., M.P.A., Nomor 09 tanggal 9 April 2020, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan Perusahaan sebesar 150.000 lembar saham dengan jumlah nominal Rp 75.000. Saham baru sebanyak 150.000 lembar saham ini telah diterbitkan dan dibayar penuh oleh PT Jaminan Kredit Indonesia. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-A.01.03.0214640 Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020.

Based on Resolution of Shareholders dated 24 October 2019 which notarised by Notarial Deed of Dewantari Handayarani, S.H., M.P.A., No.09 dated 9 April 2020 the shareholders approved the increase of the Company's share capital of 150,000 shares with the nominal value of Rp 75,000. The issuance of 150,000 new shares has been issued and fully paid by PT Jaminan Kredit Indonesia. These changes were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decree No. AHU-A.01.03.0214640 Year 2020 dated 11 May 2020.

Saldo laba yang telah dicadangkan

Appropriated retained earnings

Perusahaan membentuk penyisihan cadangan wajib sebesar Rp 96.843 sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007. Undang-undang ini mengharuskan perusahaan di Indonesia untuk membentuk cadangan wajib sekurang-kurangnya sebesar 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan cadangan wajib tersebut.

The Company has set up a statutory reserves amounting to Rp 96,843 in accordance with the Indonesia Limited Company Law No. 40 Year 2007. The Law requires Indonesian companies to set up a statutory reserve to a minimum of 20% of the Company's issued and paid up share capital. The Law does not set the period of time within which this statutory reserve should be created.

21. IMBAL JASA KAFALAH BRUTO / *21. GROSS KAFALAH FEES*

	2021	2020	
PEN	394,318	184,441	*PEN*
Kontra bank garansi	149,248	80,947	*Contra bank guarantee*
FLPP	124,175	25,731	*FLPP*
KUR	102,812	73,758	*KUR*
Multiguna	67,391	76,168	*Multipurpose*
Bond	53,583	34,881	*Bond*
Umum dan konstruksi	48,463	9,518	*General and construction*
Mikro	19,286	14,848	*Micro*
	959,276	500,292	

22. PREMI PENJAMINAN ULANG BRUTO / *22. GROSS RE-GUARANTEE PREMIUMS*

	2021	2020	
PEN	63,955	63,271	*PEN*
Kontra bank garansi	63,554	33,942	*Contra bank guarantee*
FLPP	39,312	7,482	*FLPP*
KUR	25,489	14,744	*KUR*
Multiguna	32,391	31,139	*Multipurpose*
Bond	20,609	13,621	*Bond*
Umum dan konstruksi	29,547	3,793	*General and construction*
Mikro	8,016	4,819	*Micro*
	282,873	172,811	

Termasuk di dalam premi penjaminan ulang bruto adalah beban IJK *loss limit*, yaitu premi yang dibayarkan kepada Pemerintah terkait penjaminan PEN sebesar 1% dari plafon pembiayaan. Pemerintah menanggung klaim PEN apabila jumlah klaim yang dibayarkan perusahaan sudah mencapai 90% dari total premi dibayar.

Included in gross re-guarantee premiums is IJK loss limit, which is the fee paid to the government related to PEN guarantee amounting to 1% from financing plafond. The government bears the PEN claim if the number of claims paid by the company reached 90% of premium paid.

23. KENAIKAN ATAS IMBAL JASA KAFALAH YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN / *23. INCREASE IN UNEARNED KAFALAH FEES*

	2021	2020	
PEN	47,368	84,929	*PEN*
Kontra bank garansi	15,767	5,126	*Contra bank guarantee*
FLPP	74,775	11,990	*FLPP*
KUR	38,660	36,255	*KUR*
Multiguna	387	13,464	*Multipurpose*
Bond	3,741	(1,119)	*Bond*
Umum dan konstruksi	9,734	(260)	*General and construction*
Mikro	(3,445)	(10,259)	*Micro*
	186,987	140,126	

24. KLAIM BRUTO / *24. GROSS CLAIMS*

	2021	2020	
PEN	1,411	-	*PEN*
Kontra bank garansi	46,277	60,059	*Contra bank guarantee*
FLPP	20,122	17,897	*FLPP*
KUR	5,978	10,282	*KUR*
Multiguna	142,110	111,755	*Multipurpose*
Bond	11,763	15,497	*Bond*
Umum dan konstruksi	9,104	12,469	*General and construction*
Mikro	40,340	30,629	*Micro*
	277,105	258,588	

25. KLAIM PENJAMINAN ULANG / *25. RE-GUARANTEE CLAIMS*

	2021	2020	
PEN	353	-	*PEN*
Kontra bank garansi	23,091	29,722	*Contra bank guarantee*
FLPP	5,660	4,474	*FLPP*
KUR	1,494	2,626	*KUR*
Multiguna	91,567	69,473	*Multipurpose*
Bond	5,830	7,600	*Bond*
Umum dan konstruksi	4,259	6,020	*General and construction*
Mikro	17,095	13,266	*Micro*
	149,349	133,181	

26. BEBAN UJRAH / *26. UJRAH EXPENSES*

	2021	2020	
Kontra bank garansi	21,781	14,431	*Contra bank guarantee*
FLPP	754	1,058	*FLPP*
Multiguna	8,473	7,406	*Multipurpose*
Bond	9,167	7,140	*Bond*
Umum dan konstruksi	1,778	1,643	*General and construction*
Mikro	949	546	*Micro*
	42,902	32,224	

27. PENDAPATAN UJRAH PENJAMINAN ULANG / *27. RE-GUARANTEE UJRAH INCOME*

	2021	2020	
PEN	6,377	2,396	*PEN*
Kontra bank garansi	10,066	6,087	*Contra bank guarantee*
FLPP	744	405	*FLPP*
KUR	2,130	1,088	*KUR*
Multiguna	3,234	2,937	*Multipurpose*
Bond	3,773	2,799	*Bond*
Umum dan konstruksi	1,218	788	*General and construction*
Mikro	1,151	1,435	*Micro*
	28,693	17,935	

28. PENDAPATAN SUBROGASI / *28. SUBROGATION INCOME*

	2021	2020	
Penjaminan bank	34,158	28,877	*Bank guarantee*
Penjaminan non-bank	2,016	11,821	*Non-bank guarantee*
	36,174	40,698	

29. KENAIKAN ESTIMASI KLAIM / *29. INCREASE IN ESTIMATED CLAIMS*

	2021	2020	
PEN	99,506	18,093	*PEN*
Kontra bank garansi	(8,262)	1,025	*Contra bank guarantee*
FLPP	5,193	(181)	*FLPP*
KUR	(85)	434	*KUR*
Multiguna	5,153	(2,581)	*Multipurpose*
Bond	(927)	(616)	*Bond*
Umum dan konstruksi	(1,630)	(4,379)	*General and construction*
Mikro	18,786	1,118	*Micro*
	117,734	12,913	

30. PENDAPATAN INVESTASI / *30. INVESTMENT INCOME*

	2021	2020	
Bagi hasil			*Profit sharing*
Deposito berjangka	38,416	38,028	*Time deposits*
Sukuk	15,344	14,031	*Sukuk*
Penjualan sukuk	3,105	4,392	*Sale of sukuk*
	56,865	56,451	

31. BEBAN USAHA / *31. OPERATING EXPENSES*

	2021	2020	
Beban kepegawaian	53,385	40,458	*Salaries expenses*
Beban operasional	22,374	15,452	*Operational expenses*
Beban administrasi dan umum	21,688	12,449	*General and administrative expenses*
Beban sistem, teknologi dan pengembangan usaha	3,898	2,138	*Technology, system and development expenses*
	101,345	70,497	

32. BEBAN LAIN-LAIN - BERSIH / *32. OTHER EXPENSES - NET*

	2021	2020	
Beban pajak final	10,331	10,423	*Final tax expenses*
Beban lain	-	782	*Other expenses*
Pendapatan administrasi kafalah	(3,166)	(1,542)	*Kafalah administration income*
Pendapatan lain-lain	(306)	(370)	*Other income*
	6,859	9,293	

33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI / *33. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS*

a. Perusahaan Milik Negara dan Anak Perusahaan / *a. State Owned Enterprises and Subsidiaries*

Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham Perusahaan Milik Negara. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit Syariah, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Perum Bulog, Perum Perhutani, Perum Perumnas Perum Jasa Tirta I, Perum Damri, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Bank Mandiri Taspen, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT Jasa Marga, PT Nidya Karya (Persero), PT Pelindo I, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero), PT.Amarta Karya (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Antam Tbk, PT Asabri (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Bio Farma (Persero), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Danareksa (Persero), PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero).

The Government of the Republic of Indonesia is a shareholder of State Owned Enterprises. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit Syariah, PT Bank Syariah Indonesia, Tbk, Perum Bulog, Perum Perhutani, Perum Perumnas Perum Jasa Tirta I, Perum Damri, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Bank Mandiri Taspen, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT Jasa Marga, PT Nidya Karya (Persero), PT Pelindo I, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Antam Tbk, PT Asabri (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Bio Farma (Persero), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Danareksa (Persero), PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero).

33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Perusahaan Milik Negara dan Anak Perusahaan (lanjutan)

PT Jaminan Indonesia Persero, PT Jasa Raharja, PT Kawasan Industri Medan (Persero), PT Kawasan Industri Nusantara, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Len Industri (Persero), PT Pal Indonesia (Persero), PT Pegadaian, PT Pelabuhan Indonesia I, PT Pelabuhan Indonesia III, PT Pelni (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Permodalan Nasional Madani, PT Pindad (Persero), PT PLN (Persero), PT POS Indonesia (Persero), PT PP (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Rajawali Nusindo, PT Reasuransi Nasional Indonesia, PT Sarinah (Persero), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, PT Sucofindo, PT Taspen (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara I, PT Perkebunan Nusantara II, PT Perkebunan Nusantara III, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI, PT Perkebunan Nusantara XII, PT Perkebunan Nusantara XIII, PT Perkebunan Nusantara XIV dan Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera adalah entitas-entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, serta memiliki transaksi signifikan dengan Perusahaan. Perusahaan memiliki penempatan kas dan setara kas, investasi, kas di bank yang dibatasi penggunaannya, piutang imbal jasa kafalah, piutang hasil investasi, utang klaim, utang penjaminan ulang, imbal jasa kafalah, premi penjaminan ulang, klaim, beban ujrah, pendapatan ujrah penjaminan ulang, beban kafalah lain, pendapatan investasi dan beban usaha.

b. Manajemen kunci

Manajemen kunci adalah Dewan Komisaris dan Direksi.

Saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

33. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS *(continued)*

a. State Owned Enterprises and Subsidiaries *(continued)*

PT Jaminan Indonesia Persero, PT Jasa Raharja, PT Kawasan Industri Medan (Persero), PT Kawasan Industri Nusantara, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Len Industri (Persero), PT Pal Indonesia (Persero), PT Pegadaian, PT Pelabuhan Indonesia I, PT Pelabuhan Indonesia III, PT Pelni (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Permodalan Nasional Madani, PT Pindad (Persero), PT PLN (Persero), PT POS Indonesia (Persero), PT PP (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Rajawali Nusindo, PT Reasuransi Nasional Indonesia, PT Sarinah (Persero), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, PT Sucofindo, PT Taspen (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara I, PT Perkebunan Nusantara II, PT Perkebunan Nusantara III, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI, PT Perkebunan Nusantara XII, PT Perkebunan Nusantara XIII, PT Perkebunan Nusantara XIV and Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera, are entities owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia, which have significant transactions with The Company. The Company has placement in cash and cash equivalent, investments, restricted cash in banks, kafalah fee receivables, investment income receivables, claim payables, re-guarantee payables, re-guarantee premiums, claims, ujrah expenses, re-guarantee ujrah income, other kafalah expenses, investment income and operating expenses.

b. Key management

Key management are Board of Commissioners and Directors.

Significant balances and transactions with related parties are as follows:

	2021	2020	
Aset:			***Assets:***
Kas dan setara kas			***Cash and cash equivalents***
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	78,448	123,943	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Unit Syariah	28,414	64,074	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Sharia Unit*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	992	322	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	604	22	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
	108,458	188,361	

33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

33. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS (continued)

	2021	2020	
Investasi			***Investments***
Sukuk			*Sukuk*
Pemerintah Republik Indonesia	262,270	171,320	*The Government of the Republic of Indonesia*
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya			***Restricted cash in banks***
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	567,639	269,639	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Unit Syariah	73,094	73,094	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Sharia Unit*
	640,733	342,733	
Piutang imbal jasa kafalah			***Kafalah fee receivables***
Pemerintah Republik Indonesia	73,525	33,047	*The Government of the Republic of Indonesia*
Piutang hasil investasi			***Investment income receivables***
Pemerintah Republik Indonesia	4,630	2,689	*The Government of the Republic of Indonesia*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	410	201	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Unit Syariah	125	397	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Sharia Unit*
	5,165	3,287	
Jumlah aset dengan pihak berelasi	1,090,151	738,748	*Total assets with related parties*
Persentase terhadap jumlah aset	44.58%	46.94%	*Percentage of total assets*
Liabilitas:			***Liabilities:***
Utang klaim			***Claim payables***
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	12,486	717	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Pegadaian (Persero)	7,248	181	*PT Pegadaian (Persero)*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Unit Syariah	-	65	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Sharia Unit*
	19,734	963	
Utang penjaminan ulang			***Re-guarantee payables***
PT Reasuransi Syariah Indonesia	31,279	18,319	*PT Reasuransi Syariah Indonesia*
Pemerintah Republik Indonesia	15,419	4,408	*The Government of the Republic of Indonesia*
PT Reasuransi Nasional Indonesia	8,857	-	*PT Reasuransi Nasional Indonesia*
	55,555	22,727	
Jumlah liabilitas dengan pihak berelasi	75,289	23,690	*Total liabilities with related parties*
Persentase terhadap jumlah liabilitas	5.13%	2.57%	*Percentage of total liabilities*
Pendapatan kafalah:			***Kafalah income:***
Imbal jasa kafalah bruto			***Gross kafalah fees***
Pemerintah Republik Indonesia	435,151	184,440	*The Government of the Republic of Indonesia*
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	29,842	-	*PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)*
PT Pegadaian (Persero)	19,109	-	*PT Pegadaian (Persero)*
PT Perkebunan Nusantara	3,389	-	*PT Perkebunan Nusantara*
PT Pupuk Indonesia (Persero)	659	-	*PT Pupuk Indonesia (Persero)*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	641	-	*PT Semen Indonesia (Persero)Tbk*
Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera	146	-	*Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	144	-	*PT Adhi Karya (Persero)*
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	110	-	*PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk*
Dipindahkan	489,191	184,440	*Carried forward*

33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

33. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS *(Continued)*

	2021	2020	
Pendapatan kafalah: (lanjutan)			***Kafalah income:*** *(continued)*
Imbal jasa kafalah bruto (lanjutan)			***Gross kafalah fees*** *(continued)*
Dipindahkan	489,191	184,440	*Carried forward*
PT Wijaya Karya Beton Tbk	17	129	*PT Wijaya Karya Beton Tbk*
PT Waskita Karya (Persero)	6	516	*PT Waskita Karya (Persero)*
PT Boma Bisma Indra (Persero)	-	707	*PT Boma Bisma Indra (Persero)*
PT Istaka Karya (Persero)	-	370	*PT Istaka Karya (Persero)*
PT Barata Indonesia (Persero)	-	367	*PT Barata Indonesia (Persero)*
Lain-lain	262	286	*Others*
	489,476	186,815	
Persentase terhadap jumlah imbal jasa kafalah bruto	51.03%	37.34%	*Percentage of total gross kafalah fees*
Premi penjaminan ulang bruto			***Gross re-guarantee premiums***
Pemerintah Republik Indonesia	56,941	24,110	*The Government of the Republic of Indonesia*
PT Reasuransi Syariah Indonesia	-	39,160	*PT Reasuransi Syariah Indonesia*
	56,941	63,270	
Persentase terhadap jumlah premi penjaminan ulang	20.13%	36.61%	*Percentage of total gross re-guarantee premiums*
Beban kafalah:			***Kafalah expenses:***
Klaim bruto			***Gross claims***
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	148,897	137,727	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Pegadaian Syariah	47,363	-	*PT Pegadaian Sharia*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10,607	15,335	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3,028	-	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Propernas Griya Utama	935	-	*PT Propernas Griya Utama*
Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera	291	208	*Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	104	-	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
Koperasi Warga Semen Gresik	60	-	*Koperasi Warga Semen Gresik*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Unit Syariah	15	515	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Sharia Unit*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	-	5,643	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*
	211,300	159,429	
Persentase terhadap jumlah klaim bruto	76.25%	61.65%	*Percentage of total gross claims*
Beban ujrah			**Ujrah expenses**
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1,633	1,418	*PT Bank Inonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	230	89	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Unit Syariah	13	13	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Sharia Unit*
	1,876	1,520	
Persentase terhadap jumlah beban ujrah	4.37%	4.72%	*Percentage of total ujrah expenses*

33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

33. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS *(Continued)*

	2021	2020	
Pendapatan ujrah penjaminan ulang			***Re-guarantee ujrah income***
PT Jaminan Kredit Indonesia	6,377	2,396	*PT Jaminan Kredit Indonesia*
Persentase terhadap jumlah pendapatan ujrah penjaminan ulang	22.22%	13.36%	*Percentage of total re-guarantee ujrah income*
Beban kafalah lain			***Other kafalah expenses***
PT Jaminan Kredit Indonesia	1,355	1,727	*PT Jaminan Kredit Indonesia*
Persentase terhadap jumlah beban kafalah	100%	100%	*Percentage of total kafalah expenses*
Pendapatan investasi			***Investment income***
Pemerintah Republik Indonesia	16,148	18,423	*The Government of the Republic of Indonesia*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	17,905	13,112	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Unit Syariah	5,093	8,807	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Sharia Unit*
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) Tbk	-	9	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk Negara, Sharia Unit*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	953	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
	39,146	41,304	
Persentase terhadap jumlah Pendapatan investasi	68.84%	73.17%	*Percentage of total investment income*
Beban usaha			***Operating expenses***
PT Jaminan Kredit Indonesia	-	1,367	*PT Jaminan Kredit Indonesia*
Persentase terhadap jumlah beban usaha	0%	1.94%	*Percentage of total operating expenses*

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 3.232 (31 Desember 2020: Rp 1.859).

Total compensation paid to the Company's Board of Commissioners and Directors for the year ended 31 December 2021 amounted to Rp 3,232 (31 December 2020: Rp 1,859).

34. ZAKAT

Perusahaan telah menghitung besarnya biaya zakat sebesar 2,5% dari laba tahun 2019 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 914. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan menghitung besarnya biaya zakat sebesar 2,5% dari laba tahun 2020 dan tahun 2021 masing-masing sebesar Rp 1.128 dan Rp 5.330.

34. ZAKAT

The Company has calculated zakat based on 2.5% of the income from year 2019 for the year ended 31 December 2020 amounting to Rp 914. For the year ended 31 December 2021, the Company has calculated zakat based on 2.5% of the income from year 2020 and 2021 amounted to Rp 1,128 and Rp 5,330.

35. RISIKO PENJAMINAN KEUANGAN

Risiko utama yang dihadapi Perusahaan dengan kontrak penjaminan adalah kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya. Risiko tersebut dapat dilihat pada besarnya *default risk* dan tingkat *Non-performing financing* (NPF) pinjaman yang dijamin, serta tingkat pengembalian piutang subrogasi. Selain itu, terdapat risiko atas perbedaan antara klaim aktual, pembayaran manfaat dan tanggal klaim dari yang diprediksi sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh frekuensi, keparahan klaim, manfaat yang dibayarkan dan perkembangan klaim jangka panjang selanjutnya. Oleh karena itu, tujuan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa cadangan cukup dibuat untuk menutupi kewajiban tersebut.

35. FINANCIAL GUARANTEE RISK

The principal risk the Company faces under guarantee contracts is the guarantee's failure to fulfill its obligations. This risk can be seen in the amount of default risk and the level of guarantee's Non-performing financing (NPF), as well as the rate of return on subrogation receivables. In addition, there is a risk from the difference between actual claims, benefit payments and claim dates from the one predicted previously. This is influenced by the frequency, severity of claims, actual benefits paid and subsequent development of long-term claims. Therefore, the objective of the Company is to ensure that sufficient reserves are made to cover those liabilities.

35. RISIKO PENJAMINAN KEUANGAN (lanjutan)

Eksposur risiko yang berkaitan dengan kontrak penjaminan diminimalisir dengan diversifikasi portofolio penjaminan kontrak dan wilayah geografis. Variabilitas risiko juga ditingkatkan dengan risiko seleksi yang bijak dan implementasi pedoman strategi *underwriting*, serta pengaturan program penjaminan ulang.

Operasional Perusahaan didiversifikasi berdasarkan lini bisnis dan penyebaran geografis risiko. Pendekatan global untuk manajemen risiko memungkinkan Perusahaan untuk *underwrite* dan menerima penjaminan besar.

Untuk meminimalkan risiko penjaminan, maka pada proses penjaminan kredit dilakukan identifikasi risiko menggunakan 4P, yaitu *Prospect, Productivity, Payment*, dan *Personality*. *Item* yang harus diperhatikan untuk masing-masing aspek tersebut disesuaikan dengan karakteristik kredit yang akan dijamin, dan dijabarkan di dalam sistem dan prosedur penjaminan yang terkait. Hasil dari proses identifikasi risiko kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan prediksi risiko penjaminan untuk mengetahui besarnya risiko penjaminan. Dalam pelaksanaannya prediksi risiko dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif untuk setiap aspek 4P. Prediksi secara kuantitatif dilakukan dengan sistem *scoring*. Berdasarkan *score* ditetapkan prediksi risiko penjaminan masing-masing terjamin atau sekelompok terjamin, atau suatu produk baru.

Selanjutnya, pengambilan keputusan apakah suatu pengajuan penjaminan dapat disetujui atau tidak dilakukan dalam sebuah rapat komite. Sesuai prinsip kehati-hatian, maka anggota komite tersebut terdiri dari pejabat yang terkait secara langsung dengan kegiatan penjaminan (*risk taker unit*) dan pejabat yang terkait langsung dengan konsekuensi biaya atas potensi risiko (*risk financing unit*). Dengan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan dua pihak atau lebih dari sisi yang berlainan tersebut, maka diharapkan keputusan menjadi lebih objektif dan potensi risiko karena kesalahan pengambilan keputusan dapat diminimalisasi. Selain digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan penjaminan, hasil analisis risiko yang telah dilakukan juga dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan pemantauan terhadap kredit yang sedang berjalan. Untuk kredit yang berisiko tinggi, maka pemantauan terhadap kredit dilakukan secara lebih intensif.

35. FINANCIAL GUARANTEE RISK (continued)

The risk exposure related to guarantee contracts is mitigated by diversification of guarantee contracts portfolio and geographical areas. The variability of risks is also improved by prudent risks selection and implementation of underwriting strategy guidelines, as well as re-guarantee program arrangements.

The Company's operations are diversified by line of business and the geographic spread of risk. A global approach to risk management allows the Company to underwrite and accept large guarantee accounts.

To minimise the risk of the guarantee, in the credit guarantee process, risk identification is carried out using the 4Ps, are Prospect, Productivity, Payment, and Personality. The items that must be considered for each of these aspects are adjusted to the characteristics of the credit to be guaranteed, and are described in the related guarantee system and procedures. The results of the risk identification process are then followed up with the determination of the guarantee risk prediction to determine the amount of guarantee risk. In its implementation, risk prediction can be done qualitatively and/or quantitatively for each aspect of the 4Ps. Quantitative prediction is done with a scoring system. Based on the score determined the risk prediction of each guaranteed or a group of guaranteed, or a new product.

Furthermore, decision whether a guarantee application can be approved or not is carried out in a committee meeting. In accordance with the principle of prudence, the committee members consist of officials directly related to the guarantee activity (risk taker unit) and officials directly related to the cost consequences of potential risks (risk financing unit). With a decision-making mechanism that involves two or more parties from different sides, it is expected that decisions will be more objective and potential risk because decision-making errors can be minimised. Apart from being used to assist the guarantee decision-making process, the results of the risk analysis that have been carried out are also used as a basis for consideration in monitoring ongoing credit. For high-risk credit, credit monitoring is conducted more intensively.

35. RISIKO PENJAMINAN KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen penjaminan ulang terkoordinasi terpusat memfasilitasi transfer risiko yang tepat dan penggunaan biaya yang efektif dan efisien pasar penjaminan ulang eksternal. Penjaminan ulang yang digunakan oleh Perusahaan harus memenuhi persyaratan pengalaman di bidang keuangan tertentu yang dimasukkan melalui proses reviu keuangan yang ketat untuk disetujui oleh personel manajemen senior. Sebagai hasil dari kontrol ini, penjaminan ulang ditempatkan hanya pada perusahaan yang secara finansial paling aman dan berpengalaman dalam industri penjaminan ulang. Pendekatan yang konsisten untuk praktik pencadangan dan penyelesaian klaim juga diperhatikan. Selain kontrol internal, unit operasional Perusahaan dan bidang fungsional akan ditinjau oleh tim audit perusahaan yang secara teratur melakukan audit operasional.

Eksposur Perusahaan terhadap risiko konsentrasi penjaminan ini diatasi dengan beragam portfolio bisnis di berbagai lokasi dan industri.

ANALISA EKSPOSUR

Pada tahun 2021 dan 2020, risiko penjaminan yang dihadapi oleh Perusahaan diklasifikasikan berdasarkan kelas bisnis sebagai berikut:

35. FINANCIAL GUARANTEE RISK (continued)

Centrally-coordinated re-guarantee management facilitates appropriate risk transfer and efficient and cost-effective use of external re-guarantee markets. Re-guarantee utilised by the Company must fulfill certain financial experience requirements and are put through a stringent financial review process in order to be approved by senior management personnel. As a result of these controls, re-guarantee is placed only on the most financially secured and experienced companies in the re-guarantee industry. Consistent approach to reserving practices and the settlement of claims are also ensured. In addition to these internal controls, the Company's operating units and functional areas are subject to review by the Company's audit team that regularly carries out operational audits.

The Company's exposure to the concentration of guarantee risk is mitigated by a diverse portfolio of business written across a broad range of locations and industries.

EXPOSURE ANALYSIS

In 2021 and 2020, the Company's guarantee risks classified based on class of businesses are as follows:

	2021				
	Klaim bruto/ *Gross claims*	Klaim penjaminan ulang/ *Re-guarantee claims*	Penurunan/ (kenaikan) estimasi klaim/ *Decrease/ (increase) in estimated claims*	Beban klaim - bersih/*Claim expenses - net*	
PEN	(1,411)	353	(99,506)	(100,564)	*PEN*
Kontra bank garansi	(46,277)	23,091	8,262	(14,924)	*Contra bank guarantee*
Multiguna	(20,122)	5,660	(5,193)	(19,655)	*Multipurpose*
KUR	(5,978)	1,494	85	(4,399)	*KUR*
Bond	(142,110)	91,567	(5,153)	(55,696)	*Bond*
FLPP	(11,763)	5,830	927	(5,006)	*FLPP*
Mikro	(9,104)	4,259	1,630	(3,215)	*Micro*
Umum dan konstruksi	(40,340)	17,095	(18,786)	(42,031)	*General and construction*
	(277,105)	149,349	(117,734)	(245,490)	

35. RISIKO PENJAMINAN KEUANGAN (lanjutan)

ANALISA EKSPOSUR (lanjutan)

Pada tahun 2021 dan 2020, risiko penjaminan yang dihadapi oleh Perusahaan diklasifikasikan berdasarkan kelas bisnis sebagai berikut: (lanjutan)

35. FINANCIAL GUARANTEE RISK (continued)

EXPOSURE ANALYSIS (continued)

In 2021 and 2020, the Company's guarantee risks classified based on class of businesses are as follows: (continued)

	2020				
	Klaim bruto/ *Gross claims*	Klaim penjaminan ulang/ *Re-guarantee claims*	Penurunan/ (kenaikan) estimasi klaim/ *Decrease/ (increase) in estimated claims*	Beban klaim - bersih/*Claim expenses - net*	
PEN	-	-	(18,093)	(18,093)	*PEN*
Kontra bank garansi	(60,059)	29,722	(1,025)	(31,362)	*Contra bank guarantee*
FLPP	(17,897)	4,474	181	(13,242)	*FLPP*
KUR	(10,282)	2,626	(434)	(8,090)	*KUR*
Multiguna	(111,755)	69,473	2,581	(39,701)	*Multipurpose*
Bond	(15,497)	7,600	616	(7,281)	*Bond*
Umum dan konstruksi	(12,469)	6,020	4,379	(2,070)	*General and construction*
Mikro	(30,629)	13,266	(1,118)	(18,481)	*Micro*
	(258,588)	133,181	(12,913)	(138,320)	

CADANGAN TEKNIS

Metode *Expected Loss Ratio, Incurred Chain-ladder* dan *Incurred Bornhuetter-Ferguson* ("BF") telah diterapkan untuk masing-masing kelas bisnis untuk menentukan kewajiban penjaminan yang tidak didiskontokan.

Cadangan kerugian dipotong untuk mewakili nilai waktu dari uang.

Tingkat beban klaim yang belum dialokasikan dihitung dengan membagi data historis beban klaim dengan premi yang diakui sebagai pendapatan. Variabel ini dianggap sama untuk setiap LoB.

Margin risiko secara keseluruhan ditentukan setelah memungkinkan untuk ketidakpastian estimasi klaim yang luar biasa. Ketidakpastian dianalisis dengan mempertimbangkan potensi ketidakpastian yang berkaitan dengan model aktuaria dan asumsi, kualitas data yang mendasari yang digunakan dalam model dan lingkungan penjaminan umum.

SENSITIVITAS

Kewajiban klaim sangat mudah berubah untuk digunakan sebagai asumsi utama. Karena hal tersebut, tidak mungkin untuk mengukur sensitivitas dari asumsi tertentu seperti perubahan peraturan atau ketidakpastian dalam proses estimasi.

Analisis berikut dibuat untuk menunjukkan dampak pada laporan laba rugi jika asumsi utama berubah sementara semua asumsi lain tetap. Korelasi antara asumsi-asumsi tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan dalam menentukan kewajiban klaim.

TECHNICAL RESERVES

The Expected Loss Ratio, Incurred Chain-ladder and Incurred Bornhuetter-Ferguson (BF) method have been applied to each class of business to determine the undiscounted guarantee liabilities.

The loss reserves have been discounted to represent the time value of money.

The unallocated claim expense rate is calculated by observing the historical claim expense divided by the earned premium. It is assumed to be the same for each LoB.

The overall risk margin was determined after allowing for uncertainty of the outstanding claim estimate. Uncertainty was analysed by taking into account potential uncertainties relating to the actuarial models and assumptions, the quality of the underlying data used in the models and the general guarantee environment.

SENSITIVITIES

Claim liabilities are very volatile to key assumptions used. Therefore, it is not possible to quantify the sensitivity of certain assumptions such as regulation change or uncertainty in the estimation process.

The following analysis is made to show the impact on the statement of profit or loss if the main assumptions change while all the other assumptions stay. The correlation between those assumptions can give significant impact in determining the claim liability.

35. RISIKO PENJAMINAN KEUANGAN (lanjutan)

SENSITIVITAS (lanjutan)

Dampak dari kenaikan/penurunan kewajiban dan laba sebelum pajak pada tahun berjalan dari perubahan variabel adalah sebagai berikut:

35. FINANCIAL GUARANTEE RISK (continued)

SENSITIVITIES (continued)

The impact of the increase/decrease in liability and profit before tax on the current year from change in variable are as follows:

	2021			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumptions*	Dampak terhadap liabilitas bersih/ *Impact on net liabilities*	Dampak terhadap laba sebelum pajak/ *Impact on profit before tax*	
Rata-rata besaran klaim - tahun berjalan	+5%	16,067	16,067	*Average claim size - current year*
	-5%	(16,999)	(16,999)	
Tingkat beban klaim tidak teralokasikan	+1%	86	86	*Unallocated claim expenses rate*
	-1%	(86)	(86)	

	2020			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumptions*	Dampak terhadap liabilitas bersih/ *Impact on net liabilities*	Dampak terhadap laba sebelum pajak/ *Impact on profit before tax*	
Rata-rata besaran klaim - tahun berjalan	+5%	16,622	16,622	*Average claim size - current year*
	-5%	(16,622)	(16,622)	
Tingkat beban klaim tidak teralokasikan	+1%	70	70	*Unallocated claim expenses rate*
	-1%	(70)	(70)	

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko manajemen modal

Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalannya adalah untuk menjaga kelangsungan usaha Perusahaan untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada *stakeholders* lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya operasional.

Perusahaan memonitor *Gearing Ratio* yang dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.2/POJK.05/2017 tertanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin. *Gearing Ratio* adalah perbandingan antara total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri dengan ekuitas Lembaga Penjamin pada waktu tertentu.

Gearing Ratio Penjaminan untuk Usaha Produktif ditetapkan paling tinggi 20 (dua puluh) kali dari ekuitas Perusahaan dan total *Gearing Ratio* ditetapkan paling tinggi 40 (empat puluh) kali dari ekuitas Perusahaan.

Perusahaan telah memenuhi ketentuan dalam peraturan tersebut.

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Capital management risk

The Company's objective from managing its capital are to safeguard the Company's going concern ability in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of operation.

The Company monitors Gearing Ratio which is calculated in accordance with Financial Services of Authority of the Republic of Indonesia Decree No. 2/POJK.05/2017 dated 11 January 2017 regarding Business Operation of Guarantor Institution. Gearing Ratio is the ratio between the total outstanding value of the Guarantee that is borne by itself with the net capital of the Guarantor at a certain time.

Gearing Ratio for Guarantees for Productive Businesses are set at a maximum of 20 (twenty) times the equity of the Company and the total Gearing Ratio is set at no higher than 40 (forty) times of the equity of the Company.

The Company has fulfilled the requirements outlined in the regulation.

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Pandemi virus corona

Covid-19 memberikan dampak kerugian dan diperkirakan akan terus berdampak merugikan bisnis global, kondisi keuangan dan hasil operasional Perusahaan. Dampak akhir akan bergantung pada perkembangan masa depan yang tidak pasti dan tidak dapat diprediksi termasuk ruang lingkup, tingkat keparahan dan durasi krisis dan keputusan yang diambil oleh pemerintah atas respons terhadap dampak yang ada. Perusahaan akan terus menilai dampak kerugian dan dikarenakan situasi Covid-19 yang terus berkembang, Perusahaan tidak dapat memperkirakan dampak akhir terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perusahaan.

Sampai saat ini, Perusahaan belum dapat memperkirakan sejauh mana dampak dari krisis ini dan akan terus memberikan risiko terhadap bisnis Perusahaan. Perusahaan memiliki eksposur atas risiko instrumen keuangan seperti risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas.

Risiko manajemen keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Perusahaan adalah risiko investasi, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko harga pasar. Kegiatan operasional Perusahaan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perusahaan.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan. Perusahaan mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan verifikasi dan otorisasi kredit, serta memantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi jumlah piutang tak tertagih.

Risiko likuiditas

Perusahaan terekspos terhadap kegiatan harian atas ketersediaan sumber kas terutama dari klaim-klaim yang terjadi atas kontrak penjaminan jangka pendek. Risiko likuiditas adalah risiko di mana kas tidak tersedia untuk memenuhi liabilitas di saat jatuh tempo. Risiko ini diminimalisir dengan mengelola profil jatuh tempo liabilitas keuangan dan memastikan tersedianya pendanaan dari sejumlah piutang premi dan investasi yang jatuh tempo serta memiliki deposito berjangka sebagai investasi terbesar Perusahaan.

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Coronavirus pandemic

Covid-19 is adversely affecting and is expected to continue to adversely affect the Company global business, financial condition and results of operations. Its ultimate impact will depend on future developments that are uncertain and cannot be predicted, including the scope, severity and duration of the crisis, and the governmental, legislative and regulatory actions taken and court decisions rendered in response thereto. The Company is continually assessing the impact and due to the evolving and disruptive nature of the Covid-19 crisis, the Company cannot estimate its ultimate impact on the Company business, financial condition and results of operations.

At this time, the Company also cannot estimate the full extent to which the crisis has caused and will continue to cause certain risks to our global business. The Company has exposure to the following risks from financial instruments, such as market risk, credit risk and liquidity risk.

Financial risk management

The main risks arising from the Company's financial instruments are investment risk, credit risk, liquidity risk, and market price risk. The operational activities of the Company are managed in a prudential manner by managing those risks to minimise potential losses.

Credit risk

Credit risk is the risk that the Company may suffer a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their contractual obligations. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk. The Company manages and controls the credit risk by dealing only with credit worthy parties, setting internal policies on verifications and authorisations of credit, and monitoring the collectability of receivables regularly to reduce the exposure to bad debts.

Liquidity risk

The Company is exposed to daily calls on its available cash resources mainly from claims arising from short-term guarantee contract. Liquidity risk is the risk that cash may not be available to pay obligation when due. This risk has been minimised by managing the maturity profile of financial liabilities and ensuring the availability of funding from matured premium receivables and investment portfolio and having time deposits as the Company's major investment.

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko manajemen keuangan (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Sebagian besar ketersedian dana Perusahaan ditempatkan pada deposito berjangka yang tersebar dalam berbagai tanggal jatuh tempo di dalam periode berjalan. Kebijakan untuk menjaga investasi pada dana yang likuid dapat membantu kebutuhan likuiditas yang tidak terduga.

Berikut adalah jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

***Financial risk management** (continued)*

Liquidity risk (continued)

Most of the Company's available funds are placed in time deposit spread over various maturity dates within a period. The policy of keeping investment in liquid funds helps to meet any unexpected liquidity requirement.

The table below shows the maturity date of the undiscounted financial liabilities which are based on the contractual payment as of 31 December 2021 and 2020:

	2021				
	Tanpa tanggal jatuh tempo kontraktual/ *No contractual maturity date*	Sampai dengan satu tahun/ *Up to a year*	Lebih dari satu tahun/ *More than a year*	Jumlah/ *Total*	
Utang pajak	-	62,273	-	62,273	*Tax payables*
Utang klaim	-	22,611	-	22,611	*Claim payables*
Utang penjaminan ulang	-	55,555	-	55,555	*Re-guarantee payables*
Akrual dan utang lain-lain	-	50,776	-	50,776	*Accruals and other payables*
	-	191,215	-	191,215	

	2020				
	Tanpa tanggal jatuh tempo kontraktual/ *No contractual maturity date*	Sampai dengan satu tahun/ *Up to a year*	Lebih dari satu tahun/ *More than a year*	Jumlah/ *Total*	
Utang pajak	-	9,529	-	9,529	*Tax payables*
Utang klaim	-	962	-	962	*Claim payables*
Utang penjaminan ulang	-	41,531	-	41,531	*Re-guarantee payables*
Akrual dan utang lain-lain	-	34,322	-	34,322	*Accruals and other payables*
	-	86,344	-	86,344	

Risiko harga pasar

Dalam pengelolaan risiko harga pasar, Perusahaan telah melakukan pembatasan penempatan portofolio berdasarkan peraturan yang berlaku. Selain itu, komposisi portofolio juga dibatasi berdasarkan aset alokasi yang dibuat sesuai dengan tingkatan risikonya.

Market price risk

The Company has a portfolio placement restrictions, to manage the market price, based on applicable regulation. In addition, the composition of the portfolio is also restricted by risk level of assets allocation.

37. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 22: "Kombinasi bisnis tentang referensi ke kerangka konseptual";
- Amandemen PSAK 57: "Provisi, liabilitas kontijensi, dan aset kontinjensi tentang kontrak memberatkan – Biaya memenuhi kontrak";
- Penyesuaian tahunan PSAK 71: "Instrumen keuangan"; dan
- Penyesuaian tahunan PSAK 73: "Sewa".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dan penerapan dini diperbolehkan.

- Amandemen PSAK 1: "Penyajian laporan keuangan";
- Amandemen PSAK 16: "Aset Tetap";
- Amandemen PSAK 25: "Kebijakan akuntansi, Perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan dini diperbolehkan.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan.

37. PROSPECTIVE ACCOUNTING PRONOUNCEMENT

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2022 are as follows:

- *Amendment of SFAS 22: "Business combination for reference to conceptual framework";*
- *Amendment of SFAS 57: "Provision, contingent liabilities, and contingent assets related to onerous contracts – Cost of fulfilling the contracts";*
- *Annual improvement SFAS 71: "Financial instruments"; and*
- *Annual improvement of SFAS 73: "Leases".*

The above standards will be effective on 1 January 2022 and early adoption is permitted.

- *Amendment of SFAS 1: "Presentation of financial statement";*
- *Amendment of SFAS 16: "Fixed Assets";*
- *Amendment of SFAS 25: "Accounting policies, changes of accounting estimates, and error".*

The above standards will be effective on 1 January 2023 and early adoption is permitted.

As at the authorisation date of this financial statement, the Company is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the financial statements.

2021
Laporan Tahunan
Annual Report

Jamkrindo
Syariah

PT Jamkrindo Syariah

Gedung Jamsyar Syariah
Jl. Letjend Suprapto No. 20, Cempaka Putih, Jakarta Barat